



Dokumen Kajian

KAJIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KOTA DUNIA:

**KOTA PENDIDIKAN BERKARAKTER
DAN BERBUDAYA, KOTA SILICON
VALLEY, KOTA BISNIS BARU, KOTA
SEHAT, DAN KOTA JUARA**

2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga **Dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia : Kota Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat dan Kota Juara** ini dapat selesai dengan tepat waktu. Penyusunan Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia : Kota Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat dan Kota Juara ini merupakan dokumen yang berisi latar belakang, tinjauan kebijakan dan teori, gambaran umum, analisis, konsep dan rencana aksi.

Dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia : Kota Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat dan Kota Juara ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rencana pengembangan kawasan.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen Kajian ini.

Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-1
1.2.1 Maksud	I-1
1.2.2 Tujuan.....	I-1
1.2.3 Sasaran	I-2
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Ruang Lingkup	I-3
1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan	I-3
1.4.2 Ruang Lingkup Lokasi	I-4
1.5 Sistematika Pelaporan.....	I-4
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN DAN TEORI	
2.1 Asta Cita	II-1
2.2 RPJPN Tahun 2025-2045.....	II-3
2.3 Rancangan RPJMN	II-7
2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 - 2035	II-9
2.5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.....	II-11
2.6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026.....	II-11
2.7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035	II-12
2.8 Rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044.....	II-20

2.9	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025	II-25
2.10	Rancangan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat	II-26
2.11	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022	II-28
2.12	Rancangan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat	II-28
2.13	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026	II-29
2.14	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037	II-34
2.15	Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2044	II-49
2.16	Studi Terdahulu.....	II-56
2.14	Rencana Strategis	II-65
2.15	Kajian Teori	II-74

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1	Batas Administrasi dan letak geografis	III-1
3.2	Kondisi Fisik Dasar	III-4
3.2.1	Topografi	III-4
3.2.2	Morfologi.....	III-4
3.2.3	Geologi dan Jenis Tanah	III-5
3.2.4	Klimatologi.....	III-6
3.2.5	Hidrologi.....	III-12
3.3	Penggunaan Lahan	III-12
3.4	Penguasaan dan Kepemilikan Lahan	III-16
3.5	Kependudukan.....	III-16
3.6	Isu.....	III-17
3.7	Kondisi Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Menuju Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berkebudayaan	III-19
3.7.1	Pendidikan.....	III-19
3.7.2	Kebudayaan.....	III-27
3.7.3	Program Terkait.....	III-28
3.8	Kondisi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat City Of Hub).....	III-29
3.8.1	Transportasi.....	III-29
3.8.2	Jaringan Listrik.....	III-37
3.8.3	Sistem Penyediaan Air Minum.....	III-39
3.8.4	Sistem Penyediaan Air limbah	III-46
3.8.5	Saluran Irigasi.....	III-50
3.8.6	Program Terkait.....	III-51

3.9	Kondisi Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandian (Kotawaringin Barat Kota Silicon Valley Indonesia)	III-52
3.9.1	Jaringan Telekomunikasi Dan Internet	III-53
3.9.2	Statistika	III-56
3.9.3	Persandian	III-57
3.9.4	Program Terkait.....	III-58
3.10	Kondisi Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Kobar Istimewa)	III-59
3.10.1	Pariwisata	III-59
3.10.2	Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	III-60
3.10.3	Program Terkait.....	III-66
3.11	Kondisi Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	III-67
3.11.1	PDRB.....	III-67
3.11.2	Investasi dan Penanaman Modal.....	III-70
3.11.3	Program Terkait.....	III-73
3.12	Kondisi Bidang Kesehatan dan Sosial (Kobar Kota Sehat)	III-73
3.12.1	Kesehatan	III-73
3.12.2	Sosial	III-80
3.12.3	Program Terkait.....	III-82
3.13	Kondisi Bidang Pemuda Dan Olahraga (Kobar Juara)	III-83
3.13.1	Olahraga	III-83
3.13.2	Kepemudaan	III-85
3.13.3	Program Terkait.....	III-86
3.14	Kondisi Bidang Pemberdayaan Desa dan Perumahan Rakyat	III-87
3.14.1	Pemberdayaan Desa	III-87
3.14.2	Perumahan Rakyat.....	III-88
3.15	Kondisi Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau dan Produktif)	III-88
3.15.1	Lingkungan Hidup	III-88
3.15.2	Pangan, Perkebunan dan Peternakan	III-89
3.15.3	Program Terkait.....	III-97

BAB IV ANALISIS

4.1	Analisis Kebijakan	IV-1
4.2	Analisis Pertumbuhan Penduduk	IV-4
4.3	Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Permukiman	IV-7
4.3.1	Permukiman	IV-7
4.3.2	Fasilitas Pendidikan	IV-9
4.3.3	Fasilitas Kesehatan	IV-11
4.3.4	Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau	IV-13
4.4	Analisis Kebutuhan Infrastruktur	IV-14
4.4.1	Transportasi	IV-14
4.4.2	Energi/Listrik	IV-21
4.4.3	Telekomunikasi	IV-21
4.4.4	Air Bersih	IV-22

4.4.5	Persampahan	IV-22
4.4.6	Air Limbah	IV-23
4.4.7	Sistem Jaringan Drainase	IV-24
4.4.8	Sumber Daya Air	IV-24
4.4.4	Air Bersih	IV-22
4.5	Analisis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	IV-27
4.6	Analisis Bidang Pekerjaan Umum	IV-29
4.7	Analisis Bidang Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian	IV-31
4.8	Analisis Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil	IV-33
4.9	Analisis Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV-36
4.10	Analisis Bidang Kesehatan Dan Sosial	IV-38
4.11	Analisis Bidang Pemuda dan Olahraga	IV-39
4.12	Analisis Bidang Pemberdayaan Desa Dan Perumahan Rakyat	IV-42
4.13	Analisis Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan	IV-53
BAB V RENCANA AKSI DAN INDIKASI PROGRAM		
5.1	Parameter dan Indkator Menuju Kota Dunia	V-1
5.2	Sembilan Tatanan Utama Mewujudkan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2025	V-2
5.3	Preseden	V-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	II-8
Tabel 2. 2	Daerah-daerah yang Ditetapkan Sebagai WPPI.....	II-10
Tabel 2. 3	Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah	II-13
Tabel 2. 4	Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-17
Tabel 2. 5	Arahan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-18
Tabel 2. 6	Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-21
Tabel 2. 7	Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-23
Tabel 2. 8	Arahan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-23
Tabel 2. 9	Isu Strategis dan Acuan Rekomendasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029	II-29
Tabel 2. 10	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2023-2026	II-33
Tabel 2. 11	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	II-35
Tabel 2. 12	Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-42
Tabel 2. 13	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat	II-47
Tabel 2. 14	Studi Terdahulu Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-56
Tabel 2. 15	Rencana Strategis OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat	II-66
Tabel 3. 1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat	III-1
Tabel 3. 2	Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat	III-6
Tabel 3. 3	Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	III-6
Tabel 3. 4	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-7
Tabel 3. 5	Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-12
Tabel 3. 6	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-12
Tabel 3. 7	Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	III-12

Tabel 3. 8	Luas Penguasaan Lahan Non HGU dan HGU di Kotawaringin Barat	III-16
Tabel 3. 9	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-16
Tabel 3. 10	Prosentase dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-16
Tabel 3. 11	Isu Yang Terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-18
Tabel 3. 12	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	III-20
Tabel 3. 13	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	III-20
Tabel 3. 14	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-20
Tabel 3. 15	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-20
Tabel 3. 16	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-21
Tabel 3. 17	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-21
Tabel 3. 18	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	III-21
Tabel 3. 19	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-22
Tabel 3. 20	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aiyah (MA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-22
Tabel 3. 21	Jumlah Sekolah dan Peserta Didik Tahun 2024	III-22
Tabel 3. 22	Jumlah Tenaga Pendidik/ Pengajar Tahun 2020-2024.....	III-22
Tabel 3. 23	Data Sekolah Kab. Kotawaringin Barat – Dapodikdasmen Tahun 2024.....	III-23
Tabel 3. 24	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023	III-26
Tabel 3. 25	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 dan 2023.....	III-27
Tabel 3. 26	Program Kegiatan Bidang Pendidikan.....	III-28
Tabel 3. 27	Program Kegiatan Bidang Kebudayaan.....	III-28
Tabel 3. 28	Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.....	III-29
Tabel 3. 29	Ruas Jaringan Jalan yang Melalui Kabupaten Kotawaringin Barat	III-29
Tabel 3. 30	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Km) Tahun 2021-2023	III-35
Tabel 3. 31	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023	III-35

Tabel 3. 32	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat (km) Tahun 2021–2023	III-36
Tabel 3. 33	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat (km), 2021–2023	III-36
Tabel 3. 34	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Unit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-37
Tabel 3. 35	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Bulan	III-38
Tabel 3. 36	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023	III-38
Tabel 3. 37	Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, dan Nilai Air yang Disalurkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023	III-40
Tabel 3. 38	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Kotawaringin Barat 2017-2022	III-41
Tabel 3. 39	Kapasitas dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-41
Tabel 3. 40	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Bukan Jaringan Perpipaan.....	III-42
Tabel 3. 41	Unit Air Baku Kabupaten Kotawaringin Barat	III-43
Tabel 3. 42	Pencapaian Akses Air Minum Tahun 2021-2024.....	III-44
Tabel 3. 43	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat	III-46
Tabel 3. 44	Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-48
Tabel 3. 45	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan.....	III-50
Tabel 3. 46	Sebaran Embung Per Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-50
Tabel 3. 47	Prasarana Irigasi di Kotawaringin Barat Tahun 2021	III-51
Tabel 3. 48	Indikator Urusan PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023	III-52
Tabel 3. 49	Capaian SPM Urusan PUPR Kab. Kotawaringin Barat.....	III-52
Tabel 3. 50	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang	III-52
Tabel 3. 51	Indikator Statistik Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023	III-56
Tabel 3. 52	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Tahun 2023	III-56
Tabel 3. 53	Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian.....	III-58
Tabel 3. 54	Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.....	III-59
Tabel 3. 55	Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-60
Tabel 3. 56	Rekapitulasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kotawaringin Barat.....	III-62
Tabel 3. 57	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	III-67
Tabel 3. 58	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (miliar rupiah), 2019–2023	III-68

Tabel 3. 59	Data Realisasi Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-2020	III-71
Tabel 3. 60	Realisasi Investasi Tahun 2020-2024.....	III-72
Tabel 3. 61	Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	III-74
Tabel 3. 62	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	III-74
Tabel 3. 63	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	III-74
Tabel 3. 64	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023.....	III-80
Tabel 3. 65	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023	III-81
Tabel 3. 66	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023	III-81
Tabel 3. 67	Program Dinas Kesehatan	III-83
Tabel 3. 68	Produktivitas Tanaman Pangan.....	III-89
Tabel 3. 69	Produktivitas Holtikultura.....	III-90
Tabel 3. 70	Produktivitas Buah-Buahan	III-90
Tabel 3. 71	Produktivitas Biofarmaka	III-92
Tabel 3. 72	Produktivitas Perkebunan	III-93
Tabel 3. 73	Produksi Ternak.....	III-93
Tabel 3. 74	Produktivitas Perikanan Budidaya	III-95
Tabel 3. 75	Produktivitas Perikanan Tangkap	III-95
Tabel 4. 1	Nilai Adaptasi Kebijakan untuk Pengembangan Kotawaringin Barat	IV-1
Tabel 4. 2	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044	IV-4
Tabel 4. 3	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044.....	IV-6
Tabel 4. 4	Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044	IV-6
Tabel 4. 5	Proyeksi Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-7
Tabel 4. 6	Rencana Sistem Permukiman.....	IV-7
Tabel 4. 7	Proyeksi Tambahan Demand Lahan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Pendukungnya	IV-8
Tabel 4. 8	Standar Pelayanan Sarana Pendidikan	IV-9
Tabel 4. 9	Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Pendidikan	IV-10
Tabel 4. 10	Standar Pelayanan Sarana Kesehatan	IV-14
Tabel 4. 13	Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga dan RTH	IV-14
Tabel 4. 14	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan	IV-15
Tabel 4. 15	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Listrik	IV-21
Tabel 4. 16	Perkiraan Jumlah Pengguna Seluler	IV-21
Tabel 4. 17	Jumlah Pengguna, Total Trafik (Erlang), dan Kebutuhan BT	IV-22
Tabel 4. 18	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Air Minum)	IV-22
Tabel 4. 19	Kebutuhan Sarana Persampahan	IV-23

Tabel 4. 20	Proyeksi Jumlah Air Limbah (liter/hari)	IV-23
Tabel 4. 21	Proyeksi Jumlah Air Buangan (liter/hari)	IV-24
Tabel 4. 22	Analisis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	IV-28
Tabel 4. 23	Analisis Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	IV-30
Tabel 4. 24	Analisis Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandingan	IV-32
Tabel 4. 25	Analisis Bidan Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil	IV-34
Tabel 4. 26	Analisis Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV-37
Tabel 4. 27	Analisis Bidang Kesehatan Dan Sosial	IV-39
Tabel 4. 28	Analisis Bidang Pemuda Dan Olahraga	IV-41
Tabel 4. 29	Penilaian Desa Tertinggal Di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-46
Tabel 4. 30	Analisis Bidang Pemberdayaan Desa Dan Perumahan Rakyat	IV-50
Tabel 4. 31	Analisis Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan	IV-54
Tabel 5. 1	Rencana Aksi Dan Program Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan	V-4
Tabel 5. 2	Rencana Aksi Dan Program Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	V-8
Tabel 5. 3	Rencana Aksi Dan Program Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandingan	V-14
Tabel 5. 4	Rencana Aksi Dan Program Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil	V-19
Tabel 5. 5	Rencana Aksi Dan Program Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V-28
Tabel 5. 6	Rencana Aksi Dan Program Bidang Kesehatan Dan Sosial	V-32
Tabel 5. 7	Rencana Aksi Dan Program Bidang Pemuda Dan Olahraga	V-37
Tabel 5. 8	Rencana Aksi Dan Program Bidang Pemberdayaan Desa Dan Perumahan Rakyat	V-40
Tabel 5. 9	Rencana Aksi Dan Program Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan.....	V-44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Visi RPJPN Tahun 2025 - 2045	II-4
Gambar 2. 2	Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045	II-5
Gambar 2. 3	Arah Pembangunan Pulau Kalimantan Dalam Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.....	II-7
Gambar 2. 4	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-19
Gambar 2. 5	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-19
Gambar 2. 6	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-20
Gambar 2. 7	Peta Rencana Struktur Provinsi Kalimantan Tengah	II-24
Gambar 2. 8	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-24
Gambar 2. 9	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-25
Gambar 2. 10	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045	II-27
Gambar 2. 11	Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025	II-29
Gambar 2. 12	Cascading Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026	II-30
Gambar 2. 13	Cascading Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026	II-31
Gambar 2. 14	Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026	II-32
Gambar 2. 15	Cascading Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026	II-32
Gambar 2. 16	Cascading Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026	II-33
Gambar 2. 17	Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	II-34
Gambar 2. 18	Peta Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	II-41
Gambar 2. 19	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-46
Gambar 2. 20	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat	II-48
Gambar 2. 21	Peta Rencana Struktur Ruang Revisi Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-53
Gambar 2. 22	Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat	II-54

Gambar 2. 23	Peta Rencana Kawasan Strategis Revisi Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-55
Gambar 3. 1	Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Km2).....	III-2
Gambar 3. 2	Peta Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-3
Gambar 3. 3	Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-8
Gambar 3. 4	Peta Kelereng Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-9
Gambar 3. 5	Peta Morfologi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-10
Gambar 3. 6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat	III-11
Gambar 3. 7	Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-13
Gambar 3. 8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-14
Gambar 3. 9	Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-15
Gambar 3. 10	Jumlah Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	III-17
Gambar 3. 11	Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kotawaringin Barat	III-24
Gambar 3. 12	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat.....	III-25
Gambar 3. 13	Salah Satu Kebudayaan Asli Kotawaringin Barat.....	III-27
Gambar 3. 14	Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun	III-36
Gambar 3. 15	Pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-37
Gambar 3. 16	Peta Sistem Jaringan Energi.....	III-39
Gambar 3. 17	Sarana Pengolahan IPLT Translik Pasir Panjang.....	III-50
Gambar 3. 18	Akses Internet Di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023.....	III-54
Gambar 3. 19	Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi	III-55
Gambar 3. 20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Kotawaringin Barat	III-57
Gambar 3. 21	Jumlah Seluruh Titik Yang Diamankan Pemda Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Kotawaringin Barat.....	III-58
Gambar 3. 22	Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	III-60
Gambar 3. 23	Jumlah UMKM di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2019- 2022.....	III-62
Gambar 3. 24	Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-63
Gambar 3. 25	PDRB Sektor Perindustrian Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) Kabupaten Kotawaringin Barat	III-63
Gambar 3. 26	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat	III-63
Gambar 3. 27	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2019-2022	III-64
Gambar 3. 28	Nilai Ekspor Kabupaten Kotawaringin Tahun 2022	III-65
Gambar 3. 29	Diagram Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kotawaringin Barat 2019-2023.....	III-69
Gambar 3. 30	Diagram Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023	III-70
Gambar 3. 31	Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-73
Gambar 3. 32	Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-77

Gambar 3. 33	Angka Harapan Hidup Per Desember Tahun 2022.....	III-78
Gambar 3. 34	Angka Kematian Ibu Per Desember Tahun 2022.....	III-78
Gambar 3. 35	Angka Kematian Bayi Per Desember Tahun 2022	III-79
Gambar 3. 36	Angka Prevalensi Stunting Per Desember 2022	III-79
Gambar 3. 37	Capaian Indiktaor Urusan Kesehatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023.....	III-80
Gambar 3. 38	Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-82
Gambar 3. 39	Fasilitas Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-85
Gambar 3. 40	Kompetisi Bidang Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Barat	III-86
Gambar 3. 41	Produktivitas Tanaman Pangan 2018-2023.....	III-89
Gambar 3. 42	Produktivitas Tanaman Holtikultura 2018-2022	III-90
Gambar 3. 43	Produktivitas Buah-buahan.....	III-91
Gambar 3. 44	Produktivitas Biofarmaka	III-92
Gambar 3. 45	Produktivitas Perkebunan.....	III-93
Gambar 3. 46	Produksi Daging Ternak	III-94
Gambar 3. 47	Produksi Telur.....	III-94
Gambar 3. 48	Produktivitas Peikanan Budidaya.....	III-95
Gambar 3. 49	Produktivitas Perikanan Tangkap	III-97
Gambar 4. 1	Diagram Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-5
Gambar 4. 2	Demand Lahan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Pendukungnya Tahun 2024-2044	IV-9
Gambar 4. 3	Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Pendidikan.....	IV-11
Gambar 4. 4	Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Kesehatan	IV-13
Gambar 4. 5	Roadmap Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-58
Gambar 4. 6	Roadmap Pengembangan Transportasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-59



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan nilai rata-rata IDM kabupaten/ kota, hanya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah berstatus Mandiri. Namun walaupun sudah berstatus mandiri, penduduk kabupaten Kotawaringin Barat masih banyak yang belum mengenal akan alam lingkungan hidupnya dengan baik. Padahal, Kabupaten Kotawaringin Barat berpotensi bertransformasi menjadi hub pendidikan, teknologi, bisnis, kesehatan, dan olahraga kelas dunia melalui strategi pembangunan terpadu. Meskipun memprioritaskan pendidikan, teknologi, dan pengembangan bisnis sangat penting bagi kemajuan ekonomi, hal ini mungkin secara tidak sengaja mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor penting seperti kesehatan dan layanan sosial. Sehingga, Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia: Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, Dan Kota Juara merupakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyangkut pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, dan kepemudaan masih perlu diadakan guna menunjang perencanaan, pembinaan dan pengembangan pembangunan khususnya yang menyangkut alam dan manusia yang menduduki di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia yang maju di berbagai sektor.

1.2.2 TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Dapat memberikan sumbangan kepada perencanaan pembangunan nasional sehingga alam lingkungan dan penduduk lebih dilibatkan dalam proses pembangunan yang menyeluruh, menyebar dan merata;

- b. Membina kelangsungan dan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sistem kehidupan sosial-budaya daerah;
- c. Menyusun aspek pendidikan dan kebudayaan dari daerah kotawaringin Barat sebagai bagian dari wawasan Nusantara.
- d. Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

1.2.3 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Tersusunnya Dokumen Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara).
- b. Terlaksananya Rencana Aksi Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia di berbagai sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, informasi, penataan ruang, investasi, lingkungan dan pemberdayaan desa.

1.3 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pekerjaan ini, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037.
- e. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- f. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
- g. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- h. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan Formal.
- i. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun Tahun 2022-2042.

- j. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- k. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara) meliputi:

- a. Penyusunan regulasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia, di berbagai sektor bidang;
 - 1) Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 2) Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Melaksanakan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Dalam rangka kegiatan Rencana Aksi Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara) ini dibatasi dalam ruang lingkup yang mengandung aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, sistem kehidupan sosial budaya dan wilayah-wilayah pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

No.	Strategi Aksi Percepatan Pembangunan	Nama Kegiatan
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	"Kobar Kota Pendidikan Berkarakter dan Berkebudayaan"
2	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	"Kobar City of Hub"
3	Bidang Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian	"Kobar Kota Silicon Valley Indonesia"
4	Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Koperasi Menengah Kecil	"Kobar Istimewa"
5	Bidang Investasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	"Kobar Kota Bisnis Baru"
6	Bidang Kesehatan dan Sosial	"Kobar Sehat"
7	Bidang Pemuda dan Olahraga	"Kobar Juara"
8	Bidang Pemberdayaan Desa dan Perumahan Rakyat	"Kobar Desa Maju dan Rakyat Sejahtera"
9	Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, perkebunan dan Peternakan	"Kobar Bersih dan Hijau"

1.4.2 RUANG LINGKUP LOKASI

Lokasi pekerjaan penyusunan dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara) ini, **terkhusus di daerah tertinggal**.

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika Penyusunan **Laporan Akhir** dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara) ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengungkapkan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORI

Berisi gambaran kebijakan dan teori yang menjadi dasar acuan penyusunan dokumen Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara). Tinjauan Kebijakan meliputi RPJPD, RPJMD, RTRW dan Kebijakan lain yang terkait. Selain itu juga mengkaji studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan pekerjaan ini. Sedangkan Tinjauan Teori meliputi teori yang digunakan dalam penentuan kriteria desa tertinggal dan kriteria kota dunia yang akan digunakan dalam analisis dan penentuan rencana aksi selanjutnya.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini gambaran kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin yang terkait pada bidang-bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Bidang Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian, Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha, Koperasi Menengah Kecil, Bidang Investasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Kesehatan dan Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Pemberdayaan, Desa dan Perumahan Rakyat, serta Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, perkebunan dan Peternakan.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini menganalisis antara kondisi eksisting, program pada Dinas atau OPD terhadap kriteria Kota Dunia yang telah ditetapkan sehingga akan didapat hasil analisis berupa kebutuhan dan arahan dalam pelaksanaan Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara).

BAB V KONSEP DAN RENCANA AKSI

Bab ini menguraikan mengenai hasil akhir yang berupa konsep dan rencana aksi dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, dan Kota Juara).

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORI

2.1 ASTA CITA

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam menjalankan roda pemerintahan mengusung visi sebagai berikut:

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam mencapai visi tersebut, presiden dan wakil presiden juga mencanangkan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta Cita adalah 8 (delapan) misi yang disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi meliputi pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama.

Berikut ini merupakan Asta Cita Presiden dan wakil presiden:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selain asta cita, juga terdapat program prioritas yang akan dituntaskan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Program Prioritas adalah sejumlah program yang ingin dicapai Presiden Prabowo demi mewujudkan visi dalam membangun Indonesia. Program ini meliputi berbagai bidang diantaranya swasembada pangan, pemberantasan korupsi, pendidikan, layanan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, hingga pelestarian seni dan budaya.

Berikut adalah daftar 17 Program Prioritas yang akan menjadi fokus utama Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia:

1. Swasembada pangan, energi, dan air.
2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
4. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak, serta penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
6. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
7. Pemberantasan kemiskinan.
8. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
10. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
11. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
12. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
13. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
14. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
15. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam rangka capai pertumbuhan ekonomi 8 (delapan) Persen, melalui:

1. FOKUS INVESTASI HIJAU

Diharapkan Bisa Capai Target Pengurangan Karbon 30%

2. TINGKATKAN INVESTASI ASING LANGSUNG

Terutama di Tengah Terbatasnya Pendanaan Domestik, serta Bangun Industri Berbasis Ekspor dengan Perkuat Rupiah terhadap Kurs Asing

3. STRATEGI DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Antara lain via Investasi Asing untuk Bangun Artificial Intelligence/AI Data Center, Pembangunan Carbon Capture and Storage/ CCS, Hirilisasi Nikel, Timah, Tembaga & Bauxit, Serta Pembangunan Ibu Kota Negara/IKN Nusantara

4. PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan/EBT, Pengolahan Bioetanol & Biodisel, Carbon Trading, Pengembangan Proyek Tanggul Laut, Serta Penguatan Food Estate

5. PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH/ UMUM

Dengan Program Makan Bergizi Gratis, Renovasi Rumah & Sekolah, Pengembangan Infrastruktur, Serta Hilirisasi Pangan

2.2 RPJPN TAHUN 2025-2045

2.2.1 VISI

Dalam Rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang diterbitkan oleh Bappenas, Visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada : (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, (ii) perkembangan megatren global, dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.



Gambar 2. 1 Visi RPJPN Tahun 2025 - 2045

Sumber: Undang-Undang RI No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025-2045

2.2.1 MISI

Ada delapan misi (agenda) pembangunan 2045 yaitu :

1. Transformasi Sosial

Mewujudkan transformasi social untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing

2. Transformasi Ekonomi

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Memantapkan supremasi hokum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang

mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan SDA.

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi.

7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan sebagai berikut.

8 Misi (Agenda) Pembangunan:

(1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan



17 Arah (Tujuan) Pembangunan



Gambar 2. 2 Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045

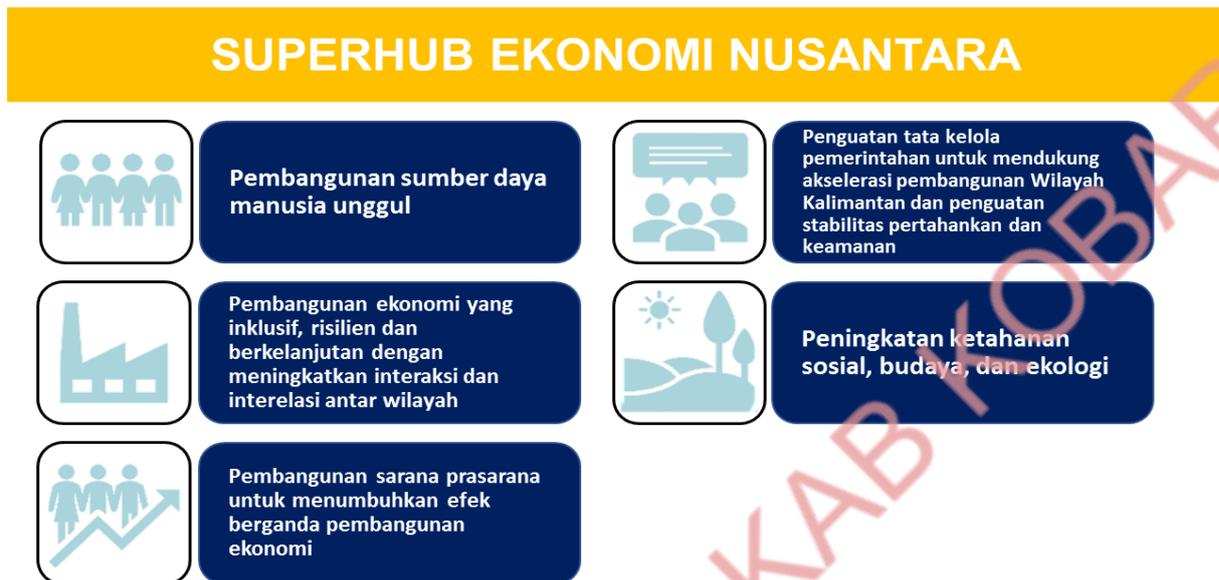
Sumber: Undang-Undang RI No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025-2045

2.2.2 ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “ **Superhub Ekonomi Nusantara**” dengan 5 (lima) arah pembangunan sebagai berikut:

1. **Pertama**, pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.
2. **Kedua**, pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan interelasi antar wilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. **Ketiga**, pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, kelistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. **Keempat**, penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR Kabupaten/ Kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. **Kelima**, peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

TEMA PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN WILAYAH KALIMANTAN DALAM RPJPN TAHUN 2025-2045



Gambar 2. 3 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan Dalam Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045

Sumber: Undang-Undang RI No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN Tahun 2025-2045

2.3 RANCANGAN RPJMN

2.3.1 VISI

Dalam Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045, yaitu **menuju Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dengan lima sasaran visi, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

2.3.2 TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN TEKNOKRATIK TAHUN 2025 - 2029

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Transformasi Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

2.3.3 TEMA DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PULAU KALIMANTAN

Tema Pembangunan Pulau Kalimantan : **SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA**

Pusat Aglomerasi dan Pengembangan Ekonomi Baru Berbasis Klaster Ekonomi Masa Depan Untuk Mendorong Terciptanya Pemerataan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan sebagai **Lumbung Pangan nasional dan Pusat Konservasi Internasional** dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria dan penyakit tropis terabaikan 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendukung potensi lokal
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat industri khususnya dengan hilirisasi komoditas unggulan daerah (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani 3. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan seperti pengembangan eco-tourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung puting dan Taman Nasional Sebangau dengan pelibatan mitra lokal 4. Lanjutan pembangunan Bandara Baru Murung Raya 5. Lanjutan pembangunan Jalan Trans Kalimantan Penghubung Kaltim – Kalteng 6. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan sungai perintis 7. Pembangunan pembangkit terbarukan berbasis surya pada daerah isolated berbeban rendah
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerjasama Kalimantan tengah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ ekosistem termasuk Heart of Borneo di Wilayah Kalimantan 2. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fiskal daerah khususnya intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pemanfaatan pembiayaan alternatif 2. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mitigasi struktural dan non struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Palangkaraya 2. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah 3. Pengembangan irigasi di WS Barito, Mentaya – Katingan untuk mendukung lumbung pangan nasional

Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029

2.4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015 -2035

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 -2035, **Visi Pembangunan Industri Nasional** adalah

Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Sedangkan **Misi dalam pembangunan industri di Indonesia**, meliputi:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan **strategi pembangunan industri nasional** sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;

4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Daerah-daerah yang Ditetapkan Sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
6	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto- Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang -Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara - Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
11	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep. Riau
16	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-LampungTengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 -2035

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Kawasan Industri Surya Borneo (KISB) namun belum masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri nasional sehingga kedepannya diusulkan dalam 7 WPPI. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI.

2.5 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Daftar Proyek Strategis Nasional telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat beberapa proyek strategis nasional khususnya kawasan industri yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya:

1. Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kawasan Industri Sungai Tabuk
3. Kawasan Industri Rimau di Kabupaten Barito Timur

2.6 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA JANGKA PANJANG MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dijelaskan sebagai berikut:

“Kalimantan Tengah makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

1. Bermartabat, Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.
2. Elok, Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (kalteng hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3. Religius, Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi kalteng berkarakter.
4. Kuat, Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin, kalteng sehat, mandiri, tangguh dan maju dalam berbagai sektor.
5. Amanah, Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga kalteng.
6. Harmonis, Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Misi yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam megantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
4. Mempercepat pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
5. Meneguhkan kalteng yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

2.7 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 – 2035

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;

2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
4. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
5. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
6. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
7. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berikut arahan penataan ruang yang dapat dikaji berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 3 Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi	PKW : Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	
a. sistem jaringan transportasi darat	<p>Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan Jaringan jalan arteri primer : Batas Kota Pangkalan Bun– P. Lada – Asam Baru – Km. 65 SP. Bangkal – Batas Kota Sampit – Jl. Lingkar Utara Kota Sampit - Jl. Tjilik Riwut (Sampit) – Batas Kota Sampit - Palantaran - Kasongan – Tangkiling - Batas Kota P. Raya - Jl. Tjilik Riwut – Jl. Imam Bonjol - Jl. RTA. Milono - SP. Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel – Pilang (Km.35) - Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalimantan Selatan sepanjang 604,75 Km;</p> <p>Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi: Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km, Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km, dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.</p> <p>Jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) : Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, Jl. Diponegoro (Pangkalan Bun), Jl. Iskandar (Pangkalan Bun) sepanjang 16,53 Km.</p> <p>Jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) : Riam Durian - Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 Km;</p> <p>Jaringan prasarana, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terminal penumpang Tipe A di Pangkalan Bun b. Jembatan Timbang Simpang Runtu di Kotawaringin Barat <p>Jaringan pelayanan terdiri atas: jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi:</p>

Kebijakan	Arahan
	<p>a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak; ▪ Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak; ▪ Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang; <p>b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Palangka Raya – Pangkalan Bun; ▪ Kasongan – Pangkalan Bun; ▪ Sampit – Pangkalan Bun; ▪ Kuala Pembuang – Pangkalan Bun; ▪ Pangkalan Bun – Nanga Bulik; ▪ Pangkalan Bun – Sukamara; <p>Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:</p> <p>a. Jaringan angkutan sungai dan danau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai ▪ Arut Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri; ▪ Sungai Kumai: Pangkalan Banteng – Kumai; ▪ Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
<p>b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian yaitu jaringan jalur kereta api lintas utama.</p> <p>Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi: Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai</p> <p>Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api di kabupaten Kotawaringin Barat dengan Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.</p> <p>Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi : Stasiun perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat)</p>
<p>c. sistem jaringan transportasi laut</p>	<p>Tatapan kepelabuhanan</p> <p>a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul : Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>b. Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru : Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>c. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) : PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Alur pelayaran nasional: Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara - Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang, Batanjung – Surabaya; Batanjung - Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; Pulang Pisau - Jakarta.</p>

Kebijakan	Arahan
d. sistem jaringan transportasi udara	<p>Tatanan kebandarudaraan Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier : skandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya	
rencana sistem jaringan energi	<p>Pembangkit tenaga listrik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan Menengah/ Tinggi Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik</p> <p>Pembangunan Gardu Induk (GI) : Di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Depo bahan bakar minyak (BBM) : Di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat</p>
rencana sistem jaringan telekomunikasi	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem Jaringan Backbone : Trunk/MSC/Router/Metro-e/Node IP di Provinsi Kalteng dengan Provinsi lainnya dan Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan backbone tersebut dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut. Remote Metro Junction (RMJ) : jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Remote/BSC/Metroe/ Node IP di Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan RMJ tersebut dalam bentuk kabel SKSO dan Radio. Sistem Jaringan Akses : jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Lokal/BTS/Node IP ke user terminal. Jaringan Akses tersebut dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga Radio Akses dan VSAT (Verry Small Aperture Terminal). <p>Pengembangan Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau:</p> <ol style="list-style-type: none"> desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam atau handphone (daerah blank spot); (I-IV/2) desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi; (I-IV/2). desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone; (I-IV/2)
rencana sistem sumberdaya air	<ol style="list-style-type: none"> Wilayah Sungai (WS) Wilayah Sungai Lintas Provinsi meliputi: Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai Bendungan, Bendung, Embung, Danau dan Situ Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak

Kebijakan	Arahan
	<p>1) Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kotawaringin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DI Sagu - Kumai Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha); ▪ DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha); ▪ DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha); ▪ DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); dan ▪ DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha). <p>2) Daerah Rawa Kewenangan Provinsi DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DR Mendawai/Tatakan Pialon Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Raja Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Mendawai Seberang Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Teluk Pulai Luas Pelayanan 1.000,00 Ha ▪ DR Sungai Sekonyer Luas Pelayanan 1.000,00 Ha <p>d. Pengamanan Pantai terdiri atas kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);</p> <p>e. Instalasi Pengolahan Air Minum Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian;</p> <p>1) Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai Instalasi pengolahan air minum tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Baku Kabupaten Kotawaringin Barat ▪ Air Baku Kota Pangkalan Bun Kapasitas 200 l/dt dan IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat <p>2) Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sumur bor air dalam di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 9 titik; <p>f. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional, ▪ Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Tabel 2. 4 Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

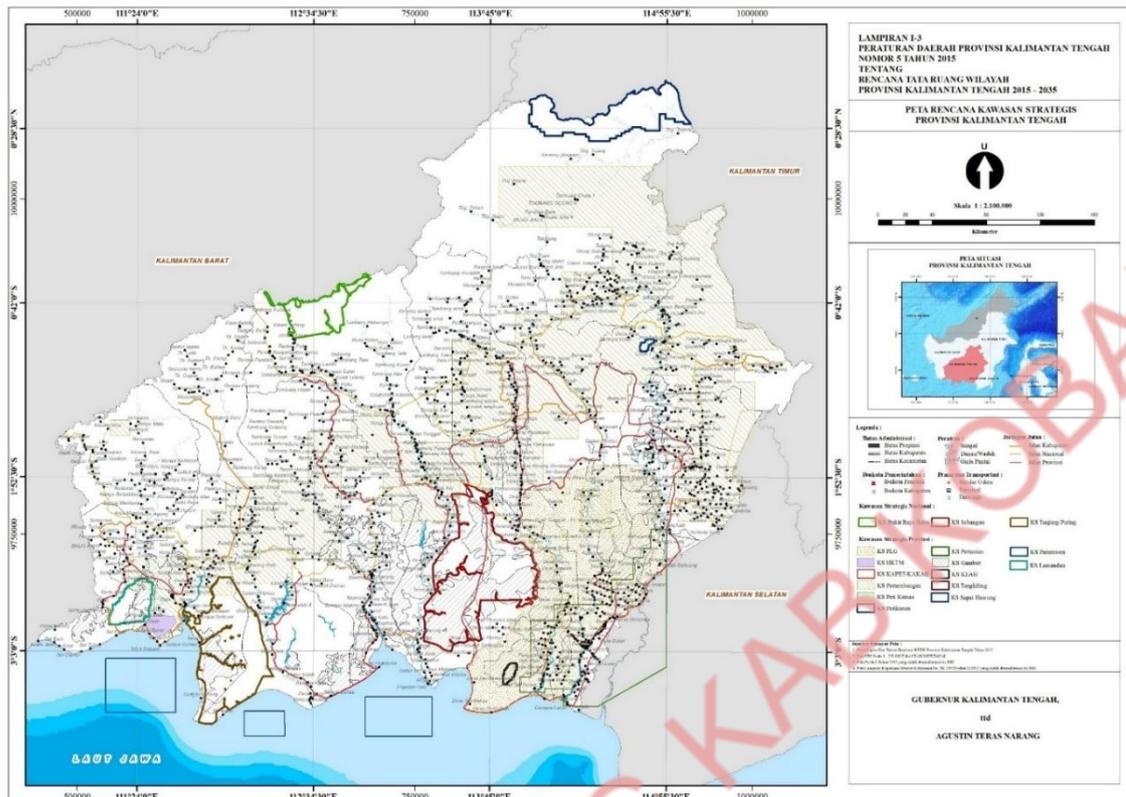
Kebijakan	Arahan
Kawasan Lindung	<p>Kawasan Lindung Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan perlindungan setempat sempadan pantai yaitu kawasan di sepanjang pantai 751 km dengan lebar 12 mil laut, di kawasan perkotaan 30-100 m dan di luar kawasan perkotaan 100-250 m meliputi pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan di Kabupaten Kapuas; 2. Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang dan Kawasan Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara seluas ±57.389 Ha. ▪ taman nasional yaitu Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan dengan seluas ±411.305 Ha ▪ Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas Ha ±2.563 Ha 4. kawasan rawan bencana alam <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan tanah longsor yaitu daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara; ▪ kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas ▪ Kawasan Lindung lainnya : Kawasan Terumbu Karang Gosong Senggora Kabupaten Kotawaringin Barat; Taman Buru di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas ±4.036 Ha
Kawasan Budidaya	<p>Non kawasan hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian 2. Kawasan Peternakan 3. Kawasan peruntukan perkebunan 4. Kawasan peruntukan perikanan laut 5. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara 6. Kawasan peruntukan pariwisata 7. kawasan peruntukan transmigrasi 8. kawasan peruntukan technopark 9. Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan geostrategic nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Kawasan peruntukan pertambangan

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Tabel 2. 5 Arahan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Kawasan strategis nasional	Kawasan strategis nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terletak di Kecamatan Kumai seluas 415.050 ha Taman Nasional Tanjung Puting di kelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan.
Kawasan strategis dari Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis ▪ Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak ▪ Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia ▪ Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) ▪ Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat 5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi ▪ Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan ▪ Andalan Laut 6. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Strategis Ekosistem Nasional ▪ Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Jelai, DAS Arut, DAS Kumai 7. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara ▪ Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; ▪ Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035



Gambar 2. 6 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

2.8 RANCANGAN RTRW PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2044

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan secara merata dan terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi maka disusun kebijakan yang terdiri atas:

- peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
- perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- pengecahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;

- g. pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya;
- h. pengelolaan dan pelestarian hutan adat;
- i. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk transmigrasi; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berikut arahan penataan ruang yang dapat dikaji berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 6 Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi	PKW : Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat PKL : Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sistem Jaringan Transportasi	
a. sistem jaringan jalan	<p>Jalan Arteri Primer (JAP) Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada; Jln. A. Yani (Pangkalan Bun); Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun); Bts. Kota Pangkalanbun – Kumai; Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun); Jln. Iskandar (Pangkalan Bun); Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya); Jalan Kolektor Primer (JKP) : Batas Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama Jalan Tol : Jalan tol Lamandau-Pangkalan Bun Terminal : Terminal Natai Suka Tipe B di Pangkalan Bun Jembatan Timbang : Jembatan Timbang Pangkalan Lada di Kotawaringin Barat Jembatan, meliputi: b. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Jembatan Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat;</p>
Jaringan Kereta Api	Jaringan jalur kereta api : Kudangan – Kuma Stasiun kereta api : Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat
sistem jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan	<p>Alur pelayaran sungai dan danau : Alur Pelayaran Sungai Kumai dan Arut Lintas Penyeberangan Kumai - Kendal di Kabupaten Kotawaringin Barat Pelabuhan sungai dan danau : a. Dermaga Danau Gatel di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Dermaga Danau Kenambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Dermaga Indrasari di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Dermaga Kapitan di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; g. Pandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; i. Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>

Kebijakan	Arahan
	Pelabuhan penyeberangan : Pelabuhan penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sistem Jaringan Transportasi Laut	<p>Pelabuhan pengumpul : Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Pelabuhan pengumpan : Pangkalan Bun dan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Terminal khusus : Terminal khusus dengan fungsipertambangan, industri, pertanian, energi, kehutanan, dan fungsi lain – lain di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Pangkalan Pendaratan Ikan : Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Alur-pelayaran di laut : dari dan ke Pelabuhan Pangkalan Bun; dari dan ke Pelabuhan Kumai; dari dan ke Pelabuhan Sebuai</p>
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	<p>Bandar Udara pengumpul : Bandar Udara Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Bandar Udara pengumpan : Bandar Udara Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
sistem jaringan energi	<p>Infrastruktur minyak dan gas bumi : Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Jaringan minyak dan gas bumi : jaringan pipa bawah laut di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem : SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, SUTT Nanga Bulik - Incomer melalui Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat; SUTT Sampit - Pangkalan Bun melalui Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat;</p> <p>Gardu listrik terdapat di seluruh Kabupaten/Kota</p>
rencana sistem jaringan telekomunikasi	<p>Jaringan tetap</p> <p>a. Kabel bawah laut, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Kakap - Pangkalan Bun; dan 2. Pangkalan Bun - Tangkisung. <p>b. Kabel serat optik, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segmen Hanau – Pangkalan Bun; 2. Segmen Pangkalan Bun – Kumai; dan 3. Segmen Pangkalan Bun – Keraya <p>Jaringan bergerak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BTS Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. BTS Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. BTS Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. BTS Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat
sistem jaringan sumber daya air	Sistem jaringan irigasi : D.I. Kumpai Batu Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat; D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah dan Tanjung Terantang di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sistem jaringan prasarana lainnya	<p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPAM IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. SPAM IKK Kumpai Batu di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. SPAM IKK Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. SPAM IKK Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</p> <p>SPAL Arut Selatan di Kabupaten Kotawaringin Barat</p>

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Tabel 2. 7 Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

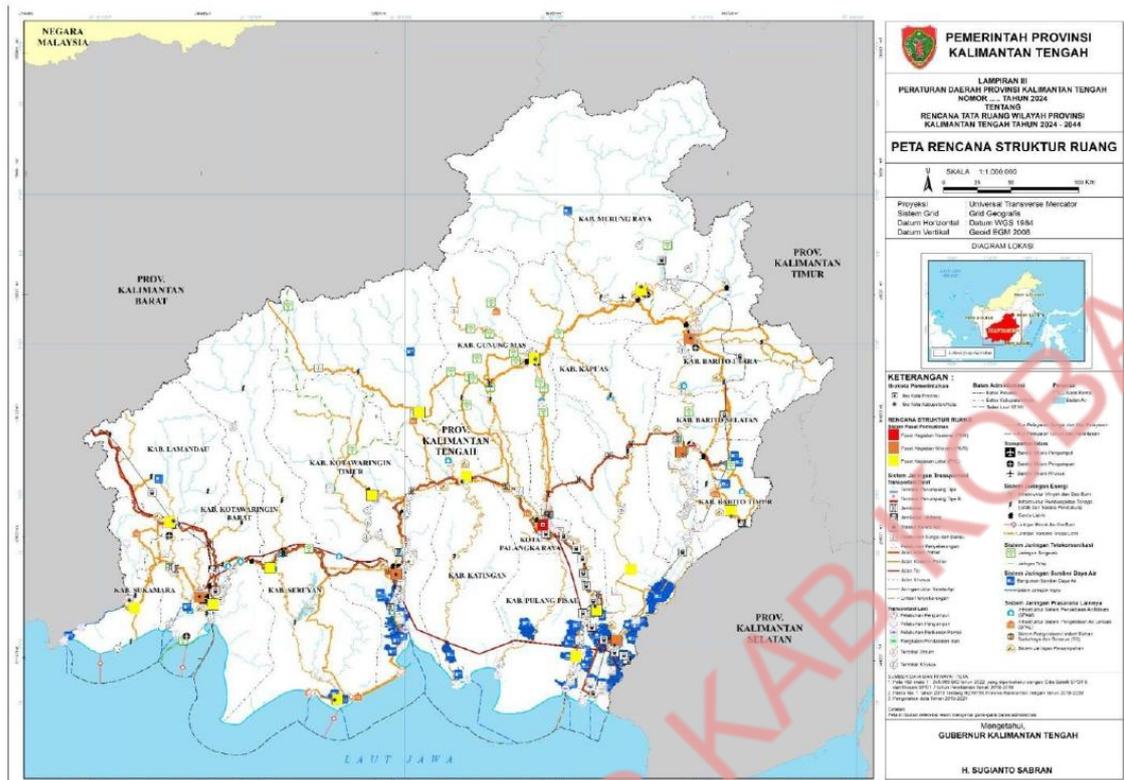
Kebijakan	Arahan
Kawasan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Air 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 3. Kawasan perlindungan setempat 4. Kawasan konservasi (Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa) 5. Kawasan pencadangan konservasi di laut (Sabuai Kecamatan Arut Selatan - Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa) 6. Kawasan cagar budaya, terdiri atas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Astana Al-Nursari dan Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1 (satu) hektare 7. Kawasan ekosistem mangrove
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan pertanian 3. Kawasan peruntukkan industri 4. Kawasan permukiman 5. Kawasan transportasi 6. Kawasan pertahanan dan keamanan (Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat, Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan TNI AU di Kabupaten Kotawaringin Barat)

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

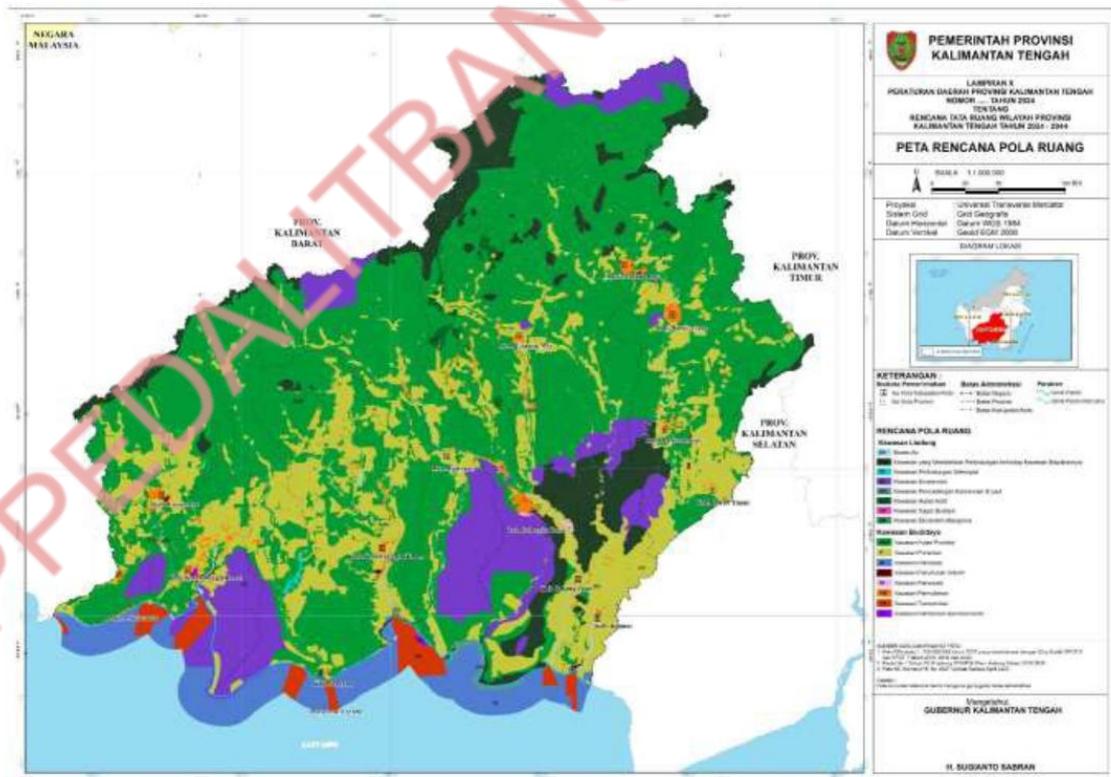
Tabel 2. 8 Arahan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Kebijakan	Arahan
Kawasan strategis nasional	Kawasan strategis nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Taman Nasional Tanjung Puting
Kawasan strategis dari Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat

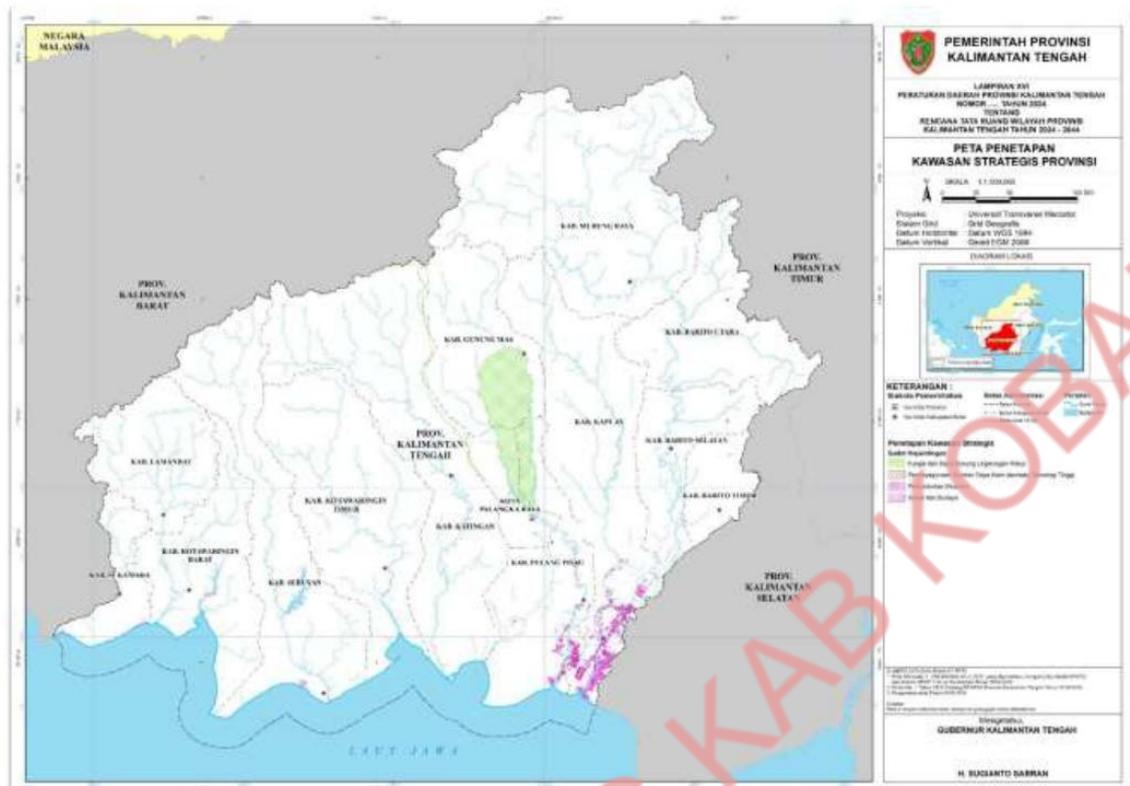
Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 – 2044



Gambar 2. 7 Peta Rencana Struktur Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. 8 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. 9 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

2.9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2025

Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

**KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, MANDIRI,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN**

Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025:

1. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan;

6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2.10 RANCANGAN RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 adalah:

KOTAWARINGIN BARAT SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Barat Logistik Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan ditempuh melalui 5 misi pembangunan.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025-2045, meliputi:

1. Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter
2. Transformasi ekonomi berbasis kerakyatan mewujudkan kemandirian ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

5. Transformasi Ketahanan Sosial dan Budaya yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin Barat Sejahtera

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045:

- Transformasi Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter,
- Transformasi ekonomi berbasis kerakyatan mewujudkan kemandirian ekonomi,
- Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia,
- Mewujudkan Keamanan Daerah Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,
- Transformasi Ketahanan Sosial dan Budaya Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin Barat Sejahtera
- Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan
- Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan
- Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Antar Periode.

Secara umum arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengacu dan memerhatikan arah kebijakan nasional. Dimana Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wilayah administratif dibawah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumbangsih / peran dalam berkontribusi mencapai cita-cita pembangunan nasional. Berikut merupakan visualisasi arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 yang dibagi kedalam 4 periode sebagai berikut.



Gambar 2. 10 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2025-2029

2.11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah. Maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“ GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEKAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Sebagai penjabaran visi RPJMD, maka perlu dioperasionasikan ke dalam beberapa misi, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mempekuat tatanan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga

Misi 3 : Mendorong pengatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas kelautan, industri dan pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup

Misi 4 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi 5 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Misi 6 : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata

2.12 RANCANGAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk melihat perpektif perencanaan pembangunan daerah, dalam perspektif teknokratik khususnya menyimpulkan isu-isu strategis serta memberikan gambaran kinerja dan rencana kerja Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran rekonstruksi rekomendasi rangkaian kinerja yang seyogyanya dijadikan acuan pembangunan 5 tahun kedepan atau bahkan dapat memberikan rekomendasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan konstruksi visi dan misi calon kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Berikut dipetakan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat kedalam rekomendasi rangkaian kinerja yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 9 Isu Strategis dan Acuan Rekomendasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029

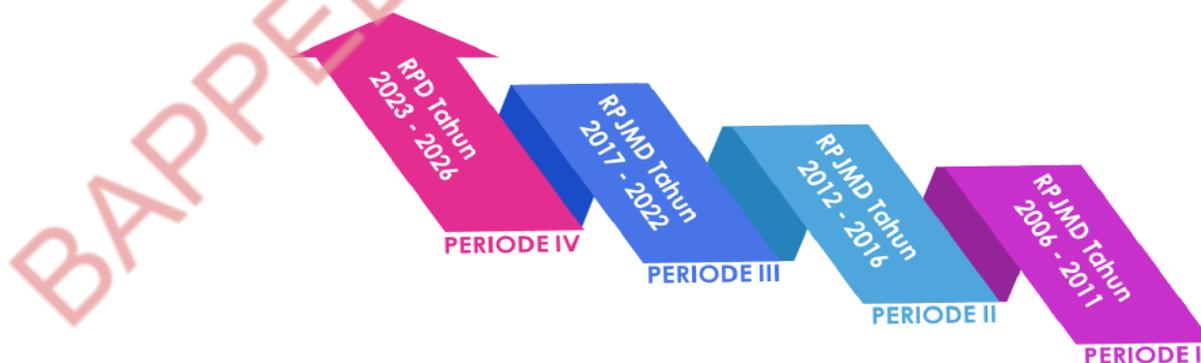
No.	Isu	Rekomendasi Kinerja	Rekomendasi Kerja
1	Akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata	Terciptanya SDM yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2	Akses dan kualitas kesehatan belum merata serta penurunan prevalensi stunting		
3	Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4	Hilirisasi produk pertanian, perkebunan, perikanan dan ketahanan Pangan	Terwujudnya Kemandirian Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan	Mengembangkan Kemandirian Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan
5	Ketersediaan air bersih yang berkualitas untuk rumah tangga dan usaha	Meningkatnya Ketahanan Daerah dengan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dengan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada konservasi lahan		
7	Konektivitas wilayah dan telekomunikasi		
8	Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berdampak Meningkatkan	Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Berdampak

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029

2.13 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kobar 2017-2022.

Berikut merupakan periode tahun perencanaan jangka menengah yang dibagi dalam 20 tahun perencanaan jangka panjang daerah:



Gambar 2. 11 Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025

Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Gambaran diatas menunjukkan 20 tahun RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah. Dimulai dengan periode pertama yakni RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2011, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan terakhir ialah RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Poin penting yang perlu diperhatikan dari gambaran periode pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 ialah, disusunnya RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dimana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin Visi dan Misi RPJPD tercapai pada tahun 2025.

Berikut merupakan gambaran keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

- Tujuan I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif”.** Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan mandat dari Misi V dan Misi VI RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

Sebagai upaya mencapai Tujuan I Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan I kedalam 4 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri;
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah;
- Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata; dan
- Meningkatnya Kemandirian Desa



Gambar 2. 12 Cascading Tujuan I RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

2. Tujuan II “Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan”. Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi IV, Misi XI, dan Misi XII RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai upaya mencapai Tujuan II Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan II kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- Menurunnya Resiko Bencana; dan
- Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar.



Gambar 2. 13 Cascading Tujuan II RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

3. Tujuan III “Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis”. Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi I, Misi III, dan Misi IX RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan III Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan III kedalam 3 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
- Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat.

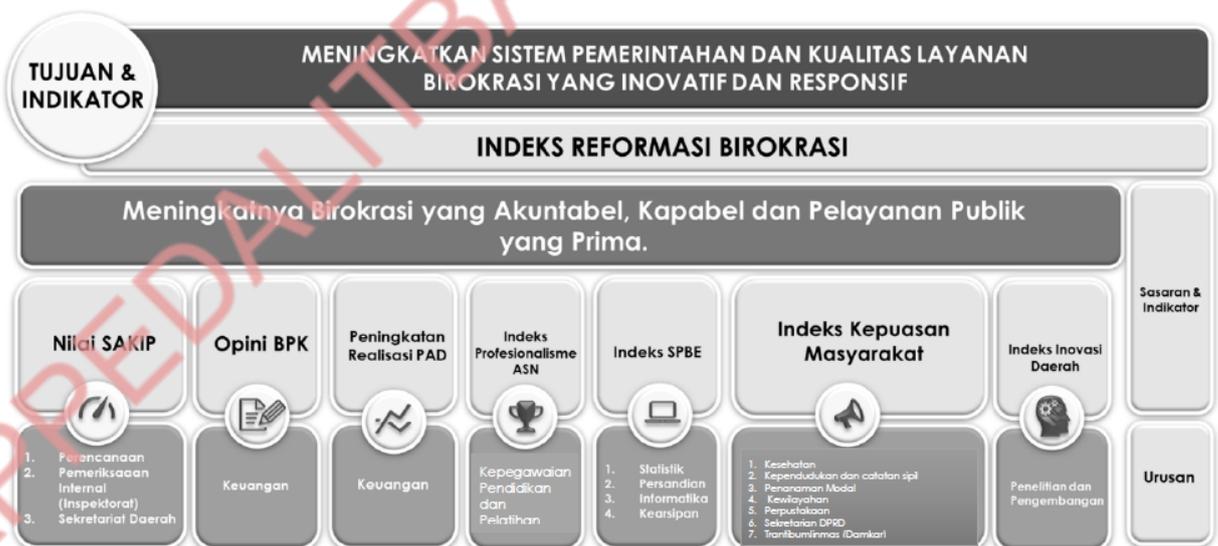


Gambar 2. 14 Cascading Tujuan III RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

4. Tujuan IV “Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”. Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi II RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan IV Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan IV kedalam 1 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.



Gambar 2. 15 Cascading Tujuan IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

5. Tujuan V “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan mandat dari Misi VII, Misi VIII, dan Misi X RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai upaya mencapai Tujuan V Kabupaten Kotawaringin Barat maka berikut diturunkan Tujuan V kedalam 2 sasaran perangkat daerah yang terdiri sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
- Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



Gambar 2. 16 Cascading Tujuan V RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

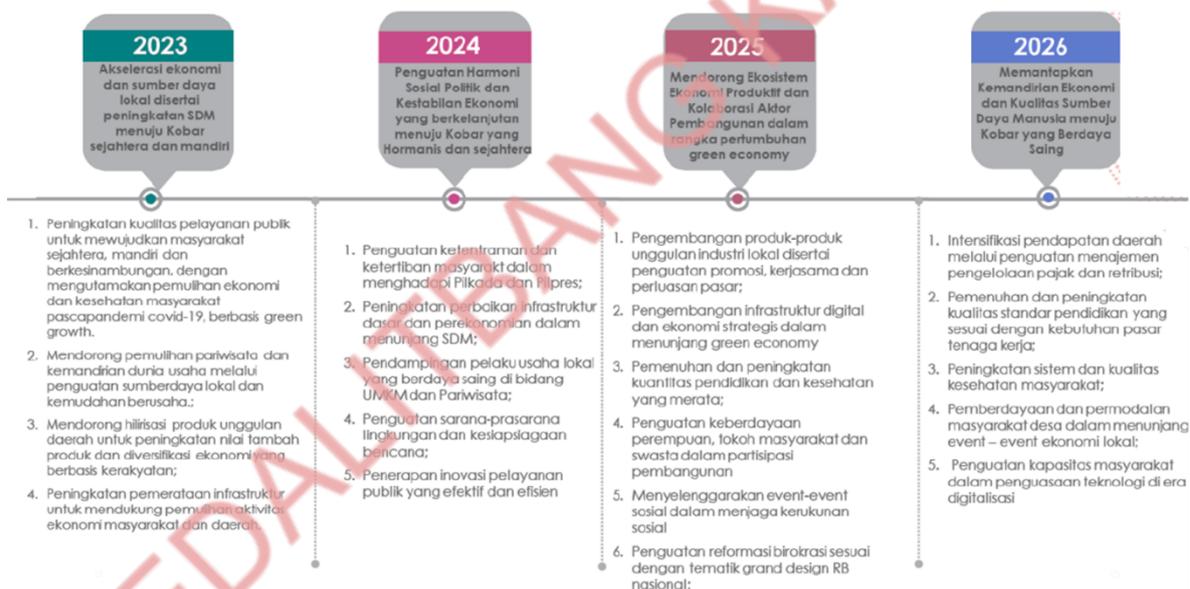
Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Tabel 2. 10 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	S.1.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	ST.1 Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa
	S.1.2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah	
	S.1.3 Meningkatnya daya tarik pariwisata	
	S.1.4 Meningkatnya kemandirian desa	
T.2. Meningkatkan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas yang berwawasan lingkungan	T.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	ST.2 Optimalisasi proses rehabilitasi lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas manajemen lingkungan hidup
	T.2.2 Menurunnya resiko bencana	
	T.2.3 Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar	ST.3 Meningkatkan kualitas infrastruktur Kabupaten melalui pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian pada sektor unggulan
T.3. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis	S.3.1 Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	ST.4 Menciptakan stabilitas sosial melalui pemberdayaan untuk menekan tingkat pengangguran dan jumlah PMKS
	S.3.2 Menurunnya tingkat pengangguran	
	S.3.3 Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	5.4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima	ST.5 Pembangunan reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi
T.5. Meningkatkan kualitas SDM	5.5.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	ST.6 Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota waringin Barat
	5.5.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	ST.7 Optimalisasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan sosial layak dan ramah terhadap anak

Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



Gambar 2. 17 Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

2.14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2037

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Arahan
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKW meliputi Kota Pangkalan Bun, ▪ PKL meliputi Kumai, ▪ PPK meliputi Ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng, Ibukota Pangkalan Lada, Ibukota Kotawaringin Lama dan Ibukota Arut Utara, ▪ PPL meliputi semua desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	
a. sistem jaringan transportasi darat	<p>jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Jaringan jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan arteri primer, jalan lintas kalimantan poros selatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Provinsi Kalimantan Barat – Kudangan – Penopa – Kujan – Simpang Runtu sepanjang 199,51 km; 2. Jalan Ahmad Yani (Pangkalan Bun), Jalan Pakunegara (Pangkalan Bun), Jalan Akses Palabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) sepanjang 17,82 km; 3. Batas KotaPangkalan Bun – Pangkalan Lada – Asam Baru. b. Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi : Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 km c. jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi : Batas Kota Pangkalan Bun – Kumai, jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Iskandar, sepanjang 16,5 km. d. jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi : Riam Durian – Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun sepanjang 60,5 km, Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai sepanjang 256,9 km, Natai Raya – Kumai sepanjang 12 km, Sungai Kapitan – Kubu, Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – batas Seruyan sepanjang 98,93 km, Iskandar – Bandar Udara Iskandar, Iskandar – Sungai Tendang, sepanjang 15 km dan Alternatif Ring Road Kota Pangkalan Bun; e. jaringan jalan khusus, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. ruas jalan khusus Nanga Mua – Semanggang, sepanjang 53,42 km;

Kebijakan	Arahan
	<p>2. ruas jalan khusus Rangda – Sei Rangit Jaya, sepanjang 51,80 km;</p> <p>3. ruas jalan khusus Semanggang – Pabrik Pulp, sepanjang 18,80 km;</p> <p>4. ruas jalan khusus Semanggang – Sei Rangit Jaya, sepanjang 25,90 km;</p> <p>5. ruas jalan khusus Sei Rangit Jaya – Bumiharjo, sepanjang 8,43 km; dan</p> <p>6. ruas jalan khusus jalan masuk dari Seruyan, sepanjang 39 km.</p> <p>f. jaringan jalan menuju pelabuhan, bandara, ibukota kecamatan dan jalan alternatif lingkar kota di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebar antara 60 sampai dengan 100 meter.</p> <p>Jaringan prasarana lalu lintas meliputi:</p> <p>a. Terminal penumpang Tipe A Pangkalan Bun pada Bundaran GM Arsyad pangkalan Bun</p> <p>b. Terminal penumpang tipe C berlokasi di Desa Natai Suka terletak di Pangkalan Bun;</p> <p>c. Pengembangan terminal penumpang tipe C untuk mendukung fungsi PPK berlokasi di Kotawaringin Lama;</p> <p>d. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Simpang Runtu, Amin Jaya, dan Kumai;</p> <p>e. pembangunan terminal penumpang tipe C berlokasi di Pangkut;</p> <p>f. pembangunan terminal barang meliputi terminal kendaraan muatan barang berlokasi disekitar pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan terletak di Kumai;</p> <p>g. pembangunan jembatan timbang muatan berada di Simpang Runtu</p> <p>Jaringan pelayanan terdiri atas : jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi :</p> <p>a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palangka Raya – Pangkalan Bun – Nanga Bulik – Pontianak; 2. Pangkalan Bun – Sukamara – Ketapang – Pontianak; 3. Pangkalan Bun – Lamandau – Ketapang. <p>b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palangka Raya - Pangkalan Bun; 2. Kasongan - Pangkalan Bun; 3. Sampit - Pangkalan Bun; 4. Kuala Pembuang - Pangkalan Bun; 5. Pangkalan Bun – Nanga Bulik. 6. Pangkalan Bun – Sukamara. <p>c. angkutan barang meliputi : angkutan barang dari Pelabuhan Panglima Utar menuju Terminal Barang Sungai Kapitan.</p> <p>jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>a. jaringan angkutan sungai dan danau meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Sungai Arut : Raja/Pangkalan Bun – Mendawai Seberang – Tanjung Putri 3. Sungai Kumai : Kumai – Pangkalan Banteng; 4. Sungai Belantika : Bayat – N. Belantika 5. Sungai Lamandau : Tapin Bini – N. Belantika – N. Bulik – Kotawaringin Lama – Mendawai Seberang. <p>b. jaringan angkutan penyeberangan meliputi Kumai – Kendal di Jawa Tengah (lintas penghubung sabuk);</p>
<p>b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi.</p> <p>a. Jaringan jalur kereta api lintas utama provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan prioritas tinggi dan dititik beratkan pada angkutan barang terdiri atas:</p>

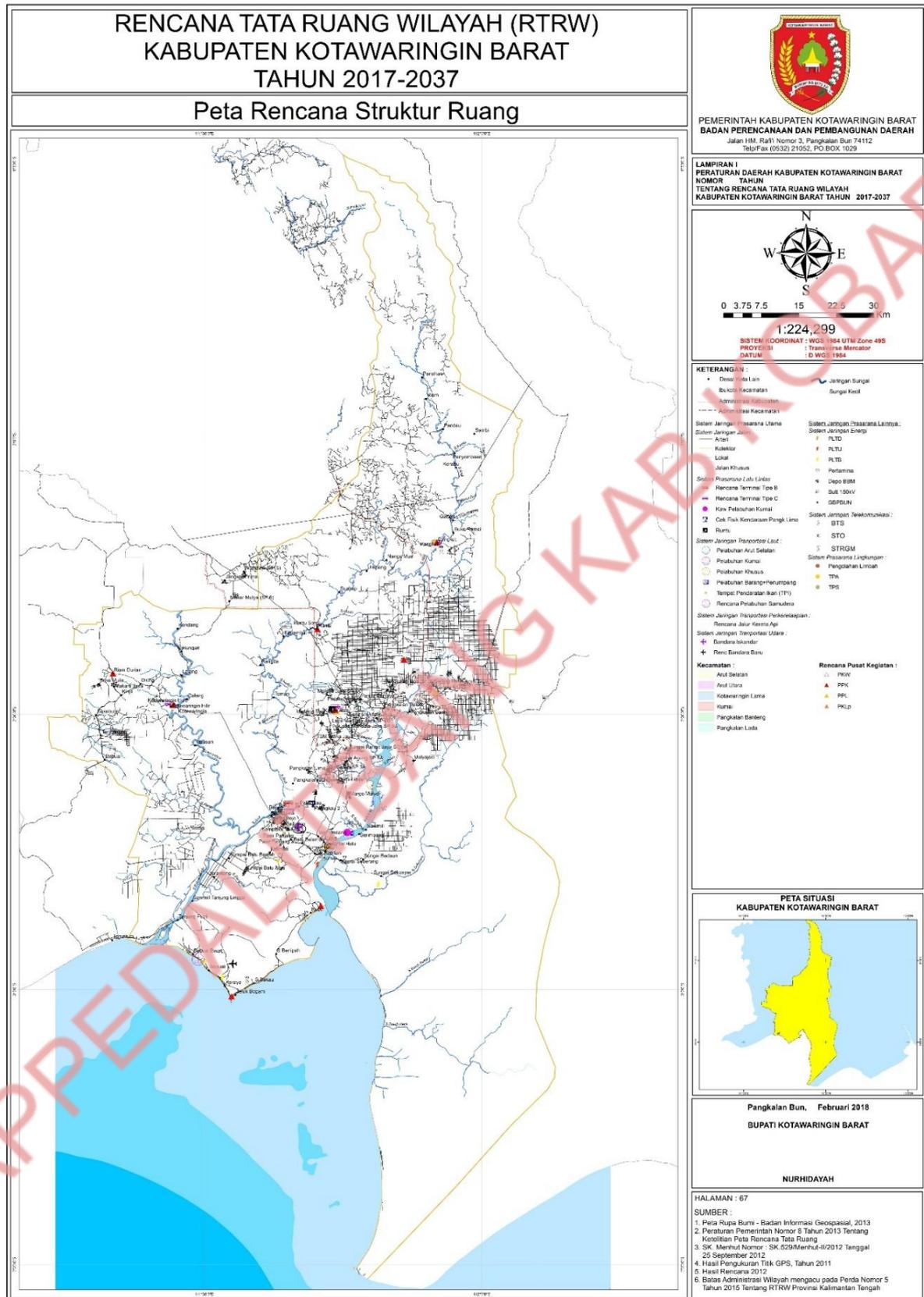
Kebijakan	Arahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem jaringan jalur kereta api utama provinsi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; b) Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai. 2. Sistem jaringan jalur kereta api antar kota dengan prioritas rendah meliputi : Ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya - Sampit – Pangkalan Bun - Sanggau 3. Simpul jaringan jalur kereta api barang di Kalimantan Tengah meliputi : perkotaan Pangkalan Bun dan Kumai.
<p>c. sistem jaringan transportasi laut</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tatanan kepelabuhan terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelabuhan Kumai berada di Kecamatan Kumai. b) Pelabuhan Pangkalan Bun berada di Kecamatan Arut Selatan. 2. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan khusus, Pelabuhan Tanjung Kalap berada di Bumiharjo Kecamatan Kumai. 3. Rencana pengembangan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan angkutan barang dan perumpang ke luar pulau, pelabuhan ro-ro berada di Kecamatan Kumai. 4. Pelabuhan Perikanan merupakan pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kecamatan Kumai. 5. Rencana pengembangan pelabuhan laut dalam di Sebuai atau Tanjung Pandan Kecamatan Kumai. 6. Tatanan kepelabuhan harus menjaga ungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan instalasi militer TNI AL b. Alur pelayaran, alur pelayaran nasional terdiri atas Kumai – Semarang, Kumai – Surabaya, Kumai – Jakarta, Pangkalan Bun – Semarang, Pangkalan Bun – Surabaya; dan Pangkalan Bun – Jakarta.
<p>d. sistem jaringan transportasi udara</p>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tatanan kebandarudaraan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bandar Udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Udara Iskandar di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Rencana pembangunan bandara baru internasional/nasional meliputi : di Desa Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Ruang udara untuk penerbangan meliputi: ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya	
<p>a. rencana sistem jaringan energi</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangkit tenaga listrik, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pangkalan Bun dan Kumai; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat;

Kebijakan	Arahan
	<p>4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Kotawaringin Barat;</p> <p>b. Pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan transmisi tegangan menengah/tinggi, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan jaringan transmisi udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai, Pangkalan Bun - Nanga Bulik. 2. Perluasan pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah dari gardu induk menuju pusat – pusat beban di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. perluasan jaringan transmisi tegangan rendah dari jaringan distribusi ke wilayah pemukiman berada di seluruh kabupaten Kotawaringin Barat 4. pembangunan kabel bawah laut dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kearah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kumai. <p>c. Gardu Induk (GI) merupakan pembangunan Gardu Induk (GI) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan</p> <p>d. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) meliputi depo bahan bakarminyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>
<p>b. rencana sistem jaringan telekomunikasi</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri atas :</p> <p>a. Sistem jaringan telekomunikasi tetap termasuk sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan kabupaten, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem jaringan stasiun telepon otomatis (STO) berada di STO Pangkalan Bun; dan 2. sistem jaringan fiber optic (FO) yang terhubung antara Banjarmasin – Kapuas – Pulang Pisau - Palangka Raya – Kasongan – Sampit - Pangkalan Bun. <p>b. Sistem jaringan stasiun radio gelombang mikro (STRGM) di Pangkalan Bun;</p> <p>c. Persebaran menara Base Transceiver Station (BTS) yang diatur dalam cell planning/site name dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan sesuai kaidah penataan ruang wilayah, kamuflase dan keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.</p>
<p>c. rencana sistem sumberdaya air</p>	<p>Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas :</p> <p>a. Wilayah sungai, terdiri atas :</p> <p>wilayah sungai lintas provinsi termasuk wilayah sungai (WS) Jelai – Kendawangan yang meliputi DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai;</p> <p>wilayah sungai lintas wilayah kabupaten meliputi DAS Buluh Kecil, DAS Cabang.</p> <p>b. Danau dan bendungan. Danau meliputi : Danau Gatal, Danau Asam, Danau Seluluk, Danau Masorayan, Danau Sulung, Danau Bakobut, Danau Sekonyer, Danau Purun, Danau Batang Pagar, Danau Liu, Danau Kandang ; sedangkan bendungan meliputi : Bendung Bengaris, Bendung Mulyajadi, Bendung Suka Mulya, Bendung Karanganyar, Bendung Palih Baru dan Bendung Sungai Tendang (Rawa) di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>c. Daerah irigasi (DI), terdiri atas:</p>

Kebijakan	Arahan
	<p>Daerah Irigasi kewenangan provinsi di Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan (Luas Pelayanan 1.500 hektar)</p> <p>Daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten berada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DI Sagu – Kondang (Luas Pelayanan 300 Ha); 2. DI Mulya Jadi (Luas Pelayanan 200 Ha); 3. DI Sei Bamban (Luas Pelayanan 297 Ha); 4. DI Pangkalan Satu (Luas Pelayanan 100 Ha); 5. DI Sei Tendang (Luas Pelayanan 600 Ha); 6. DI Modang Mas (Luas Pelayanan 122 Ha); 7. DI Palih Baru (Luas Pelayanan 300 Ha); <p>d. Daerah Rawa (DR), terdiri atas: daerah rawa kewenangan provinsi dengan luas pelayanan 5.000 hektar (5 lokasi) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daerah rawa (DR) Mendawai/Tatakan Pialon 1.000 Ha 2. daerah rawa (DR) Raja Seberang luas pelayanan 1.000 Ha 3. daerah rawa (DR) Mendawai Seberang luas pelayanan 1.000 Ha 4. daerah rawa (DR) Teluk Pulau luas pelayanan 1.000 Ha; 5. daerah rawa (DR) Sekonyer luas pelayanan 1.000 Ha. <p>daerah rawa kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas pelayanan 16.895 hektar (48 lokasi) meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kotawaringin Lama.</p> <p>e. Penanganan pantai, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Kubu, pantai sei bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, Pantai dan Pantai Teluk Bogam).</p> <p>f. Pengendalian banjir, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasional dan pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir meliputi pengendalian banjir dan pengamanan longsoran tebing sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional seperti WS Jelai – Kendawangan meliputi DAS Arut dan DAS Kumai;</p>
Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	
a. Sistem jaringan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) di setiap kecamatan dan atau fasilitas umum serta tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Pangkalan Bun; b. penyediaan kolam lindi di zona non aktif yang menampung air lindi dari zona non aktif ,dan kolam lindi di zona aktif yang menampung air lindi dari sampah zona aktif; c. penyediaan 3 (tiga) unit sumur pantau di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di bagian hilir, di lingkungan TPA dan di bagian hulu; d. dalam pengolahan pemrosesan akhir menggunakan sistem sanitary landfill; e. sistem sanitary landfill sebagaimana dimaksud pada huruf c harus ditempatkan di bawah air tanah agar tidak dapat menimbulkan polusi air, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta wabah penyakit; f. teknologi pengolahan sampah mengacu skala prioritas pada pengolahan sampah organik seperti proses bio fertilized, memaksimalkan sistem Reuse, Recycle, Reduce (3R).
b. Sistem jaringan drainase	Prasarana sistem jaringan drainase dengan menyempurnakan dan menata prasarana lingkungan perkotaan, permukiman, lingkungan pusat jasa, dan

Kebijakan	Arahan
	<p>lingkungan perdesaan termasuk peningkatan kualitas dan pembangunan saluran drainase.</p> <p>Sistem drainase tersebut merupakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; b. Sistem jaringan drainase disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada, dan tingkat peresapan air ke dalam penampang atau profil tanah, serta arah aliran dengan memanfaatkan topografi wilayah; c. Pemeliharaan kelestarian sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungai dan konservasi sempadan sungai.
<p>c. Sistem jaringan air minum</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pengelolaan air minum yang meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap hari sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Air permukaan meliputi DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Sungai Hijau, DAS Sungai Nyirih, beserta anak sungai dan danau lainnya; 2. Air yang potensial tersebar pada beberapa cekungan air tanah berada di wilayah Kotawaringin Barat dengan terdapat 9 titik. b. instalasi pengolahan air minum berada di Pangkalan Bun, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Desa Kumpai Batu Atas, dan Kecamatan Pangkalan Banteng; c. prasarana sistem jaringan air minum termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) dengan sistem perpipaan dengan kapasitas 200 Liter/detik, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan kebutuhan air minum di pusat kegiatan/aktivitas di sepanjang jalan utama; 2. penyediaan kebutuhan air minum di pusat pengembangan wilayah, meliputi kawasan di sekitar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan 3. penyediaan kebutuhan air minum di kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa.
<p>d. Rencana sarana umum dan sosial</p>	<p>Rencana pengembangan sarana umum dan sosial penataannya dilaksanakan secara bertahap melalui peraturan daerah tersendiri.</p>
<p>e. Sistem jaringan air limbah</p>	<p>Prasarana sistem jaringan pengolahan air limbah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem pengolahan air limbah setempat (<i>on-site system</i>); b. sistem pengolahan air limbah terpusat.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037



Gambar 2. 18 Peta Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut arahan rencana pola ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 12 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Kebijakan	Arahan
<p>Kawasan Lindung</p>	<p>a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan bergambut tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai; ▪ kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 182,74 hektar tersebar di Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan. <p>b. kawasan perlindungan setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan sempadan pantai dengan batas minimum 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan panjang pantai kurang lebih 304 kilometer sehingga luas perlindungan sempadan pantai kurang lebih 2.309 hektar; ▪ kawasan sempadan sungai 100 meter dari kiri dan kanan sungai besar, dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai melalui lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10 sampai dengan 50 meter ke kiri kanan sungai luas sempadan sungai kurang lebih 201 kilometer persegi; ▪ kawasan sempadan danau dengan lebar 50 meter sampai 100 meter dari bibir danau ke arah darat meliputi Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal, Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama; ▪ kawasan lindung spiritual berada di Air Terjun Patih Mambang Desa Keraya Kecamatan Kumai ;dan ▪ kawasan kearifan lokal lainnya meliputi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai. <p>c. kawasan suaka alam, perlindungan alam dan cagar budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan suka alam meliputi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 248.298 hektar dan Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.551 hektar ▪ kawasan pelestarian alam meliputi Suaka Margasatwa Sungai Lamandau dan Suaka Alam Laut seluas kurang lebih 30.453 hektar ; ▪ kawasan cagar budaya meliputi Istana Kuning atau Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam Kyai Gede Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi di Kecamatan Arut Utara. <p>d. kawasan lindung geologi</p> <p>Kawasan sekitar mata air, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Kumai panjang kurang lebih 175 km (kilometer); ▪ Sungai Lamandau panjang kurang lebih 325 km (kilometer) dan Sungai Arut panjang kurang lebih 250 km (kilometer) <p>e. kawasan rawan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan gelombang pasang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Tanjung Pengujan sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai; ▪ kawasan rawan banjir meliputi Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Rangda, Desa Sulung, Desa Kenambui, Desa Umpang, Desa Tanjung Terantang Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja Seberang di Kecamatan

Kebijakan	Arahan
	<p>Arut Selatan sedangkan Desa Lalang, Desa Rungun dan Desa Kondang di Kecamatan Kotawaringin Lama;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; <p>f. kawasan lindung lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan perlindungan plasma nutfah seluas kurang lebih 87,6 ha meliputi daerah sekitar Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), daerah sekitar Suaka Margasatwa Sungai Lamandau (SMSL) dan daerah sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang; ▪ kawasan perlindungan terumbu karang seluas kurang lebih 467 ha berada di perairan laut di dekat Gosong Senggora dan Sepagar Kecamatan Kumai; ▪ kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut seluas kurang lebih 67.872 ha yang di lindungi pada perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat di Kecamatan Kumai; ▪ kawasan pantai hutan bakau seluas kurang lebih 101 ha berada di sepanjang Sungai Mambang Desa Kubu sampai Desa Sungai Bakau terletak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ kawasan taman hutan kota seluas kurang lebih 4.4 hektar berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. ▪ kawasan konservasi perairan sungai atau danau seluas 16.482 hektar meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • kawasan konservasi perairan Sungai Arut di Sungai Desa Panahan seluas kurang lebih 1.500 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas kurang lebih 200 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas kurang lebih 1.500 hektar; • kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas kurang lebih 250 hektar; dan • kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.
<p>Kawasan Budidaya</p>	<p>a. kawasan peruntukan hutan produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 5.397 hektar; ▪ kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 253.178 hektar; dan ▪ kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas ± 147.866 hektar <p>b. kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas ± 478,5 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis</p> <p>c. kawasan peruntukan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai; ▪ Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 9.469 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai; ▪ Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 21.288 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut <p>d. kawasan peruntukan perikanan seluas ± 11.496 hektar, terdiri atas :</p>

Kebijakan	Arahan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas ± 3.930 hektar meliputi perairan laut dan perairan umum (sungai, danau dan rawa) ▪ Kawasan peruntukan budidaya perikanan seluas ± 7.541 hektar, terdapat di wilayah darat dan pesisir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ budidaya keramba jaring apung pada kawasan Desa Kubu, Sei Penyimping ke arah TWA Tanjung Keluang; ○ budidaya teripang dan rumput laut berada di Desa Sungai Bakau dan Desa Teluk Bogam; ○ budidaya air payau ditambak meliputi kawasan Sungai Ratik Desa Sungai Bakau, kawasan Teluk Ranggau dan Sungai Gumpang di Desa Sungai Cabang Timur dan kawasan Desa Tanjung Putri; dan ○ budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari Tanjung Kalap sampai Desa Sebukat. • kawasan budidaya air tawar meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ keramba jaring apung meliputi kawasan Karang Anyar sampai Danau Seluluk di Sungai Lamandau dan dari Sungai Tembaga sampai Sungai Bungur di Sungai Arut; ○ kolam ikan meliputi kawasan Desa Natai Kerbau di Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Sagu di Kecamatan Kotawaringin Lama keramba ikan meliputi kawasan Desa Runtu, Desa Kenambui dan Kelurahan Kotawaringin Hulu. • kawasan budidaya ikan di rawa meliputi Desa Sebuai, Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang. e. kawasan peruntukan pertambangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari Kawasan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan nasional (WPN), wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. ▪ Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di Kabupaten Kotawaringin Barat f. kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.580 ha, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (sentra IKM) tersebar diseluruh Kabupaten Kotawaringin Barat. ▪ Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (mulai dari Kawasan Industri Tanjung Kalap, Kawasan Industri Natai Peramu, Kawasan Industri Tempenek seluas ±146 ha dan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah Sebuai) g. kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 25 ha, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan wisata budaya di Kecamatan Arut selatan berupa istana kuning, istana mangkubumi, kolam pemandian putri raja dan makam raja kutaringin yang terletak di tengah Kota Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama berupa istana Al -Nursari, Masjid Kyai Gede dan makam Kyai Gede; ▪ kawasan peruntukan wisata alam di Kecamatan Kumai berupa Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, TWA Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air Terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Danau Naruhum, Sungai Sekonyer, dan kawasan wisata sungai Buluh Besar;

Kebijakan	Arahan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan wisata buatan berupa kawasan taman hiburan rakyat Pangkalan Bun Park h. kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 28.477 hektar terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Pangkalan Bun, Kotawaringin, Pandu Sanjaya, Karang Mulya, Kumai, Pangkut; ▪ kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa di Kabupaten Kotawaringin Barat i. kawasan peruntukan lainnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Hutan Kawasan Tertentu Untuk Latihan Militer (HKT-M) seluas kurang lebih 24.440 hektar yang berada di dalam kawasan hutan pada Kecamatan Kumai; ▪ kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 16.014 hektar yang tersebar di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada; ▪ kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Komando Distrik Militer (KODIM)-1014/ berada di Pangkalan Bun terletak di Kecamatan Arut Selatan; • Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di 6 (enam) Kecamatan terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat • Lanud TNI-AU tipe “D” berada di Pangkalan Bun seluas kurang lebih 3.006 Ha. ▪ kawasan peruntukan evakuasi bencana tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat; ▪ kawasan peruntukan kantor pemerintahan dicadangkan seluas 3.000 ha di Jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin; ▪ kawasan pengembangan perumahan pemerintah daerah di Pangkalan Lima Kecamatan Arut Selatan; ▪ kawasan peruntukan bangunan sarang burung walet diarahkan ke sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kumai. ▪ Kawasan pengembangan Bandara Baru Pangkalan Bun di Desa Sebuai ▪ Kawasan pengembangan Pelabuhan Laut Dalam di Desa Sebuai dan Tanjung Pandan

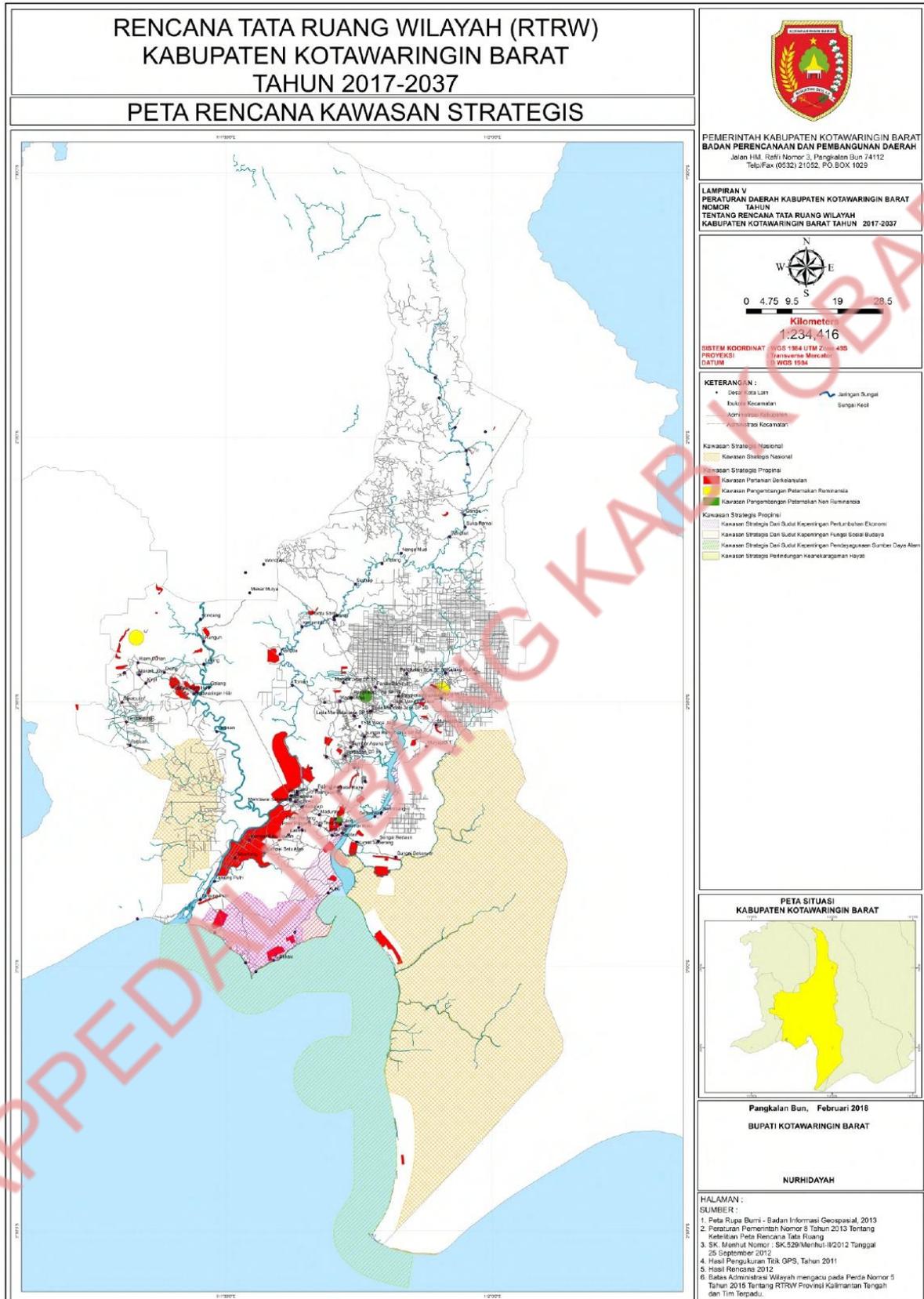
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037

Berikut arahan kawasan strategis Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2. 13 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat

Kawasan Strategis	Arahan
Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di Kabupaten Kotawaringin Barat b. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berada di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangan berada di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada dan ayam dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan perkebunan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada; 2. perkebunan karet berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada; 3. perkebunan lada berada di Kecamatan Pangkalan Lada; 4. perkebunan jagung berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. b. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara berupa kawasan sentra produksi berada di Pangkalan Bun – Kumai, kawasan sentra produksi Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), kawasan sentra produksi Pangkut, kawasan pelabuhan meliputi : pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumiharjo dan pelabuhan Ro-ro berada di Kecamatan Kumai, Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun dan rencana pembangunan Bandar Udara baru berada di Desa Sebuai serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Sebuai; c. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi 2. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi. d. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan / pusat pengembangan dan pengolahan ikan laut berada di Kecamatan kumai dengan komoditi unggulan adalah udang; e. kota terpadu mandiri di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan. <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar bangunan kerajaan atau kesultanan di Pangkalan Bun dan di Kecamatan Kotawaringin Lama.</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, yaitu di kawasan andalan laut yang berada di perairan laut sepanjang garis pantai</p> <p>Kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati, meliputi Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, Taman Margasatwa Sungai Lamandau, Catchment Area DAS Arut dan Catchment Area DAS Kumai.</p>

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037



Gambar 2. 20 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat

2.15 **DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024-2044**

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, agroindustri, dan pariwisata.

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten maka disusun **kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten** yang meliputi:

- a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- b. penetapan pusat permukiman melalui pendekatan pengembangan Wilayah dan dukungan infrastruktur sebagai upaya pemerataan pertumbuhan antar Wilayah;
- c. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan potensi kehutanan yang berkelanjutan;
- e. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya perikanan sepanjang sungai dan pesisir selatan dengan tetap menjaga lingkungan;
- f. pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- g. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.

Strategi penataan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut.

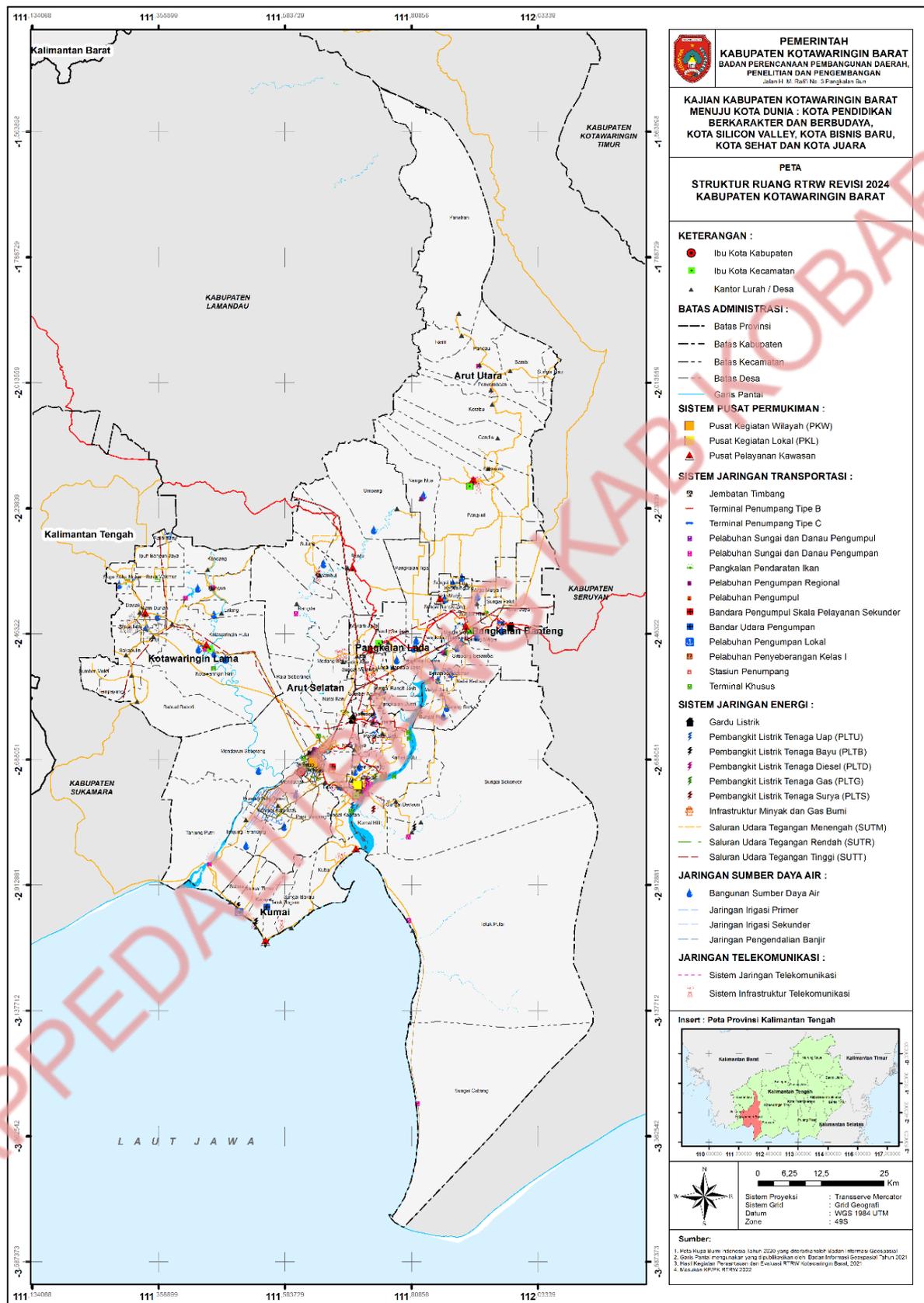
- a. Strategi dalam pengaturan keseimbangan pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan, meliputi:
 - 1) memastikan tata batas Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dalam rencana pemanfaatan Ruang dan investasi;
 - 2) mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah;
 - 3) mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
 - 4) membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - 5) mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

- 6) mengembangkan perencanaan dan penataan Kawasan yang adaptif terhadap bencana dan risiko perubahan iklim;
 - 7) menerapkan ketentuan mengenai pengendalian konflik pemanfaatan Ruang serta pemanfaatan prasarana dan sarana penunjang antar sektor unggulan;
 - 8) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - 9) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - 10) pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan perkotaan, meliputi:
 - a) mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat di Kawasan Perkotaan;
 - b) intensifikasi RTH yang telah ada; dan
 - c) mengoptimalkan lahan-lahan potensial sebagai RTH.
- b. Strategi dalam penetapan pusat permukiman melalui pendekatan pengembangan Wilayah dan dukungan infrastruktur sebagai upaya pemerataan pertumbuhan antarwilayah, meliputi:
- 1) mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional melalui penetapan dan pengoptimalan pusat permukiman dengan memperhatikan fungsi utamanya;
 - 2) mendorong terselenggaranya pengembangan Kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan pedesaan sebagai satu kesatuan Wilayah perencanaan;
 - 3) meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang meningkatkan keterkaitan antar pusat permukiman, serta pusat permukiman dengan Wilayah sekitarnya;
 - 4) mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya;
 - 5) pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan memperhatikan karakteristik Kawasan perdesaan;
 - 6) mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - 7) mengembangkan sarana prasarana perhubungan sebagai pintu gerbang Kabupaten guna mengoptimalkan potensi Wilayah; dan
 - 8) mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam Kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya.

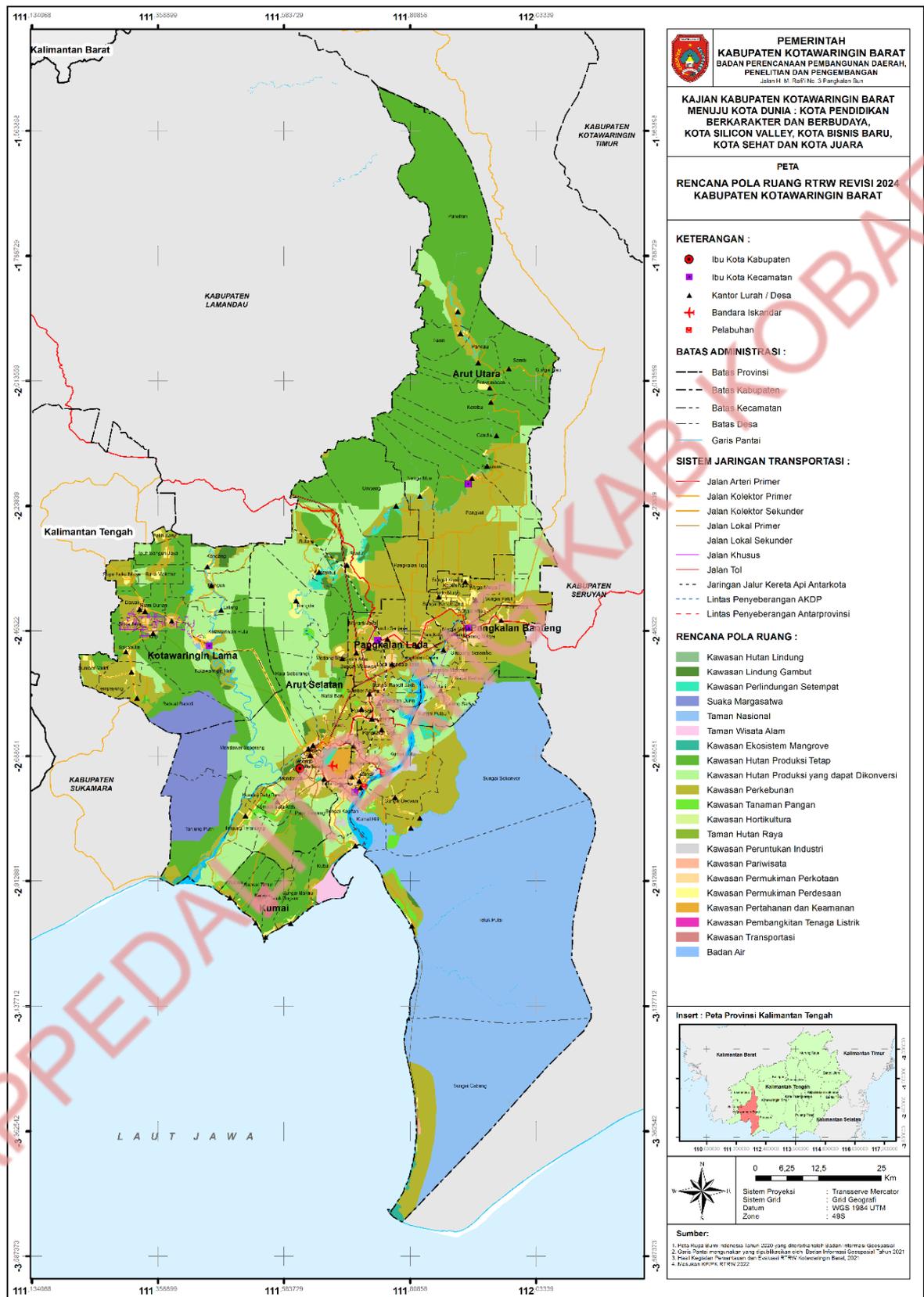
- c. Strategi dalam pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan, meliputi:
- 1) menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - 2) mendorong pengembangan perkebunan rakyat yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik Wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan;
 - 3) mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan Kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agrobisnis);
 - 4) membentuk kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan yang lebih profesional;
 - 5) meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih efektif; dan
 - 6) mewujudkan sistem agroindustri terpadu dari hulu sampai hilir demi peningkatan ekonomi masyarakat.
- d. Strategi dalam pengembangan potensi kehutanan yang berkelanjutan, meliputi:
- 1) mendorong terselenggaranya pembangunan dan pengelolaan Kawasan dengan tetap menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
 - 2) mengoptimalkan fungsi Kawasan hutan sesuai dengan kondisinya, karakter, dan fungsi ekosistemnya;
 - 3) mengendalikan pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutannya; dan
 - 4) mengendalikan perubahan peruntukan Kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.
- e. Strategi dalam pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya perikanan sepanjang sungai dan pesisir selatan dengan tetap menjaga, meliputi:
- 1) mendorong pengembangan potensi sumber daya perikanan yang produktif, efektif dan efisien bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta pembangunan

- berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas dan utilitas, pembinaan, serta peningkatan sumber daya manusia di sektor perikanan;
- 2) meningkatkan akses bagi penyediaan permodalan dan pembinaan usaha di sektor perikanan; dan
 - 3) mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjadikan kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir dan disekitar sungai.
- f. Strategi dalam pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) mengoptimalkan kegiatan pariwisata ekologis sebagai pengembangan daya tarik wisata alam;
 - 2) melestarikan budaya lokal dan Kawasan sekitar bangunan kerajaan/kesultanan sebagai pengembangan daya tarik wisata budaya;
 - 3) mengembangkan daya tarik wisata buatan guna mendukung kegiatan sektor unggulan pariwisata;
 - 4) menyediakan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional;
 - 5) meningkatkan promosi potensi dan daya tarik wisata dengan skala nasional dan internasional yang lebih efektif; dan
 - 6) menjalin dan meningkatkan kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan pengelolaan cagar alam laut kawasan lindung nasional Taman Nasional Tanjung Puting, Suaka Margasatwa Lamandau, dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang untuk mempertahankan fungsi Kawasan Lindung.
- g. Strategi dalam peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi:
- 1) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - 2) mengembangkan budidaya baik didalam kawasan maupun diluar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukan secara selektif;
 - 3) menjaga kawasan lindung dan kawasan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - 4) mendukung, turut serta, memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.

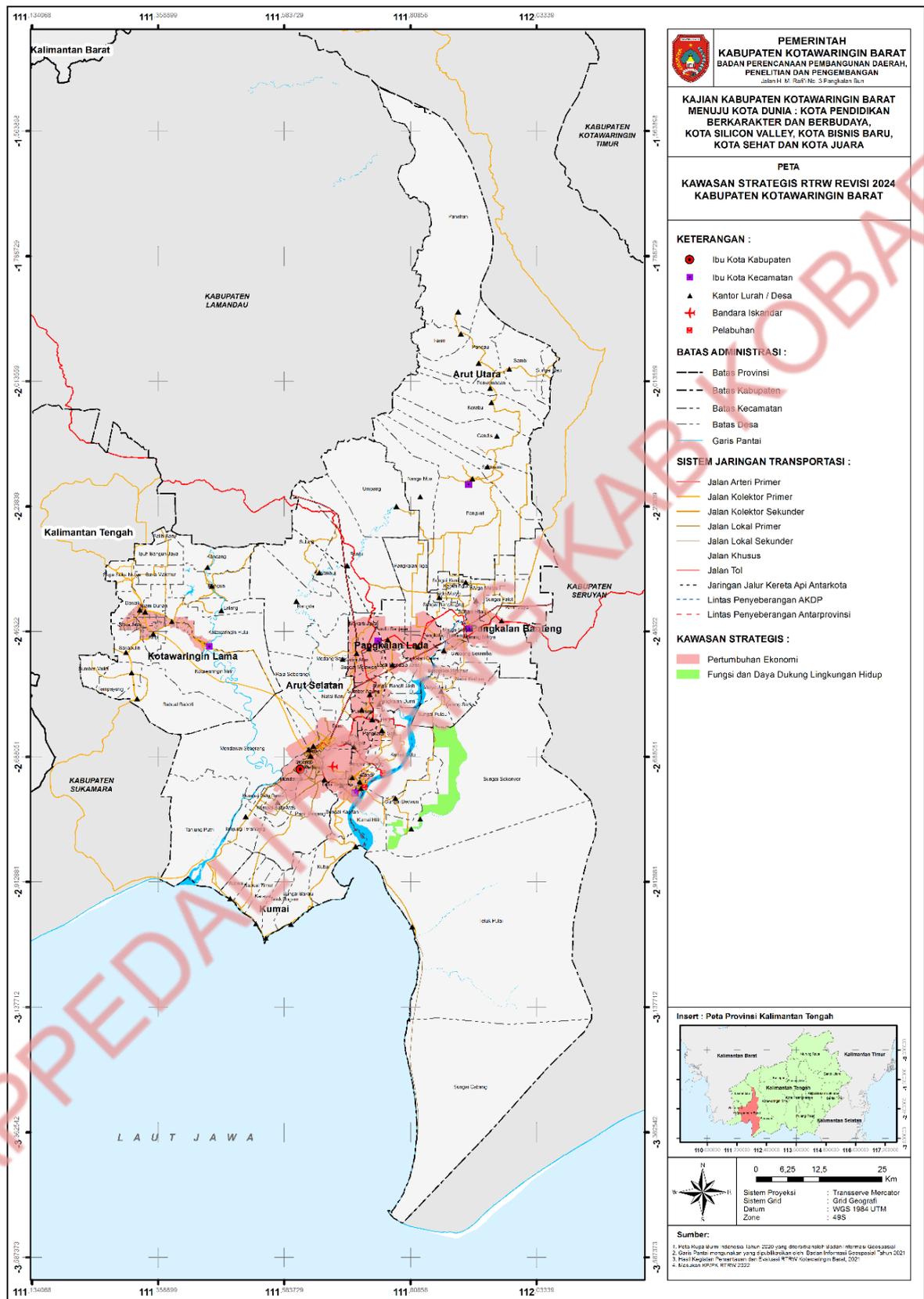
Berikut arahan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten Kotawaringin dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. 21 Peta Rencana Struktur Ruang Revisi Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2. 22 Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2. 23 Peta Rencana Kawasan Strategis Revisi Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Barat

2.16 STUDI TERDAHULU

Berikut arah kebijakan beberapa studi yang pernah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang relevan dengan Kajian Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia: Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, Dan Kota Juara.

Tabel 2. 14 Studi Terdahulu Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
1	Dokumen Kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat	Strategi- strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meliputi: 1. Memperbaiki program perlindungan sosial. 2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. 4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
2	Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2028	Rekomendasi Generik 1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Strategi Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 6. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana 7. Strategi Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
3	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024	Visi Pembangunan Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: “Akses Air Minum Layak dan Aman Berkelanjutan Untuk Semua Mendukung Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan” Adapun Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Tahun 2025-2029 antara lain adalah : 1) Peningkatan akses airminum layak dan aman bagi seluruhmasyarakat di perkotaan melalujaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan • Pengembangan pelayanan SPAM diwilayah perkotaan disertai dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PDAM dan Pamdes /Pamsimas. • Pengembangan SPAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku yang dapat menjamin, dengan strategi : • Meningkatkan konservasi wilayah daerah aliran sungai dan perlindungan sumber air baku. • Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan dan dapat diandalkan • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. 3) Peningkatan kapasitaskelembagaan serta peningkatan Profesionalisme PDAM Melalui peningkatan kapabilitas/keterampilan pegawai, termasuk menyusun SOP yang diperlukan, dengan strategi : • Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusi (SDM) dalam Pengembangan SPAM • Memperkuat peran dan fungsi dinas / instansi / SKPD dalam Pengembangan SPAM.

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan <p>4) Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal sehingga mampu mengejar sasaran peningkatan 100% akses layak dan 15% akses aman, dengan strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan financialinternal Penyelenggara SPAM. • Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Pengembangan SPAM, <p>5) Pengembangan dan penerapan peraturan perundangan tentang SPAM sesuai kebutuhan daerah, dengan strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi dan menerapkan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
4	<p>Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 2045</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan dan Strategi KLHS RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 :</p> <p>1. Menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemerataan sarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jangkauan pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana kesehatan pada lokasi yang sesuai tata ruang dan sesuai daya dukung lingkungan, - Menyediakan ruang terbuka hijau - Menyediakan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan limbah B3, sumur resapan dan/atau biopori - Mitigasi bencana misal dengan menyediakan jalur evakuasi, ruang evakuasi, APAR, hidran kebakaran - Mendirikan bangunan sesuai aturan tata bangunan yang berlaku, dengan struktur kuat tahan bencana, dengan desain ramah lingkungan c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan profesional. d) Peningkatan akses jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat e) Peningkatan inovasi di bidang kesehatan. <p>2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerataan sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan jangkauan pelayanan. <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana pendidikan pada lokasi yang sesuai tata ruang dan sesuai daya dukung lingkungan, - Menyediakan ruang terbuka hijau - Menyediakan prasarana pendukung seperti jaringan air bersih, pengumpulan sampah, pengelolaan limbah, sumur resapan dan/atau biopori - Mitigasi bencana misal dengan menyediakan jalur evakuasi, ruang evakuasi, APAR, hidran kebakaran - Mendirikan bangunan sesuai aturan tata bangunan yang berlaku, dengan struktur kuat tahan bencana, dengan desain ramah lingkungan b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang kompeten. c. Pengembangan kurikulum pendidikan yang membentuk karakter kreatif, inovatif, dan berdaya saing <p>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan sosial masyarakat. b. Pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas c. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan lingkungan layak huni bagi MBR d. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<p>e. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung permukiman yang layak huni</p> <p>4. Membangun infrastruktur dasar yang aman, layak, inovatif dan berkelanjutan, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) Pemanfaatan energi terbarukan. Peningkatan akses jaringan transportasi ke seluruh wilayah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau Penyusunan manajemen rekayasa lalu lintas Penerapan desain struktur jalan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jaringan drainase, jaringan energi dsb <p>5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdaya saing, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan. Penciptaan lapangan usaha dengan pemberdayaan UMKM Peningkatan industri inklusif <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan bahan baku lokal - Pengelolaan limbah industri dan limbah B3, Daur ulang sampah dan limbah tidak berbahaya - Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) - Pemanfaatan sumber energi dan sumber air alternatif - Pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan - Peningkatan kualitas lingkungan sekitar industri, - Penyediaan ruang terbuka hijau - Konservasi sumber air
5	<p>Laporan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah</p>	<p>Hasil Studi EHRA di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prioritas masalah bidang sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan urutan nilai IRS tertinggi adalah parameter persampahan (nilai IRS sebesar 83-97), dan berikutnya adalah air limbah domestik (nilai IRS sebesar 78-89). Masalah sanitasi pada variabel persampahan adalah banyaknya rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, demikian juga belum dilakukannya pengelolaan sampah setempat, serta mekanisme dan frekuensi pengangkutan sampah yang masih belum teratur di masyarakat. Masalah sanitasi pada variabel air limbah domestik, kondisi yang ditemui di masyarakat adalah hampir semua jamban keluarga belum dilengkapi dengan tangki septik yang aman, yang dinyatakan dengan kondisi bahwa tidak pernah dilakukannya pengurusan/penyedotan tanki septik dalam 3-5 tahun terakhir atau lebih.
6	<p>Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2027</p>	<p>Visi sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :</p> <p>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG “BERSIH, SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2027”</p> <p>Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Air Limbah Domestik <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 1 : Memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari APBN, CSR dan masyarakat • Strategi 2 : Menyusun mandat turunan regulasi pengelolaan air limbah domestik

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Strategi 3 : Meningkatkan pengetahuan masyarakat umum terkait pengelolaan air limbah domestik • Strategi 4 : Meningkatkan akses cakupan layanan air limbah SPALDS dan SPALDT di perkotaan dan pedesaan • Strategi 5 : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IPLT <p>2. Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 1 : Meningkatkan cakupan layanan persampahan • Strategi 2 : Memaksimalkan Pengoperasian TPA Sanitary Landfill serta TPS 3R • Strategi 3 : Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat <p>3. Drainase Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi 1 : Peningkatan kegiatan sosialisasi dan kampanye • Strategi 3 : Memaksimalkan pembangunan sistem drainase • Strategi 4 : Melakukan pemeliharaan sistem drainase
7	Kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2023	<p>Visi dari Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: “PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI”</p> <p>Adapun strategi yang dirumuskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengembangan Ekraf 2. Pengembangan Ekosistem Ekraf, 3. Penguatan Marketing Ekraf berbasis Kolaborasi, 4. Pengembangan Pembiayaan Kolaboratif
8	Dokumen Kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	<p>Strategi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Ekonomi melalui pengembangan Sektor Potensial (pertanian, industry, Pedagangan), Daya Tarik Pariwisata dan Investasi, serta Pengembangan Potensi Desa 2. Optimalisasi Proses Rehabilitasi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kabupaten melalui Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian Pada Sektor Unggulan 4. Menciptakan Stabilitas Sosial melalui pemberdayaan untuk menekan Tingkat pengangguran dan Jumlah PMKS 5. Pembangunan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi 6. Sinergitas Stakeholder Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Kotawaringin Barat
9	Kajian Potensi Hilirisasi Industri Di Kabupaten Kotawaringin Barat	<p>Visi Pembangunan Sektor Strategis Perkebunan dan industri pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “INTEGRASI PEMBANGUNAN HILIRISASI INDUSTRI BERBASIS AGRO UNTUK PENGUATAN EKONOMI, DAYA SAING WILAYAH DAN PEMERTAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KOTAWARINGIN BARAT “</p> <p>Rumusan Kebijakan yang perlu dilaksanakan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitasi dan ruang akomodasi yang memungkinkan komunikasi bisnis, kerjasama korporasi dapat berjalan efektif dan lebih produktif 2. Mengakomodasi kebutuhan ruang untuk pengembangan/perluasan industri pengolahan disekitar lokasi

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<p>perkebunan dan industri yang sudah ada agar manajemen rantai lebih efisien</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membangun konektitas infrastruktur antara kawasan industri dan cluster industri dengan kawasan ekonomi khusus 4. Mendorong kesepakatan bersama antar daerah yang berbatasan dengan kotawaringin barat untuk meningkatkan produktifitas komoditi perkebunan kelapa sawit untuk menjamin ketersediaan rantai pasok industri 5. Melakukan revitalisasi terhadap sentra perkebunan rakyat dan perkebunan swasta yang mengalami penurunan produksi 6. Melakukan pemeliharaan terhadap alur utama pelayaran kumai dan rawa pasangsurut untuk mendukung keamanan lalu lintas pelayaran
10	Dokumen Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Tahun 2023-2043	<p>Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2043 "TERWUJUDNYA INDUSTRI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN"</p> <p>Misi Pembangunan Industri Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2043, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun industri yang berdaya saing baik skala lokal maupun regional dan bernilai tambah berdasarkan potensi sumber daya alam unggulan daerah. 2. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya 3. saing baik di pasar lokal maupun internasional. 4. Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta aplikasi teknologi. 5. Meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah dan 6. kesejahteraan rakyat. <p>Strategi Pembangunan Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri; 2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi terbarukan; 3. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan industrial-intelligence; 4. Sentralisasi pengembangan wilayah industri; 5. Membangun kekuatan IKM bersama sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran; dan 6. Peningkatan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
11	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPADA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	<p>Kebijakan pariwisata rencana induk pembangunan pariwisata Kotawaringin barat disusun sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan daya tarik Pariwisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Kotawaringin Barat b. Peningkatan dan pengembangan aksesibilitas pendukung pariwisata c. Penyediaan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata d. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan e. Peningkatan dan optimalisasi potensi investasi pariwisata 2. Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara b. Penguatan kemitraan pariwisata c. Peningkatan dorongan promosi pariwisata unggulan dan pendukung <ol style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Menciptakan struktur industri pariwisata yang kompetitif 4. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata b. Penguatan dan Kolaborasi keterlibatan Organisasi pelaku pariwisata Kotawaringin Barat
12	Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045	<p>RANCANGAN TAHAPAN PERSIAPAN 2023-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ▪ Membentuk struktur organisasi yang efisien dan efektif ▪ Mengembangkan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran mulai dari desa sampai Dinas/OPD ▪ Memperkuat sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi ▪ Memperkuat peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD/Dinas dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan IKN ▪ Mempercepat pemerataan infrastruktur dasar pada daerah yang sulit dijangkau, utamanya adalah akses jalan, listrik, telekomunikasi., dan air pada tahap persiapan. ▪ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk bantuan-bantuan. ▪ Mempercepat penurunan angka stunting, kemiskinan eskترم, dan permukiman kumuh ▪ Mendorong diversifikasi ekonomi lokal potensial (UMKM, IKM, UKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan SDA potensial) ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan ▪ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan pendukungnya; dan memperluas jaringan pemasaran ▪ Memberdayakan dan menguatkan usaha kecil menengah (UKM), industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran ▪ Meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dan BUMD dan swasta pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi ▪ Mempercepat penyediaan infrastruktur strategis terutama Pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan ▪ Meningkatkan komitmen lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dengan prinsip keberkelanjutan dan eko efisiensi ▪ Menguatkan pertahanan dan keamanan daerah <p>RANCANGAN TAHAPAN PEMBANGUNAN I 2024-2029</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah secara konsisten ▪ Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten ▪ Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan desa ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD/Dinas dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mendukung kemitraan dengan wilayah IKN ▪ Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperluas cakupan bantuan-bantuan. ▪ Menurunkan angka stunting, kemiskinan eskترم, dan permukiman kumuh ▪ Memperkuat sinergi antar OPD dan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ▪ Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal potensial (UMKM, IKM, UKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan SDA potensial) ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor <ul style="list-style-type: none"> ▪ pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman ▪ pangan, perkebunan, dan peternakan ▪ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan pemasaran ▪ Memberdayakan dan menguatkan usaha kecil menengah (UKM), industri kecil (UMKM), dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran ▪ Mempercepat penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata. ▪ Meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dan BUMD serta swasta pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi ▪ Mengembangkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan ▪ Meningkatkan komitmen lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dengan prinsip keberkelanjutan dan eko efisiensi ▪ Menguatkan pertahanan dan keamanan daerah. <p>RANCANGAN TAHAPAN PEMBANGUNAN II 2030-2034</p>

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah secara konsisten ▪ Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten ▪ Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan desa ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD/Dinas dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mendukung kemitraan dengan wilayah IKN ▪ Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata ▪ Memantapkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan serta bantuan-bantuan Menajamkan program dan kegiatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat ▪ Memperkuat sinergi antar OPD dan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ▪ Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal potensial (UMKM, IKM, UKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan SDA potensial) ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan ▪ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan pemasaran ▪ Memberdayakan dan menguatkan usaha kecil menengah (UKM), industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran ▪ Memantapkan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata. ▪ Memantapkan kerja sama Pemerintah Daerah dan BUMD serta swasta pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi ▪ Memantapkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan ▪ Memantapkan komitmen lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dengan prinsip keberkelanjutan dan eko efisiensi ▪ Menguatkan pertahanan dan keamanan daerah. <p>RANCANGAN TAHAPAN PEMBANGUNAN III 2035-2039</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah secara konsisten

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten ▪ Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan desa ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD/Dinas dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mendukung kemitraan dengan wilayah IKN ▪ Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis ▪ Memantapkan penyediaan dan layanan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ▪ Memantapkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan disertai pengembangan teknologi tinggi ▪ Memantapkan perekonomian lokal potensial (UMKM, IKM, UKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan SDA potensial) ▪ Meningkatkan dan menguatkan usaha kecil menengah (UKM), industri kecilmenengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran ▪ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan pemasaran ▪ Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan lokal, regional dan global ▪ Memantapkan kerja sama Pemerintah Daerah dan BUMD serta swasta pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi ▪ Memantapkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan ▪ Memantapkan komitmen lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dengan prinsip keberkelanjutan dan eko efisiensi ▪ Menguatkan pertahanan dan keamanan daerah ▪ Mengembangkan konsep Green City, Smart City, dan Resilient City untuk mewujudkan Kota Layak Huni yang Berkelanjutan dan Eko Efisiensi. <p>RANCANGAN TAHAPAN PEMBANGUNAN IV 2040-2045</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah secara konsisten ▪ Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian, dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten ▪ Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam pengembangan komoditas unggulan desa ▪ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kecamatan dan OPD/Dinas dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan yang diperlukan untuk mendukung kemitraan dengan wilayah IKN

No.	Studi Terdahulu	Arahan/ Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan menuju agroindustri ▪ Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis ▪ Memantapkan penyediaan dan layanan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ▪ Memantapkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan disertai pengembangan teknologi tinggi ▪ Memantapkan perekonomian lokal potensial (UMKM, IKM, UKM, Ekonomi Kreatif, Industri Pengolahan, dan SDA potensial) ▪ Meningkatkan dan menguatkan usaha kecil menengah (UKM), industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran ▪ Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata dan memperluas jaringan pemasaran ▪ Memantapkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan lokal, regional dan global ▪ Memantapkan kerja sama Pemerintah Daerah dan BUMD serta swasta pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi ▪ Memantapkan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan ▪ Memantapkan komitmen lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon dengan prinsip keberlanjutan dan eko efisiensi ▪ Menguatkan pertahanan dan keamanan daerah ▪ Melaksanakan pengembangan dan pembangunan kota dengan konsep Green City, Smart City, dan Resilient City untuk mewujudkan Kota Layak Huni yang Berkelanjutan dan Eko Efisiensi ▪ Mewujudkan Kotawaringin Barat yang Maju, Berkembang, Berkeadilan, dan Sejahtera.

Sumber: Hasil Kajian, 2024

2.14 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk jangka waktu tertentu. Renstra ini biasanya disusun untuk jangka waktu lima tahun oleh organisasi pemerintahan yaitu Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam hal ini adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra digunakan sebagai acuan untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan Dinas dengan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas. Berikut adalah beberapa rencana strategis dan rencana kerja yang dimiliki oleh OPD Kabupaten Kotawaringin Barat terkait penyusunan kajian ini.

Tabel 2. 15 Rencana Strategis OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>Strategi :</p> <p>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perluasan kesempatan kerja melalui Pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam peningkatan kualitas kompetensi untuk siap bersaing di pasar kerja melalui pendekatan kemitraandengan berbagai pihak perusahaan swasta dan masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kerja serta produktivitas tenaga kerja 3. Pengadaan Peralatan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja 4. Pelaksanaan Pembinaan teknis penyelesaian PHI dan Peningkatan harmonisasi hubungan kerja 5. Finalisasi dokumen rencana teknis satuan permukiman (RTSP) untuk Membangun Kawasan transmigrasi
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Mendorong pembangunan desa melauai transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan. <p>Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan fungsi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah. b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Penataan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<p>a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
3	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	<p>Ada pun Tujuan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang tertuang di dalam dokumen Renstra tahun 2023-2026 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan sub sektor Perikanan terhadap PDRB 2. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel <p>Sebagai upaya mencapai Tujuan maka diturunkan kedalam 4 sasaran yang terdiri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Perikanan 2. Meningkatnya Konsumsi Ikan 3. Meningkatnya ketersediaan pangan Daerah 4. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah <p>Program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penelolan Perikanan Budidaya Dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan Dengan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dengan kegiatan:

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala mikro dan Kecil - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <p>5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <p>6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi <p>7. Program Penanganan Kerawanan Pangan Dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan ▪ Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota <p>8. Program Pengawasan Keamanan Pangan Dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota <p>9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ▪ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ▪ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah ▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ▪ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Dinas Pertanian	<p>Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :</p>

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<p>- Meningkatnya pertumbuhan sub sector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan terhadap PDRB</p> <p>Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 2. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah <p>Strategi Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: “GERBANG TABBE (Gerakan Pengembangan Tani Baik dan Berkah) melalui peningkatan luas areal tanam, produktivitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, dan populasi peternakan, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani serta peningkatan investasi dan akses pasar”</p> <p>Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan pengembangan sarana produksi pertanian - Pengembangan lahan, irigasi , prasarana pertanian serta kawasan peternakan - Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pengendalian OPT dan DPI pertanian - Peningkatan investasi usaha pertanian dan akses pasar petani - Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan pertanian
5	Dinas Kesehatan	<p>Tujuan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan sasaran Pembangunan Daerah adalah meningkatnya kualitas pendidikan dan Kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah Angka Harapan Hidup, dengan target di tahun 2026 angka harapan hidup mencapai usia 70,98 tahun.</p> <p>Sasaran yang ditetapkan agar tujuan strategis dapat tercapai adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat indikator yang digunakan : <ol style="list-style-type: none"> a) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. b) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup. c) Prevalensi Balita Stunting . d) Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk. e) Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV. 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dibidang Kesehatan Indikator yang digunakan adalah Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target disetiap tahunnya adalah 100%. 3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 100% di tahun 2026. <p>Strategi yang ditetapkan agar tujuan strategis dapat tercapai adalah:</p> <p>Meningkatkan pemenuhan upayakesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, dengan arah kebijakan :</p>

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang memiliki sarana, prasarana, alat kesehatan sesuai standar termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan dasar dan kesehatan pengembangan untuk UKM dan UKP termasuk upaya rujukan 3. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. 4. Memastikan RS Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin
6	Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah	<p>Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Industri Potensial Daerah 2. Meningkatkan kapasitas Sektor Perdagangan 3. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel <p>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator penilaiannya, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Indikator program : Persentase pelaku usaha yang izin sesuai dengan ketentuan 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator program : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Indikator program: Persentase koefisien variasi harga antar waktu 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Indikator program : Nilai Ekspor (US\$ juta) 5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Indikator program : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Indikator program : Persentase peningkatan omset UMKM yang bermitra 7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Indikator program : Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah 8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Indikator program : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Indikator program : Nilai Kualitas Informasi Industri 10. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Indikator program : Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi 11. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<p>Indikator program : Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</p> <p>12. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Indikator program : Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan</p> <p>13. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Indikator program : Persentase Peningkatan volume Usaha Koperasi</p> <p>14. Program Peremberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) Indikator program : Persentase usaha mikro Potensial yang bermitra</p> <p>15. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Indikator program : Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemudahan berusaha</p> <p>16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator program : Persentase capaian kegiatan penunjang Perangkat Daerah</p>
7.	Dinas Pariwisata	<p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf 2. Pengembangan Model Promosi Pariwisata Terpadu 3. Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Standart usaha pariwisata 4. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi 5. Membangun Integrasi antar obyek wisata 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata berdasarkan pemetaan kebutuhan pasar 7. Peningkatan penataan dan pengelolaan daya tarik wisata 8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf <p>Program Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pemasaran Pariwisata 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.	DPMPTSP	<p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi 2. untuk mewujudkan pengelolaan data yang 3. terintegrasi antara petugas pelayanan dengan 4. pengelola data 5. Pelaksanaan Pengendalian LKPM 6. Online 7. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan 8. Pengawasan Penanaman Modal 9. Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional 10. tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media 11. elektronika dengan memperhatikan potensi investasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<p>12. dan pembangunan daerah</p> <p>13. Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet</p> <p>14. Investasi</p> <p>15. Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten</p> <p>16. Kotawaringin Barat dikelola secara lestari</p> <p>17. diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada</p> <p>18. sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari</p> <p>19. Digitalisasi peta potensi investasi</p> <p>20. Pengembangan SDM</p> <p>21. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>22. Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik</p> <p>23. Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik</p> <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Promosi Penanaman Modal; 4. Program Pelayanan Penanaman Modal; 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; dan 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
9.	Dinas PUPR	<p>Arah Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sarana prasarana air limbah untuk peningkatan pelayanan sistem air limbah yang memadai 2. Pembangunan dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3. Membangun / merehabilitasi/memelihara drainase lingkungan 4. Melaksanakan Sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor agar pemanfaatan ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku 5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta penyediaan pelayanan nol lobang di jalan 6. Optimalisasi pendanaan dari CSR sektor swasta dan filantropi dalam rangka rehabilitasi lingkungan hidup dan kebencanaan 7. Perluasan atau penambahan cakupan pelayanan SPAM dan melaksanakan pembangunan embung sebagai salah satu sumber persediaan air baku 8. Mengadakan pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait pembinaan jasa konstruksi <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2. Program Pengembangan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Penataan Bangunan Gedung

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rencana Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Hasil Kajian, 2024

2.15 KAJIAN TEORI

2.15.1 Definisi Kota Dunia

Apa yang dimaksud dengan kota dunia, kota dunia merupakan sebuah kota yang dianggap menjadi titik penting dalam sistem perekonomian dunia.

Kota dunia memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- **Penting dalam Perekonomian:** Kota ini memiliki peran strategis dalam perdagangan, keuangan, dan bisnis internasional.
- **Keanekaragaman Penduduk:** Kota dunia sering dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis.
- **Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Infrastruktur yang baik dan konektivitas global menjadi ciri khas kota ini.
- **Pusat Kebijakan dan Kegiatan Budaya:** Kota dunia sering menjadi pusat kebijakan politik, kegiatan seni, dan budaya.

2.15.2 Indikator Menuju Kota Dunia

Untuk sebuah wilayah kabupaten atau kota menuju menjadi kota dunia, ada beberapa parameter dan indikator yang perlu dipertimbangkan (sumber :[1] Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota Dan Wilayah-UN-Habitat (https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/ig-utp_bahasa.pdf); [2] Panduan Penggunaan Dashboard Indeks Kota Berkelanjutan [2022]-Bappenas (<https://bing.com/search?Q=parameter+dan+indikator+penetapan+kota+dunia>)). Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. **Ekonomi yang Kuat:** Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota.
2. **Infrastruktur yang Modern:** Infrastruktur yang maju sangat penting, termasuk transportasi umum yang efisien, jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, dan fasilitas teknologi canggih. Indikator ini termasuk aksesibilitas transportasi, kualitas jalan, dan ketersediaan layanan listrik dan air bersih.
3. **Pendidikan dan Penelitian:** Kota harus memiliki institusi pendidikan dan penelitian yang berkualitas tinggi, seperti universitas dan lembaga penelitian terkemuka. Indikator ini termasuk angka melekterasi, jumlah universitas dan peneliti, dan hasil penelitian yang dihasilkan.

4. **Kualitas Hidup:** Kualitas hidup penduduk kota harus tinggi, dengan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan fasilitas rekreasi yang baik. Indikator ini termasuk angka kematian, ketersediaan rumah sakit, dan kualitas lingkungan hidup.
5. **Keberagaman Budaya:** Kota harus mendorong keberagaman budaya dan memiliki komunitas internasional yang besar dan beragam. Indikator ini termasuk jumlah festival budaya, kegiatan seni, dan keberagaman etnis.
6. **Keamanan dan Stabilitas:** Kota harus aman dan stabil, dengan tingkat kejahatan yang rendah dan pemerintahan yang efektif. Indikator ini termasuk tingkat kejahatan, kepatuhan terhadap hukum, dan kualitas pelayanan keamanan.
7. **Pengaruh Global:** Kota harus memiliki pengaruh global dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Indikator ini termasuk jumlah kunjungan wisatawan internasional, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam acara internasional.
8. **Inovasi dan Teknologi:** Kota harus mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indikator ini termasuk jumlah paten yang diterbitkan, penggunaan teknologi dalam layanan publik, dan inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
9. **Pengelolaan Lingkungan:** Kota harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indikator ini termasuk tingkat polusi udara dan air, penggunaan energi terbarukan, dan program daur ulang sampah.
10. **Partisipasi Masyarakat:** Kota harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota. Indikator ini termasuk tingkat partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunitas.



BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 BATAS ADMINISTRASI DAN LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Kotawaringin Barat yang ber-ibukota di Pangkalan Bun, berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Kotawaringin Barat terletak di antara 3 kabupaten yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara; dan
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 9.401,03 km² atau 940.102,85 Hektar. Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Tahun 2003, kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pemekaran kecamatan dari 4 Kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai yaitu menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 3.359,88 km² (35,74% dari total luas kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 423,48 km² (hanya sebesar 4,50% dari total luas kabupaten).

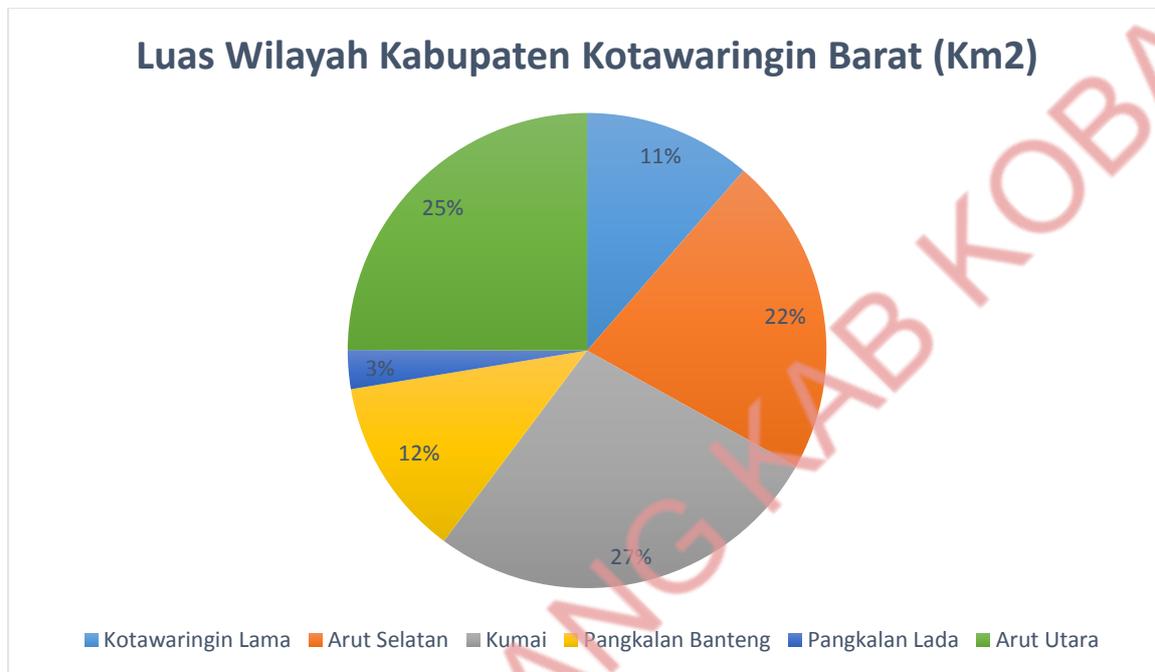
Berikut jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah tiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Tiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

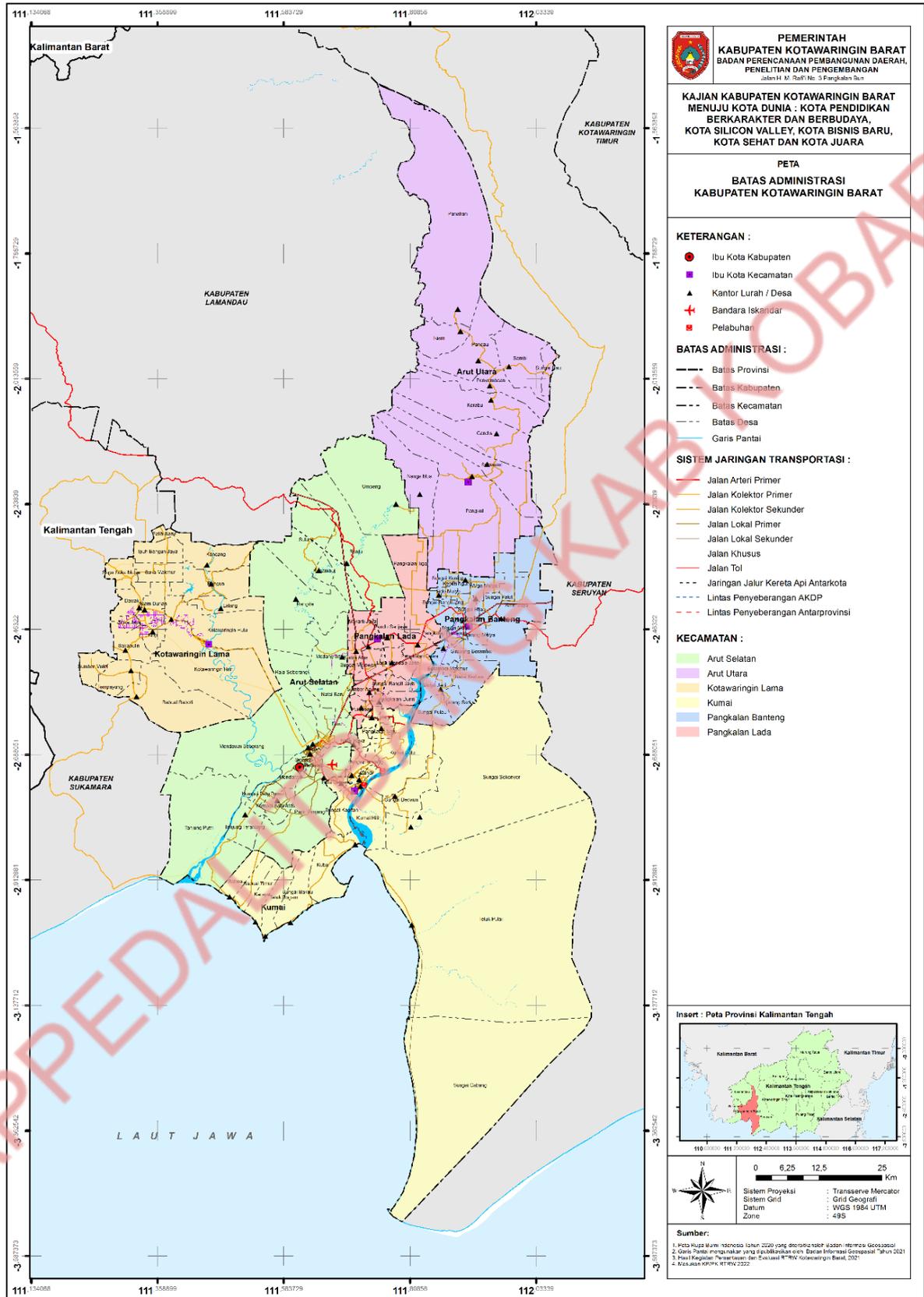
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	17	1219,83	11,32
2	Arut Selatan	Mandurejo	20	2342,66	21,77
3	Kumai	Candi	17	2915,05	27,09

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
4	Pangkalan banteng	Karang Mulya	17	1311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	11	284,73	2,65
6	Arut Utara	Pangkut	11	1685,00	24,96
	Kotawaringin Barat		93	10.759,00	100.00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Km²)



Gambar 3. 2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

3.2 KONDISI FISIK DASAR

3.2.1 TOPOGRAFI

Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40%, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut mempunyai area yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46% dan lokasinya menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut dengan luas mencapai 145.327,20 Ha atau 14,37% dari luas wilayah. Pada daerah ini Sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40% dan sangat berpotensi terjadinya erosi. Salah satunya Kecamatan Arut Utara yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 25 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan hingga mencapai >40 %.

3.2.2 MORFOLOGI

Morfologi adalah pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya, pada beberapa satuan morfologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007, morfologi diklasifikasikan menjadi dua satuan yaitu satuan morfologi dataran dan satuan morfologi perbukitan, yang didefinisikan sebagai berikut.

Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni subsatuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan subsatuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng lebih dari 2% hingga 5%.

Satuan morfologi perbukitan Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus; subsatuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% - 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar. Berdasarkan data dari *Land Systems of Indonesia and New Guinea*, diketahui bahwa

wilayah Kotawaringin Barat memiliki wilayah dataran yang luas terutama di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Kotawaringin Lama yang secara geografis dekat dengan Laut Jawa. Sementara Kecamatan Arut Utara memiliki wilayah perbukitan sedang yang paling luas diantara kecamatan lainnya.

3.2.3 GEOLOGI DAN JENIS TANAH

Kondisi geologi dan jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas:

1. Daerah Dataran Alluvial

Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan endapan laut akibat pengaruh pasang surut. Dataran ini dijumpai 2 – 5 Km dari sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. Selain itu, berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2024 wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau disebutkan mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam.

2. Dataran Gambut

Dataran gambut atau dome terbentuk dari endapan bahan organik dalam kondisi drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung Puting, daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai. Dataran gambut yang luas ditemukan diantara muara Sungai Lamandau dan Sungai Arut.

3. Daerah Teras-teras

Daerah teras-teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang pantai, terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan pasir. Dataran ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung Puting.

4. Daerah Dataran

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan daerah perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke utara dan dari selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut.

5. Daerah Perbukitan

Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari batuan beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk dari endapan dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk wilayah berbukit hingga bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu – Nanga Bulik dan sebelah utara Pangkut.

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Tanah	Sebaran
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

3.2.4 KLIMATOLOGI

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga bulan Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga bulan Maret. Temperatur udara pada Tahun 2023 rata-rata berkisar antara 26,14 °C hingga 27,53 °C. Suhu maksimum terjadi pada bulan Februari dengan suhu 35,40°C serta suhu minimum 20,60°C terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 82,00% hingga 88,57%, kelembaban udara minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 39% dan kelembaban maksimum rata-rata seluruh bulan mencapai puncak kelembaban sebesar 100%.

Tabel 3. 3 Suhu Udara dan Kelembaban di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Januari	22,20	26,33	33,90	52,00	86,93	100,00
Februari	22,40	27,53	35,40	39,00	82,00	98,00
Maret	21,40	26,69	34,20	50,00	85,72	100,00
April	22,40	27,20	35,20	44,00	83,77	99,00
Mei	22,00	27,14	34,40	54,00	87,38	100,00
Juni	21,20	26,64	35,00	54,00	86,79	100,00
Juli	20,60	26,75	33,60	52,00	85,26	100,00
Agustus	22,60	26,38	34,00	53,00	88,08	100,00
September	22,40	26,14	33,60	52,00	88,57	100,00
Oktober	22,40	26,95	34,10	52,00	86,28	100,00
November	22,60	26,51	35,00	49,00	87,59	100,00
Desember	21,00	26,44	35,00	51,00	87,85	100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Curah hujan pada tahun 2023 berkisar antara 119,20mm sampai 453,40 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 453,40 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 119,20 mm. Sedangkan hari hujan pada tahun 2021 rata-rata

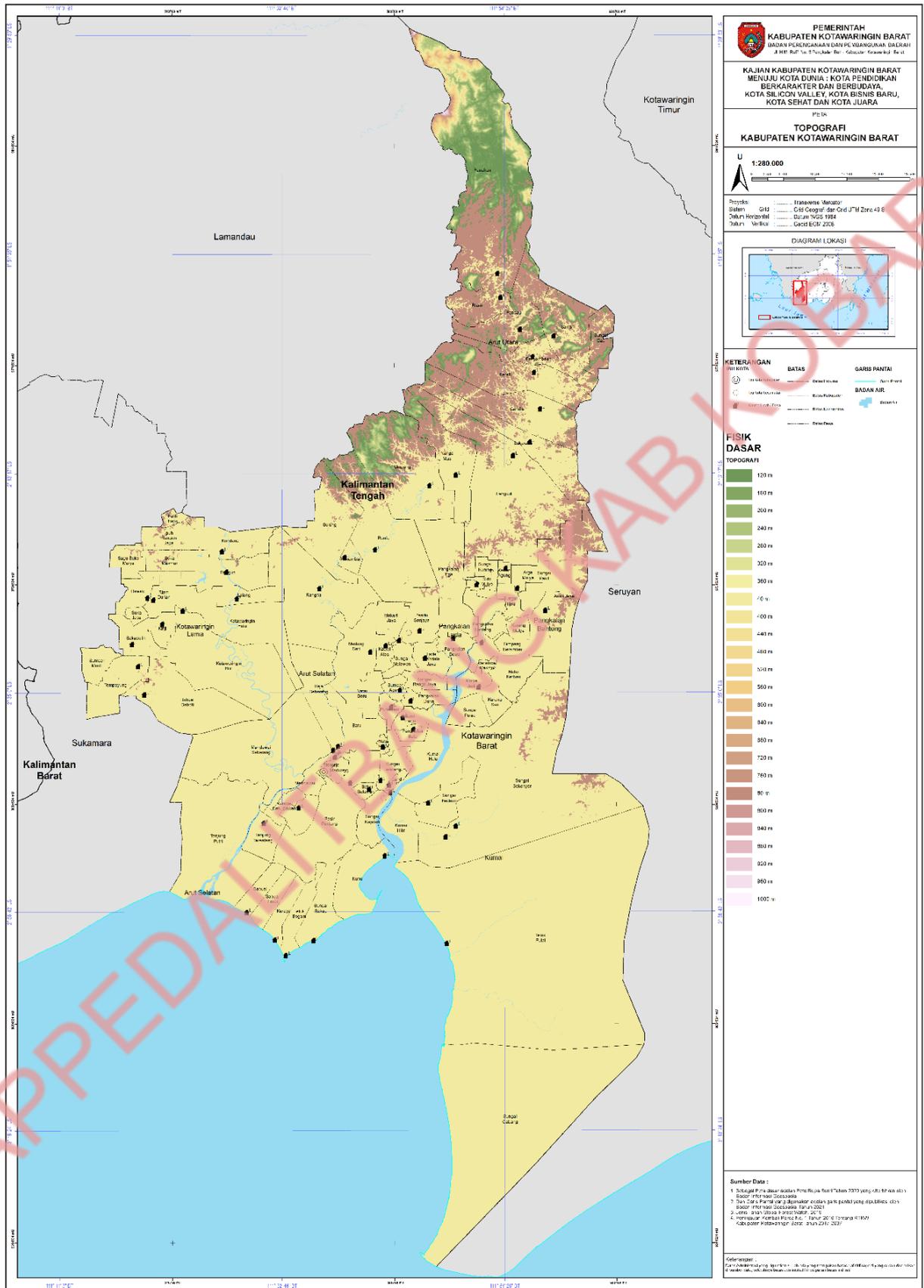
sebanyak 18 hari dengan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 24 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 10 hari.

Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. tekanan udara rata-rata 1.006,57 milibar dengan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 1.012,40 milibar, sedangkan tekanan udara minimum terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1.009,40 milibar.

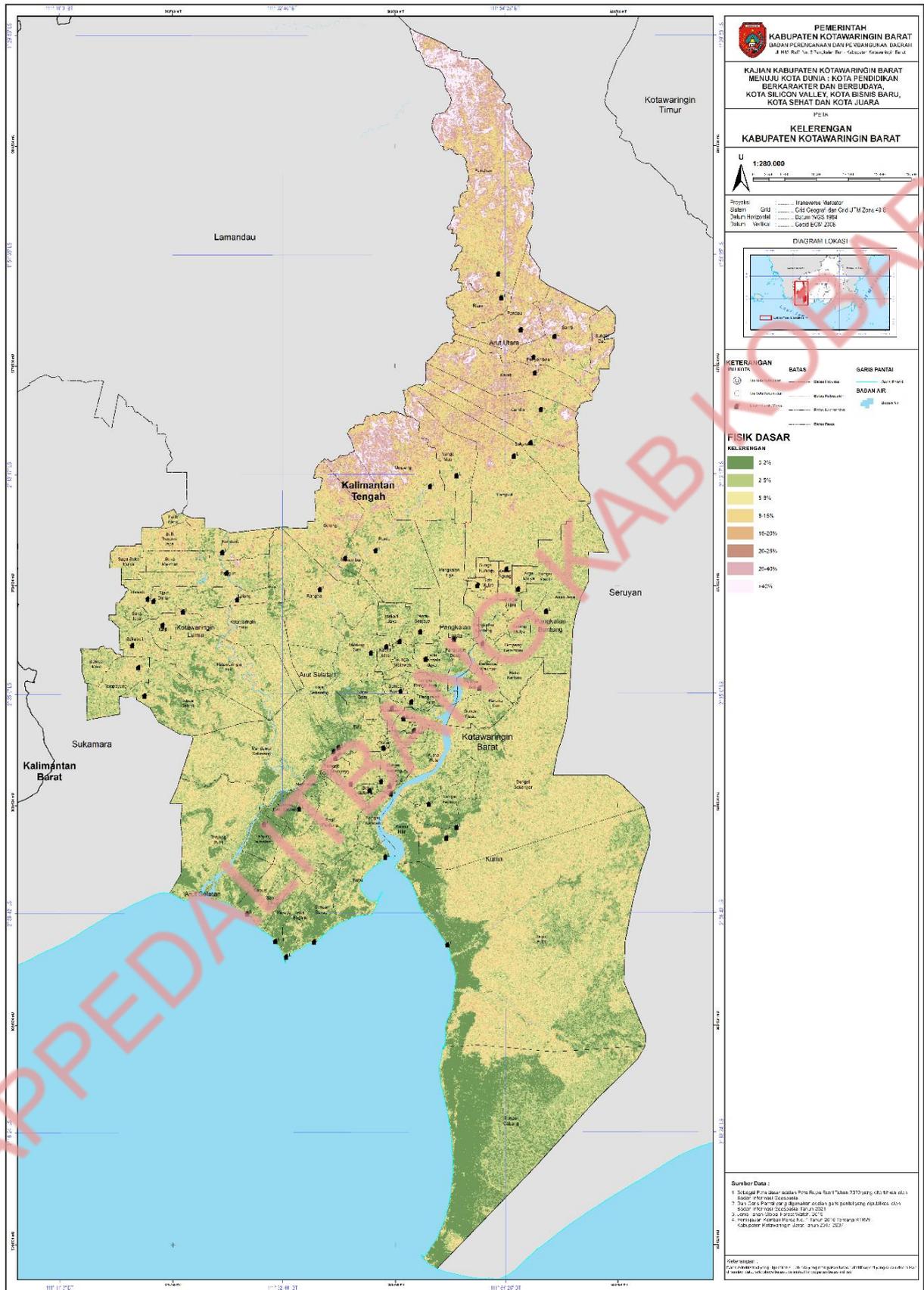
Tabel 3. 4 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Harian Penyinaran Matahari di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (%)
Januari	302,30	22	33,31
Februari	119,20	10	58,39
Maret	237,70	19	43,66
April	162,30	14	57,69
Mei	285,80	20	42,89
Juni	261,00	20	46,94
Juli	263,60	13	49,86
Agustus	349,80	19	42,94
September	421,50	24	33,25
Oktober	453,40	17	41,67
November	334,90	20	38,33
Desember	145,30	22	39,83

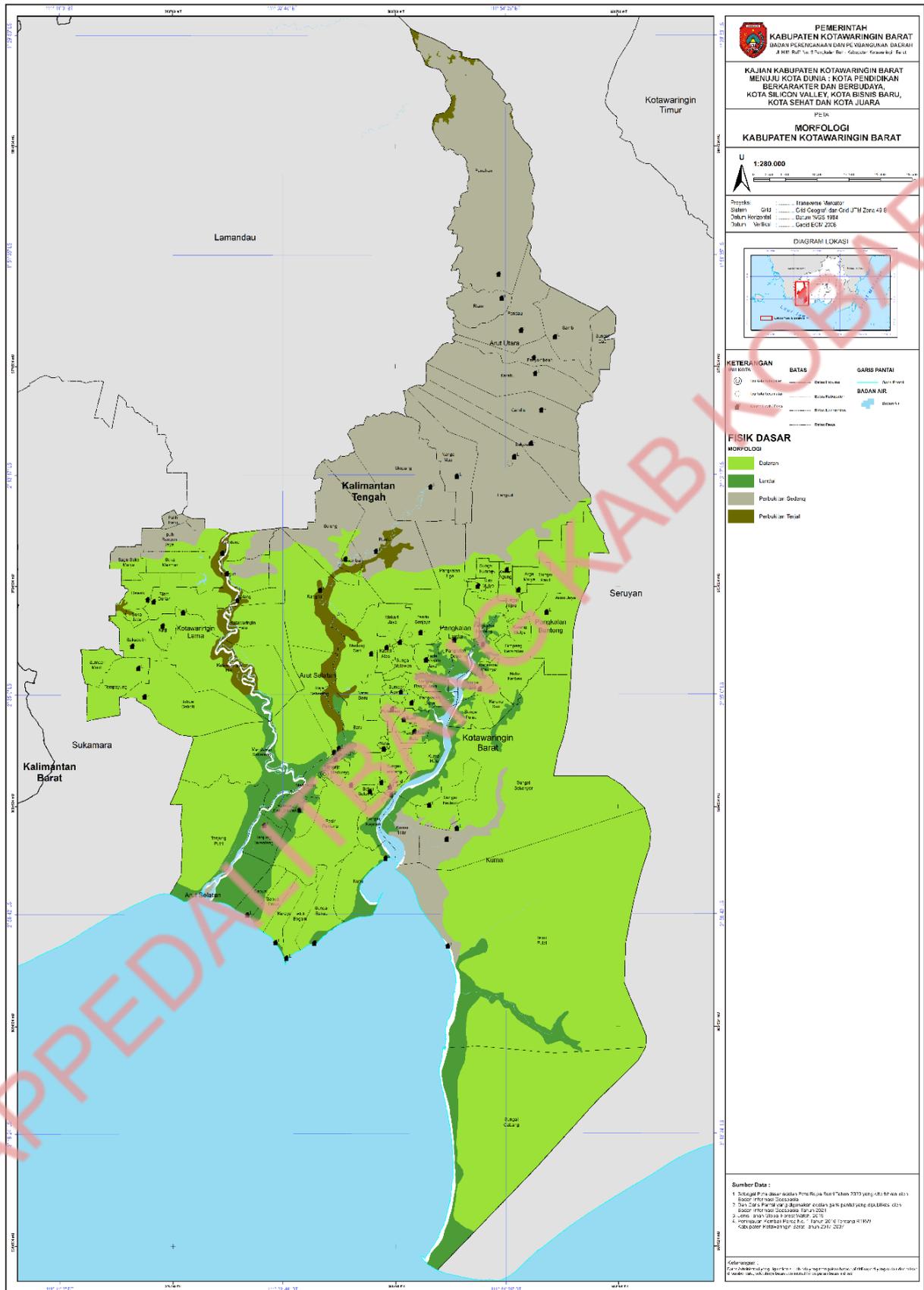
Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



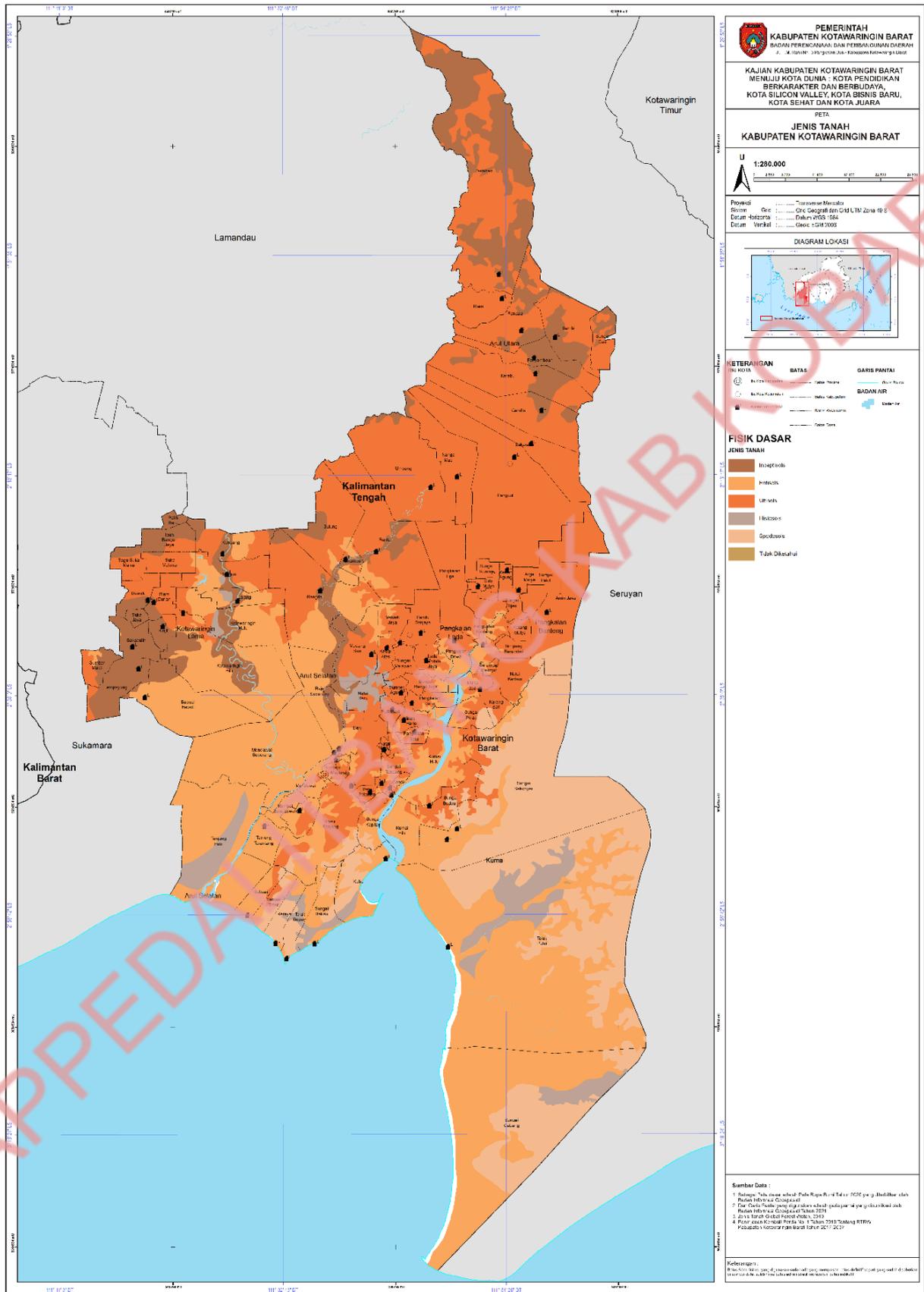
Gambar 3. 3 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 4 Peta Kelerengan Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 5 Peta Morfologi Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Barat

3.2.5 HIDROLOGI

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya.

Tabel 3. 5 Sungai Besar di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.00	100.00	6.00	300.00
2	Lamandau	300.00	250.00	6.00	200.00
3	Arut	250.00	190.00	4.00	100.00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Terdapat 4 daerah aliran sungai, yaitu DAS Kotawaringin lokasi lintas provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) yang merupakan DAS yang paling luas. Berikutnya adalah DAS Kumai lokasi Kabupaten Kotawaringin Barat, DAS Bulu Kecil lokasi lintas kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan) dan DAS Cabang lokasi kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Nama DAS dan luasnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Nama Sungai	Luas (Ha)
1	Kotawaringin	13.9030,0
2	Kumai	23.420,0
3	Bulu Kecil	18.540,0
4	Cabang	3.560,0

Sumber: RISPAM Kotawaringin Barat, 2023

3.3 PENGGUNAAN LAHAN

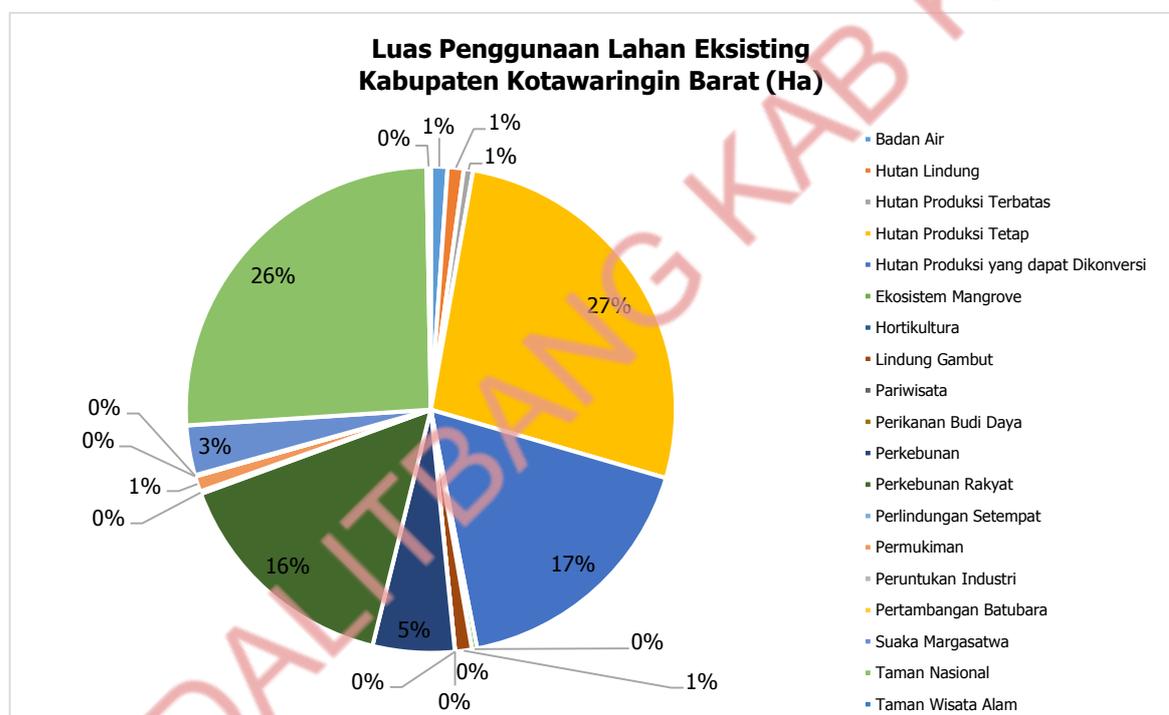
Berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting Tahun 2022 wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas sebesar 940.102,85 Ha, dengan lahan terluas yaitu kawasan hutan seluas 431.272,83 Ha atau sebesar 45,88% dari total luas wilayah. Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berikut rincian penggunaan lahan eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Tabel 3. 7 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	10.329,90	1,10%
2	Hutan Lindung	9.956,88	1,06%
3	Hutan Produksi Terbatas	5.741,56	0,61%
4	Hutan Produksi Tetap	251.661,55	26,77%
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	163.912,84	17,44%
6	Ekosistem Mangrove	3.184,50	0,34%
7	Hortikultura	0,10	0,00%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
8	Lindung Gambut	10.405,61	1,11%
9	Pariwisata	6,64	0,00%
10	Perikanan Budi Daya	96,87	0,01%
11	Perkebunan	50.728,90	5,40%
12	Perkebunan Rakyat	146.141,33	15,55%
13	Perlindungan Setempat	1.586,76	0,17%
14	Permukiman	9.702,87	1,03%
15	Peruntukan Industri	233,76	0,02%
16	Pertambangan Batubara	531,88	0,06%
17	Suaka Margasatwa	31.161,93	3,31%
18	Taman Nasional	242.132,62	25,76%
19	Taman Wisata Alam	2.586,36	0,28%
Jumlah		940.102,86	100,00%

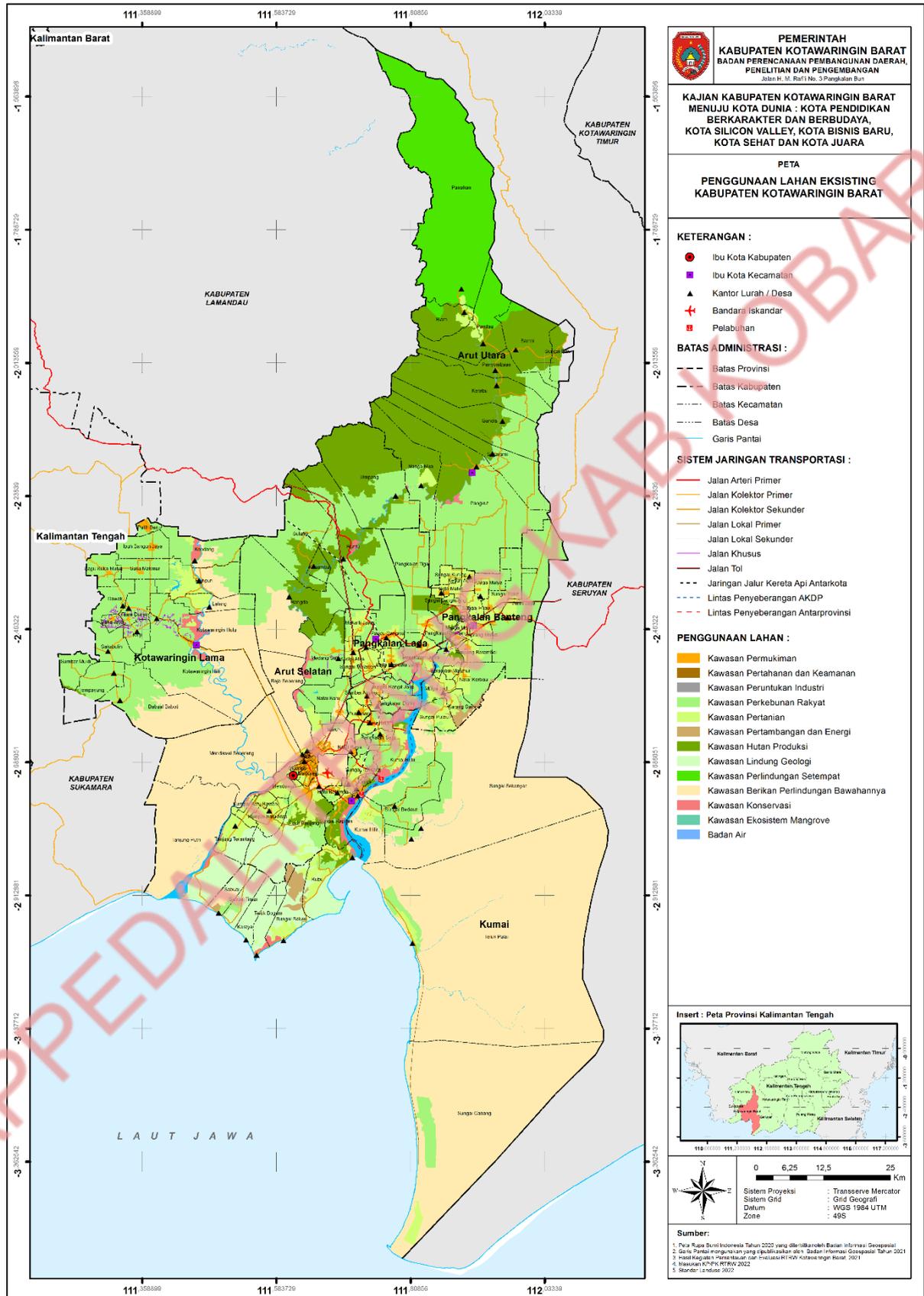
Sumber: Revisi RTRW, diolah 2024



Gambar 3. 7 Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 9 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat

3.4 PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN LAHAN

Sesuai dengan data Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat, jenis penguasaan lahan di Kotawaringin Barat terdiri atas Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Wakaf, dan Hak Guna Usaha. Penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup luas sebesar 167.250,50 Hektar karena mayoritas lahan berupa kawasan perkebunan sawit.

Berikut luas penguasaan lahan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Luas Penguasaan Lahan Non HGU dan HGU di Kotawaringin Barat

No	Jenis Penguasaan	Luas (Hektar)
1	Hak Guna Bangunan	651,64
2	Hak Milik	24.139,39
3	Hak Pakai	3.154,34
4	Hak Wakaf	12,49
5	Hak Guna Usaha (HGU)	167.250,50

Sumber: Peta Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat (diolah), 2022

3.5 KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 adalah 274.935 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2022-2023 yaitu 1,24%. Jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Arut Selatan : 123.040 jiwa (43,64%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,61%. Lebih detailnya pada tabel berikut :

Tabel 3. 9 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Kotawaringin Lama	19.710	1,09
2	Arut Selatan	123.040	1,61
3	Kumai	54.110	1,01
4	Pangkalan Banteng	37.680	0,30
5	Pangkalan Lada	35.930	1,85
6	Arut Utara	9.270	(0,29)
	Jumlah	279.740	1,24

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2023 sebesar 26 jiwa/km². Setiap km² wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 26 orang. Kepadatan Penduduk tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 126,19 jiwa/km².

Tabel 3. 10 Prosentase dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

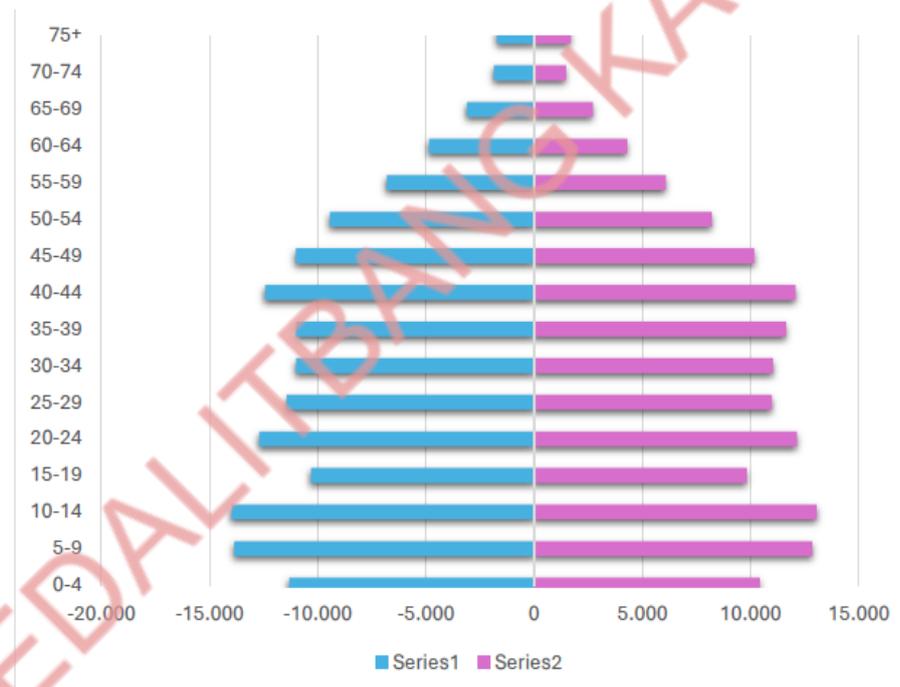
No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kotawaringin Lama	19.710	16,16
2	Arut Selatan	123.040	52,52
3	Kumai	54.110	18,56

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
4	Pangkalan Banteng	37.680	28,73
5	Pangkalan Lada	35.930	126,19
6	Arut Utara	9.270	3,45
	Jumlah	279.740	26,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari nilai Sex Rasio. Nilai Sex Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 107,25. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 107 penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2023, 70,13% persen (192.820 jiwa) dari seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu 15-64 tahun. Sedangkan 25,30% (69/552 jiwa) merupakan penduduk berusia 0-14 tahun, dan sisanya sebesar 4,59% (12/620 jiwa) adalah penduduk berusia lebih dari 65 tahun.



Gambar 3. 10 Jumlah Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

3.6 ISU

Isu adalah permasalahan atau topik yang menjadi perhatian dan pembahasan dalam suatu waktu tertentu. Isu dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Isu yang tidak ditangani dengan baik dapat memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Berikut beberapa Isu berdasarkan hasil kajian kebijakan dan kondisi eksisting yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 11 Isu Yang Terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat

ISU STRATEGIS DALAM RPD KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2023-2026	ISU STRATEGIS DALAM RANTEK RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2025-2029	ISU STRATEGIS DALAM RANCANGAN AKHIR RPJPD KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2025-2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Kapasitas Fiskal; 2. Mendesaknya akselerasi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah; 3. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 4. Perlunya menciptakan peluang usaha bagi masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran 5. Menjaga dan Menguatkan Stabilitas Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 6. Pentingnya Perluasan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan; 7. Pentingnya keberpihakan terhadap perempuan dan anak; 8. Diperlukan afirmasi khusus terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup; 9. Pentingnya menjaga kesesuaian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah; dan 10. Pentingnya meningkatkan konektivitas antar wilayah 11. Pengembangan agroindustri melalui hilirisasi produk unggulan daerah 12. Perlu Penguatan Peran Pemerintah dalam Penguatan Ideologi Bangsa dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pola Hidup Sehat serta Perluasan Akses dan Pemerataan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 3. Efektivitas Jaminan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat 4. Kontribusi Seluruh Elemen Masyarakat dalam Pembangunan 5. Menguatkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Budaya 6. Infrastruktur Terintegrasi Berkelanjutan 7. Ketahanan Lingkungan Hidup menghadapi Ancaman Perubahan Iklim 8. Hilirisasi Sektor Unggulan 9. Optimalisasi Daya Tarik Investasi 10. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 11. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Akses Dan Pemerataan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 3. Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 4. Penurunan Stunting 5. Menguatkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Budaya (Satu Desa Satu Unggulan) 6. Infrastruktur Terintegrasi Berkelanjutan 7. Ketahanan Lingkungan Hidup menghadapi Ancaman Perubahan Iklim 8. Hilirisasi Sektor Unggulan 9. Optimalisasi Daya Tarik Investasi 10. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 11. Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Kinerja 12. Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis

Sumber: RPD, Rantek RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, diolah 2024

ISU LINGKUNGAN	ISU GLOBAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan dan ketersediaan infrastruktur belum optimal (telekomunikasi dan informasi, air minum, sanitasi, persampahan, limbah) 2. Alih fungsi lahan, degradasi lahan 3. Perubahan iklim dan pengelolaan resiko bencana 4. Akses terhadap sarana prasarana, pelayanan, dan SDM pendidikan (formal dan Informal) dan kesehatan 5. Kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan hak dasar disabilitas 6. Ketahanan pangan 7. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan 8. Tata kelola pemerintahan, pengadministrasian dan pelayanan publik yang transparan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demografi Global 2. Geopolitik dan Geoekonomi 3. Disrupsi Teknologi 4. Urbanisasi Dunia 5. Perdagangan Internasional 6. Kelas Menengah 7. Persaingan Sumber Daya Alam 8. Perubahan Iklim

Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029, diolah 2024

3.7 KONDISI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENUJU KOTA PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERKEBUDAYAAN

Peranan bidang pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam menciptakan kota pendidikan yang berkarakter dan berbudaya. Pendidikan yang bermutu dan pelestarian kebudayaan adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki nilai-nilai moral, etika, dan identitas budaya yang kuat.

Dengan integrasi yang baik antara pendidikan dan kebudayaan, sebuah kota dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat, etika yang baik, dan kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat secara harmonis. Ini adalah fondasi bagi kemajuan daerah menuju visi kota pendidikan yang berkarakter dan berbudaya.

3.7.1 PENDIDIKAN

Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebar secara merata di seluruh kecamatan, kecuali untuk fasilitas pendidikan SMK dan SLB. Di Kecamatan Arut Utara tidak memiliki fasilitas pendidikan SMK dan SLB hanya terdapat di Kecamatan Arut Selatan.

Jumlah sekolah TK di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 150 unit sekolah, jumlah sekolah RA banyak 13 unit sekolah. Fasilitas pendidikan tingkat dasar sudah tersebar merata di seluruh kecamatan. Dari 141 TK/PAUD, hanya 6 unit TK/PAUD yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 135 unit TK/PAUD lainnya dikelola oleh swasta. Data sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pda tabel berikut.

Tabel 3. 12 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	10	43	690
2	Arut Selatan	62	326	3.229
3	Kumai	27	116	1.287
4	Pangkalan Banteng	25	113	1.200
5	Pangkalan Lada	16	86	1.169
6	Arut Utara	10	30	452
	Jumlah	150	714	8.027

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 3. 13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	13	96
2	Arut Selatan	4	19	314
3	Kumai	3	19	244
4	Pangkalan Banteng	4	20	348
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	13	71	1.002

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar, cukup merata di setiap kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SD, baik negeri maupun swasta, adalah 196 unit termasuk SDLB. Total siswa yang ditampung adalah 30.455 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 1.654 guru. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 14 sekolah dengan tenaga pengajar 131 guru dan siswa sebanyak 2.025 anak.

Tabel 3. 14 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	24	199	1.800
2	Arut Selatan	72	792	12.301
3	Kumai	36	385	5.598
4	Pangkalan Banteng	26	284	4.163
5	Pangkalan Lada	21	218	4.020
6	Arut Utara	17	149	1.681
	Jumlah	197	2.027	30.563

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	-	-	-
2	Arut Selatan	8	101	1.667
3	Kumai	5	85	1.178
4	Pangkalan Banteng	3	35	721

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
5	Pangkalan Lada	-	-	-
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	221	3.566

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Demikian pula Sekolah Menengah Pertama cukup merata di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah SMP, baik negeri maupun swasta adalah 65 unit. Total siswa yang ditampung adalah 11.121 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 749 guru. Sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah berjumlah 13 unit dengan total siswa sebanyak 2.179 siswa yang ditangani oleh tenaga pengajar sebanyak 136 guru.

Tabel 3. 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	8	75	849
2	Arut Selatan	25	392	6.009
3	Kumai	12	130	1.550
4	Pangkalan Banteng	11	112	1.574
5	Pangkalan Lada	6	73	1.003
6	Arut Utara	5	35	455
	Jumlah	67	817	11.440

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 17 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	19	102
2	Arut Selatan	4	82	1.136
3	Kumai	6	89	1.161
4	Pangkalan Banteng	2	19	320
5	Pangkalan Lada	2	22	326
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	16	231	3.045

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik negeri maupun swasta, berjumlah 12 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 326 guru dan siswa sebanyak 5.301 siswa. Untuk menampung lulusan Madrasah Tsanawiyah telah tersedia sekolah lanjutan setingkat SMU yaitu Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 4 sekolah dengan tenaga pengajar sebanyak 50 guru dan jumlah siswa sebanyak 780 siswa.

Tabel 3. 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	27	271
2	Arut Selatan	4	142	2.435

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
3	Kumai	2	77	1.392
4	Pangkalan Banteng	2	31	577
5	Pangkalan Lada	1	30	631
6	Arut Utara	1	16	145
	Jumlah	11	323	5.451

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 19 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	1	20	259
2	Arut Selatan	11	270	3.546
3	Kumai	3	51	441
4	Pangkalan Banteng	1	37	726
5	Pangkalan Lada	1	22	226
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	17	400	5.198

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 20 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aiyah (MA) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	Kotawaringin Lama	2	20	36
2	Arut Selatan	4	73	654
3	Kumai	2	14	112
4	Pangkalan Banteng	2	16	63
5	Pangkalan Lada	2	23	193
6	Arut Utara	-	-	-
	Jumlah	12	146	1.058

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 21 Jumlah Sekolah dan Peserta Didik Tahun 2024

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik
TK	168	9.112
SD	210	34.357
SMP	86	15.477
SMA	25	7.260
Perguruan Tinggi	3	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Tabel 3. 22 Jumlah Tenaga Pendidik/ Pengajar Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Tenaga Pendidik/Pengajar
2020	1.594
2021	1.644
2022	1.657
2023	1.677
2024	1.672

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Tabel 3. 23 Data Sekolah Kab. Kotawaringin Barat – Dapodikdasmen Tahun 2024

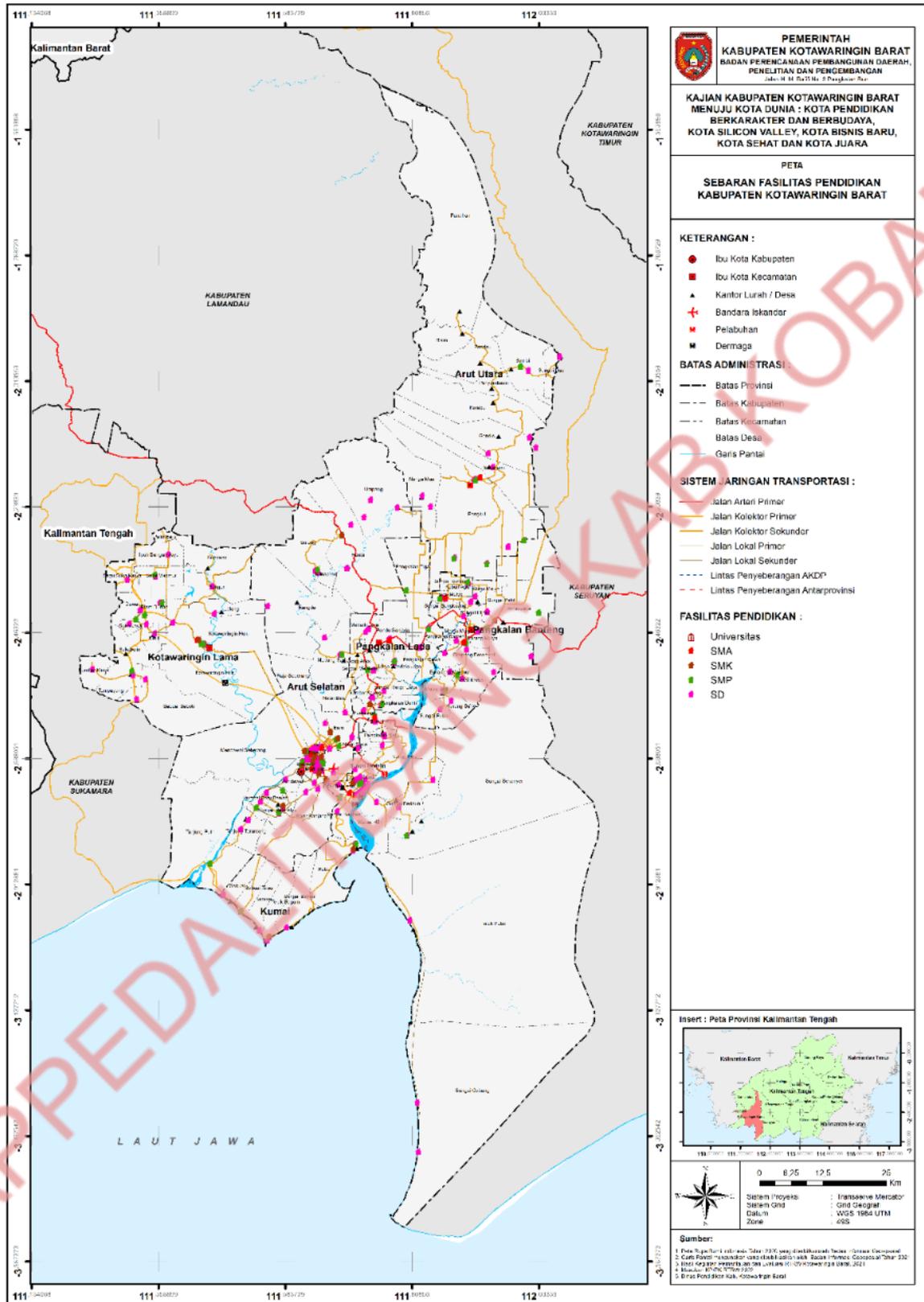
No	Wilayah	Total			TK			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kec. Arut Selatan	201	84	117	56	1	55	73	60	13	25	13	12	5	3	2	11	4	7	2	2	0
2	Kec. Kumai	93	48	45	27	1	26	36	31	5	13	11	2	2	2	0	3	3	0	0	0	0
3	Kec. Pangkalan Banteng	68	29	39	25	1	24	26	20	6	11	6	5	2	1	1	1	1	0	0	0	0
4	Kec. Pangkalan Lada	56	28	28	15	1	14	21	20	1	6	5	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	Kec. Kotawaringin Lama	49	32	17	10	1	9	24	23	1	8	6	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	Kec. Arut Utara	33	18	15	10	1	9	17	12	5	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	500	239	261	143	6	137	197	166	31	68	45	23	12	9	3	17	10	7	2	2	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 11 Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kotawaringin Barat

Terkait kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah mengenai ketersediaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang saat ini hanya tersedia di ibu kota Kabupaten. Idealnya SDLB minimal harus tersedia di kecamatan mengingat jarak masing-masing kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup jauh, sehingga apabila SDLB hanya tersedia di kota kabupaten maka bagi siswa yang seharusnya bersekolah di sekolah luar biasa yang berada di luar kota kabupaten praktis tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan hak mereka sebagai warga negara.



Gambar 3. 12 Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai angka partisipasi murni untuk SD/MI/ sederajat yaitu 98,16 dan angka partisipasi kasar sebesar 102,72. Nilai angka partisipasi murni untuk SMP/MTS/ sederajat yaitu 81,55 dan angka partisipasi kasar sebesar 81,93. Nilai angka partisipasi murni untuk SMA/SMK/MA sederajat yaitu 54,78 dan angka partisipasi kasar sebesar 85,14.

Tabel 3. 24 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Angkatan Kerja				
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹⁾	Bekerja	Pengangguran ²⁾	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
0	50.539	638	51.177	98,75
1	23.234	460	23.694	98,06
2	49.063	4.103	53.166	92,28
3	11.084	1.043	12.127	91,4
Jumlah	133.920	6.244	140.164	95,55

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹⁾	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
0	28.335	79.512	64,36
1	21.341	45.035	52,61
2	17.925	71.091	74,79
3	897	13.024	93,11
Jumlah	68.498	208.662	67,17

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Catatan/Note:

- 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)
 1. Sekolah Menengah Pertama
 2. Sekolah Menengah Atas
 3. Perguruan Tinggi
- 2 1. Mencari pekerjaan
 2. Mempersiapkan usaha
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tabel 3. 25 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 dan 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/ MI/ Sederajat	98,2	98,16	103,22	102,72
SMP/ MTs/ Sederajat	79,59	81,55	87,07	81,93
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	60,34	54,78	81,51	85,14

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

3.7.2 KEBUDAYAAN

Kebudayaan menjadi unsur penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak melupakan akar budaya mereka. Di bawah ini adalah kondisi kebudayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat (data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat, 2024) :

1. Kotawaringin Barat memiliki suku yang cukup beragam dimana ada budaya suku Dayak, suku Melayu dan budaya etnis pendatang seperti Sunda, Jawa, Madura, Banjar.
2. 44 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdiri dari 4 adat istiadat, 2 arsitektur tradisional, 1 bahasa, 16 cerita rakyat, 1 makanan/ minuman, 3 pengetahuan tradisional, 14 ritus, dan 3 seni tari.
3. 57 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
4. 4 Lembaga Kebudayaan (Balai Hukum Adat Kesultanan Kutaringin, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Warga, Sanggar Kenanga Tanjung, dan Sanggar Bakuba)
5. 14 Sarana Kebudayaan berupa Pojok Baca Digital (Pocadi), Balai PKK Kel. Baru, Balai Behaum Kampung Baru, Aula PKK Kel. Raja, Rumah Pintar Borneo Gemilang, Balai Sembaga Mas, Aula Kel. Raja, Balai Serba Guna Bakuna, Perpustakaan Kulakaban Pintar Desa Pasir Panjang, Taman Kota Manis, Tugu Bundaran Pancasila, Monumen Palagan Sambi, Monumen Operasi Penerjunan Pertama, Perpustakaan Daerah Kotawaringin Barat.



Gambar 3. 13 Salah Satu Kebudayaan Asli Kotawaringin Barat

3.7.3 PROGRAM TERKAIT

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa program kegiatan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Program kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, dan kesadaran budaya sehingga kota dapat berkembang dengan identitas yang kuat dan berkelanjutan. Melalui program-program tersebut, kota dapat membangun karakter warganya yang cerdas secara intelektual, kuat dalam moral, dan bangga akan identitas budayanya. Sinergi antara pendidikan dan kebudayaan menjadi kunci utama untuk mewujudkan kota yang berkarakter dan berbudaya.

Berdasarkan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, terdapat program kegiatan bidang pendidikan yang terkait dengan menuju kota pendidikan berkarakter dan berkebudayaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 26 Program Kegiatan Bidang Pendidikan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
▪ Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
▪ Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
▪ Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
▪ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
✓ Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
▪ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
✓ Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Sumber: Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Tabel 3. 27 Program Kegiatan Bidang Kebudayaan

Urusan / Bidang Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
▪ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
▪ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
▪ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
▪ Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
▪ Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
▪ Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
▪ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
▪ Pelindungan Cagar Budaya

Sumber: Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 95,60 % dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Tabel 3. 28 Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13.57	12.75	93.96	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Lama Sekolah	9.2	8.54	92.83	
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase cagar budaya yang lestari	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

3.8 KONDISI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (KOTAWARINGIN BARAT CITY OF HUB)

3.8.1 TRANSPORTASI

1. Transportasi Darat

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas jaringan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Ruas jaringan jalan yang melalui Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 29 Ruas Jaringan Jalan yang Melalui Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Fungsi	Nama Ruas
A.	JALAN ARTERI PRIMER (Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan)	
1.	Jalan Arteri Primer	Kujan – Runtu
2.	Jalan Arteri Primer	Runtu – Simp. Runtu
3.	Jalan Arteri Primer	Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada
4.	Jalan Arteri Primer	Jln. A. Yani (Pangkalan Bun)
5.	Jalan Arteri Primer	Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun)
6.	Jalan Arteri Primer	P. Lada – Asam Baru
B.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K1 (Jalan Penghubung Antara Jalan Lintas Kalimantan)	
1.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Iskandar (Pangkalan Bun)
2.	Jalan Kolektor Primer 1	Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) – Kumai – Batas Kota Pangkalan Bun
C.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K2	
1.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Pangkalan Bun – Kumai – Teluk Bogam
2.	Jalan Kolektor Primer 2	Jln. Teluk Bogam - Sebau
D.	JALAN KOLEKTOR PRIMER K3	
1.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian
2.	Jalan Kolektor Primer 3	Pangkalan Bun – Seberang Gajah – Lunci – Kuala Jelai
3.	Jalan Kolektor Primer 3	Sei Kalap – Sei Rangit – Pelabuhan Bumi Hardjo
4.	Jalan Kolektor Primer 3	Sp. Penopa – Riam Durian – Sukamara
5.	Jalan Kolektor Primer 3	Bumi Harjo – Pelabuhan CPO

No.	Fungsi	Nama Ruas
6.	Jalan Kolektor Primer 3	Natai Raya – Kumai
7.	Jalan Kolektor Primer 3	Sungai Kapitan – Kubu
8.	Jalan Kolektor Primer 3	Semanggang – Pangkut – Sungai Dau – Batas Seruyan
9.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Bandar Udara Iskandar
10.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Iskandar – Sungai Tendang
11.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Purbasari– Pelabuhan Roro –Kumai
12.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Banteng – Sungai Bedaun – Kumai Sebrang
13.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Simpang Kotawaringin lama/Pangkalan Bun – Simpang Runtu
14.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Palih Baru – Kondang – Rungun – Lalang
15.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Kumpai Batu-Tanjung Puteri-Sebuai
16.	Jalan Kolektor Primer 3	Jln. Pangkalan Bun - Pangkut
E.	JALAN LOKAL PRIMER	
	Kecamatan Arut Selatan	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Jenderal Sudirman
2.	Jalan Lokal Primer	Sidorejo - Kumpai Batu Bawah
3.	Jalan Lokal Primer	Kumpai Batu Bawah - Tanjung Terantang
4.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Terantang - Tanjung Putri
5.	Jalan Lokal Primer	Tanjung Putri - Batas Sebuai Barat
6.	Jalan Lokal Primer	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. HM. Rafi'i
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bhayangkara
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Ahmad Wongso - Jl. Pramuka
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sutan Syahrir
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Hasanudin
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. PRA. Kesumayuda
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kawitan
14.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 2
15.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangeran Antasari
16.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sukma Aryaningrat
17.	Jalan Lokal Primer	Jl. Udan Said
18.	Jalan Lokal Primer	Jl. GM. Arsyad
19.	Jalan Lokal Primer	Jl. Matnoor
20.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Natai Baru - Batas Kadipi Atas
21.	Jalan Lokal Primer	Jl. Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas
22.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Runtu - Batas Runtu GSDI
23.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bukit Sintang - Sulung Kenambui
24.	Jalan Lokal Primer	Jl. Umpang - Simpang Tiga GSDI + Sp. Pangkut
	Kecamatan Arut Utara	
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut (Maslubih Siak) - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pangkut/SMAN Pangkut - Sp. Sukarami
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Sukarami – Gandis
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Gandis – Kerabu
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kerabu – Penyombaan
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan – Pandau
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Pandau – Riam
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam – Penahan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Penyombaan - Sambi - Simpang Salip
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Salip - Sei Dau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkut/Bagimang Panji - Aspec Paper
	Kecamatan Kumai	
1.	Jalan Lokal Primer	Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pemuda
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Tendang - Pangkalan Satu

No.	Fungsi	Nama Ruas
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Natai Raya - Pelabuhan Roro
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. PKGB. 5
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Hilir - Terminal Sei Kapitan
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai Seberang - Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau
11.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kumai/Gerilya - Sungai Tendang
12.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bendahara
13.	Jalan Lokal Primer	Jl. Bahari
Kecamatan Kotawaringin Lama		
1.	Jalan Lokal Primer	Sp. Danau Gatal – Lalang
2.	Jalan Lokal Primer	Sp. Diung - Danau Gatal
3.	Jalan Lokal Primer	Sp. Lalang – Rungun
4.	Jalan Lokal Primer	Rungun - Kondang - Batas Lamanadau
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Tempayung - Sumber Mukti
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Riam Durian - Dawak - Suka Jaya
Kecamatan Pangkalan Lada		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya
3.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Makarti Jaya
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Medang Sari
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sp. Kadipi Atas - Batas Natai Baru
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa
Kecamatan Pangkalan Banteng		
1.	Jalan Lokal Primer	Jl. Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang
2.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sungai Bengkuang - Sido Mulyo – Semanggang
3.	Jalan Lokal Primer	Jalan Negara KM.53 - Sungai Bengkuang
4.	Jalan Lokal Primer	Jl. Sido Mulya - Sungai Kuning
5.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Sungai Pakit - Sp.Amin Jaya
6.	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI)
7.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng
8.	Jalan Lokal Primer	Jl. Simpang Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi
9.	Jalan Lokal Primer	Jl. Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun
10.	Jalan Lokal Primer	Pangkalan Banteng – sungai bedaun – trans UPT Kumai Seberang
E. JALAN LOKAL SEKUNDER		
Kecamatan Arut Selatan		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin
2.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Parit Serong
3.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Dukuh Mola
4.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat
5.	Jalan Lokal Sekunder	Kumpai Batu Atas - Karang Anyar
6.	Jalan Lokal Sekunder	Pasir Panjang - Dukuh Mola
7.	Jalan Lokal Sekunder	Pinang Merah – Stadion
8.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Jl. Hasan Surin
9.	Jalan Lokal Sekunder	Stadion - Cilik Riwut 2
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Samari - Stadion - Pinang Merah
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Palagan Sambu
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lijo
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 1
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mangga 2
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Salak
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. LKMD 2
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pancasila

No.	Fungsi	Nama Ruas
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Yuka / Maid Badir
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mustalim
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Delima
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 4 / Jl. Pemuda
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 3
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 2
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 1
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Ancis
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Seroja
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perwira
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Edy Suwargono
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sultan Imanudin
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sudirman. SH
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 1
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 1 - SMU 3
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kasanrejo 2
35.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Camar
36.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rajawali
37.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Zebra
38.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud
39.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DAH. Hamzah
40.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Alipandi Sarjan
41.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abdul Syukur
42.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Mu'an
43.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sembaga Mas - Jl. Mawar
44.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rangga Santrek
45.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Blimbing Manis
46.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Saik
47.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ki Patih Surodilogo
48.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangeran Adipati
49.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. R. Mangku
50.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. PKGB. 3
51.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Asam Bubuk
52.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Damai
53.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Kaderi Udan
54.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kadaiut 2
55.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lapangan Tugu
56.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Matnoor 1
57.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Brunai - Jl. Belida
58.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tengadak - Jl. Tebengalan
59.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
60.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. M. Idris
61.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Warna Agung
62.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid Al-Hikmah
63.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. J. Lubut
64.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 3
65.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dermawan
66.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9
67.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Baru - Pangkalan Bungur
68.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Cikranegara
69.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rarait 9 - SLTP 6
70.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Saefudin Kusasi - SLTP 6
71.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Runtu
72.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patung

No.	Fungsi	Nama Ruas
73.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas
74.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Tatas
75.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Desa Runtu
76.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 1
77.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 2
78.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Raya 3
79.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pabrik Jagung
	Kecamatan Arut Utara	
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu - Macan Tali
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tumenggung Kubu 1
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hendrik Dingan
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Naun Silih
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Riak Sawa
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Eden Jeha
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tiupilus Umar
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut/Durian Tunggal - Jl. Sinapati Mamang Sukarami
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Aspec Paper - Nanga Mua
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pangkut / PBNA - Batas Amin Jaya/BJAP
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Salip - Batas Amin Jaya/BJAP
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bukit Naning - Batas Amin Jaya/Parit Cina
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manjung H1
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Balai Antang
	Kecamatan Kumai	
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sebui - Batas Pasir PanjangJl. Pemuda
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Tiwadak – Pemancingan
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Idris - Al Huda
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Marundau
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Masjid
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Abdul Azis
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelita
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. An Noor
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sirajul Huda - Jl. Pemuda
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka - Sp. Pelabuhan Roro
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ampu Candi - Sei Tendang
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Berdikari - Jl. Bina Jadi
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Meden
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp. Pelabuhan CPO - Pelabuhan Roro
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Angkatan Muda
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Abd. Hamid - Jl. Pemilu
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. HM. Taher
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. MIN Kumai Hilir / Jl. Berlian
19.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rahmat - PKGB 5
20.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Keramat
21.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paigo – Pertamina
22.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rungun – PLTU
23.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD
24.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 1
25.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nangka Batu Belaman
26.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Sungai Tendang
27.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batu Belaman - Pabrik Jagung
28.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pare-Pare
29.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Bedaun - Sungai Sekonyer
30.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Natai Mamis - Tanjung Harapan

No.	Fungsi	Nama Ruas
31.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tanjung Harapan - Teluk Pulau - Sei Cabang
32.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sei Cabang - Teluk Ranggau
33.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. DPRD 2 - Sungai Tendang
34.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bahari Sungai Tendang
Kecamatan Kotawaringin Lama		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Sp. Diung – Kinjil
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sakabulin - Batas Sukaraja
3.	Jalan Lokal Sekunder	Tempayung - Baboti – Babual
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Makarti Jaya - Sp.Suka Jaya
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sp.Despot - Sp.Kinjil +Sakabulin
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dawak - Sp. R. Durian+Sagu
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sagu Suka Mulya - Batas Pangkalan Muntai
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cilik Riwut 7
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Merdeka - Jl. Nasional - Jl. Danau
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Suryariansyah
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Muntai
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beji
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pelabuhan
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin
16.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP
17.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya 1
18.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. ASDP 1
Kecamatan Pangkalan Lada		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Beringin Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Sungai Melawen
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Melawen - Sp. Runtu
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Dewa - Sungai Biru
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkuang (GSDI)
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga
7.	Jalan Lokal Sekunder	Purba Sari - SMA 2 Bumi Harjo
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banteng Sumber Agung
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patimura - Jl. Renggam SMK 1 Sumber Agung
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin
Kecamatan Pangkalan Banteng		
1.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Semanggang - Pangkalan Getah
2.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Batas Pangkalan Tiga - Sp. GSDI
3.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang+Sp.Pangkut
4.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung
5.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Desa 7 - Arga Mulya
6.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP)
7.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP)
8.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (Parit Cina)
9.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Margo Mulyo
10.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mulya Jadi - Pelabuhan Karang Sari
11.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Karang Sari
12.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Simpang Natai Kerbau
13.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Sungai Hijau
14.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya Baru - Sungai Hijau
15.	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Mulya - Amin Jaya
F.	JALAN KHUSUS	
1.	Jalan Khusus	Main road timur/ruas A (Nanga Mua – Semanggang)
2.	Jalan Khusus	Main road barat/ruas B (Rangda – Sei Rangit Jaya)
3.	Jalan Khusus	Ruas C (Semanggang – Pabrik Pulp)

No.	Fungsi	Nama Ruas
4.	Jalan Khusus	Jalan penghubung main road timur dan barat: a. Ruas E (Semanggang – Sei Rangit Jaya) b. Ruas F (Sei Rangit Jaya – Bumi Harjo) c. Ruas A (Jalan masuk dari Seruyan)

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat 2022

Panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 3.108,68 km, dengan kewenangan nasional/negara sepanjang 156,90 km, kewenangan Provinsi sepanjang 56.500 km, kewenangan Kabupaten sepanjang 2.017,630, kewenangan Desa sepanjang 1.034,55 km.

Kondisi kualitas jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari kondisi jalan baik sepanjang 1.098,676 km, kondisi sedang sepanjang 12.845,559 km, kondisi rusak sebesar 377,338 km, kondisi rusak berat sebesar 314,356 km. Berdasarkan kondisi eksisting, Kecamatan yang sedikit tertinggal meliputi Kumai Seberang, Arut Utara, dan Korawaringin Lama yang disebabkan masih kurang aksesibilitasnya.

Berikut lebih detailnya mengenai Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Km) Tahun 2021-2023.

Tabel 3. 30 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Km) Tahun 2021-2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
Negara	156,960	156,960	NA
Provinsi	96,420	96,420	56,500
Kabupaten/ Kota	2.017,411	2.017,411	2.017,630
Desa	1.034,550	1.034,550	1.034,550
Khusus	11.374,499	NA	NA
- Industri	243,00	NA	NA
- Perusahaan	11.131,499	NA	NA
Jumlah	14.635,499	3.301,709	3.108,68

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Catatan/Note:

1 Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road

2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2016

Tabel 3. 31 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Negara	149,76	7,2	-	-	156,96
Provinsi	42,470	3,020	5,93	3,98	96,42
Kabupaten	865,426	458,09	371,408	310,376	2.005,30
Desa	-	1.002,75	-	-	1.002,75
Khusus	NA	NA	NA	NA	NA
Kotawaringin Barat	1.098,676	12.845,559	377,338	314,356	14.635,929

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 32 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat (km) Tahun 2021–2023

Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
Aspal	1.281,04	1.112,39	1.055,89
Kerikil	495,59	479,38	479,83
Tanah	1.512,82	151	482,36
Lainnya	12,49
Jumlah	3.301,94	3.108,68	2017,63

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 33 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat (km), 2021–2023

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik	1.098,68	...	895,96
Sedang	12.845,56	...	467,15
Rusak	377,34	...	357,43
Rusak Berat	314,36	...	297,09
Jumlah	14.635,93	3.108,68	2.017,63

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

2. Transportasi Udara

Sistem transportasi udara di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang oleh keberadaan bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandara Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan.



Gambar 3. 14 Bandar Udara Iskandar - Pangkalan Bun

3. Transportasi Laut

Sistem transportasi laut di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang oleh keberadaan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Kumai di Kecamatan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun di Kecamatan Arut Selatan. Selain itu, terdapat Pelabuhan khusus yaitu Pelabuhan Tanjung Kalap di Bumiharjo Kecamatan Kumai.



Gambar 3. 15 Pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.8.2 JARINGAN LISTRIK

Pelayanan listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dilayani oleh PLN baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pelayanan PLN sejak tahun 2020 sudah menjangkau seluruh desa. Namun di beberapa wilayah yang diperkirakan akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan permukiman baru belum ditunjang oleh keberadaan listrik. Pembangkit listrik untuk menyokong perumahan dan industri awalnya dipenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berdaya 33,65 MW di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Kemudian, sekitar tahun 2018 dioperasikan Gardu Induk (GI) Pangkalan Bun 150 kV untuk supply listrik kabupaten. Sistem kelistrikan Pangkalan Bun terhubung (interkoneksi) dengan sistem kelistrikan interkoneksi Barito - Mahakam (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) yang saat ini memiliki surplus daya mencapai lebih dari 200 Mega Watt (MW). Dengan beroperasinya Gardu Induk Pangkalan Bun 150 kV PLN dapat menurunkan Biaya Pokok Produksi Penyediaan (BPP) listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berasal dari PLTD berbahan bakar High Speed Diesel (HSD). Transmisi listrik ke permukiman disalurkan melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Tabel 3. 34 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Unit di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Unit	2023
Pangkalan Bun	99.743
Kumai	11.542
Teluk Bogam	960
Sei Rangit	13.479
Pangkalan Banteng	9.949
Kotawaringin Barat	135.673

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 35 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Bulan

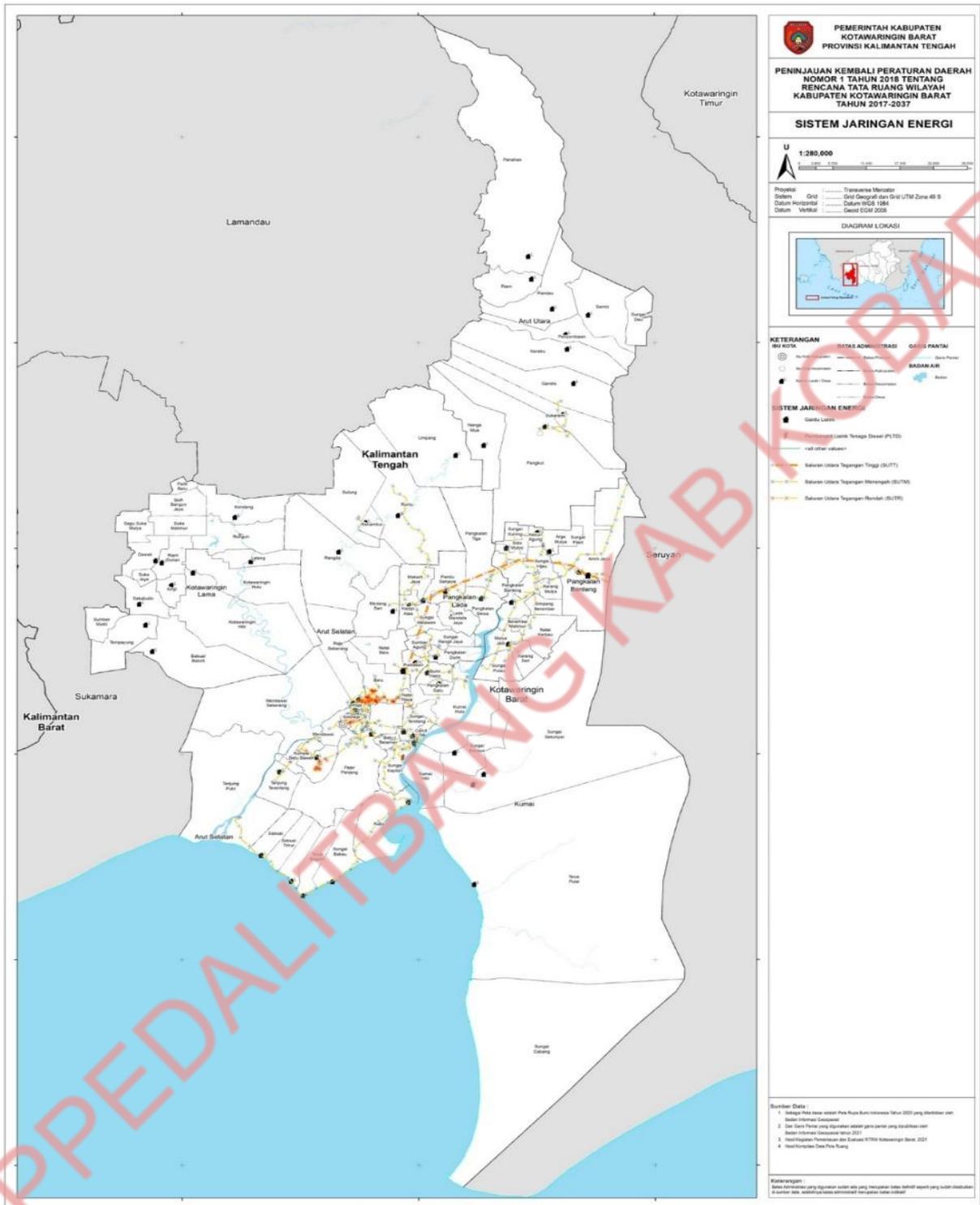
Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	71.170	76.516	81.440			
Februari	71.499	77.088	81.910			
Maret	71.605	77.573	82.266			
April	72.172	77.949	82.587			
Mei	72.783	78.434	82.847			
Juni	73.344	78.602	83.212			
Juli	73.879	79.017	83.574			
Agustus	74.397	79.288	83.852			
September	74.655	79.761	84.120			
Oktober	74.914	80.258	84.463			
November	75.659	80.613	84.879			
Desember	76.103	81.069	85.289	90.071	94.232	135.673

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 36 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Daya Terpasang (GW)	1.971,67
Produksi Listrik(GWh)	287,78
Listrik Terjual (GWh)	266,47
Dipakai Sendiri (MWh)	141,06
Susut/ Hilang (GWh)	24,99

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024



Gambar 3. 16 Peta Sistem Jaringan Energi

3.8.3 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat biasanya menggunakan air tanah, air sungai, mata air dan air hujan. Potensi air baku air minum terbesar adalah air sungai. Air sungai selain sebagai urat nadi transportasi berpotensi untuk air

baku air minum. Air tanah yang diambil melalui sumur gali, sumur pompa tangan, dan pompa listrik, masih potensi digunakan oleh warga. Potensi air tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dipasok dari dua jenis akuifer yaitu akuifer ruang antar butir dan rekahan. Air tanah bebas yang biasa dikonsumsi dengan sumur gali dan sumur pantek dengan kedalaman antar 1-6 m, bersifat asam, dengan pH < 6. Wilayah ini tersebar pada dataran Pangkalan Bun, Sidorejo, dan Kumai. Berdasarkan peta geohidrologi akuifer, produktivitas kecil berada di wilayah utara (Kecamatan Arut Utara) dan yang produktif di wilayah selatan. Wilayah akuifer produktif dengan kategori sedang ada di sekitar Pangkalan Bun dan Kumai. Air tanah masih menjadi andalan karena jangkauan pelayanan PDAM masih sulit untuk wilayah yang belum berkembang.

Dalam dokumen RISPAM disebutkan bahwa status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 adalah 70% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014). Akses air minum perpipaan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 38,49% dan di wilayah perdesaan mencapai 31,51%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2014 tercatat 75,80%.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum/ bersih. Wilayah pelayanan PERUMDAM Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat untuk wilayah perkotaan/ibukota kabupaten atau SPAM Ibukota yaitu melayani Kecamatan Arut Selatan dengan menggunakan SPAM Kota Pangkalan Bun. Untuk wilayah pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan atau SPAM IKK dilayani juga oleh PERUMDAM Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dan digerakkan oleh cabang-cabang SPAM yang tersebar di 7 (tujuh) IKK dan 3 (tiga) ABP. Pada tahun 2024 pelayanan PERUMDAM Tirta Arut mencapai 28.104 KK dari total 70.130 KK Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan jumlah pelayanan terbanyak berada di Kecamatan Arut Selatan. Perkembangan atau penambahan pelanggan/ Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 3. 37 Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, dan Nilai Air yang Disalurkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Jenis Konsumen	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
Sosial			
Umum	21	14.275	34.214.000
Khusus	211	130.487	327.097.200
Non Niaga			
Rumah Tangga	22.665	4.929.425	24.381.179.950
Instansi Pemerintah	161	52.778	363.627.700
Niaga			

Jenis Konsumen	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai Air Disalurkan (Rp)
Kecil	2.867	757.325	5.017.081.950
Besar	176	67.009	596.575.950
Industri			
Kecil	2	304	1.925.200
Besar	-	-	-
Khusus			
Pelabuhan	4	17.788	444.700.000
Lainnya	245	94.955	228.071.000
Susut/ Hilang	-	411.121	1.619.101
Jumlah	26.352	6.475.567	31.396.092.051

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 38 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Kotawaringin Barat 2017-2022

Tahun	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
2017	19.488	4.158.990	17.446.139.000
2018	21.592	4.745.778	19.707.293.000
2019	23.084	6.378.329	40.557.966.000
2020	23.657	5.224.873	26.269.360.950
2021	24.833	5.703.610	28.136.872.400
2022	26.352	6.475.567	31.396.092.051

Sumber: PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat 2018-2023

Kualitas air selalu di bawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standard kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat memanfaatkan mata air dan air permukaan sungai dalam sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 39 Kapasitas dan Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat

Unit	Kapasitas Terpasang (Liter/ Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/ Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/ Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/ Detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Liter/ Detik)	Sumbangan Rumah (Unit)	Sumber Air Baku
Pangkalan Bun	155	155	155,00	140,00	0	13.029	Sungai Arut
Kumai	20	20	20,00	17,00	0	1.535	Sungai Arut
Mendawai Sebrang	5	5	5,00	5,00	0	647	Sungai Arut
Kota Waringin Lama	5	5	5,00	5,00	0	557	Sungai Lamandau
Kumpai Batu	15	15	15,00	15,00	0	1.442	Sumber Air
Kubu	5	5	5,00	4,03	0	750	Sungai Pemancingan
Pangkalan Banteng	35	25	18,00	16,00	10	2.991	Sungai Hijau
Pangkalan Lada	25	15	15,00	12,00	10	2.329	Sungai Hijau

Unit	Kapasitas Terpasang (Liter/ Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/ Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/ Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/ Detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Liter/ Detik)	Sambungan Rumah (Unit)	Sumber Air Baku
IKK Pangkut Arut Utara	10	10	10,00	8,00	0	557	Sungai Arut
Total	275	255	248,00	222,03	20	23.837	

Sumber: Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat

Kondisi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain adalah :

- jumlah total layanan masyarakat/pemanfaat oleh SPAM PAMSIMAS tahun 2014-2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 4.853 KK.
- Pada Tahun 2024, secara keseluruhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki akses terhadap air minum yang layak sebesar 94,05%. Sehingga masih terdapat GAP sekitar 5.95% yang belum memiliki akses sumber air minum layak menuju sasaran RPJMN 2024.
- Capaian akses aman perpipaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 39.8%. Sehingga dengan target RPJMN sebesar 15% pada tahun 2024, target tersebut sudah dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Penyelenggara SPAM Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari BUMD yaitu PERUMDAM Tirta Arut melalui jaringan perpipaan PERUMDAM, dan jaringan perpipaan non PDAM melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan total capaian akses air Jaringan perpipaan sebesar 47.0% dan Akses Air Minum Aman 40.1%.

Tabel 3. 40 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Bukan Jaringan Perpipaan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Rumah Tangga Pengguna					
			Sumur Gali Terlindungi	Sumur Bor	Terminal Air	Mata Air Terlindung	Penampungan Air Hujan	Depot Air Minum
1	Kec. Arut Selatan	30.349	4.543	7.530	497	0	94	0
2	Kec. Kumai	13.820	3.374	3.372	744	0	978	0
3	Kec. Pangkalan lada	9.241	1.360	1.287	592	0	32	0
4	Kec. Pangkalan Banteng	9.504	2.696	549	1.247	40	0	0
5	Kec. Kotawaringin Lama	4.965	1.480	736	1.064	0	2	0
6	Kec. Arut Utara	2.251	298	260	202	220	0	0
Total		70.130	13.751	13.734	4.346	260	1.106	0

Sumber: Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 3. 41 Unit Air Baku Kabupaten Kotawaringin Barat

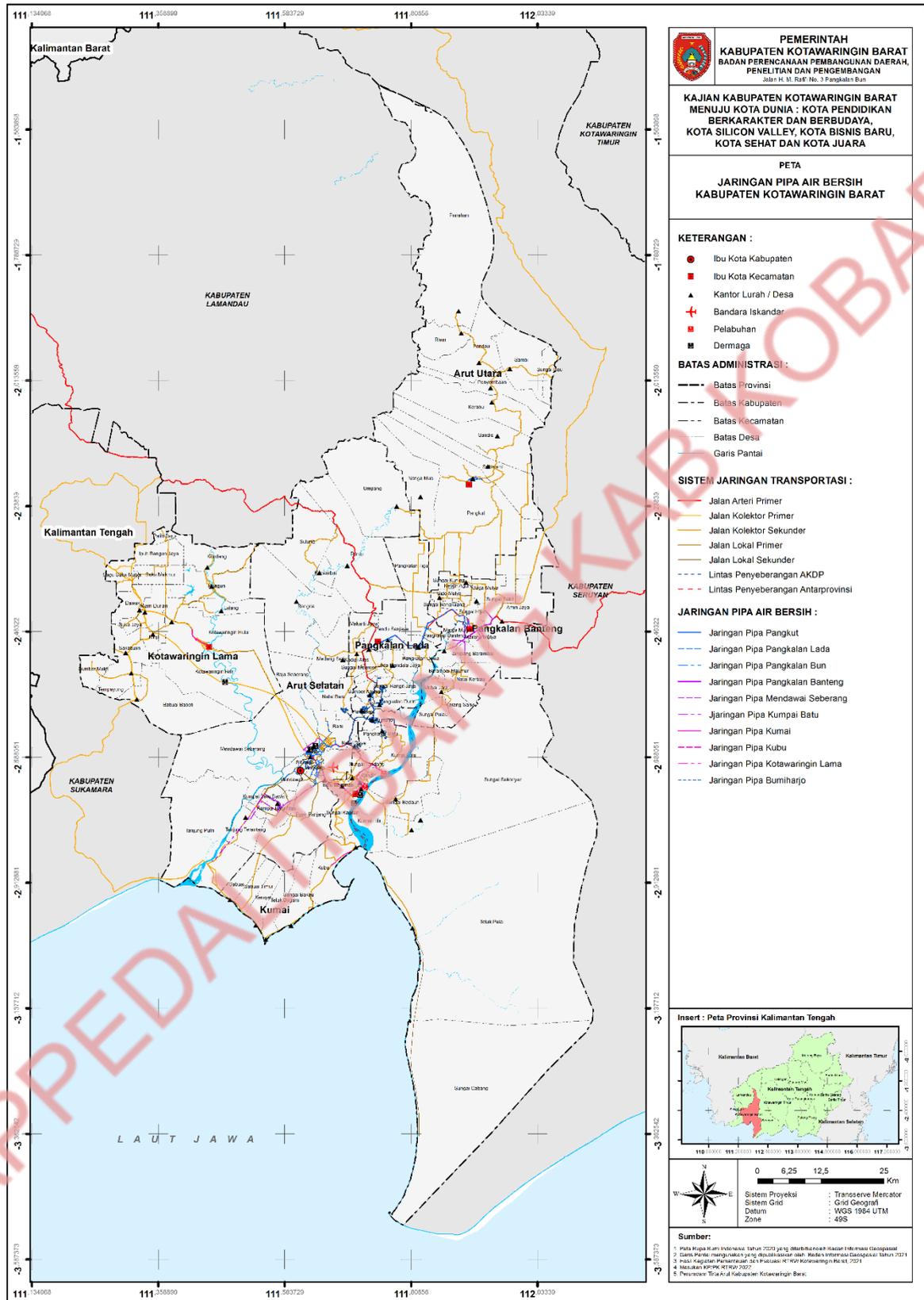
No.	Nama SPAM	Jenis dan Nama Sumber	Tahun di Bangun	Bangunan Penangkap Air Baku	Sistem Pengaliran	POMPA AIR BAKU			PIPA TRANSMISI				Jenis Alat Ukur Debit
						Kapasitas (lps)	Jumlah (Unit)	Kondisi	Jenis Pipa	Diameter (mm)	Panjang (m)	Kondisi	
1	IKK Pangkalan Bun	Sungai Arut	1991 & 2012	Intake	Pompa	150	1	Baik	PVC	400-160	44.550	Baik	Water Meter
2	IKK Kumai	Sungai Arut	2007 & 2013	Intake	Pompa	20	1	Baik	PVC	200-160	14.463	Baik	Water Meter
3	IKK Kotawaringin Lama	Sungai Lamandau	1992	Intake	Pompa	8	1	Baik	PVC	160	4.434	Baik	Water Meter
4	IKK Pangkalan Benteng	Sungai Hijau	2010, 2016, & 2020	Intake	Pompa	60	1	Baik	PVC	200-160	9.700	Baik	Water Meter
5	IKK Pangkalan Lada	Sungai Hijau	2015	Intake	Pompa	25	1	Baik	PVC	200-160	35.784	Baik	Water Meter
6	IKK Pangkut	Sungai Arut	2015	Intake	Pompa	10	1	Baik	PVC	160	2.673	Baik	Water Meter
7	IKK Kumai Bumiharjo	Sungai Arut	2021	Intake	Pompa	30	1	Baik	PVC	200-160	11.365	Baik	Water Meter
8	ABP Mendawai Seberang	Sungai Arut	1997 & 2019	Intake	Pompa	20	1	Baik	PVC	160	5.499	Baik	Water Meter
9	ABP Kumpai Batu Atas	Mata Air	2015	Intake	Pompa	20	1	Baik	PVC	200-160	22.201	Baik	Water Meter
10	ABP Kubu	Sungai Pemancingan	2015	Intake	Pompa	10	1	Baik	PVC	110	5.252	Baik	Water Meter

Sumber: Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 3. 42 Pencapaian Akses Air Minum Tahun 2021-2024

No.	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Akses air minum layak	%	92,6	93,8	94,2	94
		KK	61058	61382	63808	65954
2	Akses air minum jaringan perpipaan	%	44,3	47,1	47,4	47
		KK	29245	31069	32121	32967
3	Akses air minum bukan jaringan perpipaan	%	48,2	46,6	46,8	47,1
		KK	31813	30763	31687	32997
4	Akses air minum aman	%	38,7	40,1	39,8	40,1
		KK	25548	26441	26967	28104

Sumber: Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kotawaringin Barat



Peta 3.1 Jaringan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Barat

3.8.4 SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH

Air limbah domestik adalah air limbah permukiman (municipal waste water) yang terdiri dari black water yaitu air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, air pembersih, air pengelontor dan kertas pembersih serta grey water yaitu air limbah domestik yang berasal dari air cucian dapur dan cucian pakaian. Pengolahan air limbah domestik dengan SPALDS skala individual sistem (On-site System) banyak dijumpai di perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun teknologi atau pengolahan yang dipakai pada On-site system ini adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Penyediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan.

Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat toilet yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan untuk masyarakat dengan penghasilan sedikit/rendah biasanya tidak bisa membuat jamban sendiri tetapi mereka mendapatkan fasilitas berupa jamban secara kolektif. Pada kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai masyarakat ekonomi lemah yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar atau pekarangan belakang rumah. Hal ini yang masih dijumpai pada masyarakat di pedesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sistem infrastruktur air limbah domestik Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALDS) tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3. 43 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
1.	Septictank komunal + SR	APBD	2016	Ds. Batu Belaman	5 KK
2.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hilir	73 KK
3.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Kumai Hulu	78 KK
4.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017	Kel. Candi	16 KK
5.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Mendawai	71 KK
6.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2017-2018	Kel. Baru	78 KK
7.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Raja	28 KK
8.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Madurejo	28 KK
9.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2018	Kel. Sidorejo	28 KK
10.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Amin Jaya	80 KK
11.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Banteng	50 KK
12.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pandu Sanjaya	75 KK

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
13.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Purba Sari	50 KK
14.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kadipi Atas	50 KK
15.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sungai Melawen	50 KK
16.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Karang Mulya	80 KK
17.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Natai Kerbau	85 KK
18.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sumber Agung	50 KK
19.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sei Rangit Jaya	50 KK
20.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Tiga	50 KK
21.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Lada Mandala Jaya	75 KK
22.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Durin	75 KK
23.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Pangkalan Dewa	75 KK
24.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Kebun Agung	70 KK
25.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Sidomulyo	75 KK
26.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Arga Mulya	50 KK
27.	Tanki Septick Individual	DAK	2018	Ds. Mulya Jadi	50 KK
28.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Baru dan Kel. Madurejo	40 KK
29.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Mendawai dan Kel. Madurejo	40 KK
30.	Tanki Septick Individual	APBD + HIBAH	2019	Kel. Kumai Hilir dan Kel. Kumai Hulu	40 KK
31.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Marga Mulya	50 KK
32.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sungai Hijau	50 KK
33.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Simpang Berambai	50 KK
34.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Makarti Jaya	50 KK
35.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Keraya	50 KK
36.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Sei Bakau	50 KK
37.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Teluk Bogam	50 KK
38.	Tanki Septick Individual	DAK	2019	Ds. Natai Raya	50 KK
39.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Purbasari	68 KK
40.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Bumi Harjo	112 KK
41.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Bengkuang	63 KK
42.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pakit	63 KK
43.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Pulau	63 KK
44.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Berambai Makmur	63 KK
45.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sungai Kuning	63 KK
46.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Karang Sari	63 KK
47.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Sidomulyo	68 KK
48.	Tanki Septick Individual	DAK	2020	Ds. Kebun Agung	68 KK
49.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Baru	25 KK
50.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja Seberang	25 KK
51.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai	25 KK
52.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Mendawai Seberang	25 KK
53.	Tanki Septick Individual	APBD	2021	Kel. Raja	25 KK
54.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Bumi Harjo	56 KK
55.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Kumpai Batu Atas	46 KK
56.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Baru	46 KK
57.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Natai Raya	46 KK
58.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Pangkalan Satu	51 KK
59.	Tanki Septick Individual	DAK	2021	Ds. Sungai Tendang	53 KK

No.	Infrastruktur SPALDS	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Cakupan Layanan
TOTAL					3.182 KK

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Rekapitulasi akses air limbah domestik dan SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat (Instrumen SSK tahun 2020, Dinas PU) dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 44 Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	1,57%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	31,60%
	Akses Layak Bersama	1,20%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,60%
D	BABS di Tempat Terbuka	8,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	2,06%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Akses Aman)	39,60%
	Akses Layak Bersama	3,00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk)	7,80%
C	Akses Belum Layak (BABS Tertutup)	1,50%
D	BABS di Tempat Terbuka	2%

Sumber: Instrumen SSK 2020

Tabel 3. 38 SPALDS Sub Sistem Pengolahan Setempat

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
1.	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,03%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	1,36%
2.	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	2,04%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	35,55%
3.	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4.	Persentase RT yang BABS terselubung	
5.	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	4,89%

Sumber: Instrumen SSK 2020

Selain SPALDS, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki sistem pengelolaan limbah terpusat atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALDT) yang terkonsentrasi di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 39 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Infrastruktur SPALDT	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Lokasi	Kapasitas	Cakupan Layanan
IPLT						
1.	IPLT Translik	APBN	2014	Ds. Pasir Panjang	28 m ³ /hari	2 Kecamatan
IPAL						
1.	IPAL Komunal + SR	APBN + DAK	2013/2014	Ds. Pasir Panjang	200 KK	200 SR
2.	IPAL Komunal + SR	DAK	2017	Kel. Raja Seberang	50 KK	35 SR
3.	IPAL Komunal (sanimas) + SR	APBN	2017-2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	34 SR
4.	IPAL Kombinasi MCK + SR	DAK	2017-2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	45 SR
5.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	25 SR
6.	IPAL Komunal 2 + SR	DAK	2017	Kel. Kumai Hilir	50 KK	30 SR
7.	IPAL Komunal 1 + SR	DAK	2017-2018	Kel. Baru	100 KK	88 SR
8.	IPAL Komunal + SR (Griya Citra)	DAK	2018	Ds. Batu Belaman	50 KK	36 SR
9.	IPAL Komunal + SR (Arut Sehat)	DAK	2018	Kel. Madurejo	50 KK	30 SR
10.	IPAL Komunal 2 + SR (Buun Indah)	DAK	2018	Kel. Baru	50 KK	33 SR
11.	IPAL Komunal 2 + SR (Itah Bersama)	DAK	2018	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	50 SR
12.	IPAL Komunal + SR (Kumai Hulu)	DAK	2019	Kel. Kumai Hulu	50 KK	45 SR
13.	IPAL Komunal 3 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2019-2020	Kel. Mendawai Seberang	100 KK	100 SR
14.	IPAL Komunal 2 + SR (Raja Seberang)	DAK	2019	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
15.	IPAL Komunal 4 + SR (Mendawai Seberang)	DAK	2020	Kel. Mendawai Seberang	50 KK	47 SR
16.	IPAL Komunal 3 + SR (Raja Seberang)	DAK	2020	Kel. Raja Seberang	50 KK	30 SR
17.	IPAL Komunal 2 + SR (Kumai Hulu)	DAK	2020	Kel. Kumai Hulu	50 KK	35 SR
TOTAL					1.100 KK	893 SR

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

Sarana pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi cubluk/jamban tidak aman, cubluk dengan septiktank, WC jongkok maupun duduk dengan tangki septik aman dan tidak aman, jamban bersama, MCK komunal. MCK dan IPAL Komunal dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas PU Cipta Karya yang tersebar di beberapa desa, IPLT sudah terbangun namun belum berfungsi secara optimal. IPLT

di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu IPLT Translik Pasir Panjang (dibangun tahun 2014) memiliki kapasitas 28 m³/ hari. Wilayah cakupan pelayanannya meliputi Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Sistem yang digunakan dalam IPLT ini yaitu bak penerima-pretreatment mekanis mekanis acceptance unit) - tangki imhoff - Kolam anaerob-activated sludge-kolam maturasi-sludge drying bed-pemanfaatan padatan. Saat ini terdapat 1 unit truk tinja dengan kapasitas 4 m³ namun belum dioptimalkan dengan baik.



Gambar 3. 17 Sarana Pengolahan IPLT Translik Pasir Panjang

Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik dirinci per kecamatan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 45 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan

No.	Kecamatan	BABS	Belum Layak	Layak	Terpusat
1.	Kotawaringin Lama	12,4%	0,73%	86,80%	0%
2.	Arut Selatan	17,92%	3,11%	76,59%	2,38%
3.	Kumai	8,49%	0,34%	91,17%	0%
4.	Pangkalan Banteng	0%	0,88%	99,12%	0%
5.	Pangkalan Lada	0%	10,58%	89,42%	0%
6.	Arut Utara	0,79%	0%	99,21%	0%

Sumber: Instrumen SSK 2020

3.8.5 SALURAN IRIGASI

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, saluran irigasi memiliki peranan penting untuk mendukung sektor pertanian, yang menjadi salah satu sektor ekonomi utama di wilayah ini. Irigasi digunakan untuk mengairi lahan pertanian, terutama untuk sawah dan perkebunan yang tersebar di berbagai kecamatan.

Tabel 3. 46 Sebaran Embung Per Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Embung
1	Kotawaringin Lama	danau masorayan
2		danau Punjung
3		danau asam

No.	Kecamatan	Embung
4		embung di Desa Riam Durian
5		Danau Gatal
6	Arut Selatan	Embung di Karang Anyar
7		Danau seluluk
8		Danau Sulung Kenambui
9	Kumai	Embung Bengaris
10		Embung di Desa Batu Belaman
11		Embung di Desa Sungai Tendang
12	Pangkalan Banteng	Embung di Desa Sungai Pulau
13		Embung di Desa Karang Sari
14		Embung Berambai
15		Embung di Desa Marga Mulya
16		Embung di Desa Karang Mulya
17		Embung di Amin Jaya
18		Embung di Amin Jaya 2
19		Embung di Desa Sungai Hijau
20		Embung di Desa Sidomulyo
21		Embung di Desa Arga Mulya
22		Embung di Desa Sungai Kuning
23		Embung di Desa Kebun Agung
24	Pangkalan Lada	Embung di Desa Sungai Rangit Jaya
25		Embung Danau Kura-Kura

Sumber: Materi teknis PK RTRW TAHUN 2017-2037

Tabel 3. 47 Prasarana Irigasi di Kotawaringin Barat Tahun 2021

No.	Daerah Irigasi	Panjang Saluran	
		Primer (m)	Sekunder (m)
1	Berambai Makmur	3.797	8.900
2	Pangkalan Satu	5.652	5.913
	DI Pangkalan Satu/ Lahan I	3.126	4.187
	DI Pangkalan Satu Bumiharjo/ Lahan II	2.526	1.726
	Lahan III	0	0
3	Palih Baru	4.134	6.319
4	Sagu Suka Mulya (Kumai Kondang)	5.000	5.000
Jumlah		24.235	32.045

Sumber: Materi teknis PK RTRW TAHUN 2017-2037

3.8.6 PROGRAM TERKAIT

Program bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses ke hunian layak, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3. Program Pemerataan Konektivitas Wilayah
4. Program Peningkatan Pemerataan Jaringan

5. Program Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan

Tabel 3. 48 Indikator Urusan PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Irigasi kabupaten (Ha)	16439,88	16439,9	16439,9	16439,9	16439,9
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		72,15	84,25	84,51	61,59
3	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik (%)	86	54,52	56,71	57,915	35,071
4	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman (%)	80,5	80,11	92,59	93,76	94,21
5	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	99,89	88,15	93,19	94,58	94,66
6	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2kali setahun) (%)	86	90,29	82,63	85,77	91,12
7	Persentase ketaatan terhadap RTRW	99,89	99,94	99,94	99,94	

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2024

Tabel 3. 49 Capaian SPM Urusan PUPR Kab. Kotawaringin Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2020	2021	2022	2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	prosentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	78,71%	92,67%	94%	95%
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	prosentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88%	79%	88%	90%

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perda RTRW	-	1	-	-	-
2	Dokumen RDTR	-	-	-	-	4
3	Ketaatan Pada RTRW	-	-	99,89	99,94	99,94

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

3.9 KONDISI BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIKA DAN PERSANDIAN (KOTAWARINGIN BARAT KOTA SILICON VALLEY INDONESIA)

Kondisi Bidang Komunikasi Informatika, Statistika, dan Persandian di Kabupaten Kotawaringin Barat mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung transformasi

digital, pengelolaan data yang akurat, dan penguatan keamanan informasi untuk mendukung pelayanan publik.

3.9.1 JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN INTERNET

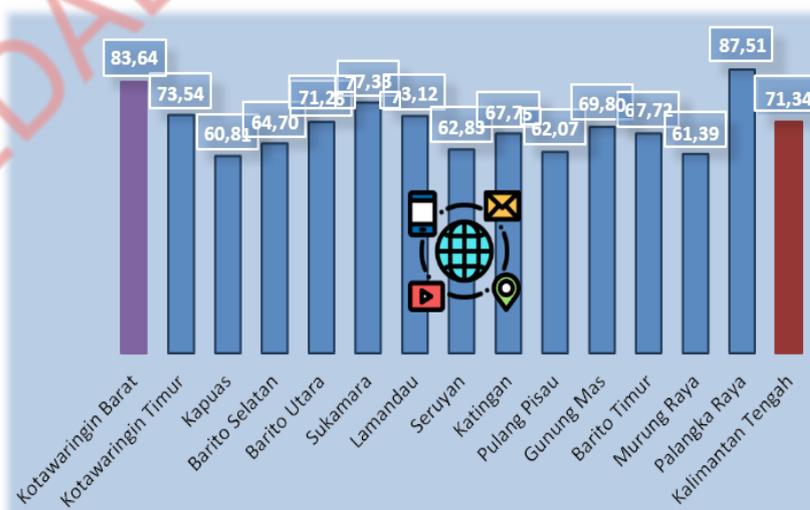
Layanan telepon dan internet di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah merata baik dilakukan oleh BUMN (Telkom) maupun oleh provider swasta dengan menggunakan telepon seluler. Penggunaannya menjangkau perkotaan maupun daerah pedesaan. Masyarakat bebas memilih provider apa yang bisa menjangkau dengan baik di lokasi mereka karena setiap daerah/kecamatan tingkat penangkapan jaringan (signal) berbeda, sehingga komunikasi (telepon maupun internet) bisa dilakukan dengan baik. Meskipun demikian, layanan telekomunikasi ini belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2021, pelanggan telepon sebanyak 6.976 dan pelanggan internet sebanyak 19.378 (PT. TELKOM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022).

Tabel 3.1 Jumlah BTS per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Menara BTS
1.	Kotawaringin Lama	7
2.	Arut Selatan	66
3.	Kumai	22
4.	Pangkalan Banteng	14
5.	Pangkalan Lada	18
6.	Arut Utara	2
	Jumlah	129

Sumber: Materi teknis PK RTRW TAHUN 2017-2037

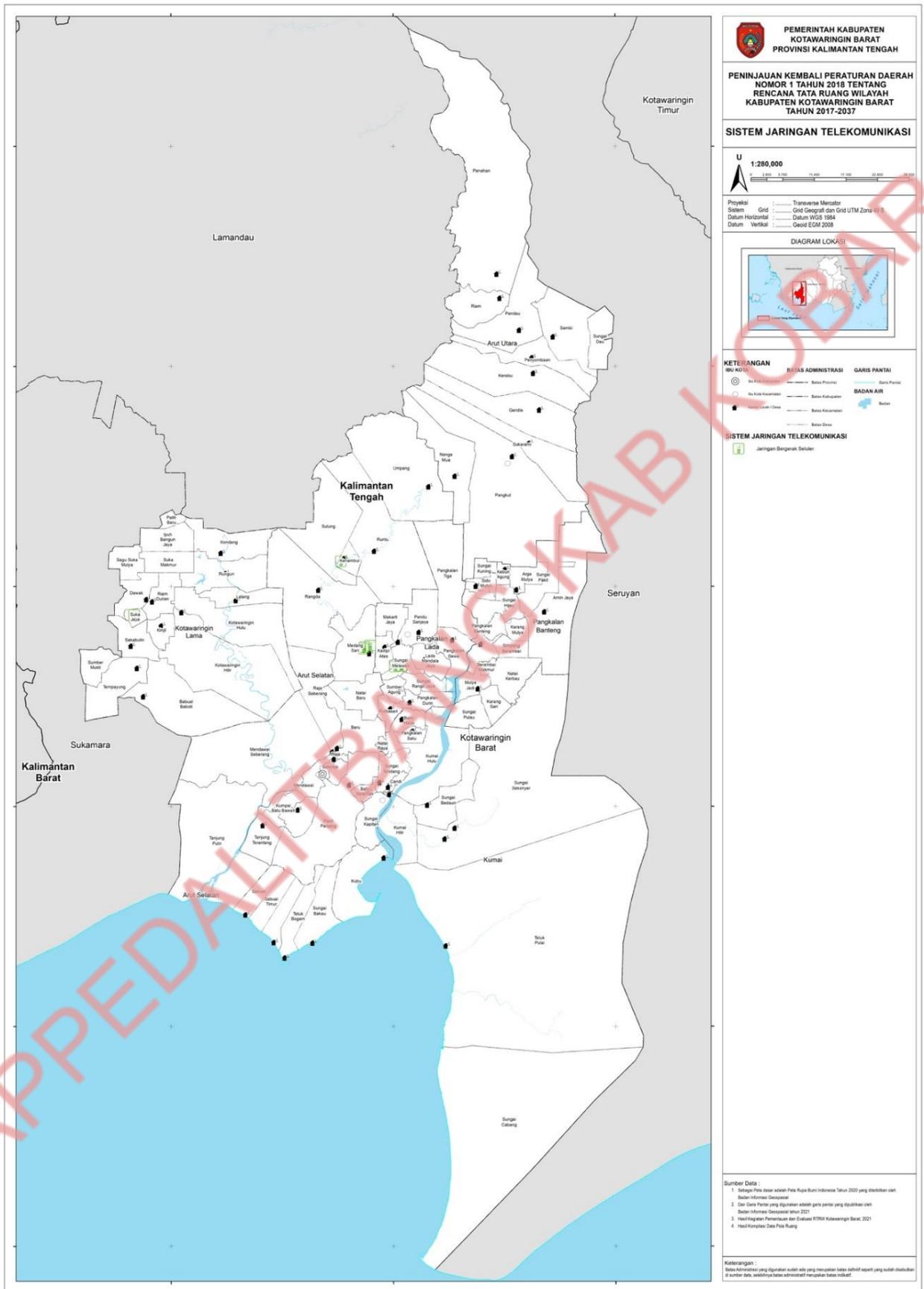
Persentase Penduduk 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten di Kalimantan Tengah, 2023



Persentase Tujuan Akses Internet di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



Gambar 3. 18 Akses Internet Di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



Gambar 3. 19 Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi

3.9.2 STATISTIKA

Bidang Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data. Pengelolaan data statistik di wilayah ini mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi, sosial, dan demografi. Berikut adalah rincian mengenai kondisi, tantangan, dan upaya pengembangan di bidang statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kondisi Saat Ini:

- Pengelolaan Data Statistik:
 - Peningkatan kapasitas pengumpulan dan pengelolaan data statistik dilakukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
 - Pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan OPD lain sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Sistem Informasi Berbasis Data:
 - Diperlukan integrasi data antarinstansi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
 - Tantangan dalam pengumpulan data akurat di wilayah pedalaman atau dengan akses terbatas.

Tabel 3. 51 Indikator Statistik Kotawaringin Barat Tahun 2020-2023

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			12	13
2	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		28	33	38
3	jumlah metadata indikator statistik sektoral		28	33	38
4	jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38	38	38	37

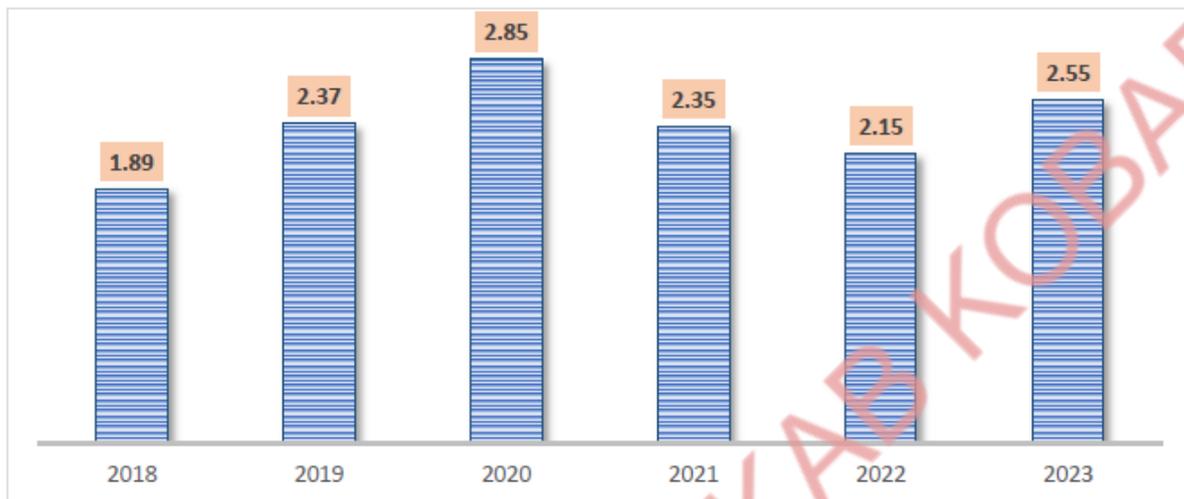
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kotawaringin Barat 2025-2045, Rantek RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025-2029, Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian 2024

Tabel 3. 52 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Tahun 2023

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Meningkatkan Indeks Domain Kebijakan SPBE	Indeks Domain Kebijakan SPBE	0,299	0,312	104,35%	Sangat tinggi
2	Meningkatkan Indeks Domain tata kelola SPBE	Indeks Domain tata kelola SPBE	0,53	0,475	89,62%	tinggi
3	Meningkatkan Indeks Domain manajemen SPBE	Indeks Domain manajemen SPBE	0,3	0,2244	74,80%	sedang

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
4	Meningkatkan Indeks Domain layanan SPBE	Indeks Domain layanan SPBE	1,25	1,53	122,67%	sangat tinggi

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kotawaringin Barat 2025-2045, Rantek RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025-2029, Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian 2024



Gambar 3. 20 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Kotawaringin Barat

3.9.3 PERSANDIAN

Bidang Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan melindungi informasi strategis dan meningkatkan keamanan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era digital yang terus berkembang, bidang ini berperan krusial dalam menjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritas informasi, terutama untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis teknologi.

Kondisi Terkini Bidang Persandian di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Pengelolaan Sistem Persandian:

- Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan sistem persandian untuk melindungi komunikasi internal pemerintah.
- Persandian digunakan untuk memastikan bahwa data dan informasi penting, seperti dokumen pemerintah dan informasi strategis, tetap aman dari akses yang tidak sah.

2. Kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN):

- Kerja sama dengan BSSN dalam pengembangan sistem keamanan informasi dan penerapan standar nasional persandian.
- Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala kepada tenaga ahli bidang persandian.

3. Perlindungan Data Elektronik:

- Sistem persandian diterapkan pada data yang dikelola secara digital untuk melindungi dari ancaman serangan siber.
- Penyediaan sertifikat elektronik dan pengamanan dokumen digital melalui enkripsi.

4. Kesadaran Keamanan Informasi:

- Meningkatkan kesadaran di kalangan aparatur pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.



Gambar 3. 21 Jumlah Seluruh Titik Yang Diamankan Pemda Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Kotawaringin Barat

3.9.4 PROGRAM TERKAIT

Berikut program dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian yang terkait untuk mendukung Kotawaringin Barat Kota Silicon Valley.

Tabel 3. 53 Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian

PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ▪ PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ✓ Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian 2024

3.10 KONDISI BIDANG PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (*KOBAR ISTIMEWA*)

3.10.1 PARIWISATA

Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah memiliki daya tarik khas yang menggabungkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan potensi sejarah. Sebagai salah satu daerah yang menjadi pintu masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kotawaringin Barat memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dalam 5 tahun kebelakang Wisatawan Nusantara mengalami fluktuasi dengan trend yang cenderung menurun sedangkan wisatawan manca negara mengalami peningkatan yang cukup konsisten, daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung meningkat secara internasional walaupun capaian tersebut belum cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia terlebih daerah yang berada di Pulau Bali dan Lombok.

Tabel 3. 54 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara
2019	14.552	296.563
2020	4.883	210.515
2021	510	221.881
2022	19.679	326.917
2023	41.738	344.880

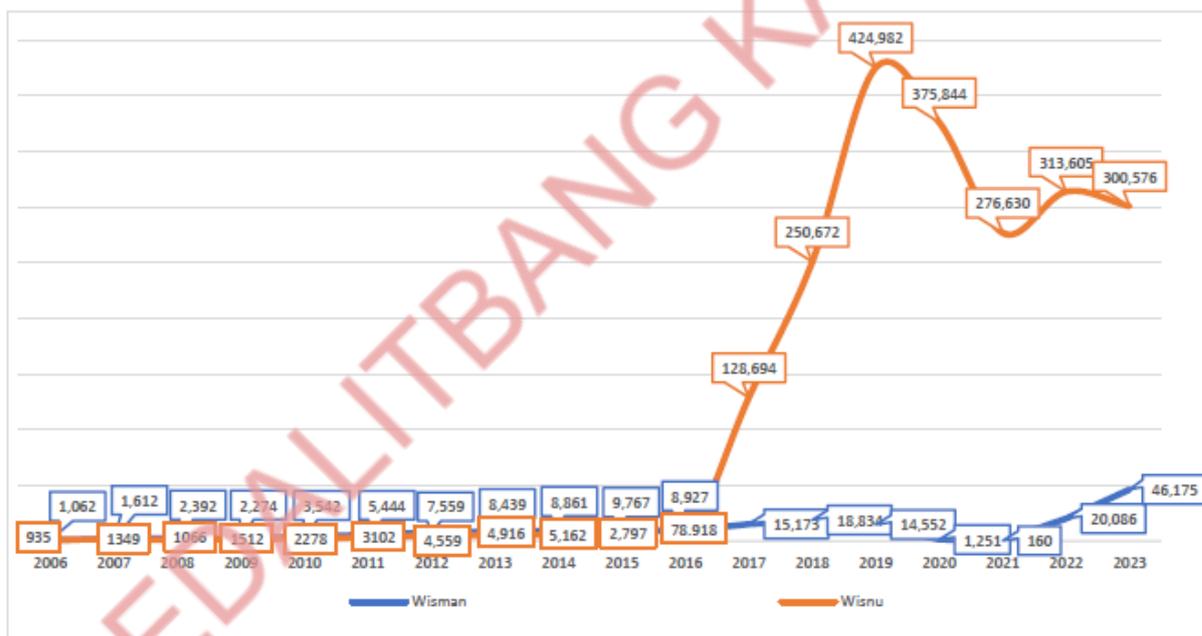
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045

Desa wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kabupaten ini memiliki keindahan alam, keunikan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berikut adalah beberapa desa wisata potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 55 Desa Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Desa	Kategori
1	Desa Pasir Panjang	Maju
2	Desa Keraya	Berkembang
3	Desa Kumpai Batu Atas	Berkembang
4	Desa Pangkalan Dewa	Berkembang
5	Desa Pangkalan Tiga	Berkembang
6	Desa Arga Mulya	Berkembang
7	Desa Riam	Berkembang
8	Desa Rungun	Rintisan
9	Desa Pangkalan Banteng	Rintisan
10	Desa Berambai Makmur	Rintisan
11	Desa Panahan	Rintisan
12	Desa Penyombaan	Rintisan
13	Desa Lada Mandala Jaya	Rintisan
14	Desa Sungai Sekonyer	Berkembang
15	Desa Sabuai	Rintisan
16	Desa Sungai Bakau	Rintisan

Sumber : Dinas Pariwisata Tahun 2024



Gambar 3. 22 Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

3.10.2 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (UKMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, serta budaya kewirausahaan masyarakat setempat memberikan peluang besar untuk pengembangan sektor ini.

1. Kondisi Perindustrian

- Sektor Unggulan:
 - Industri Kelapa Sawit:
 - Pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) merupakan industri utama di daerah ini.
 - Industri Kayu:
 - Pemanfaatan kayu lokal untuk produk seperti furnitur dan kerajinan.
 - Industri Rumah Tangga:
 - Produksi makanan olahan seperti keripik, kue tradisional, dan minuman khas.

2. Kondisi Perdagangan

- Pusat Perdagangan Utama:
 - Pasar tradisional seperti Pasar Indra Sari di Pangkalan Bun.
 - Toko modern dan minimarket mulai berkembang di area urban.
- Jenis Produk Unggulan:
 - Komoditas pertanian seperti beras, karet, dan hasil hutan.
 - Produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas.

3. Kondisi Koperasi dan UKMK

Jenis Koperasi:

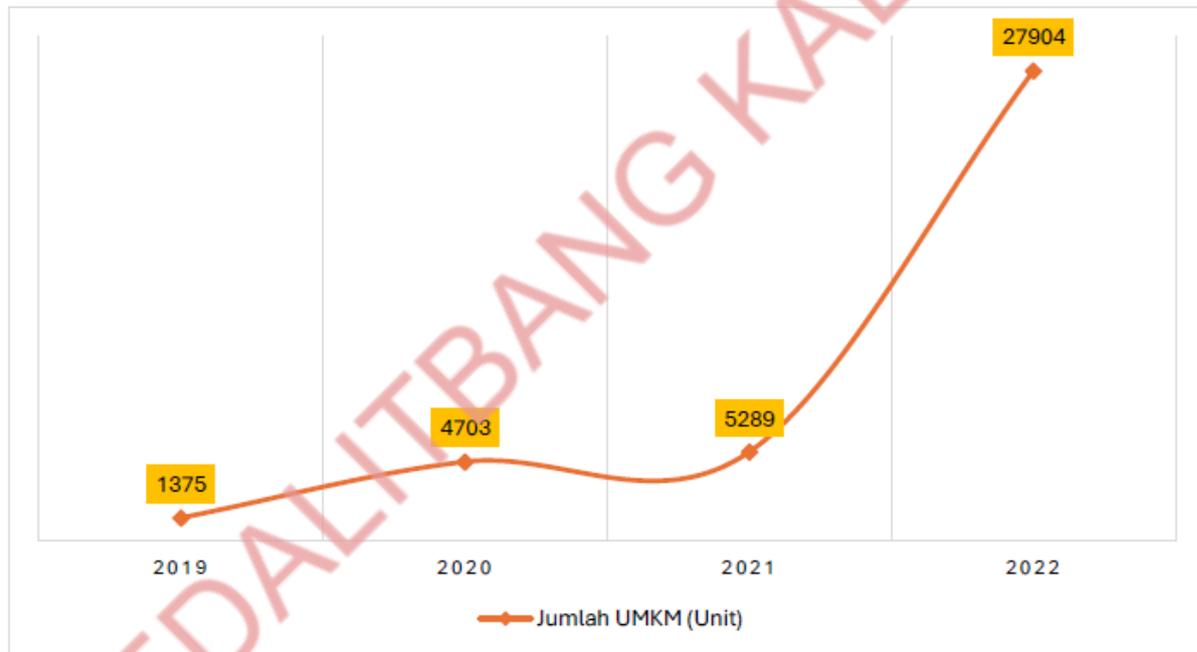
- Koperasi aktif yang bergerak di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan simpan pinjam.
- Koperasi masyarakat desa untuk mendukung usaha mikro dan kecil.
- UKMK Unggulan:
 - Kerajinan: Produksi anyaman rotan, souvenir dari kayu, dan batik khas Kalimantan.
 - Kuliner: Makanan olahan seperti amplang (kerupuk ikan), lemang, dan jajanan tradisional.
 - Agroindustri: Olahan hasil pertanian seperti minyak kelapa dan gula aren.

Kondisi industri, perdagangan dan usaha mikrokecil dan menengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

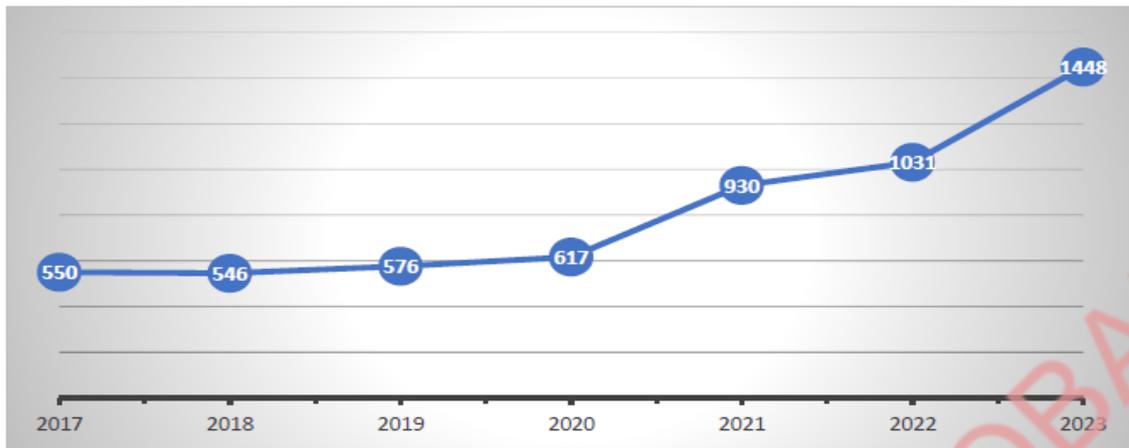
Tabel 3. 56 Rekapitulasi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kotawaringin Barat

NO	Sub Sektor	Tahun						Total Pelaku Ekonomi Kreatif per sub sektor 2018-2023	Presentase Kontribusi per sub sektor terhadap keseluruhan jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun 2018-2023	Presentase Pertumbuhan (nilai akhir - nilai awal) / nilai awal X 100%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Kuliner	86	59	101	126	52	891	1315	39.54	16.13
2	Musik	128	0	201	15	0	17	361	10.85	-
3	Kriya	22	34	24	0	5	4	89	2.68	-0.20
4	Seni Pertunjukan	0	166	117	198	206	195	882	26.52	-0.05
5	Fotografi	0	70	72	50	42	52	286	8.60	0.24
6	Film	0	0	31	21	1	55	108	3.25	54.00
7	Fashion	23	176	11	19	8	3	240	7.22	-0.63
8	DKV						45	45	1.35	-
Total Pelaku Ekonomi Kreatif Per tahun		259	505	557	429	314	1262	3326	100.00	
Persentase kenaikan (%) = ((akhir-awal)/awal x 100%		0.40	0.95	0.10	-0.23	-0.27	3.02			

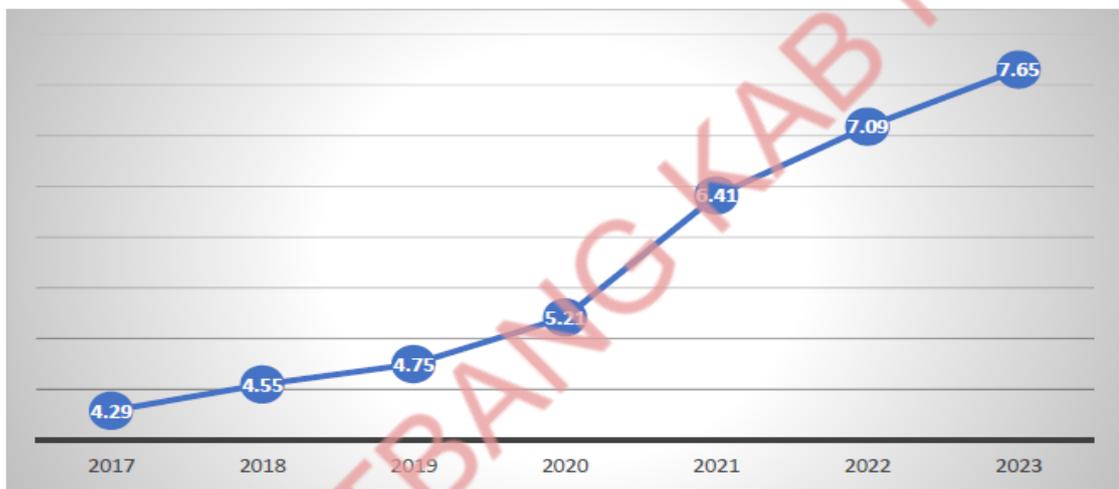
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045



Gambar 3. 23 Jumlah UMKM di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022



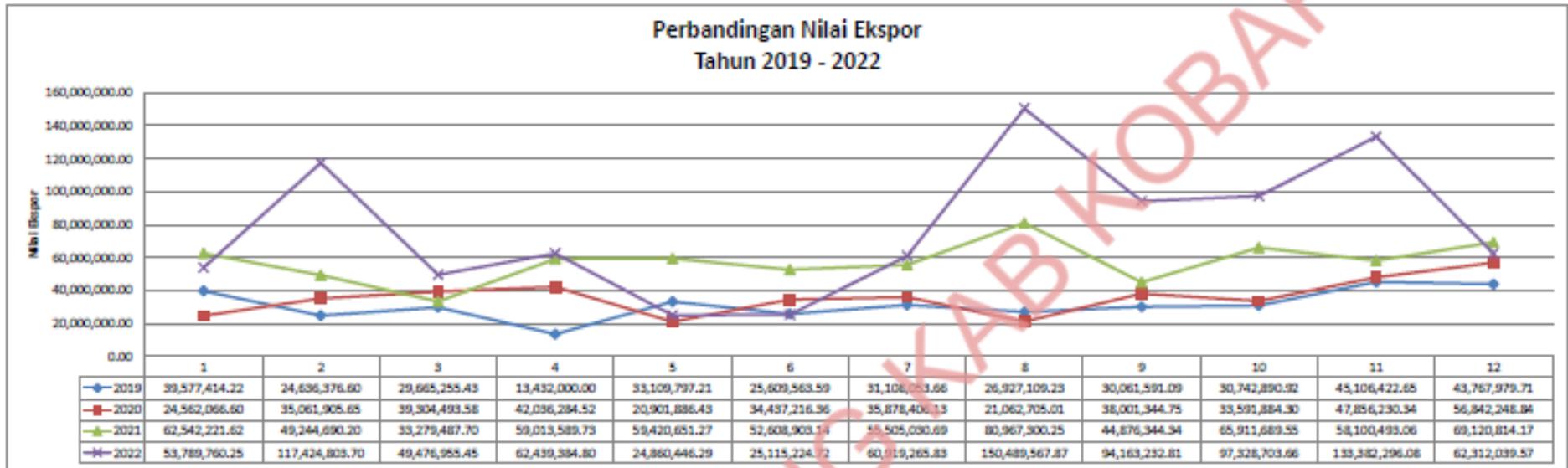
Gambar 3. 24 Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat



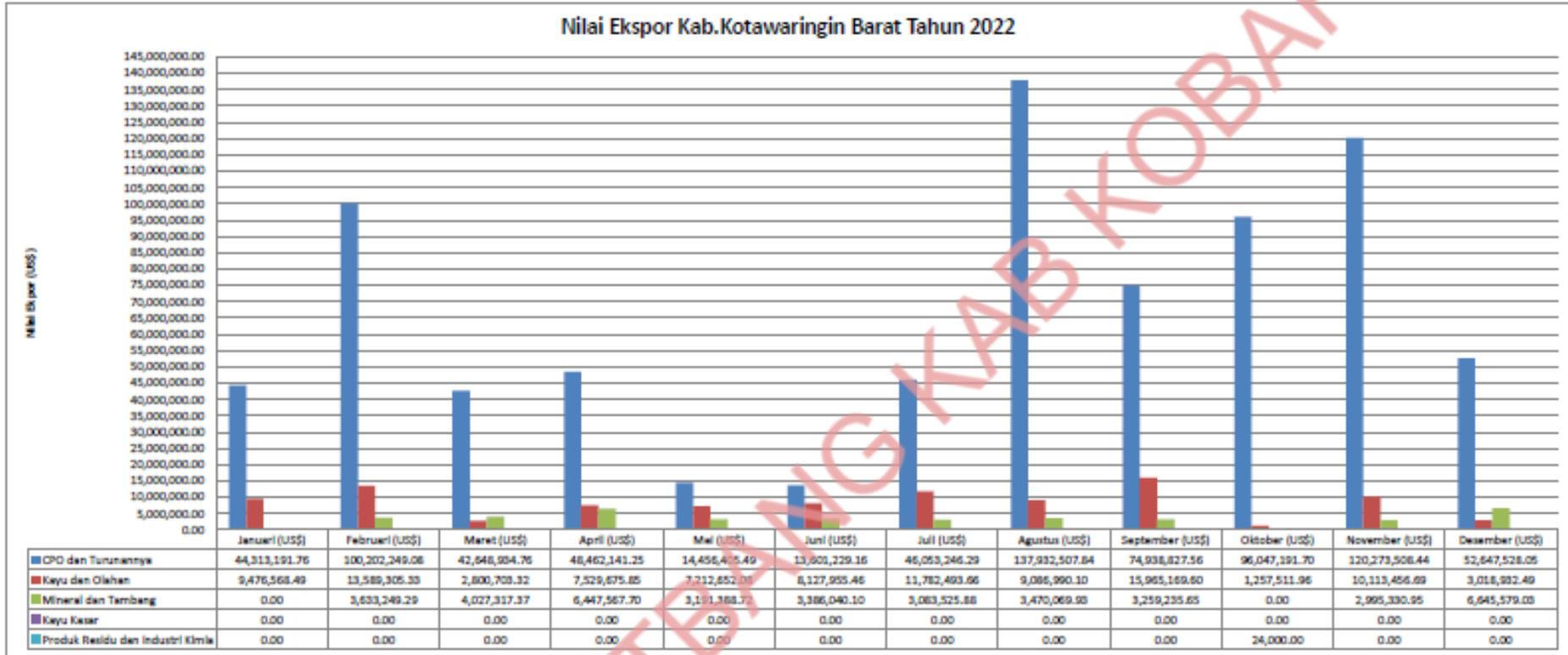
Gambar 3. 25 PDRB Sektor Perindustrian Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 26 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3. 27 Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2019-2022



Gambar 3. 28 Nilai Ekspor Kabupaten Kotawaringin Tahun 2022

3.10.3 PROGRAM TERKAIT

1. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Sudah Dilakukan
 - a. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif
 - ii. Pembinaan Ekonomi Kreatif
 - iii. Pembinaan Event Kreativitas
 - b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - i. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - i. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - i. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, berpromosi dan Berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/ kota
 - e. Program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
 - i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
 - ii. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
3. Program Disperindagkop Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - b. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - c. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - e. Program Pengembangan UMKM
4. Program Disperindagkop Bidang Perdagangan

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Program Disperindagkop Bidang Industri
- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

3.11 KONDISI BIDANG INVESTASI, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.11.1 PDRB

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menggambarkan kondisi investasi dalam suatu wilayah, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, biasanya mencakup informasi tentang sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian. Data ini menjadi indikator penting untuk memahami potensi dan tren investasi.

Tabel 3. 57 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.617,10	5.197,20	6.233,20	6.969,10	7.627,80
B	Pertambangan dan Penggalian	256,3	257,6	265,2	280,8	243,7
C	Industri Pengolahan	4.754,50	5.211,50	6.412,00	7.095,00	7.656,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,3	11,5	12,2	13,4	15,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	18,1	17,8	20,1	21,3	22,7
F	Konstruksi	1.851,60	1.651,60	1.947,80	2.192,20	2.240,20
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2.664,30	2.881,20	3.110,40	3.459,00	3.789,50
H	Transportasi dan pergudangan	1.734,40	1.600,30	1.721,40	1.915,30	2.222,40
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	267,3	259,9	270,3	291,7	328,7
J	Informasi dan komunikasi	179	189,2	209,9	227,2	239,4
K	Jasa keuangan dan asuransi	966,2	1.063,70	1.189,10	1.277,50	1.396,80
L	Real estate	386,1	405,9	417	459,2	498
M,N	Jasa Perusahaan	9,5	8,4	8,8	9,7	11,3
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	653,4	743,3	780,8	855,6	877,9
P	Jasa Pendidikan	533,6	583,2	613,2	634	728,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	231,5	301,9	357,7	397,2	452,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	198,9	137,6	139,6	166,9	200,4

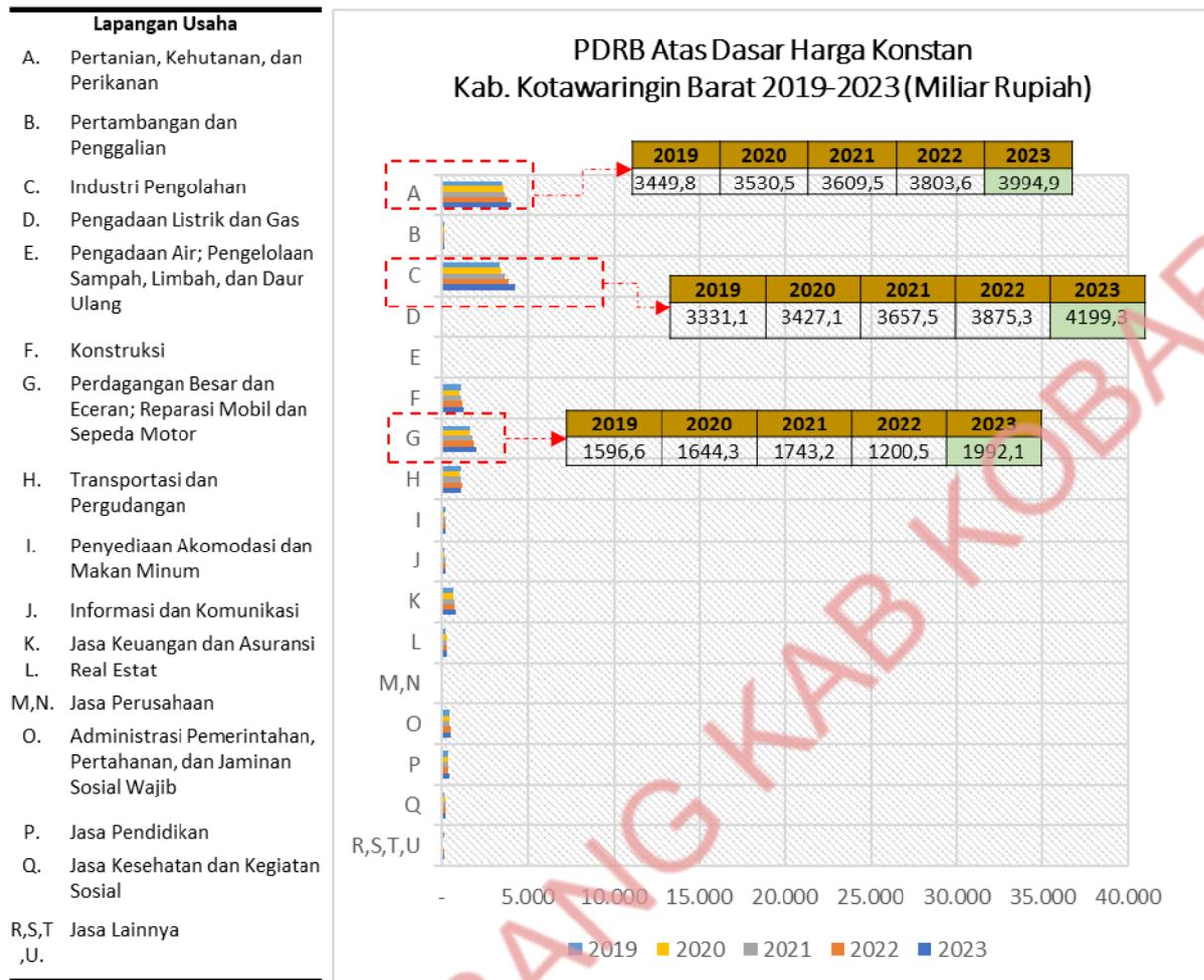
No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
	PDRB	19.332,10	20.521,90	23.708,80	26.265,10	28.551,70

Sumber: Kabupaten kotawaringin Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3. 58 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat (miliar rupiah), 2019–2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.449,80	3.530,50	3.609,50	3.803,60	3.994,90
B	Pertambangan dan Penggalian	158,1	157,8	149,7	153,9	130,9
C	Industri Pengolahan	3.331,10	3.427,10	3.657,50	3.874,30	4.199,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,2	8	8,3	8,8	10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	11,3	10,9	12	12,2	12,7
F	Konstruksi	1.122,50	987,4	1.116,80	1.200,50	1.205,50
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.596,60	1.644,30	1.743,20	1.866,50	1.992,10
H	Transportasi dan pergudangan	1.088,90	998,3	1.071,80	1.146,70	1.256,50
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	165,9	156,5	160,5	167,4	182,1
J	Informasi dan komunikasi	137,4	147,8	161	171,9	177,9
K	Jasa keuangan dan asuransi	611,6	672,7	723,5	749,8	802,1
L	Real estate	229,4	236,9	242,3	256,7	270,1
M,N	Jasa Perusahaan	5,6	4,9	5,1	5,4	6,1
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	385,1	419,3	436	469,4	467,5
P	Jasa Pendidikan	320,5	346,3	357,8	366,1	399,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	137,6	174,3	199,4	213,8	232,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	119,1	81,2	78,8	91,4	107,7
	PDRB	12.877,60	13.004,30	13.733,20	14.558,40	15.446,60

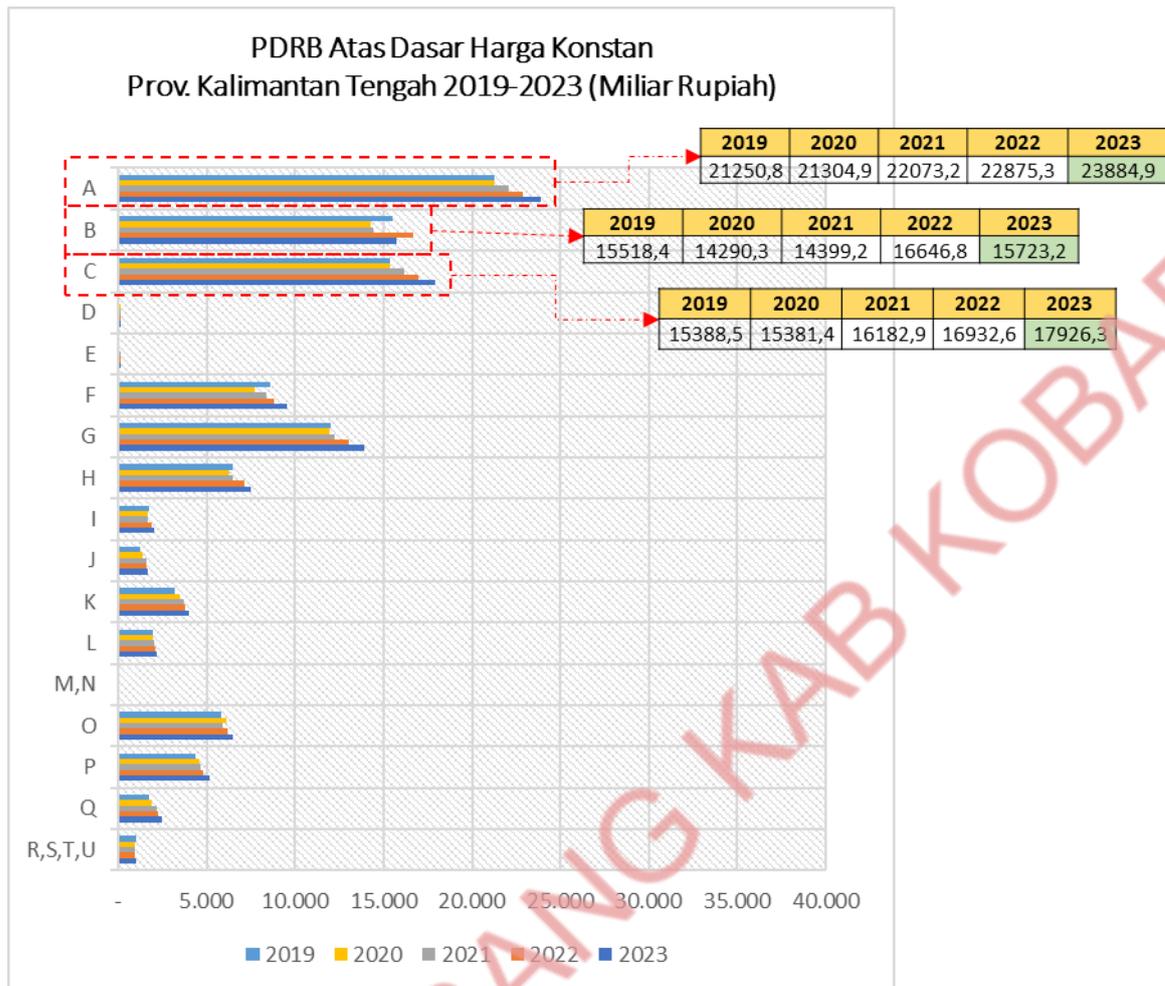
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 3. 29 Diagram Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kotawaringin Barat 2019-2023

Sektor dengan nilai PDRB tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat secara berurutan adalah :

- a. Industri Pengolahan (nilai tertinggi Rp 4199,3 M di tahun 2023)
- b. Perdagangan Besar (nilai tertinggi Rp 1992,1 M di tahun 2023)
- c. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai tertinggi Rp 3994,9 M di tahun 2023)



Gambar 3. 30 Diagram Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023

Sektor dengan nilai PDRB tertinggi di Prov. Tengah secara berurutan adalah:

- B. Pertambangan dan Penggalian (nilai tertinggi Rp 15.723,2 di tahun 2023)
- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai tertinggi Rp 23.884,9 M di tahun 2023)
- C. Industri Pengolahan (nilai tertinggi Rp 17.926,3 M di tahun 2023)

3.11.2 INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

Data realisasi investasi di Indonesia, termasuk Kotawaringin Barat, menunjukkan tren yang positif hingga 2024. Pada Triwulan III 2024, realisasi investasi nasional mencapai Rp431,48 triliun, meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sebagian besar investasi diarahkan ke sektor hilirisasi, dengan nilai Rp91,51 triliun atau 21,2% dari total realisasi triwulan tersebut. Penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 650.000 orang dalam periode ini.

Pada Semester I 2024, total realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun, setara dengan 50,3% dari target tahunan sebesar Rp1.650 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor UMKM berkontribusi sebesar Rp127 triliun dengan menciptakan lebih dari 4,6 juta lapangan kerja.

Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah berpotensi menarik investasi di sektor-sektor berbasis sumber daya alam, pariwisata, dan pengembangan kawasan industri, sesuai dengan prioritas nasional untuk mendorong hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah strategis.

Tabel 3. 59 Data Realisasi Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-2020

Tahun	Uraian	PMA	PMDN	NIB	UMKM
2019	Triwulan I				
	Realisasi	568.569.044.140	84.551.658.750	831.693.500.000	11.845.300.000
	Investasi	2.803.910.611.474	7.422.147.207.635		
Total Realisasi Investasi					1.496.659.502.890
2019	Triwulan II				
	Realisasi	280.016.174.919	1.382.697.853.579	65.645.000.000	12.666.500.000
	Investasi	2.476.186.319.708	2.915.999.468.270		
Total Realisasi Investasi					1.741.025.528.498
2019	Triwulan III				
	Realisasi	364.885.611.638	411.673.518.724	52.748.520.000	18.107.000.000
	Investasi	4.650.282.112.240	512.543.711.445		
Total Realisasi Investasi					847.414.650.362
2019	Triwulan IV				
	Realisasi	188.344.268.253	411.673.518.724	11.782.750.000	7.896.653.500
	Investasi	6.060.600.623.791	2.566.983.640.937		
Total Realisasi Investasi					619.697.190.477
2020	Triwulan I				
	Realisasi	954.207.704.104	618.034.895.600		
	Investasi				
Total Realisasi Investasi					1.572.242.599.704
2020	Triwulan II				
	Realisasi	509.349.605.912	2.532.671.040.878		
	Investasi				
Total Realisasi Investasi					3.042.020.646.790
2020	Triwulan III				
	Realisasi	674.196.803.108	1.092.125.260.877		
	Investasi				
Total Realisasi Investasi					1.766.322.063.985
2020	Triwulan IV				
	Realisasi	31.743.595.506	498.715.268.652		
	Investasi				
Total Realisasi Investasi					530.458.864.158

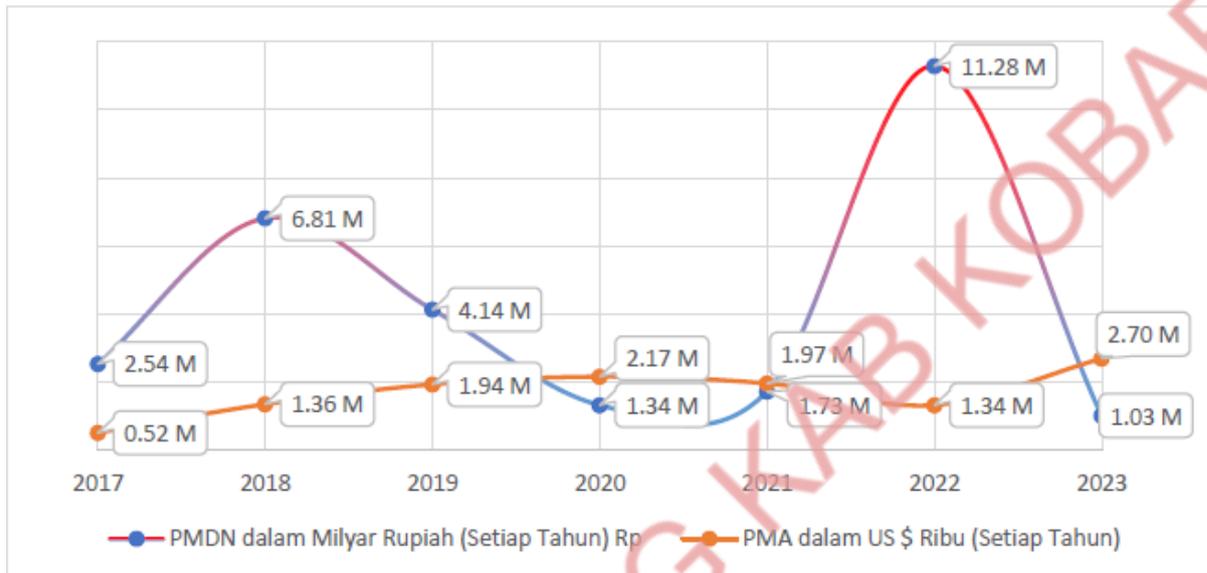
Sumber: Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045 dan Materi Teknis PK RTRW Tahun 2017-2037

Tabel 3. 60 Realisasi Investasi Tahun 2020-2024

Keterangan	Satuan	TAHUN REALISASI INVESTASI					2024 s.d Triwulan II	TOTAL	KET
		2020	2021	2022	2023				
Jumlah Investor (PMA/PMDN)									
- PMDN	Pelaku Usaha	48	46	46	72	133		Jumlah Perusahaan yang aktif (dalam pelaporan lkpm) di Kobar	
- PMA	Perusa haan	12	11	14	14	16			
Jumlah Investasi Nasional	Berskala								
- PMDN	Rp	4.741.546.466.0 07,00	1.731.922.379.80 2,18	11.281.482.157. 792,00	1.030.092.400. 000,00	705.465.229. 809	19.490.508.633.4 10,20		
- PMA	Rp	2.169.497.708.6 30,00	1.971.023.273.40 8,00	1.335.823.279. 897,00	2.700.349.795. 540,00	117.361.615.11 8	8.294.055.672.59 3,31		
TOTAL REALISASI INVESTASI		6.911.044.174.6 37,00	3.702.945.653.21 0,18	12.617.305.437 .689,00	3.730.442.195.5 40,00	822.826.844. 927,31	27.784.564.306.0 03,50		

Sumber: DPMPTSA, 2024

Penanaman modal dalam negeri memiliki nilai yang lebih besar dari penanaman modal asing. Modal asing cukup memiliki stabilitas yang baik sehingga masih mengalami kenaikan pada tahun tahun tersebut akan tetapi di tahun 2023 Modal dalam negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan sedangkan penanaman modal asing meningkat cukup signifikan walaupun tidak sebanding dengan penurunan modal dalam negeri.



Gambar 3. 31 Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.11.3 PROGRAM TERKAIT

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

3.12 KONDISI BIDANG KESEHATAN DAN SOSIAL (KOBAR KOTA SEHAT)

3.12.1 KESEHATAN

Fasilitas kesehatan merupakan sarana penyedia kebutuhan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa rumah sakit umum, puskesmas, klinik pratama, dan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari dokter sejumlah 130 orang, dokter gigi sejumlah 23 orang, perawat sejumlah 209 orang, bidan sejumlah 245 orang, tenaga kefarmasian sejumlah 5 orang, tenaga gizi sejumlah 32 orang dan ahli teknologi

laboratorium medik sejumlah 134 orang. Berikut data kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 3. 61 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
1	Kotawaringin Lama	7	4	29	40	0	5	17
2	Arut Selatan	99	12	49	64	5	12	48
3	Kumai	6	2	49	50	0	4	25
4	Pangkalan Banteng	10	3	42	41	0	4	17
5	Pangkalan Lada	4	1	21	24	0	4	14
6	Arut Utara	4	1	19	26	0	3	13
	Jumlah	130	23	209	245	5	32	134

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Pada Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 4 rumah sakit, diantaranya RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Rumah Sakit Citra Husada, RSUD Kutaringin, Rumah Sakit Harapan Insani. Puskesmas, klinik dan posyandu terdapat di masing-masing Kecamatan. Lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 3. 62 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	RS Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik Pratama	Posyandu
1	Kotawaringin Lama	1	3	12	1	20
2	Arut Selatan	3	6	17	17	77
3	Kumai	0	3	19	4	30
4	Pangkalan Banteng	0	2	17	5	20
5	Pangkalan Lada	0	2	5	1	26
6	Arut Utara	0	2	9	2	14
	Jumlah	4	18	79	30	187

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

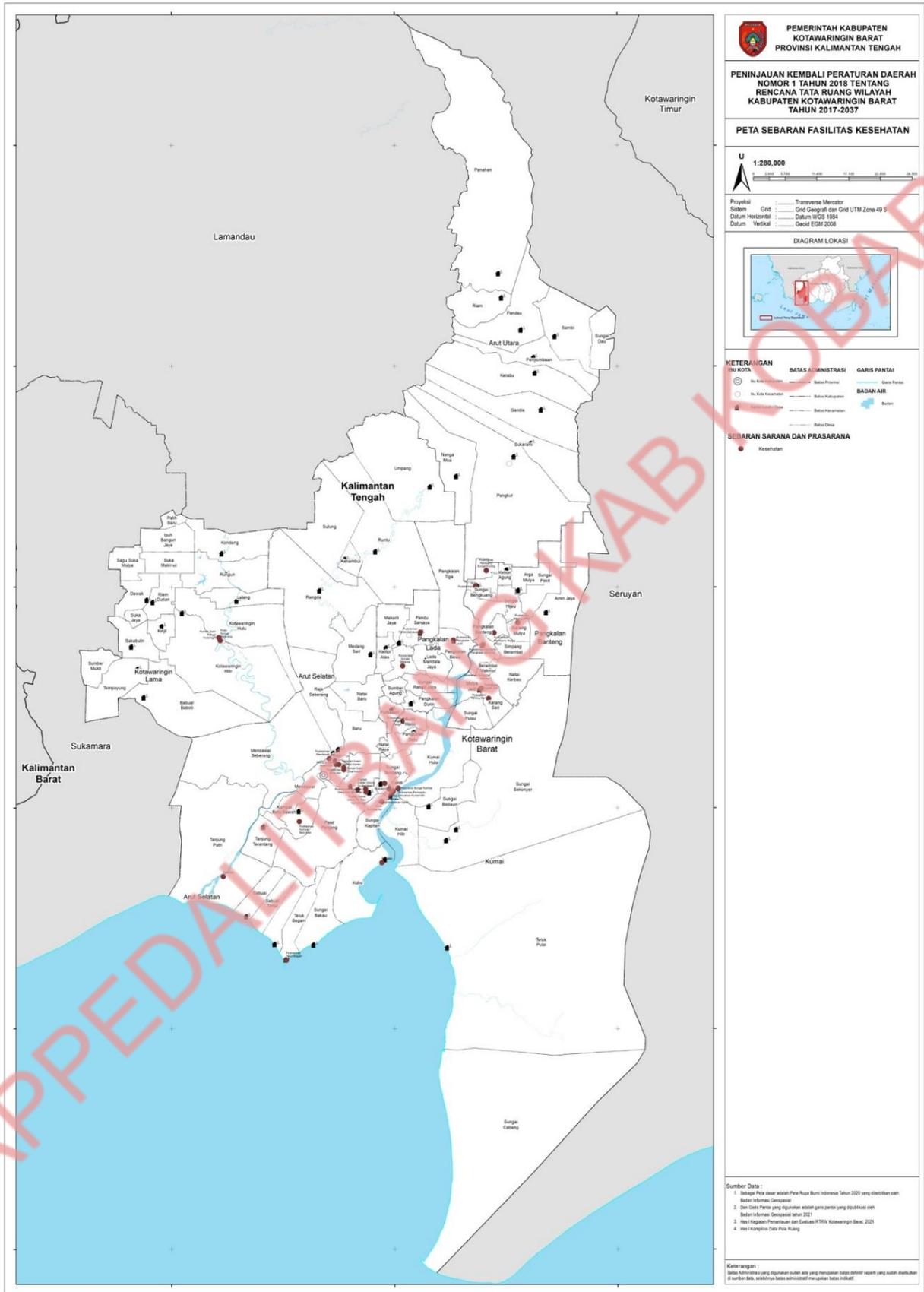
Tabel 3. 63 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No.	Nama Fasilitas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas	Status
1	RSUD. Sultan Imanuddin	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Negeri
2	RS. Citra Husada	Arut Selatan	Madurejo	Rumah Sakit	Swasta
3	Puskesmas Arut Selatan	Arut Selatan	Raja	Puskesmas	Negeri
4	Puskesmas Natai Palingkau	Arut Selatan	Baru	Puskesmas	Negeri
5	Puskesmas Mendawai	Arut Selatan	Mendawai	Puskesmas	Negeri
6	Puskesmas Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Puskesmas	Negeri
7	Puskesmas Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	_ Kumpai Batu Atas	Puskesmas	Negeri
8	Puskesmas Teluk Bogam	Kumai	_ Teluk Bogam	Puskesmas	Negeri
9	Puskesmas Kumai	Kumai	Candi	Puskesmas	Negeri
10	Puskesmas Sungai Rangit	Kumai	Bumi Harjo	Puskesmas	Negeri
11	Puskesmas Pandu Sanjaya	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	Puskesmas	Negeri
12	Puskesmas Pangkalan Lada	Pangkalan Lada	Pangkalan Dewa	Puskesmas	Negeri
13	Puskesmas Semanggang	Pangkalan Banteng	Semanggang	Puskesmas	Negeri

No.	Nama Fasilitas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas	Status
14	Puskesmas Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	Puskesmas	Negeri
15	Puskesmas Runtu	Arut Selatan	Runtu	Puskesmas	Negeri
16	Puskesmas Kotawaringin Lama	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Puskesmas	Negeri
17	Puskesmas Riam Durian	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Puskesmas	Negeri
18	Puskesmas Ipuh Jaya	Kotawaringin Lama	Ipih Bangun Jaya	Puskesmas	Negeri
19	Puskesmas Arut Utara	Arut Utara	Pangkut	Puskesmas	Negeri
20	Puskesmas Sambu	Arut Utara	Sambu	Puskesmas	Negeri
21	Pustu Pasir Panjang	Arut Selatan	Pasir Panjang	Pustu	Negeri
22	Pustu Sidorejo	Arut Selatan	Sidorejo	Pustu	Negeri
23	Pustu Pangkalan Bungur	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
24	Pustu Kumpai Batu Bawah	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	Pustu	Negeri
25	Pustu Pangkalan Lima	Arut Selatan	Baru	Pustu	Negeri
26	Pustu Natai Baru	Arut Selatan	Natai Baru	Pustu	Negeri
27	Pustu Madurejo	Arut Selatan	Madurejo	Pustu	Negeri
28	Pustu Sulung	Arut Selatan	Sulung	Pustu	Negeri
29	Pustu Mendawai Seberang	Arut Selatan	Mendawai Seberang	Pustu	Negeri
30	Pustu Raja Seberang	Arut Selatan	Raja Seberang	Pustu	Negeri
31	Pustu Tanjung Putri	Arut Selatan	Tanjung Putri	Pustu	Negeri
32	Pustu Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	Pustu	Negeri
33	Pustu Tanjung Terantang	Arut Selatan	Tanjung Terantang	Pustu	Negeri
34	Pustu Umpang	Arut Selatan	Umpang	Pustu	Negeri
35	Pustu Natai Raya	Arut Selatan	Natai Raya	Pustu	Negeri
36	Pustu Simpang Berambai	Pangkalan Banteng	Simpang Berambai	Pustu	Negeri
37	Pustu Karang Sari	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
38	Pustu Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	Pustu	Negeri
39	Pustu Marga Mulya	Pangkalan Banteng	Marga Mulya	Pustu	Negeri
40	Pustu Berambai Makmur	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
41	Pustu Karang Mulya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
42	Pustu Natai Kerbau	Pangkalan Banteng	Natai Kerbau	Pustu	Negeri
43	Pustu Sungai Pulau	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
44	Pustu Amin Jaya	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
45	Pustu Mulya Jadi	Pangkalan Banteng	Mulya Jadi	Pustu	Negeri
46	Pustu Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	Sungai Kuning	Pustu	Negeri
47	Pustu Sungai Bengkuang	Pangkalan Banteng	Sungai Bengkuang	Pustu	Negeri
48	Pustu Sungai Pakit	Pangkalan Banteng	Amin Jaya	Pustu	Negeri
49	Pustu Sidomulyo	Pangkalan Banteng	Sidomulyo	Pustu	Negeri
50	Pustu Sungai Cabang	Kumai	Sungai Cabang	Pustu	Negeri
51	Pustu Sungai Berdaun	Kumai	Sungai Berdaun	Pustu	Negeri
52	Pustu Sungai Tendang	Kumai	Sungai Tendang	Pustu	Negeri
53	Pustu Sungai Sintuk	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
54	Pustu Pangkalan Satu	Kumai	Pangkalan Satu	Pustu	Negeri
55	Pustu Sungai Kapitan	Kumai	Sungai Kapitan	Pustu	Negeri
56	Pustu Kumai Hilir	Kumai	Kumai Hilir	Pustu	Negeri
57	Pustu Kumai Hulu	Kumai	Kumai Hulu	Pustu	Negeri
58	Pustu Kubu	Kumai	Kubu	Pustu	Negeri
59	Pustu Sebuai Barat	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
60	Pustu Sebuai Timur	Kumai	Sebuai	Pustu	Negeri
61	Pustu Keraya	Kumai	Keraya	Pustu	Negeri
62	Pustu Sungai Bakau	Kumai	Sungai Bakau	Pustu	Negeri
63	Pustu Sungai Sekonyer	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
64	Pustu Tran	Kumai	Sungai Sekonyer	Pustu	Negeri
65	Pustu Batu Belaman	Kumai	Batu Belaman	Pustu	Negeri
66	Pustu Teluk Pulau	Kumai	Teluk Pulau	Pustu	Negeri
67	Pustu Teluk Bogam	Kumai	Teluk Bogam	Pustu	Negeri

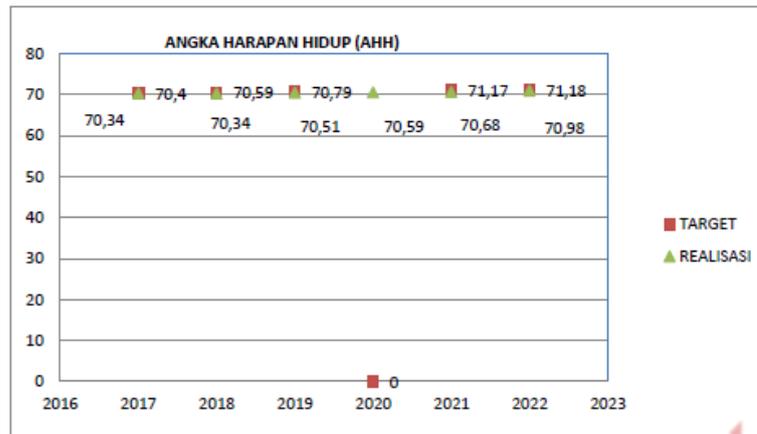
No.	Nama Fasilitas	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas	Status
68	Pustu Sumber Agung	Pangkalan Lada	Sumber Agung	Pustu	Negeri
69	Pustu Sungai Melawen	Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Pustu	Negeri
70	Pustu Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	Pangkalan Durin	Pustu	Negeri
71	Pustu Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	Sungai Rangit Jaya	Pustu	Negeri
72	Pustu Purba Sari	Pangkalan Lada	Purba Sari	Pustu	Negeri
73	Pustu Makarti Jaya	Pangkalan Lada	Makarti Jaya	Pustu	Negeri
74	Pustu Riam Durin	Kotawaringin Lama	Riam Durian	Pustu	Negeri
75	Pustu Lalang	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Pustu	Negeri
76	Pustu Suka Makmur	Kotawaringin Lama	Suka Makmur	Pustu	Negeri
77	Pustu Sumber Mukti	Kotawaringin Lama	Sumber Mukti	Pustu	Negeri
78	Pustu Desa Sukajaya	Kotawaringin Lama	Sukajaya	Pustu	Negeri
79	Pustu Rungun	Kotawaringin Lama	Rungun	Pustu	Negeri
80	Pustu Diung	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Pustu	Negeri
81	Pustu Palih Baru	Kotawaringin Lama	Palih Baru	Pustu	Negeri
82	Pustu Sagu Sukamulya	Kotawaringin Lama	Suka Mulya	Pustu	Negeri
83	Pustu Sungai Dau	Arut Utara	Sungai Dau	Pustu	Negeri
84	Pustu Gandis	Arut Utara	Gandis	Pustu	Negeri

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024



Gambar 3. 32 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

1) Angka Harapan Hidup



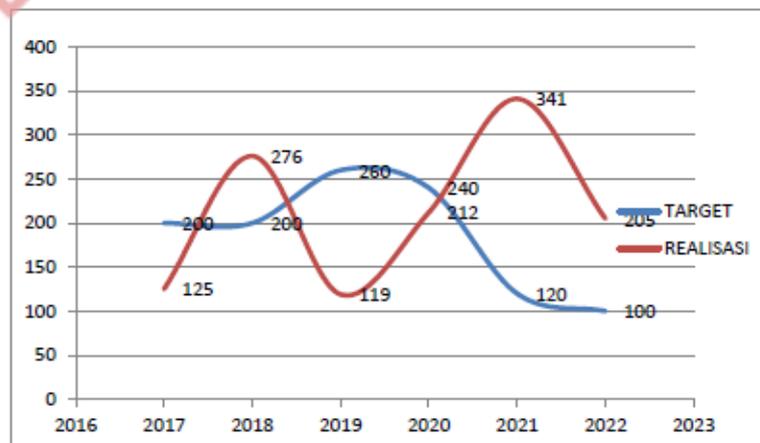
Gambar 3. 33 Angka Harapan Hidup Per desember Tahun 2022

Pada tahun 2023 sampai dengan 2026 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun peningkatan yang terjadi masih lebih rendah dari harapan, sehingga belum mampu memenuhi target disetiap tahunnya.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

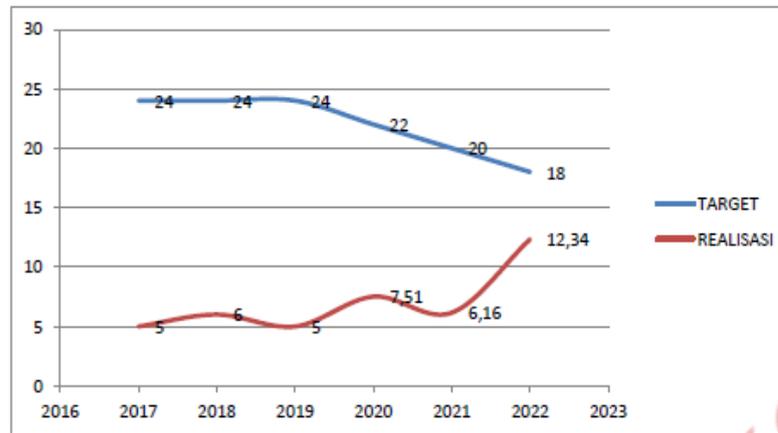
Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk kedalam kelompok indikator negatif, dimana angka yang tinggi menunjukkan kinerja yang buruk sedangkan angka yang rendah menunjukkan kinerja yang baik.

Angka Kematian Ibu dalam Periode 2017 -2020 menunjukan tren yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 dan 2019 selain mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, capaian AKI mampu ditekan hingga berada dibawah target nasional. Sebaliknya pada tahun 2018, 2020,2021 dan 2022. Di tahun 2022 mencapai realisasi 205/ 100.000 KH dari target 100/100.000 KH mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan masing -masing capaian masih diatas target nasional.



Gambar 3. 34 Angka Kematian Ibu Per Desember Tahun 2022

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

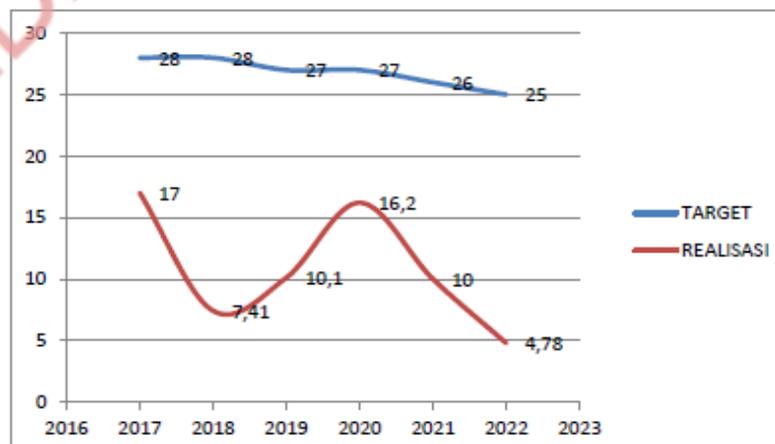


Gambar 3. 35 Angka Kematian Bayi Per Desember Tahun 2022

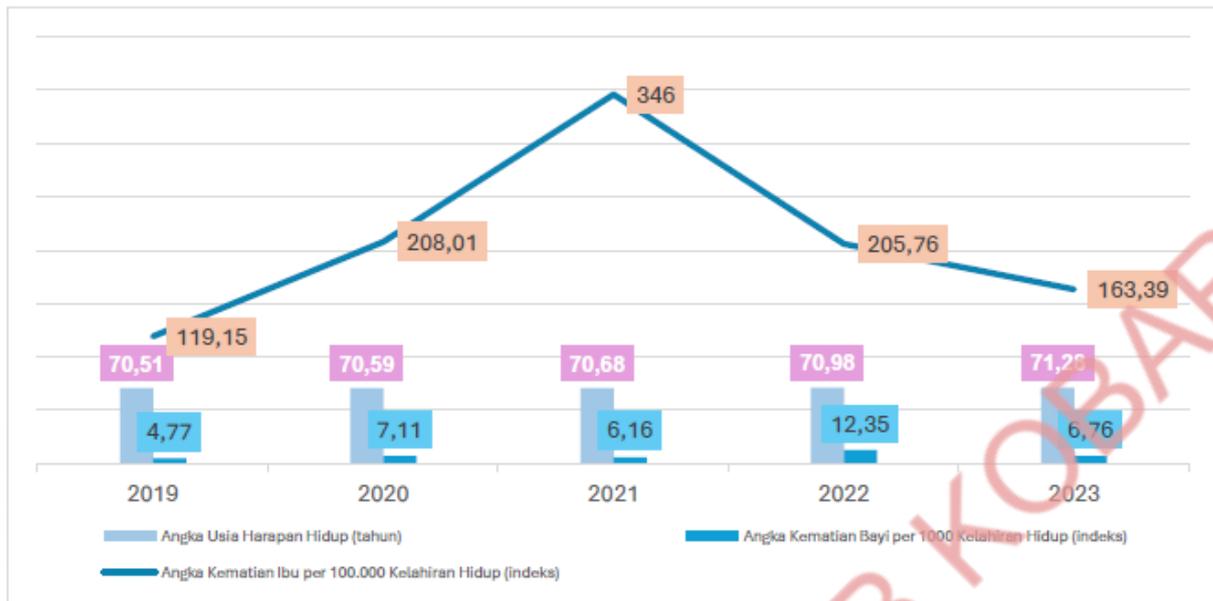
Angka Kematian Bayi tahun 2017 s.d 2022 berkisar diangka 5 hingga 7 per 1.000 kelahiran hidup dan berfluktuasi naik turun. Tahun 2018 dan 2020 ada peningkatan sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2022 turun. Pada tahun 2022 realisasi 12,34 / 1.000 KH dari target 18/ 1.000 KH. Kinerja terhadap target menunjukkan disepanjang tahun 2017 s.d 2022 target nasional selalu terpenuhi.

4) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting tahun 2017 s.d 2022 berkisar di angka 7% hingga 17% dan berfluktuasi naik turun, Tahun 2017 prevalensi stunting sebesar 17%, tahun 2018 membaik cukup tajam menjadi 7,41%, tahun 2019 memburuk menjadi sebesar 10,01%, tahun 2020 kembali memburuk menjadi 16,2% tahun 2021 membaik menjadi 10% dan di tahun 2022 membaik mencapai 4,78 % dari target 25 %. Kinerja terhadap target menunjukkan disepanjang tahun 2017 s.d 2022 target selalu terpenuhi.



Gambar 3. 36 Angka Prevalensi Stunting Per Desember 2022



Gambar 3. 37Capaian Indiktaor Urusan Kesehatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas, angka usia harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 70,51 tahun menjadi 71,28 tahun. Hal ini menunjukkan mencerminkan terjaidnya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat, juga adanya data perhitungan baru yang bersumber pada hasil Sensus Penduduk Longform Tahun 2020 sehingga data kependudukan yang digunakan lebih riil.

3.12.2 SOSIAL

Kemiskinan merupakan masalah sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 13.400 penduduk dan dengan prosentase sebesar 4,18% Berikut data kondisi bidang sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 64 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	319.064	14,1	4,96
2017	338.230	13,3	4,52
2018	344.337	12,9	4,27
2019	360.942	12,8	4,11
2020	397.883	11,5	3,59
2021	418.388	12,3	3,95
2022	476.297	12,4	3,93
2023	513.949	13.4	4,18

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. z = garis kemiskinan. Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,55. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun.

Indek keparahan kemiskinan adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. z = garis kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 0,13. Dari tahun ke tahun semakin baik dengan grafik yang menurun. Berikut untuk kedetailan datanya.

Tabel 3. 65 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2016-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2016	0,77	0,16
2017	0,57	0,11
2018	0,55	0,12
2019	0,55	0,13
2020	0,40	0,08
2021	0,48	0,09
2022	0,47	0,09
2023	0,55	0,13

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 memiliki nilai cukup tinggi yaitu 13,4 (ribu) dibanding Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3. 66 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu)
Kotawaringin Barat	13,4
Kotawaringin Timur	26,6
Kapuas	19,2
Barito Selatan	6,7
Barito Utara	7,1
Sukamara	2,7
Lamandau	2,6
Seruyan	15,7
Katingan	8,9
Pulau Pisau	5,9
Gunung Mas	6,6
Barito Timur	8,6
Murung Raya	7,8
Kota Palangka Raya	10,3
Kalimantan tengah	142,2

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 3. 38 Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan hasil yang sangat positif. Peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator ini mencerminkan upaya yang berhasil dan efektif dalam menyediakan berbagai layanan sosial dasar, baik untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, maupun korban bencana. Keberhasilan program-program ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menerima pembinaan meningkat dari 10.832 pada tahun 2019 menjadi 26.013 pada tahun 2022, dan diperkirakan tetap sama pada tahun 2023. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial naik dari 95,68% pada tahun 2019 menjadi 101,99% pada tahun 2022, dan sedikit turun menjadi 96,82% pada tahun 2023.

3.12.3 PROGRAM TERKAIT

Berikut adalah beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial: Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, termasuk program kesehatan dan sosial lainnya⁽¹⁾.
2. Program Penanganan Bencana: Dinas Sosial juga terlibat dalam program penanganan bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak⁽¹⁾.
3. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan (FKP-SP): Dinas Sosial menggelar acara FKP-SP untuk meningkatkan standar pelayanan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat⁽²⁾.

Sumber informasi ini berasal dari situs web resmi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dan berita dari media seperti Antara News.

Sumber:

[1] dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id (<https://dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id/pdf/RencanaKerjaDinasSosial.pdf>)

[2] Dinas Sosial (<https://dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id/>)

Tabel 3. 67 Program Dinas Kesehatan

Uraian
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

3.13 KONDISI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA (KOBAR JUARA)

3.13.1 OLAHRAGA

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat sejumlah jenis olahraga yang banyak diikuti oleh pemuda yang terdiri dari:

1. Olahraga Prestasi

- Bola Voli
- Taekwondo
- Karate
- Grass Track
- Basket
- Pencak Silat
- Panahan
- Menembak
- Tenis Meja
- Futsal
- Senam
- Sepak Takraw
- Binaraga dan Fitnes
- Sepak bola

- Sepeda
 - Panjat Tebing
 - Tenis Lapangan
 - Bulu Tangkis
 - Kempo
 - Renang
 - Dayung
 - Tinju
 - Catur
 - Atletik
 - Biliard
 - Kick Boxing
 - Aero Sport
 - Beladiri Amatir
 - Olahraga Wanita
 - E-Sport
 - Bridge
 - Sepatu Roda
 - Korfball
2. Olahraga Rekreasi
- Angkat Berat
 - Atletik
 - Boccia
 - Bulu Tangkis
 - Catur
 - Judo
 - Menembak
 - Panahan
 - Renang
 - Sepak Bola CR
 - Tenis Lapangan Kursi Roda
 - Tenis Meja
 - Olahraga Tradisional
 - Airsoft Brothethood Unity
 - Sepeda Tua

- Off-Road
- Senam Tera
- Olahraga Pernafasan
- Aerobik dan Fitnes
- Line Dance
- Senam Kreasi

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin telah dilengkapi dengan fasilitas olahraga seperti gambar dibawah ini.



Gedung Sport
Center Pangeran
Ratu Alamsyah



Tennis Court Pasir
Panjang



Stadion Sampuraga



Lapangan Basket
Pasir Panjang

Gambar 3. 39 Fasilitas Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.13.2 KEPEMUDAAN

Jumlah organisasi pemuda yang dibina sejak tahun 2019 menunjukkan kuantitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Secara umum, jumlahnya cenderung pada angka 30an. Beberapa kondisi yang menjadi kendala dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi. Selain itu kurangnya kegiatan dalam organisasi sehingga partisipasinya juga kurang. Pada aspek komunikasi dengan perangkat daerah terkait juga masih kurang.

Sedangkan untuk klub olahraga menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena minat pemuda lebih condong pada pengembangan diri melalui kegiatan olahraga. Beberapa kompetisi yang pernah diikuti oleh pemuda di Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:



Gambar 3. 40 Kompetisi Bidang Olahraga Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Beberapa kondisi yang masih menjadi PR penyelenggaraan sub urusan olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: (1). kurangnya sinkronisasi penyusunan jadwal rencana kerja dan jadwal rencana penyerapan anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran; (2) masih kurang optimalnya koordinasi dan evaluasi internal; (3) kurangnya bimtek keterampilan; (4) masih adanya sarpras kepemudaan yang pemanfaatannya kurang maksimal; (5) tidak memiliki gelanggang pemuda; (6) kurangnya akurasi data keorganisasian pemuda.

3.13.3 PROGRAM TERKAIT

Berdasarkan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 “Tercapai” dan melebihi target yang ditetapkan, dengan persentase capaian 103%. Sesuai capaian tersebut terdapat program untuk pengembangan lebih lanjut terkait kepemudaan dan olahraga.

Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi:

1. Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan
2. Program Khursus Wasit C3 Askap PSSI
3. Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan
4. Program Seminar Pemuda
5. Program Pembinaan Aktivitas Pemuda
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Berikut adalah beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. **Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan:** Dinas ini berusaha memperkuat kapasitas dan kemampuan lembaga-lembaga yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga⁽¹⁾.
2. **Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kotawaringin Barat⁽¹⁾.
3. **Pelayanan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga:** Menyediakan pelayanan pembinaan kepemudaan dan olahraga yang intensif, produktif, dan inovatif⁽¹⁾.
4. **Program Kampung Pemuda:** Menyiapkan program Kampung Pemuda untuk memberikan wadah inspiratif dan dorongan motivasi bagi kaum milenial⁽²⁾.

3.14 KONDISI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.14.1 PEMBERDAYAAN DESA

Kondisi Pemberdayaan Desa

1. Persentase desa mandiri sebesar 56,79%
2. Lembaga ekonomi desa yang sudah terbina 215 lembaga di tahun 2022
3. Lembaga yang aktif (PKK : 101 dan posyandu : 182)
4. Desa Terakses teknologi tepat guna sebanyak 133 desa
5. Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa bersama dimana dari 76 Bumdesa terdapat 34 yang tidak aktif

Program-Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
6. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
9. Program Peningkatan Kerjasama Desa
10. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal
11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

12. Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan
13. Program Administrasi Pemerintahan Desa
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.14.2 PERUMAHAN RAKYAT

Kondisi Perumahan Rakyat

1. Rumah tangga pengguna air minum bersih : 92,59 %
2. Rumah tinggal bersanitasi : 93,49 %
3. Rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik : 87,61 %
4. Rasio Rumah Layak Huni : 0,97

Program bidang perumahan dan kawasan permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Pengelolaan Izin Lokasi
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
8. Program Penatagunaan Tanah
9. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.15 KONDISI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (KOBAR BERSIH, HIJAU DAN PRODUKTIF)

3.15.1 LINGKUNGAN HIDUP

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Kotawaringin Barat tahun 2023 mencapai 76,19
- Suhu udara rata-rata bulanan tertinggi di Kabupaten Kotawaringin terjadi dibulan Maret, April, Mei Juni pada 27,2 °C, sedangkan suhu udara maksimum yang tercatat oleh BMKG Kotawaringin barat pada bulan Januari 2020 yaitu pada suhu 37,2 °C
- Seluruh nilai O3 berada dibawah ambang batas (baku mutu 235 µg/Nm3) menunjukkan bahwa kadar O3 di udara masih rendah.

- Kualitas air sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan beberapa parameter utama sudah sangat melampaui baku mutu, antara lain: TSS, BOD, COD, Fe, Phenol, Sulfat, MBAS, Fecal dan Total coliform (Sumber : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kotawaringin Barat, 2021)
- Terdapat 76 titik lokasi RTH
- Terdapat 1 TPA, 14 titik TPS/TPST/TP 3R dan 13 Bank Sampah

3.15.2 PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

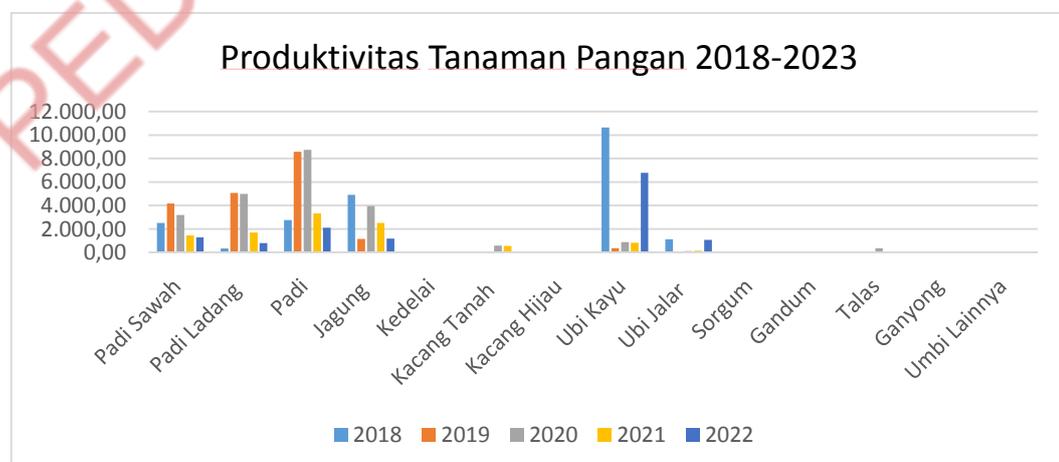
Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa potensi dari hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 3. 68 Produktivitas Tanaman Pangan

No	Kecamatan	Realisasi Tahunan Tanaman Pangan (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi Sawah	2.499,84	4.178,90	3186,48	1.457,40	1.300,97
2	Padi Ladang	336,00	5.067,72	4997,12	1.689,09	793,56
3	Padi	2.757,49	8.569,74	8731,284	3.331,01	2.094,53
4	Jagung	4.904,98	1.151,20	3950,154	2.513,21	1.192,61
5	Kedelai	3,36	2,60	3,542	2,00	0,64
6	Kacang Tanah	72,45	40,90	594,7	555,75	53,91
7	Kacang Hijau	0,10	0,60	0,1	-	0,60
8	Ubi Kayu	10.648,25	374,00	888,798	824,59	6.767,87
9	Ubi Jalar	1.122,72	103,60	126,854	153,99	1.083,15
10	Sorgum	-	-	24,91	16,80	-
11	Gandum	-	-	0	-	-
12	Talas	4,70	6,50	370,92	40,09	19,53
13	Ganyong	-	-	0	-	-
14	Umbi Lainnya	-	-	0	-	-
TOTAL		19.514,06	10.249,14	14.691,26	7.437,45	11.212,83

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024

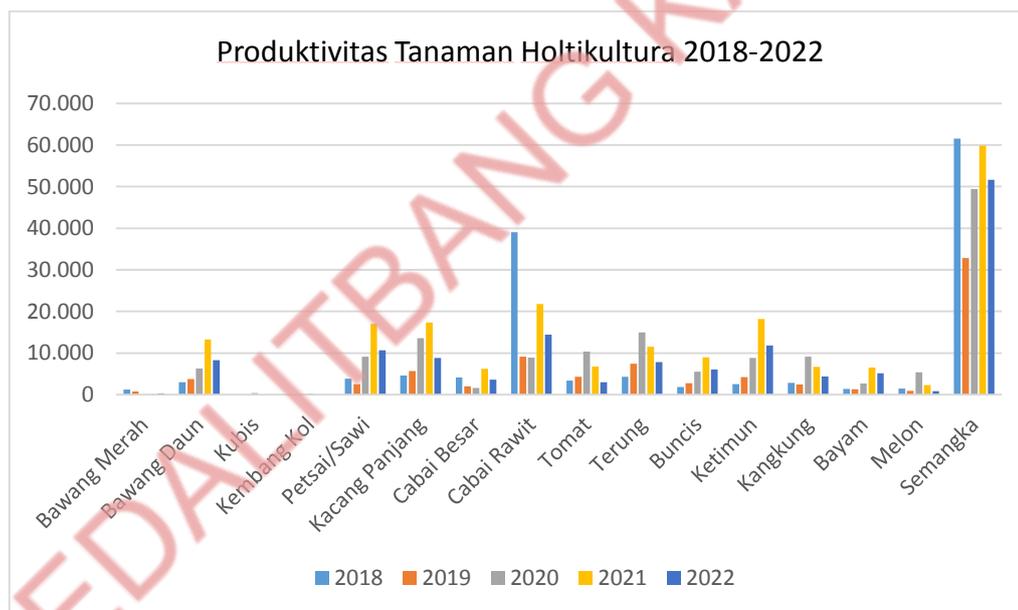


Gambar 3. 41 Produktivitas Tanaman Pangan 2018-2023

Tabel 3. 69 Produktivitas Holtikultura

No	Komoditi	Realisasi Tahunan Tanaman Holtikultura (kuintal)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bawang Merah	1.208	785	110	163,1	340,00
2	Bawang Daun	3.024	3.804	6.274	13.274,4	8.308,50
3	Kubis	-	-	400	-	-
4	Kembang Kol	-	85	235	-	-
5	Petai/Sawi	3.825	2.577	9.124	17.044,1	10.692,41
6	Kacang Panjang	4.646	5.693	13.550	17.381,6	8.838,10
7	Cabai Besar	4.143	2.022	1.645	6.230,5	3.649,77
8	Cabai Rawit	39.091	9.157	8.908	21.767,1	14.406,09
9	Tomat	3.375	4.329	10.401	6.768,3	3.022,97
10	Terung	4.321	7.463	14.967	11.534,4	7.811,35
11	Buncis	1.852	2.804	5.513	8.946,2	6.046,97
12	Ketimun	2.514	4.201	8.800	18.218,0	11.821,22
13	Kangkung	2.808	2.497	9.161	6.683,8	4.386,67
14	Bayam	1.414	1.284	2.698	6.517,9	5.145,04
15	Melon	1.490	957	5.363	2.337,5	843,64
16	Semangka	61.551	32.865	49.381	59.860,0	51.675,37

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



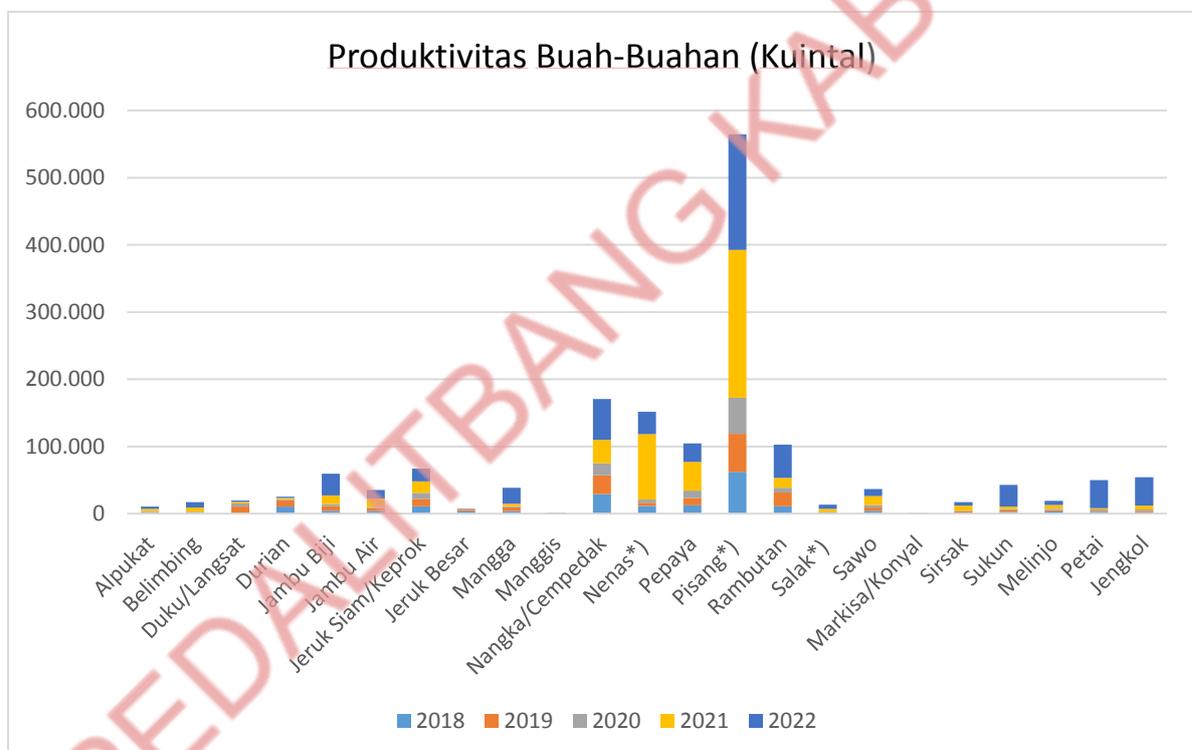
Gambar 3. 42 Produktivitas Tanaman Holtikultura 2018-2022

Tabel 3. 70 Produktivitas Buah-Buahan

No	Komoditi	Produktivitas Buah-buahan (kuintal)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Alpukat	1.056	1.594	1.325	3.352,0	2.995
2	Belimbing	940	911	1.079	6.292,0	7.904
3	Duku/Langsat	593	9.965	4.638	2.476,0	1.654
4	Durian	10.747	9.421	1.075	1.928,0	1.998
5	Jambu Biji	4.419	6.509	3.208	13.170,0	32.336
6	Jambu Air	3.955	4.263	2.014	11.927,0	13.206
7	Jeruk Siam/Keprok	11.078	10.693	9.397	16.697,0	19.015
8	Jeruk Besar	3.330	2.512	1.994	-	-
9	Mangga	3.669	6.557	1.024	3.609,0	23.727

No	Komoditi	Produktivitas Buah-buahan (kuintal)				
		2018	2019	2020	2021	2022
10	Manggis	77	394	189	201,0	669
11	Nangka/Cempedak	29.249	27.962	17.805	34.826,0	60.590
12	Nenas*)	11.349	4.727	4.679	97.636,0	33.357
13	Pepaya	12.356	11.086	10.903	42.458,0	27.645
14	Pisang*)	62.436	56.153	53.769	219.859,0	171.952
15	Rambutan	11.002	20.390	7.165	14.636,0	49.669
16	Salak*)	1.843	506	193	4.740,0	6.152
17	Sawo	4.198	5.029	3.849	13.076,0	10.517
18	Markisa/Konyal	7	6	6	-	-
19	Sirsak	1.643	1.667	1.186	7.606,0	5.244
20	Sukun	2.612	2.124	1.940	4.019,0	32.336
21	Melinjo	3.326	2.170	1.663	5.531,0	6.509
22	Petai	2.759	1.814	1.636	2.129,0	41.395
23	Jengkol	1.945	2.060	2.237	5.743,0	42.178

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 43 Produktivitas Buah-buahan

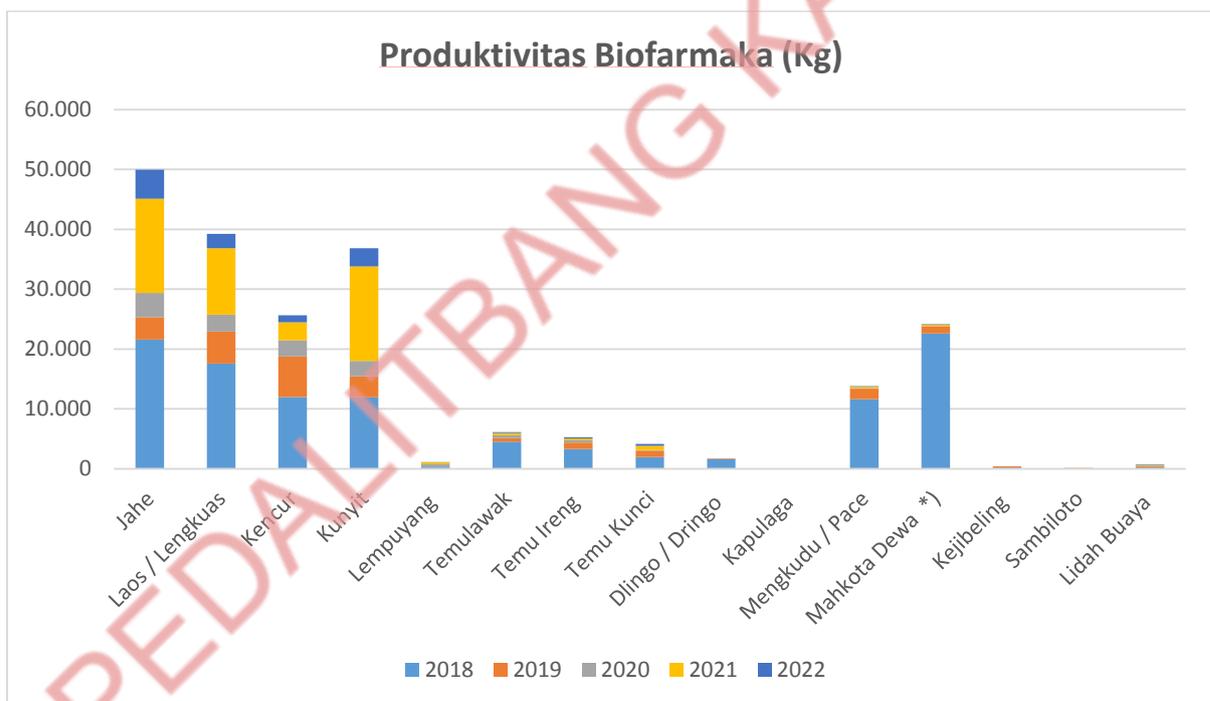
5 (Lima) Komoditas buah-buahan unggulan tertinggi untuk subsektor tanaman hortikultura adalah:

1. Pisang : memiliki nilai produktivitas 171.952 kuintal
2. Nangka : memiliki nilai produktivitas 171.952 kuintal
3. Rambutan : memiliki nilai produktivitas 171.952 kuintal
4. Jambu Biji : memiliki nilai produktivitas 171.952 kuintal

Tabel 3. 71 Produktivitas Biofarmaka

No	Komoditi	Produktivitas Biofarmaka (Kg)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jahe	21.580	3.725	4.087	15.737	4.821
2	Laos / Lengkuas	17.600	5.313	2.836	11.115	2.375
3	Kencur	11.989	6.793	2.693	3.001	1.180
4	Kunyit	11.932	3.544	2.538	15.812	3.005
5	Lempuyang	325	-	393	325	75
6	Temulawak	4.502	582	501	395	110
7	Temu Ireng	3.274	1.069	377	350	175
8	Temu Kunci	1.931	1.078	125	675	345
9	Dlingo / Dringo	1.643	97	-	-	-
10	Kapulaga	-	-	-	-	-
11	Mengkudu / Pace	11.590	1.754	100	250	100
12	Mahkota Dewa *)	22.607	1.200	-	250	100
13	Kejibeling	216	187	-	-	-
14	Sambiloto	107	56	-	-	-
15	Lidah Buaya	236	230	-	150	100

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 44 Produktivitas Biofarmaka

Komoditas biofarmaka unggulan tertinggi untuk subsektor tanaman holtikultura adalah :

1. Jahe : memiliki nilai produktivitas 4.821 Kg
2. Kunyit : memiliki nilai produktivitas 3.005 Kg
3. Laos : memiliki nilai produktivitas 2.375 Kg

2. Perkebunan

Tabel 3. 72 Produktivitas Perkebunan

No	Jenis Komoditi	Produktivitas Perkebunan (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karet	6080,3	9116,1	9283,8	9400,8	9520,1
2	Kelapa	210,3	315,0	311,9	379,1	340,0
3	Kelapa Sawit	90467,9	83772,9	83795,8	84169,6	84551,7
4	Kopi	2,7	22,2	11,3	13,4	15,4
5	Lada	158,4	169,3	167,9	174,8	180,4
6	Jambu Mete	1,4	1,8	1,8	2,6	2,7
7	Aren	2,0	2,2	1,5	2,2	2,2
Total		98940,8	95418,56	95593,87	96163,54	96634,54

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 45 Produktivitas Perkebunan

Komoditas unggulan tertinggi untuk sektor perkebunan adalah:

1. Kelapa sawit : memiliki nilai produksi 84.551,7 ton
2. Karet: memiliki nilai produksi 9.520,1 ton
3. Kelapa : memiliki nilai produksi 340 ton

3. Peternakan

Tabel 3. 73 Produksi Ternak

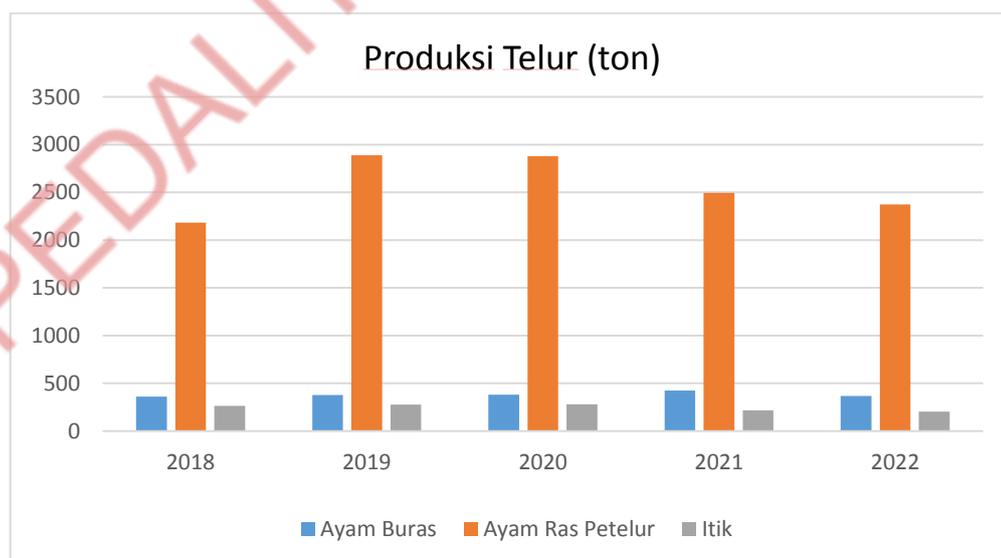
Jenis Ternak	Jumlah Produksi (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pencapaian Produksi Daging					
- Sapi	575,50	706,80	651,73	848,98	910,48
- Kambing	35,69	36,86	37,38	47,17	68,96
- Babi	166,58	183,67	185,68	116,71	142,25
Unggas :					

Jenis Ternak	Jumlah Produksi (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
- Ayam Buras	313,98	314,71	302,60	570,94	554,80
- Ayam Ras Pedaging	5769,35	6268,93	6551,89	6645,26	7079,68
- Itik	27,27	29,84	29,12	17,58	23,06
Total Produksi Daging (A)	6888,37	7540,81	7758,38	8246,65	8779,23
2. Pencapaian Produksi Telur (Ton)					
- Ayam Buras	361,03	378,36	380,79	425,41	367,55
- Ayam Ras Petelur	2181,44	2889,07	2878,48	2495,28	2375,28
- Itik	264,62	278,49	279,27	217,61	203,53
TotalProduksi Telur (B)	2807,09	3545,91	3538,54	3138,30	2742,83

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 46 Produksi Daging Ternak



Gambar 3. 47 Produksi Telur

Komoditas Daging Peternakan unggulan tertinggi untuk Peternakan adalah:

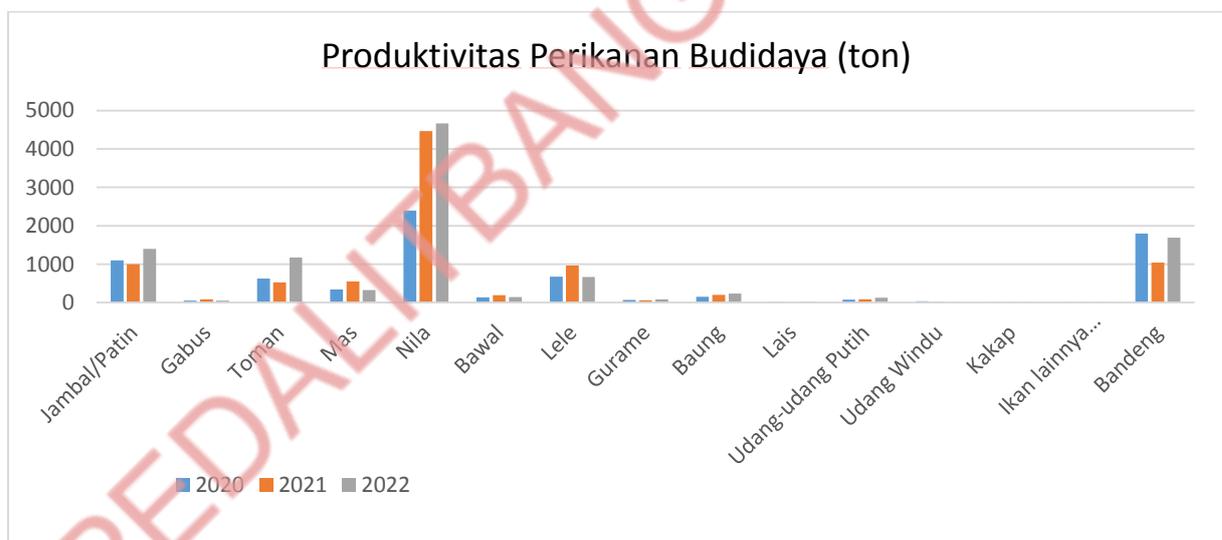
- A. Daging Ternak : Daging Sapi dengan nilai produksi 68,96 ton.

- B. Daging Unggas : Daging Ayam ras pedaging dengan nilai produksi 7.079,68 ton.
- C. Telur : Telur Ayam Ras Petelur dengan nilai produksi 2.375,28 ton

Tabel 3. 74 Produktivitas Perikanan Budidaya

No.	Jenis Komoditas	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jambal/Patin	1097,37	1000,59	1400,23
2	Gabus	54,04	83,30	53,82
3	Toman	625,02	528,34	1173,14
4	Mas	343,87	553,76	323,72
5	Nila	2397,24	4461,91	4664,96
6	Bawal	138,34	190,47	142,10
7	Lele	675,00	968,15	665,11
8	Curame	71,19	61,26	82,23
9	Baung	152,77	201,40	234,67
10	Lais	20,47	6,37	27,78
11	Udang-udang Putih	76,54	86,04	125,98
12	Udang Windu	32,80	23,29	12,38
13	Kakap	6,71	1,43	12,44
14	Ikan lainnya (Belanak dsb)	6,32	6,46	9,23
15	Bandeng	1800,17	1042,49	1686,13
TOTAL		7497,85	9215,26	10613,89

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 48 Produktivitas Peikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya adalah:

- A. Ikan Nila merupakan komoditas unggulan dengan nilai produksi 4.664,96 ton.
- B. Ikan Bandeng dengan nilai produksi 1.686,13 ton.
- C. Ikan Jambal/patin dengan nilai produksi 1.400,23 ton.

Tabel 3. 75 Produktivitas Perikanan Tangkap

No	Nama Ikan	Satuan	Jumlah Produksi		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Alu-alu	Ton	843,5	891,28	305,4
2	Ikan Pelagis kecil lainnya	Ton	959,15	859,14	203,71
3	Bawal hitam	Ton	511,14	247,02	519,61
4	Belanak	Ton	348,02	-	-
5	Kembung	Ton	617,75	660,15	1.631,12
6	Telang	Ton	1.088,62	1.504,47	723,2
7	Kakap Putih	Ton	541,45	968,43	428,14
8	Kakap merah/ Bambang	Ton	325,78	883,03	871,08
9	Kepiting	Ton	293,21	-	-
10	Kurau	Ton	279,51	-	-
11	Kuro/ Senangin	Ton	569,4	-	-
12	Cumi-cumi	Ton	368,81	359,72	542,5
13	Manyung/otek	Ton	1.167,24	1.090,59	289,39
14	Pari	Ton	625,11	385,01	405,06
15	Sembilang	Ton	161,09	287,52	702,77
16	Bawal Putih	Ton	604,05	319,95	332,14
17	Tenggiri (COM)	Ton	1.608,68	1.348,69	469,28
18	Tenggiri papan (GUT)	Ton	1.357,41	-	-
19	Udang dogol /white	Ton	1.049,04	653,33	542,74
20	Udang krosok	Ton	455,19	416,95	286,26
21	Udang papay (acetes)	Ton	538,31	447,46	277,71
22	Udang windu	Ton	505,36	359,04	334,09
23	Rajungan	Ton	815,75	921,18	1.366,22
24	Tongkol	Ton	252,02	142,18	1.216,68
25	Bandeng	Ton	-	204,88	348,21
26	Belanak Jumpul	Ton	-	135,42	554,05
27	Blungsungan/ Beloso	Ton	-	283,84	165,53
28	Hiu Taji	Ton	-	253,08	361,38
29	Ikan Runcah / Peperek	Ton	-	284,45	445,87
30	Kepiting Bakau	Ton	-	378	827,9
31	Parang parang / Golok-golok	Ton	-	289,93	158,33
32	Lemuru/ Puput	Ton	-	133,08	253,48
33	Remang	Ton	-	156,43	198,53
34	Senangin/Kuro	Ton	-	955,89	431,14
35	Kepala Timah / Layur	Ton	-	143,06	207,22
36	Udang Pacet / Flower'	Ton	-	556,83	229,75
37	Kerapu	Ton	-	-	708,89
38	Sotong	Ton	-	-	564,75
39	Udang Sayur	Ton	-	-	173,09
TOTAL			15885,59	16520,03	17075,22

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3. 49 Produktivitas Perikanan Tangkap

Komoditas unggulan tertinggi untuk Perikanan Tangkap adalah :

- A. Ikan Kembung dengan nilai produktivitas 1.631,12 ton.
- B. Rajungan dengan nilai produktivitas 1.366,22 ton.
- C. Tongkol dengan nilai produktivitas 1.216,68 ton.

3.15.3 PROGRAM TERKAIT

Bidang Lingkungan Hidup

1. Program Revitalisasi Fungsi RTH
2. Program Pengelolaan Persampahan
3. Program Penanganan Pencemaran Lingkungan
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Bidang Pangan, Perkebunan, dan Peternakan

1. Program Hilirasi sector pertanian, perkebunan, perikanan
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Program perizinan usaha pertanian
7. Program penyuluhan pertanian
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

BAB 4 ANALISIS

4.1 ANALISIS KEBIJAKAN

Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan segala potensi dan tantangannya, berada dalam fase penting perencanaan jangka panjang untuk menyongsong abad baru pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan sintesis kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis berdasarkan berbagai dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk RPJPN, RPJMN, RTRW, RPJPD, dan RPJMD. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sekaligus mampu menangkap keunikan dan kebutuhan spesifik wilayah.

Adapun secara rinci nilai-nilai yang dapat diadaptasi dari setiap dokumen kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Nilai Adaptasi Kebijakan untuk Pengembangan Kotawaringin Barat

Kebijakan	Nilai Adaptasi
RPJPN	<ul style="list-style-type: none">• Transformasi Sosial dan Ekonomi: Fokus pada peningkatan SDM, hilirisasi SDA, dan pembangunan ekonomi berbasis teknologi dan keberlanjutan. Ini cocok dengan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata di Kobar.• Sarana Prasarana Ramah Lingkungan: Kobar dapat mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, termasuk transportasi dan energi berkelanjutan.• Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi: Kobar yang memiliki kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, harus melestarikan ekosistem dan budaya lokal.
RPJMN	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Kobar dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasional dan layanan kesehatan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan.

Kebijakan	Nilai Adaptasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Berbasis SDA Lokal: Hilirisasi produk unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, dan perikanan dapat dioptimalkan. • Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Potensi pariwisata alam seperti eco-tourism di Taman Nasional Tanjung Puting harus dikembangkan sebagai daya tarik ekonomi berkelanjutan.
RTRW Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian Berorientasi Agribisnis: Kobar dapat menjadi pusat agroindustri yang berkelanjutan, mengoptimalkan sektor pertanian dan perkebunan. • Lumbung Pangan dan Energi: Kobar berpotensi sebagai pusat lumbung pangan dan energi, terutama energi terbarukan seperti bioenergi dan PLTS. • Pengelolaan Lingkungan: Dengan luas kawasan hutan dan perkebunan, pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologi
RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan dan Ketertiban: Mewujudkan masyarakat yang aman dan damai adalah prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung investasi. • Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri: Fokus pada pembangunan sector agribisnis, pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai penopang ekonomi lokal. • Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas: Meningkatkan akses pendidikan dan Kesehatan untuk menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif.
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Ekonomi Berbasis Pertanian dan Perikanan: Dengan fokus pada pertanian, kelautan, dan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan di Kobar harus diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. • Pelestarian Budaya dan Pariwisata: Melestarikan budaya lokal dan mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting serta destinasi wisata sejarah dan religi. • Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan transportasi lokal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Kebijakan	Nilai Adaptasi
RPD Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi Sektor Potensial: Fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, industri, dan pariwisata harus menjadi prioritas jangka panjang. • Pembangunan Berbasis Lingkungan: Pengembangan infrastruktur harus berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, khususnya di sektor energi terbarukan seperti PLTS dan biomassa. • Peningkatan SDM: Strategi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat menjadi kunci dalam pengembangan jangka panjang
RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Wilayah yang Berkelanjutan: Perencanaan tata ruang yang aman, nyaman, dan produktif berbasis pada sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. • Pengembangan Kawasan Strategis: Kobar harus mengembangkan kawasan strategis ekonomi seperti kawasan perkebunan, agropolitan, dan minapolitan yang ada di Kecamatan Kumai dan Pangkalan Lada. • Perlindungan Kawasan Lingkungan Hidup: Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting harus dilindungi, dengan pengelolaan yang berbasis konservasi dan ekowisata

Sumber : Hasil Kajian Kebijakan, 2024

Secara garis besar, sintesis kebijakan berupaya untuk menyelaraskan elemen-elemen penting seperti transformasi sosial dan ekonomi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengadopsi pendekatan pembangunan tematik dengan fokus utama diarahkan pada beberapa area prioritas berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Agroindustri: Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar ekonomi lokal harus dikembangkan melalui hilirisasi dan teknologi.
2. Pariwisata Berkelanjutan dan Ekowisata: Dengan potensi alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Kobar harus mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya, menarik wisatawan sambil menjaga kelestarian lingkungan.
3. Energi Terbarukan: Pembangunan energi terbarukan seperti PLTS dan biomassa sesuai dengan potensi SDA di daerah pedesaan dan perkebunan.

4. Pembangunan Infrastruktur Berkualitas: Pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi untuk mengoptimalkan konektivitas wilayah, mendukung sektor-sektor unggulan, serta mendukung daya saing ekonomi daerah.
5. Peningkatan Kualitas SDM: Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan teknologi, sejalan dengan prioritas nasional dalam transformasi sosial dan ekonomi.

Sintesis kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mengoptimalkan potensi yang ada, tetapi juga untuk menghadapi tantangan-tantangan strategis yang meliputi perubahan iklim, dinamika ekonomi global, dan kebutuhan akan pembangunan inklusif. Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis data, dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat menuju 1 abad yang berdaya saing dan berkelanjutan.

4.2 ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK 2024-2044

Proyeksi penduduk adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi). Hasil dari analisis kependudukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan rekomendasi rencana mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai obyek perencanaan. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Analisa kependudukan dilakukan dengan Model regresi linier. Proyeksi jumlah penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana di suatu wilayah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan perhitungan harus memperhatikan perkembangan jumlah penduduk masa lampau, kecenderungan, arahan tata guna lahan, dan ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Metode yang digunakan adalah regresi linier (berdasarkan hasil pengujian dengan hasil simpangan terkecil). Model linier digunakan dengan asumsi, tingkat pertumbuhan penduduk jumlahnya selalu konstan dari tahun ketahun. Bentuk matematis model linier adalah:

$$P(t+q) = P_t + b(q)$$

dimana:

$P(t+q)$: Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_t : Jumlah penduduk tahun dasar

b : Selisih tahun dari tahun dasar ke tahun $t+q$

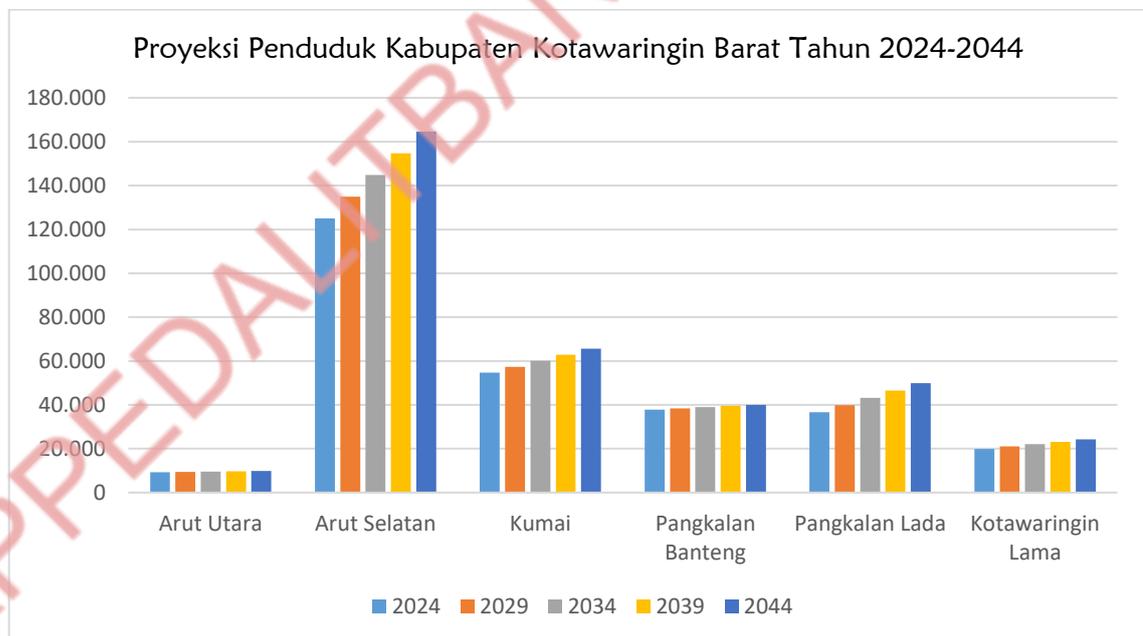
q : Rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun.

Berdasarkan hasil Analisa kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024-2044 di prediksi jumlah penduduk tahun 2044 Kotawaringin Barat adalah 354.225 jiwa. Diprediksi terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan dari 283.287 jiwa menjadi 354.225 jiwa dengan persentase kenaikan jumlah penduduk mencapai 24,8% dalam jangka waktu 20 tahun atau kenaikan pertahun adalah 1,24% dari total jumlah kenaikan jumlah penduduk. Kecamatan Arut Selatan masih memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 164.640 jiwa atau 32,2% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut hasil analisis proyeksi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat :

Tabel 4. 2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
		2024	2029	2034	2039	2044
1	Arut Utara	9.297	9.431	9.566	9.700	9.835
2	Arut Selatan	125.021	134.926	144.830	154.735	164.640
3	Kumai	54.657	57.389	60.122	62.854	65.587
4	Pangkalan Banteng	37.793	38.358	38.923	39.489	40.054
5	Pangkalan Lada	36.595	39.918	43.242	46.565	49.889
6	Kotawaringin Lama	19.925	20.999	22.073	23.147	24.222
	Total	283.287	301.022	318.756	336.491	354.225

Sumber : Analisis, 2024



Gambar 4. 1 Diagram Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

Terkait perkembangan penduduk berdasarkan umur hingga tahun 2044. Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan umur diketahui bahwasanya pada tahun 2044 sebagian besar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada usia 10-14 tahun hal ini tentunya

sebagai bonus demografi yang baik akan diterima oleh Kabupaten Kotawaringin barat. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kelompok umur.

Tabel 4. 3 Proyeksi Penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044

Usia	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
	2024	2029	2034	2039	2044
> 74 Thn	25.173	25.418	25.663	25.908	26.153
70 - 74 Thn	25.479	33.214	40.949	48.684	56.419
65 - 69 Thn	23.064	25.739	28.414	31.089	33.764
60 - 64 Thn	22.905	28.690	34.475	40.260	46.045
55 - 59 Thn	22.869	29.599	36.329	43.059	49.789
50 - 54 Thn	23.347	24.597	25.847	27.097	28.347
45 - 49 Thn	22.446	23.041	23.636	24.231	24.826
40 - 44 Thn	23.250	28.100	32.950	37.800	42.650
35 - 39 Thn	22.383	22.698	23.013	23.328	23.643
30 - 34 Thn	21.125	23.875	26.625	29.375	32.125
25 - 29 Thn	17.904	21.784	25.664	29.544	33.424
20 - 24 Thn	14.012	16.632	19.252	21.872	24.492
15 - 19 Thn	10.870	15.455	20.040	24.625	29.210
10 - 14 Thn	6.767	8.717	10.667	12.617	14.567
5 - 9 Thn	4.363	6.313	8.263	10.213	12.163
0 - 4 Thn	3.662	5.192	6.722	8.252	9.782
Total	284.525	308.500	332.475	356.450	380.425

Sumber : Analisis, 2024

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Berdasarkan hasil Analisa di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024 rasio ketergantungan memiliki nilai 44 artinya 100 Penduduk produktif menanggung 44 penduduk usia non produktif.

Tabel 4. 4 Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044

Usia	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
	2024	2029	2034	2039	2044
0-14 Thn + > 65 Thn	83.985	87.651	91.318	94.984	98.650
15-64 Thn	189.905	197.229	204.554	211.878	219.202

Usia	Jumlah Penduduk / Tahun (Jiwa)				
	2024	2029	2034	2039	2044
Total	44 %	44 %	44 %	44 %	44 %

Sumber : Analisis, 2024

Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir IPM tahun 2022 adalah 71,63, sedangkan pada tahun 2021 adalah 73,07 adanya penurunan IPM dari tahun 2021-2022, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan Pendidikan yang mengalami penurunan. Dalam penentuan target IPM diperlukannya proyeksi dari indeks pembangunan manusia hingga tahun 2044, berikut tabel proyeksi indeks pembangunan manusia tahun 2044.

Tabel 4. 5 Proyeksi Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2044

INDIKATOR	2029	2034	2039	2044
Indek Pembangunan Manusia	74,15	76,75	78,11	79,07

Sumber : Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2044 adalah 79,07, sedangkan pada tahun 2022 adalah 71,63 peningkatan IPM diikuti dengan proyeksi kesehatan dan Pendidikan tahun 2044 yang terus meningkat.

4.3 ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN

4.3.1 Permukiman

Sistem permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat mengikuti arahan Rencana Sistem Permukiman dalam revisi RTRW Kotawaringin Barat Tahun 2023, sistem permukiman Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Rencana Sistem Permukiman

No	Pusat Kegiatan	Fungsi
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	
	Perkotaan Pangkalan Bun	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian dan regional, • Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan • Perekonomian (pengolahan dan pemasaran),

No	Pusat Kegiatan	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan permukiman
2	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	
	Kumai	Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat, dan Permukiman
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	
	IKK Kotawaringin Lama	Pusat pemerintahan, pelayanan sosial, permukiman, dan perkebunan
	IKK Pangkalan Banteng	Pusat pemerintahan, produksi pertanian dan perkebunan (agropolitan area) dengan skala pelayanan beberapa kecamatan, dan permukiman
	IKK Pangkalan Lada	Pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta permukiman
	IKK Arut Utara	Pusat pemerintahan, produksi perkebunan dengan skala pelayanan beberapa kecamatan, dan permukiman
	Desa Runtu, Arut Selatan	Pelayanan sosial, perkebunan, dan permukiman
	Desa Teluk Bogam, Kumai	Pelayanan sosial, dan permukiman
	Desa Kubu, Kumai	Pelayanan sosial, perdagangan dan jasa dan permukiman
	Desa Sidomulyo, Pangkalan Banteng	Pelayanan sosial, dan permukiman
	Desa Riam Durian, Kotawaringin Lama	Pelayanan sosial, dan permukiman
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	
	Seluruh desa	Pusat pengembangan penunjang pelayanan desa

Sumber: Revisi RTRW Kotawaringin Barat, 2023

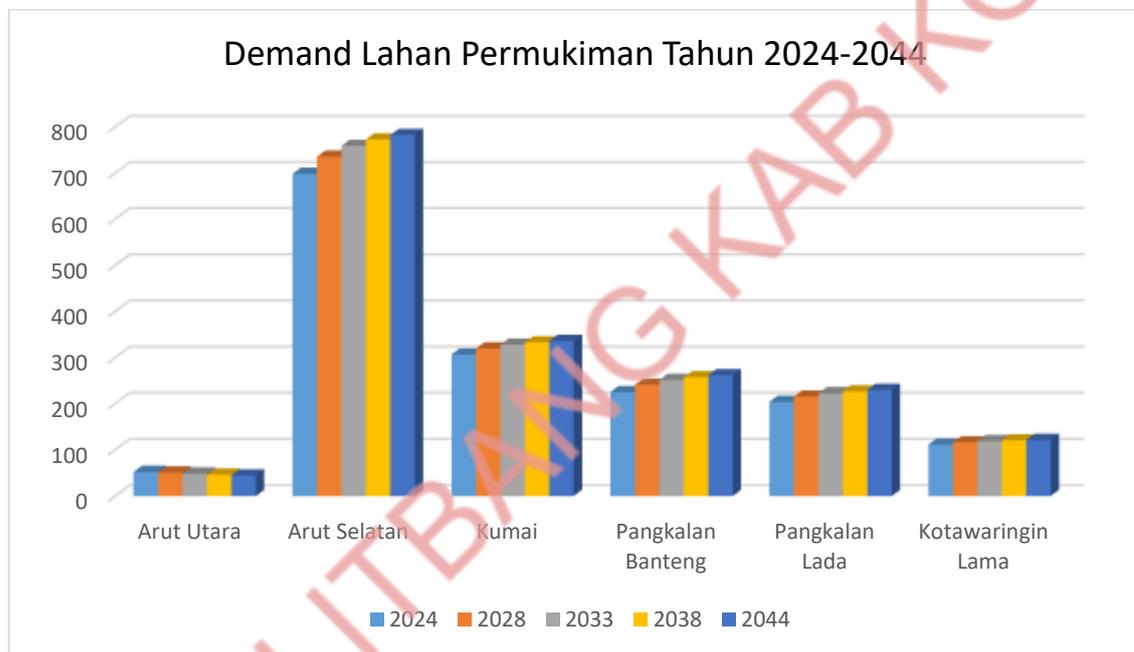
Kebutuhan perumahan dianalisis berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Berikut adalah proyeksi tambahan permintaan lahan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya.

Tabel 4. 7 Proyeksi Tambahan Demand Lahan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Pendukungnya hingga Tahun 2044

No	Kecamatan	Tambahan Demand Lahan Kawasan Permukiman dan PSU Pendukungnya hingga Tahun 2044					Jumlah
		2024	2029	2034	2039	2044	
1	Arut Utara	52,33	50,75	48,47	46,29	44,54	242,37

No	Kecamatan	Tambahannya Demand Lahan Kawasan Permukiman dan PSU Pendukungnya hingga Tahun 2044					Jumlah
		2024	2029	2034	2039	2044	
2	Arut Selatan	698,34	735,43	758,84	772,53	782,24	3747,39
3	Kumai	306,64	319,66	327,87	332,67	336,08	1622,92
4	Pangkalan Banteng	225,25	241,39	251,57	257,52	261,75	1237,48
5	Pangkalan Lada	203,91	215,39	222,62	226,86	229,86	1098,64
6	Kotawaringin Lama	111,52	116,03	118,87	120,54	121,72	588,67
	Total	1597,99	1678,64	1728,24	1756,41	1776,20	8537,48

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 2 Demand Lahan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Pendukungnya Tahun 2024-2044

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.3.2 Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan sarana pendidikan yang diproyeksikan yaitu hingga tahun berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standar pelayanan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 8 Standar Pelayanan Sarana Pendidikan Di Lingkungan Perkotaan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Taman Kanak-kanak	1250	216 termasuk rumah	500	0,28	500 m ²	Di tengah kelompok warga, tidak	2 rombongan prabelajar

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
			penjaga 36 m ²				menyeberang jalan raya, bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	@60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2	Sekolah Dasar	1600	633	2000	1,25	1000 m ²		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2,3,dan 4, Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain misal SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3	SLTP	4800	2282	9000	1,88		dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olahraga, tidak selalu harus di pusat lingkungan	
4	SMU	4800	4800	12500	2,6			
5	Taman Bacaan	2500	72	150	0,09			

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

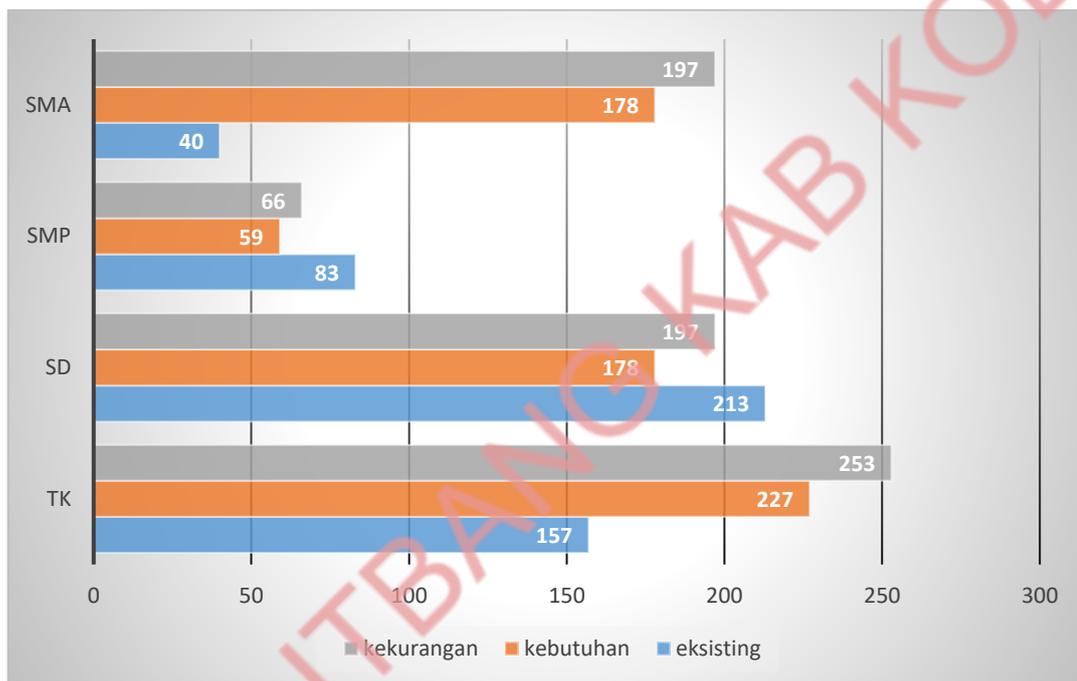
Sehingga proyeksi kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Pendidikan Tahun 2023-2045

Kecamatan	Total Kebutuhan Sarana Pendidikan									
	TK					SD				
	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
Arut Utara	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5
Arut Selatan	99	105	108	110	111	78	82	84	86	87
Kumai	44	45	47	47	48	34	36	36	37	37
Pangkalan Banteng	32	34	36	37	37	25	27	28	29	29
Pangkalan Lada	29	31	32	32	33	23	24	25	25	26
Kotawaringin Lama	16	17	17	17	17	12	13	13	13	14
Total	227	239	246	250	253	178	187	192	195	197
Kecamatan	Total Kebutuhan Sarana Pendidikan									
	SMP					SMA				
	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
Arut Utara	2	2	2	2	2	6	6	6	5	5
Arut Selatan	26	27	28	29	29	78	82	84	86	87
Kumai	11	12	12	12	12	34	36	36	37	37

Kecamatan	Total Kebutuhan Sarana Pendidikan									
	TK					SD				
	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
Pangkalan Banteng	8	9	9	10	10	25	27	28	29	29
Pangkalan Lada	8	8	8	8	9	23	24	25	25	26
Kotawaringin Lama	4	4	4	4	5	12	13	13	13	14
Total	59	62	64	65	66	178	187	192	195	197

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 3 Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Pendidikan

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan layanan pendidikan hingga tahun 2044 terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.3.2 Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan sarana kesehatan yang diproyeksikan yaitu hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan standar pelayanan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 10 Standar Pelayanan Sarana Kesehatan Di Lingkungan Perkotaan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1250	36	60	0,048	500 m ²	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/ rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2500	150	300	0,12	1000 m ²	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/Klinik Persalinan	30.000	1500	3000	0,1	4.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m ²		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	12.000	420	1000	0,008	3.000 m ²		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18			1.500 m ²		Dapat bersatu dengan rumah tinggal/ tempat usaha/ apotik
7	Apotik/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m ²		

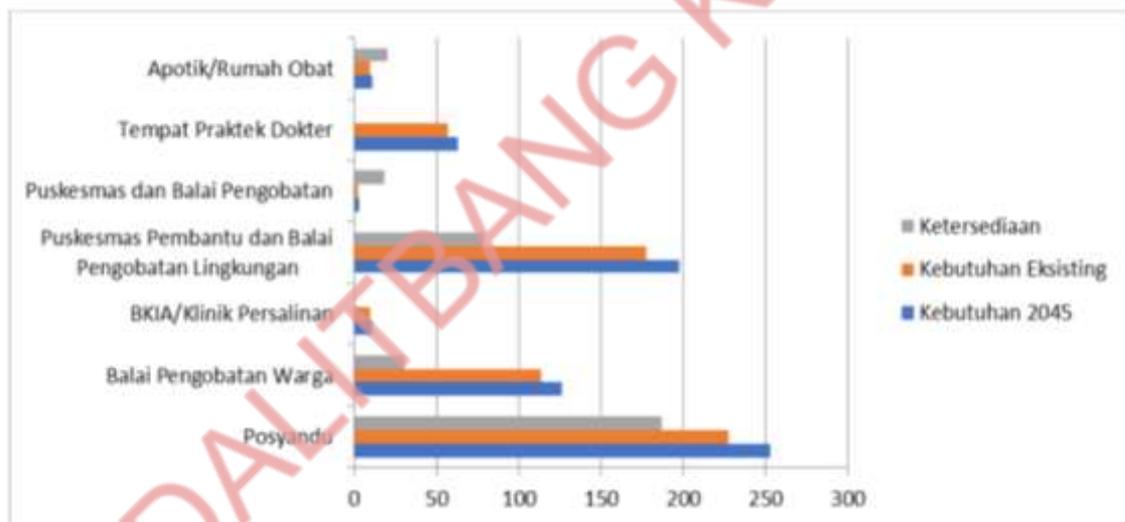
Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Sehingga proyeksi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Tahun 2045

No	Kecamatan	Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA/ Klinik Persalin	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas dan Balai Pengobatan	empat Praktek Dokter	apotik/ Rumah Obat
1	Arut Utara	6	3	0	5	0	2	0
2	Arut Selatan	111	56	5	87	1	28	5
3	Kumai	48	24	2	37	0	12	2
4	Pangkalan Banteng	37	19	2	29	0	9	2
5	Pangkalan Lada	33	16	1	26	0	8	1
6	Kotawaringin Lama	17	9	1	14	0	4	1
	Total	253	126	11	197	3	63	11

Sumber : Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045



Gambar 4. 4 Gap Ketersediaan dan Kebutuhan Layanan Kesehatan

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan layanan Kesehatan hingga tahun 2045 terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan layanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.3.2 Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kebutuhan sarana olahraga dan RTH diproyeksikan berdasarkan standar yang berlaku yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Tabel 4. 12 Kebutuhan dan Jangkauan Sarana Olahraga dan RTH

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m2)	Standar (m2/jiwa)	Kriteria		Keterangan
				Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
Taman dan Lapangan Olahraga	30.000	9.000	0,3	1000 m2	Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan	2 rombongan Prabelajar @60murid Dapat bersatu Dengan sarana lain
Taman dan Lapangan Olahraga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3, dan 4, Dapat digabung Dengan sarana Pendidikan lain misal SD, SMP, SMA dalam satu komplek

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 4. 13 Proyeksi Kebutuhan Sarana Olahraga dan RTH Tahun 2024-2044

Kecamatan	Total Kebutuhan Sarana Pendidikan									
	Taman dan Lapangan Olahraga Tipe 1					Taman dan Lapangan Olahraga Tipe 2				
	2024	2029	2034	2039	2044	2024	2029	2034	2039	2044
Arut Utara	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Arut Selatan	4,14	4,36	4,50	4,58	4,64	1,03	1,09	1,12	1,14	1,16
Kumai	1,82	1,89	1,94	1,97	1,99	0,45	0,47	0,49	0,49	0,50
Pangkalan Banteng	1,33	1,43	1,49	1,53	1,55	0,33	0,36	0,37	0,38	0,39
Pangkalan Lada	1,21	1,28	1,32	1,34	1,36	0,30	0,32	0,33	0,34	0,34
Kotawaringin Lama	0,66	0,69	0,70	0,71	0,72	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
Total	9,47	9,95	10,24	10,41	10,52	2,37	2,49	2,56	2,60	2,63

Sumber : Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur pada tahun 2045, maka dilakukan analisis proyeksi kebutuhan infrastruktur berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2045 mendatang. Berikut adalah proyeksi kebutuhan infrastruktur Kotawaringin Barat yang meliputi sarana dan prasarana umum.

4.4.1 Transportasi

Transportasi berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Status Jalan	Ruas Jalan	
Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Kujan - Runtu • Ruas Runtu - Sp. Runtu • Ruas Bts. Kota Pangkalan Bun - P. Lada • Ruas P. Lada - Asam Baru • Ruas Bts. Kota Pangkalan Bun - Kumai • Ruas Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun) • Ruas Jln. Iskandar (Pangkalan Bun) • Ruas Akses Pelabuhan Tanjung Kalap/ Bumi Harjo 	
Kolektor Primer Dua (JKP-2)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Sp.Kenawan – Riam Durian • Ruas Riam Durian – Sukamara 	
Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama • Ruas Riam Durian – Kotawaringin Lama 	
Kolektor (Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi Rencan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruas Kumai – Kubu sepanjang • Ruas Pangkalan Lima – Kumai sepanjang • Ruas Natai Arahan – Malijo sepanjang 	
Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jenderal Sudirman Sidorejo - Kumpai Batu Bawah • Kumpai Batu Bawah – Tanjung Terantang • Tanjung Terantang - Tanjung Putri • Tanjung Putri - Batas Sebuai Barat • Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah • Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin • Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Parit Serong • Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas - Dukuh Mola • Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat • Kumpai Batu Atas - Karang Anyar • Pasir Panjang - Dukuh Mola • Jl. HM. Rafi'i • Jl. Bhayangkara • Pinang Merah - Stadion • Stadion - Jl. Hasan Surin • Stadion - Cilik Riwut 2 • Jl. Samari - Stadion - Pinang Merah • Jl. Ahmad Wongso - Jl. Pramuka • Jl. Pelita • Jl. Palagan Sambu • Jl. Lijo • Jl. Mangga 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Cilik Riwut 7 • Jl. Merdeka - Jl. Nasional - Jl. Danau • Jl. P. Suryariansyah • Jl. Pangkalan Muntai • Jl. Padat Karya • Jl. Beji • Jl. Pelabuhan • Jl. Beringin • Jl. ASDP • Jl. Padat Karya 1 • Jl. ASDP 1 • Jl. Purbasari - Pangkalan Durin- Sungai Rangit Jaya • Jl. Beringin Sungai Rangit JayaKecamatan Pangkalan Banteng • Jl. Sungai Rangit Jaya – Sungai Melawen • Jl. Sungai Melawen – Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya • Jl. Sungai Melawen - Sp. Runtu • Jl. Sp. Kadipi Atas - MakartiJaya • Jl. Sp. Kadipi Atas – Batas Medang Sari • Jl. Sp. Kadipi Atas – Batas Natai Baru • Jl. Pangkalan Dewa - SungaiBiru • Jl. Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa • Jl. Pangkalan Tiga – Batas Sungai Bengkuang (GSDI)

Status Jalan	Ruas Jalan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Mangga 2 • Jl. Salak • Jl. LKMD 2 • Jl. Pancasila • Jl. Yuka / Maid Badir • Jl. H. Mustalim • Jl. Delima • Jl. Cilik Riwut 4 / Jl. Pemuda • Jl. Cilik Riwut 3 • Jl. Cilik Riwut 2 • Jl. Cilik Riwut 1 • Jl. Abdul Ancis • Jl. Abdul Ancis 1 • Jl. Seroja • Jl. Perwira • Jl. Sutan Syahrir • Jl. Edy Suwargono • Jl. Sultan Imanudin • Jl. Sudirman. SH • Jl. PKGB. 1 • Jl. Kasanrejo 1 - SMU 3 • Jl. Kasanrejo 2 • Jl. Camar • Jl. Rajawali • Jl. Hasanudin • Jl. Zebra • Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud • Jl. DAH. Hamzah • Jl. Alipandi Sarjan • Jl. Abdul Syukur • Jl. H. Mu'an • Jl. Sembaga Mas - Jl. Mawar • Jl. PRA. Kesumayuda • Jl. Rangga Santrek • Jl. Blimbing Manis • Jl. Pasar Saik • Jl. Ki Patih Surodilogo • Jl. Pangeran Adipati • Jl. R. Mangku • Jl. Kawitan • Jl. PKGB. 2 • Jl. PKGB. 3 • Jl. Asam Bubuk • Jl. Damai • Jl. H. Kaderi Udan • Jl. Kadaiut 2 • Jl. Lapangan Tugu • Jl. Pangeran Antasari • Jl. Sukma Aryaningrat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Pangkalan Tiga – Dermaga Pangkalan Tiga • Purba Sari - SMA 2 Bumi Harjo • Jl. Simpang Berambai – Natai Kerbau - Mulya Jadi • Jl. Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun • Jl. Mulya Jadi – Pelabuhan Karang Sari • Jl. Simpang Karang Sari • Jl. Simpang Natai Kerbau • Jl. Simpang Berambai Makmur • Jl. Simpang Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya - Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya Baru – Sungai Hijau • Jl. Karang Mulya - Amin Jaya • Jl. Natai Tiwadak – Pemancingan • Sp. Diung - Danau Gatal • Sp. Lalang – Rungun • Rungun - Kondang – Batas Lamanadau • Sp. Diung – Kinjil • Jl. Sakabulin - Batas Sukaraja • Jl. Tempayung - Sumber Mukti • Tempayung - Baboti – Babual • Jl. Riam Durian - Dawak – Suka Jaya • Jl. Makarti Jaya - Sp.Suka Jaya • Jl. Sp.Despot - Sp.Kinjil +Sakabulin • Jl. Dawak - Sp. R. Durian+Sagu • Jl. Sagu Suka Mulya – Batas Pangkalan Muntai • Jl. Sp.Sagu Suka Mulya – Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan • Jl. Patimura - Jl. Renggam SMK1 Sumber Agung • Jl. Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin • Jl. Batas Runtu GSDI – Sungai Bengkuang • Jl. Sungai Bengkuang – Sido Mulyo – Semanggang • Jl. Semanggang – Pangkalan Getah • Jalan Negara KM.53 – Sungai Bengkuang

Status Jalan	Ruas Jalan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Udan Said • Jl. GM. Arsyad • Jl. Matnoor • Jl. Matnoor 1 • Jl. Brunai - Jl. Belida • Jl. Tengadak - Jl. Tebengalan • Jl. Padat Karya 1 • Jl. Padat Karya • Jl. M.Idris • Jl. Warna Agung • Jl. Masjid Al-Hikmah • Jl. J. Lubut • Jl. Rarait 3 • Jl. Dermawan • Jl. Rarait 9 • Jl. Baru - Pangkalan Bungur • Jl. Tumenggung Cikranegara • Jl. Rarait 9 - SLTP 6 • Jl. Saefudin Kusasi - SLTP 6 • Jl. Runtu • Jl. Patung • Jl. Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas • Jl. Sungai Tatas • Jl. Pangkalan Bun – Batas Kotawaringin Lama • Jl. Simpang Natai Baru – Batas Kadipi Atas • Jl. Dermaga Medang Sari – Batas Kadipi Atas • Jl. Sp. Runtu - Batas Runtu GSDI • Jl. Desa Runtu • Jl. Bukit Sintang - Sulung Kenambui • Jl. Umpang - Simpang Tiga GSDI +Sp. Pangkut • Jl. Natai Raya 1 • Jl. Natai Raya 2 • Jl. Natai Raya 3 • Jl. Natai Raya - Batas Sungai Tendang • Jl. Pabrik Jagung • Jl. Iskandar - Sei Tendang (AURI) • Jl. Natai Arahan • Jl. Pasanah • Jl. Malijo • Jl. Sport Center - Jl. Jendr. Sudirman 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Batas Pangkalan Tiga - Sp. GSDI • Jl. Simpang GSDI – Simpang Tiga • GSDI+Sp.Umpang+Sp.Pangkut • Jl. Sido Mulya - Sungai Kuning • Jl. Kebon Agung - Sungai Pakit- Sp.Amin Jaya • Jl. Kebon Agung – Simpang Pangkut (GSDI) • Jl. Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung • Jl. Simpang Desa 7 – Arga Mulya • Jl. Simpang Amin Jaya – Batas Arut Utara (BJAP) • Jl. Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP) • Jl. Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (Parit Cina) • Jl. Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng • Jl. Simpang Margo Mulyo • Jl. Nangka - Sp. Pelabuhan Roro • Jl. Ampu Candi - Sei Tendang • Jl. Berdikari - Jl. Bina Jadi • Jl. Meden • Jl. Sungai Tendang – Pangkalan Satu • Jl. Sp. Bumi Harjo – Pelabuhan CPO • Jl. Sp. Bumi Harjo – Pangkalan Satu • Jl. Sp. Pelabuhan CPO - Pangkalan Satu • Jl. Sungai Tendang – Batas Natai Raya • Jl. Sp. Sungai Tendang - Pelabuhan Roro • Jl. Angkatan Muda • Jl. Sp. Natai Raya – Pelabuhan Roro • Jl. PKGB. 5 • Jl. Abd. Hamid - Jl. Pemilu • Jl. HM. Taher • Jl. MIN Kumai Hilir / Jl.Berlian • Jl. Rahmat - PKGB 5 • Jl. Keramat • Jl. Paigo – Pertamina • Jl. Kumai/Gerilya – Sungai Tendang

Status Jalan	Ruas Jalan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Tumenggung Kubu - Macan Tali • Jl. Tumenggung Kubu 1 • Jl. Hendrik Dingan • Jl. Naun Silih • Jl. Riak Sawa • Jl. Eden Jeha • Jl. Tiupilus Umar • Jl. Manjung H • Jl. Pangkut (Maslubuhi Siak) - Simpang Tiga GSDI+Sp.Umpang • Jl. Sp. Pangkut/Durian Tunggal - Jl. Sinapati Mamang Sukarami • Jl. Sp. Pangkut/SMAN Pangkut - Sp. Sukarami • Jl. Sp. Sukarami – Gandis • Jl. Sp. Gandis – Kerabu • Jl. Sp. Kerabu – Penyombaan • Jl. Sp. Penyombaan – Pandau • Jl. Sp. Pandau – Riam • Jl. Riam – Penahan • Jl. Sp. Penyombaan - Sambu - Simpang Salip • Jl. Sp. Salip - Sei Dau • Jl. Pangkut/Bagimang Panji – Aspec Paper • • Jl. Sp. Aspec Paper - Nanga Mua • Jl. Bukit Naning - Batas Amin Jaya/Parit Cina 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Kumai Hilir - Terminal Sei Kapitan • Jl. Rungun – PLTU • Jl. DPRD • Jl. DPRD 1 • Jl. Banteng Sumber Agung • Jl. Manjung H1 • Jl. Balai Antang • Jl. Sp. Pangkut - Korintiga / Camp UCK • Jl. Pangkut Seberang • Kubu - Sungai Bakau - Teluk Bogam • Teluk Bogam - Keraya – Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tj. Putri • Sebuai - Batas Pasir Panjang • Jl. Bendahara • Jl. H.M. Idris - Al Huda • Jl. Marundau • Jl. Bahari • Jl. Masjid • Jl. H. Abdul Azis • Jl. Pemuda • Jl. Sirajul Huda - Jl. Pemuda • Jl. Pelita • Jl. An Noor • Jl. Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro - Sp. Pelabuhan CPO • Jl. Sp. Pangkut / PBNA - Batas Amin Jaya/BJAP • Jl. Sp. Salip - Batas Amin Jaya/BJAP
Lingkungan Primer & Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Di seluruh kecamatan 	
Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> • ruas Pangkalan Bun – Lamandau; dan • ruas Pangkalan Bun – Sampit 	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Arahan pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 antara lain:

- a. Pengoptimal terminal penumpang tipe B Natai Suka
- b. Pengaktifan kembali 4 (empat) unit terminal penumpang tipe C yaitu:
 1. Terminal Simpang Runtu
 2. Terminal Kotawaringin Lama

3. Terminal Pangkut
4. Terminal di Kecamatan Pangkalan Banteng

c. Pengoptimalan trayek angkutan umum perkotaan dan perdesaan

Sedangkan arahan pengembangan terminal barang di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Terminal Barang Bumi Harjo. Selanjutnya untuk arahan pengembangan jembatan timbang di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Jembatan Timbang Runtu di Kecamatan Pangkalan Lada.

Arahan pengembangan jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- a. Jembatan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain pengembangan-pengembangan tersebut, juga terdapat pengembangan jaringan kereta api yang meliputi:

A - Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana jalur kereta api di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. Sistem jaringan jalur kereta api utama Provinsi yaitu pada jalur kereta api berupa:
 - Jalur Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga yang melintasi wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada
 - Jalur Kudangan - Nanga Bulik - Kumai yang melintasi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, dan Pangkalan Lada
2. Sistem jaringan jalur kereta api antar kota yaitu ruas jalan kereta api Buntok –Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.

B - Stasiun Kereta Api

Arahan pengembangan stasiun penumpang di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa :

1. Pengembangan Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun, Kumai.
2. Pengembangan Stasiun Pangkalan Bun dan Kumai.

Rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 meliputi:

A - Lintas Penyeberangan Antar Provinsi

Berupa Lintas penyeberangan Tempenek - Kendal

B - Pelabuhan Sungai Dan Danau

Pelabuhan sungai dan danau meliputi:

1. Rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalan Lada
2. Dermaga Rungun
3. Rencana pengembangan Pelabuhan Pandau
4. Dermaga LLSADP Sebukat

5. Pelabuhan Kotawaringin Lama
6. Dermaga LLSADP Karang Sari
7. Pelabuhan Pangkalan Bun
8. Dermaga Nangamua
9. Pelabuhan Kumai
10. Dermaga Pandau
11. Pelabuhan Pasar Indrasari
12. Dermaga Kumai Hilir
13. Pelabuhan Pasar Saik
14. Dermaga Sei Cabang
15. Dermaga LLASDP Kotawaringin Lama
16. Dermaga Tanjung Putri
17. Dermaga LLASDP Kumai
18. Dermaga Telur Pulau
19. Dermaga Sungai Sekonyer

C - Pelabuhan Penyeberangan

Berupa Pelabuhan penyeberangan Kumai

Rencana sistem jaringan transportasi laut berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 berdasarkan berupa:

A - Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan pengumpul di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Pelabuhan Kumai

B - Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan pengumpan di Kotawaringin Barat berupa Pelabuhan Pengumpan Regional. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa:

1. Pengoptimalan Pelabuhan Pangkalan Bun
2. Pengembangan Pelabuhan Sebuai.

C - Pelabuhan Perikanan

Rencana pelabuhan perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Kumai.

Untuk jaringan transportasi udara, pada kondisi eksisting Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki satu bandara udara pengumpul yaitu Bandar Udara Iskandar. Pengembangan pada bandara tersebut terus ditingkatkan. Selain itu, terdapat rencana pengembangan bandara khusus berupa Bandar Udara Sebuai, Kecamatan Kumai.

4.4.2 Energi/ Listrik

Kebutuhan energi/ listrik yang diproyeksikan meliputi kebutuhan rumah tangga, perdagangan dan industri, fasilitas umum, perkantoran, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Kebutuhan energi/ listrik di Kotawaringin Barat hingga tahun 2045 diperkirakan mencapai 71.390 KVA dan meningkat tiap tahunnya. Dimana kebutuhan listrik terbesar adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Berikut adalah proyeksi kebutuhan energi/ listrik di Kotawaringin Barat tahun 2045.

Tabel 4. 15 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Listrik Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Listrik (KVA)						Total
		Rumah Tangga	Perdagangan dan Industri	Fasilitas Umum	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	
1	Arut Utara	884	619	133	88	9	44	1.777
2	Arut Selatan	15.645	10.951	2.347	1.564	156	782	31.446
3	Kumai	6.772	4.705	1.008	672	67	336	13.510
4	Pangkalan Banteng	5.235	3.664	785	523	52	262	10.522
5	Pangkalan Lada	4.597	3.218	690	460	46	230	9.241
6	Kotawaringin Lama	2.434	1.704	365	243	24	122	31.446
	Total	35.517	24.862	2.328	3.552	355	1.776	71.390

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.3 Telekomunikasi

Kebutuhan telekomunikasi yang diproyeksikan meliputi perkiraan jumlah pengguna seluler, trafik (Erlang), dan Base Transceiver Tower (BTS). Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Jumlah pengguna seluler pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 226.110 pengguna sehingga kebutuhan telekomunikasi di Kotawaringin Barat hingga tahun 2045 diperkirakan mencapai 3.769 trafik (Erlang) dan 84 BTS. Berikut adalah proyeksi telekomunikasi di Kotawaringin Barat tahun 2045.

Tabel 4. 16 Perkiraan Jumlah Pengguna Seluler Tahun 2045

Tahun	Arut Utara	Arut Selatan	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Kotawaringin Lama
2024	6.663	88.915	39.043	28.680	25.963	14.199
2029	6.462	93.639	40.700	30.735	27.424	14.773
2034	6.161	96.619	41.746	32.031	28.346	15.135
2039	5.893	98.362	42.357	32.789	28.885	15.347
2044	5.628	99.599	42.791	33.327	29.267	15.498

Sumber : Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

Tabel 4. 17 Jumlah Pengguna, Total Trafik (Erlang), dan Kebutuhan BT

Tahun	Jumlah Pengguna	Total Trafik (Erlang)	Kebutuhan BTS
2024	203.463	3.391	76
2029	213.732	3.562	80
2034	220.047	3.667	82
2039	223.634	3.727	83
2044	226.110	3.769	84

Sumber : Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.4 Air Bersih (Air Minum)

Kebutuhan air bersih (air minum) yang diproyeksikan meliputi kebutuhan rumah tangga, fasos dan perkantoran, komersial, industri, dan cadangan kebocoran. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Kebutuhan air bersih (air minum) pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 91.752.694 liter/hari. Berikut adalah proyeksi air bersih (air minum) di Kotawaringin Barat tahun 2045.

Tabel 4. 18 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Air Minum) Tahun 2045

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Air Bersih (liter/Hr)					Total
		Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Cadangan Kebocoran	
1	Arut Utara	1.473.413	221.012	294.683	147.341	147.341	2.283.789
2	Arut Selatan	26.074.819	3.911.223	5.214.964	2.607.482	2.607.482	40.415.970
3	Kumai	11.202.715	1.680.407	2.240.543	1.120.271	1.120.271	17.364.208
4	Pangkalan Banteng	8.724.945	1.308.742	1.744.989	872.494	872.494	13.523.664
5	Pangkalan Lada	7.662.125	1.149.319	1.532.425	766.212	766.212	11.876.293
6	Kotawaringin Lama	4.057.271	608.591	811.454	405.727	405.727	6.288.770
	Total	59.195.286	8.879.293	11.839.057	5.919.529	5.919.529	91.752.694

Sumber : Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.5 Persampahan

Proyeksi yang dihitung meliputi jumlah timbulan sampah (liter/hari) dan kebutuhan sarana persampahannya. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Timbulan sampah pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 947.124,58 liter/hari. Sedangkan kebutuhan sarana persampahan hingga tahun 2045 meliputi wadah komunal (1.579 unit), komposter komunal (3.157 unit), gerobak sampah (493 unit), container amroll truck (59 unit), TPS (140 unit), dan bangunan pendaur ulang sampah skala

lingkungan (105 unit). Berikut adalah proyeksi jumlah timbulan sampah dan kebutuhan sarana persampahan di Kotawaringin Barat tahun 2045.

Tabel 4. 19 Kebutuhan Sarana Persampahan Tahun 2045

Kecamatan	Wadah Komunal	Komposter komunal	Gerobak Sampah	Conatiner Amroll Truk	TPS			Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan
					Tipe I	Tipe II	Tipe III	
Arut Utara	39	79	12	1	3	0	0	3
Arut Selatan	695	1.391	217	26	56	5	1	46
Kumai	299	597	93	11	24	2	0	20
Pangkalan Banteng	233	465	73	9	19	2	0	16
Pangkalan Lada	204	409	64	8	16	1	0	14
Kotawaringin Lama	108	216	34	4	9	1	0	7
Total	1.579	3.157	493	59	126	11	3	105

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.6 Air Limbah

Jumlah air limbah yang diproyeksikan meliputi air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, fasos dan perkantoran, komersial, dan industri. Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Air limbah yang dihasilkan pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 68.666.532 liter/hari. Berikut adalah proyeksi air limbah di Kotawaringin Barat tahun 2045.

Tabel 4. 20 Proyeksi Jumlah Air Limbah (liter/hari) Tahun 2045

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Fasos dan Perkantoran	Komersial	Industri	Total
1	Arut Utara	1.178.730	176.810	235.746	117.873	1.709.159
2	Arut Selatan	20.859.855	3.128.978	4.171.971	2.085.986	30.246.790
3	Kumai	8.962.172	1.344.326	1.792.434	896.217	12.995.149
4	Pangkalan Banteng	6.979.956	1.046.993	1.395.991	697.996	10.120.936
5	Pangkalan Lada	6.129.700	919.455	1.225.940	612.970	8.888.065
6	Kotawaringin Lama	3.245.817	486.872	649.163	324.582	4.706.434
	Total	47.356.229	7.103.434	9.471.246	4.735.623	68.666.532

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.7 Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase yang diproyeksikan yaitu air buangan (liter/hari). Proyeksi hingga tahun 2045 dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 dan air bersih (air minum). Air buangan yang mengalir dalam saluran drainase pada tahun 2045 di Kotawaringin Barat diperkirakan mencapai 64.226.885,69 liter/hari atau 743,37 liter/detik. Berikut adalah proyeksi air buangan pada saluran drainase di Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2045.

Tabel 4. 21 Proyeksi Jumlah Air Buangan (liter/hari)

No	Kecamatan	2023	2029	2034	2039	2044
1	Arut Utara	1.892.647,59	1.835.437,66	1.752.848,82	1.673.976,21	1.598.652,62
2	Arut Selatan	25.256.547,70	26.598.200,93	27.444.689,88	27.939.854,17	28.291.178,83
3	Kumai	11.090.181,47	11.560.928,56	11.857.936,91	12.031.675,65	12.154.945,25
4	Pangkalan Banteng	8.146.621,65	8.730.187,14	9.098.375,97	9.313.752,63	9.466.564,80
5	Pangkalan Lada	7.374.804,78	7.789.773,36	8.051.589,39	8.204.741,95	8.313.405,42
6	Kotawaringin Lama	3.245.817	486.872	649.163	324.582	4.706.434
	Total	57.793.942,14	60.710.806,63	62.504.649,84	63.523.419,61	64.226.885,69

Sumber: Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kotawaringin Barat Tahun 2045

4.4.8 Sumber Daya Air

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, prasarana sumber daya air meliputi sistem jaringan irigasi, sistem jaringan pengendali air, dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, sebagai berikut:

1. Jaringan irigasi primer, berupa:

- a. DI Sagu Suka Mulya (Kumai - Kondang) Induk di Kecamatan Kotawaringin Lama
- b. DI Palih Baru Induk di Kecamatan Kotawaringin Lama
- c. DI Berambai Makmur Induk di Kecamatan Pangkalan Banteng
- d. DI Pangkalan Satu Bumi Harjo Induk di Kecamatan Kumai
- e. DI Pangkalan Satu Lahan II Induk di Kecamatan Kumai

2. Jaringan irigasi sekunder, berupa:

- a. DI Sagu Suka Mulya (Kumai - Kondang) Sekunder di Kecamatan Kotawaringin Lama
- b. DI Palih Baru Sekunder di Kecamatan Kotawaringin Lama
- c. DI Berambai Makmur Sekunder di Kecamatan Pangkalan Banteng
- d. DI Pangkalan Satu Bumi Harjo Sekunder di Kecamatan Kumai

e. Di Pangkalan Satu Lahan II Sekunder di Kecamatan Kumai

Rencana sistem pengendalian banjir terdiri dari rencana jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir.

1. Jaringan pengendalian banjir:

Rencana pengembangan jaringan pengendalian banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

- a. Wilayah Sungai (WS) Jelai Kendawangan meliputi DAS Arut (Kabupaten Kotawaringin Barat), DAS Lamandau (Kabupaten Lamandau), DAS Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), dan DAS Jelai (Kabupaten Sukamara);
- b. Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam).

2. Bangunan pengendalian banjir:

- a. Sungai Dendang Desa Marga Mulya
- b. Sungai Buun Kec. Arut Selatan
- c. Sungai di Desa Sungai Hijau
- d. Sungai IPUH Desa IPUH Bangun Jaya Kec. Kotawaringin Lama
- e. Sungai Kumai di Desa Argamulya Kec. Pangkalan Banteng
- f. Sungai Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng
- g. Sungai Sintuk Kecil Kec. Kumai
- h. Sungai Sentosa Kec. Kumai
- i. Sungai Badara Kumpai Batu Bawah
- j. Sungai Melawen Desa Sungai Melawen
- k. Sungai Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada
- l. Sungai Dendang Desa Marga Mulya
- m. Sungai Anak Sungai Pakit Kec. Pangkalan Banteng
- n. Sungai Lopo Kec. Kotawaringin Lama
- o. Sungai Sintuk Kec. Kumai
- p. Sungai Bamban Kec. Arut Selatan
- q. Sungai Dendang Desa Simpang Berambai Kec. Pangkalan Banteng
- r. Desa Karang Sari Kec. Pangkalan Banteng
- s. Sungai Andel Perkebunan Pertanian RT 8 Kel. Candi Kec. Kumai
- t. Sungai RT.15 Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada
- u. Sungai Asap Kumai Hilir Kec. Kumai.

Pada kondisi eksisting bangunan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa bendung, embung, dan danau sebagai berikut:

1. Bendung, meliputi: Bendung Kumai Kondang di Kotawaringin Lama;

2. Embung, meliputi:

- a. Embung Danau Asam;
- b. Embung Sungai Kuning;
- c. Embung Marga Mulya;
- d. Embung Pangkalan Satu; dan
- e. Embung Palih Baru di Kotawaringin Lama.

3. Danau, meliputi:

- a. Danau Asem
- b. Danau Gatel
- c. Danau Gihitam
- d. Danau Jalapangin; dan
- e. Danau Kandang.

➤ Evakuasi Bencana

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, evakuasi bencana Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi. Berikut adalah penjelasannya.

1. Jalur Evakuasi

Jalur evakuasi adalah jalan-jalan utama, jalan kecil, dan gang-gang yang memandu masyarakat dengan cepat menuju area aman dan bangunan vertikal. Rute yang baik harus cukup lebar untuk pergerakan, dan dapat memandu langsung menjauhi lokasi bahaya. Apabila di suatu wilayah rute evakuasi tidak memadai, maka perlu pembuatan jalan tambahan untuk jalur evakuasi. Jalur evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Titik awal adalah dari permukiman/pusat kegiatan masyarakat
- b. Lebar minimal dapat dilalui oleh 1 kendaraan roda 4, aksesibilitas baik
- c. Perkerasan jalan aspal
- d. Arah rute menjauhi atau tegak lurus dengan bibir pantai atau sungai dan menuju zona risiko rendah
- e. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana dilengkapi rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi. Jalur evakuasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan jaringan jalan di seluruh wilayah kabupaten.

2. Tempat Evakuasi

Tempat evakuasi yang baik berdasarkan Buku Penyusunan Rencana Evakuasi Tahun 2020 harus memuat beberapa kriteria seperti:

- a. Luas bangunan minimal 225 m² (mampu menampung seluruh warga terdampak)
- b. berada dekat dengan jalan primer (jalan kabupaten) atau jalan sekunder (jalandes)

- c. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana
- d. Lokasi aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama
- e. Jarak terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak
- f. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar
- g. Tersedia dan/atau dekat dengan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.

Tempat evakuasi bencana dapat memanfaatkan hamparan luas, lapangan maupun bangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan kriteria tempat evakuasi.

4.5 ANALISIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (KOTA PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERPENDIDIKAN)

Dari ketersediaan dan kualitas pelayanan pendidikan belum optimal dan masih sangat terbatas. Dari program yang ada belum memenuhi kriteria Kota Dunia dalam hal pendidikan sehingga untuk mendukung Kotawaringin barat sebagai Kota Dunia perlu pengembangan institusi pendidikan tinggi baik dari kualitas dan kuantitas.

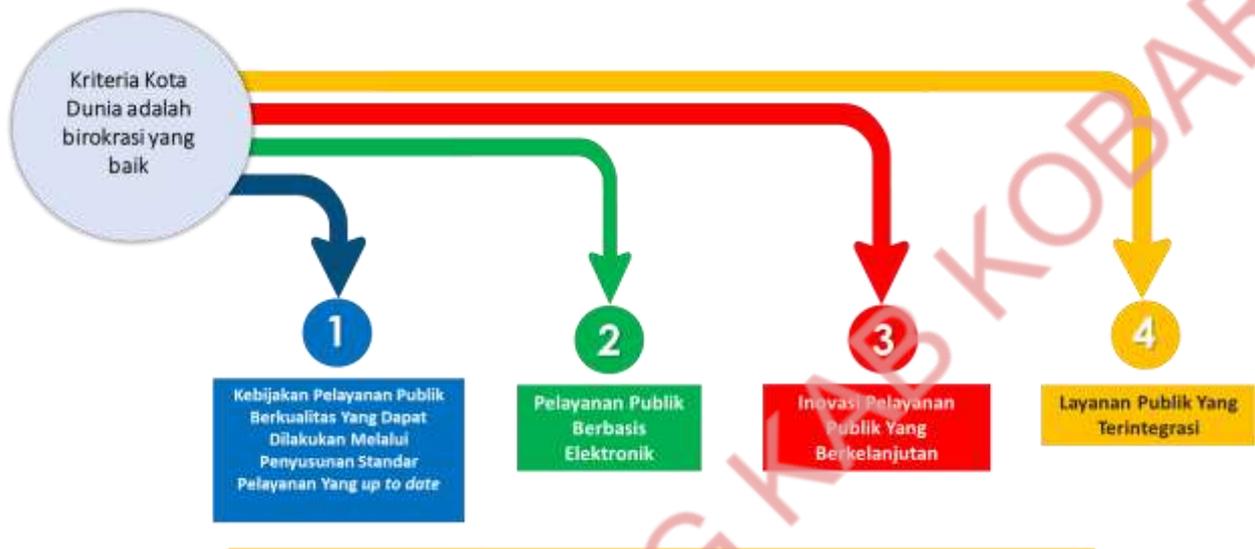
Dari kondisi eksisting, dan program kebudayaan yang ada Kotawaringin cukup potensial. Namun untuk menjadi Kota Dunia, Kebudayaan yang ada perlu dikenal lebih luas untuk promosi skala internasional dengan teknologi dan informasi yang mendukung

Tabel 4. 22 Analisis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Kota Pendidikan Berkarakter dan Berpendidikan)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat TK : 168, SD: 210, SMP: 86, SMA: 25, Perguruan tinggi : 3 • Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebar secara merata di seluruh kecamatan, kecuali untuk fasilitas pendidikan SMK dan SLB. • Jumlah tenaga Pendidik/ pengajar tahun 2024 : 1.672 pendidik • Di Kotawaringin barat terdapat Sekolah rujukan google, dengan syarat minimal memiliki 64 chrome book, nantinya Sekolah langsung dibina google • Salah satunya SDN 1 Pandu Sajaya Pangkalan Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pembinaan Sejarah 5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 	<p>Kota harus memiliki institusi pendidikan dan penelitian yang berkualitas tinggi, seperti universitas dan lembaga penelitian terkemuka. Indikator ini termasuk angka melekterasi, jumlah universitas dan peneliti, dan hasil penelitian yang dihasilkan.</p>	<p>✓ Dari ketersediaan dan kualitas pelayanan pendidikan belum optimal dan masih sangat terbatas. Dari program yang ada belum memenuhi kriteria Kota Dunia dalam hal pendidikan sehingga untuk mendukung Kotawaringin barat sebagai Kota Dunia perlu pengembangan institusi pendidikan tinggi baik dari kualitas dan kuantitas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 44 objek Pemajuan kebudayaan (OPK), 57 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), 4 Lembaga kebudayaan, 14 sarana kebudayaan, 127 grup kesenian, 45 festival seni, dan memiliki suku yang beragam. 		<p>Kota harus mendorong keberagaman budaya dan memiliki komunitas internasional yang besar dan beragam. Indikator ini termasuk jumlah festival budaya, kegiatan seni, dan keberagaman etnis.</p>	<p>✓ Dari kondisi eksisting, dan program kebudayaan yang ada Kotawaringin cukup potensial. Namun untuk menjadi Kota Dunia, Kebudayaan yang ada perlu dikenal lebih luas untuk promosi skala internasional dengan teknologi dan informasi yang mendukung</p>

Sumber ; Analisis, 2024

Untuk mewujudkan **birokrasi bertaraf internasional** berdasarkan beberapa sumber yaitu **Birokrasi yang berlevel internasional birokrasi yang bersih bebas dari KKN-Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**; pelaksanaan **anggaran yang akuntabel**, yaitu **pelaksanaan anggaran yang secara simultan harus lebih efektif dan efisien**; ASN itu harus **memiliki kapabilitas**, harus mampu memberikan pelayanan publik yang prima.



4.6 ANALISIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (KOTAWARINGIN BARAT CITY OF HUB)

Kotawaringin Barat sudah memiliki infrastruktur transportasi darat, udara maupun laut seperti, jalan, bandara dan Pelabuhan. Juga sudah terlayani fasilitas telekomunikasi, listrik dan air yang mendukung dalam semua aktivitas.

Namun sejalan dengan pertumbuhan penduduk perlu ada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang ada dan program sudah mendukung Kotawaringin barat sebagai Kota Dunia. Namun, perlu pengembangan aksesibilitas berupa jalan tol, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan penerapan teknologi pada bidang transportasi seperti IoT (Internet Of Things) pada manajemen Transportasi Publik. Selain itu, perlu adanya peningkatan transportasi udara yaitu bandara Iskandar menjadi skala internasional.

Tabel 4. 23 Analisis Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat City Of Hub)

ksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, • Terdapat Pelabuhan Kumai, pelabuhan Panglima Utar, Pelabuhan Sei Pasar Indrasari, Pelabuhan Tanjung Kalap, dll • Didukung dengan infrastruktur jalan negara, provinsi, dan kabupaten. • Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik : 35,071% • Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman : 94,21% • Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai : 94,66% • Telah terlayani jaringan listrik yang tersebar di seluruh wilayah Kotawaringin Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 3. Program Pemerataan Konektivitas Wilayah 4. Program Peningkatan Pemerataan Jaringan 5. Program Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan 	<p>Infrastruktur yang maju sangat penting, termasuk transportasi umum yang efisien, jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, dan fasilitas teknologi canggih. Indikator ini termasuk aksesibilitas transportasi, kualitas jalan, dan ketersediaan layanan listrik dan air bersih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kotawaringin Barat sudah memiliki infrastruktur transportasi darat, udara maupun laut seperti, jalan, bandara dan Pelabuhan. • Juga sudah terlayani fasilitas telekomunikasi, listrik dan air yang mendukung dalam semua aktivitas . • Namun sejalan dengan pertumbuhan penduduk perlu ada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. • Berdasarkan kondisi yang ada dan program sudah mendukung Kotawaringin barat sebagai Kota Dunia. Namun, perlu pengembangan aksesibilitas berupa jalan tol, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan penerapan teknologi pada bidang transportasi seperti IoT (Internet Of Things) pada manajemen Transportasi Publik. Selain itu, perlu adanya peningkatan transportasi udara yaitu bandara Iskandar menjadi skala internasional.

Sumber ; Analisis, 2024

4.7 ANALISIS BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIKA DAN PERSANDINGAN (KOBAR KOTA SILIKON VALLEY INDONESIA)

Sudah ada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronika namun masih banyak infrastruktur yang harus dilengkapi untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas.

Perlu adanya peningkatan SDM di bidang teknologi informasi komunikasi pada masing-masing SKPD, karena saat ini kondisinya belum memadai.

Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga yang membidangi statistic karena kondisi saat ini masih kurang.

Dari kondisi eksisting dan program yang ada, sudah mendukung kriteria menuju Kota Dunia namun perlu upaya pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas aplikasi informatika, statistika, dan persandian pada seluruh aspek/ bidang.

Tabel 4. 24 Analisis Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandian (Kobar Kota Silikon Valley Indonesia)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pada Aspek Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat adalah dengan tersedianya Layanan Adminstrasi Pemerintahan dan layanan publik secara elektronik. • Perangkat Daerah Kotawaringin Barat sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah • Capaian tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 50,38% lalu mengalami kenaikan menjadi 51,8% di tahun 2023. • Kotawaringin Barat telah menggunakan metode persandian dengan tujuan mengamankan informasi penting pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 	<p>Kota harus mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indikator ini termasuk jumlah paten yang diterbitkan, penggunaan teknologi dalam layanan publik, dan inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronika namun masih banyak ifrastruktur yang harus dilengkapi untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas. • Perlu adanya peningkatan SDM di bidang teknologi informasi komunikasi pada masing-masing SKPD, karena saat ini kondisinya belum memadai. • Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga yang membidangi statistic karena kondisi saat ini masih kurang. • Dari kondisi eksisting dan program yang ada, sudah mendukung kriteria menuju Kota Dunia namun perlu upaya pengembangan dan peningkatan kualitas serta kuantitas aplikasi informatika, statistika, dan persandian pada seluruh aspek/ bidang.

Sumber ; Analisis, 2024

4.8 ANALISIS BIDAN PARIWISATA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KOPERASI MENENGAH KECIL (KOBAR ISTIMEWA)

Perlu upaya peningkatan kualitas obyek wisata dan produk ekonomi kreatif karena kondisi saat ini masih rendah. Tata Kelola obyek wisata belum berjalan dengan baik sehingga perlu ada keterlibatan pemda dalam pengelolaannya. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata seperti upaya promosi hingga skala internasional untuk menarik wisatawan mancanegara

Berdasarkan kondisi dan eksisting dan program, untuk menuju Kotawaringin Barat sebagai Kota Dunia perlu peningkatan industri pariwisata dengan pengembangan sarana prasarana pariwisata, promosi, SDM, teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata. Perlu pengembangan SDM Pembina Industri Perdagangan, Koperasi dan UMKM karena saat ini masih kurang. Perlu upaya pengembangan dalam pengelolaan pasar rakyat menjadi pasar yang bersih dan sehat karena saat ini kondisinya belum optimal. Perlu adanya hilirasi industry karena kondisi saat ini masih minim. Untuk menuju Kota Dunia, dalam sektor industri dan perdagangan perlu pengembangan sarana prasarana, SDM pelaku industri, promosi produk daerah, dan pengembangan teknologi industri serta pengembangan hilirisasi industri.

Tabel 4. 25 Analisis Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (Kobar Istimewa)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah destinasi wisata Kotawaringin Barat sebanyak 54 DTW dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 41.738, wisatawan nusantara 344.880. Jumlah pengangguran tahun 2023 : 6.244 jiwa Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 26,8% dan 13,3%. 	<p>Program Dinas Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<p>Kota harus memiliki pengaruh global dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Indikator ini termasuk jumlah kunjungan wisatawan internasional, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam acara internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlu upaya peningkatan kualitas obyek wisata dan produk ekonomi kreatif karena kondisi saat ini masih rendah ✓ Tata Kelola obyek wisata belum berjalan dengan baik sehingga perlu ada keterlibatan pemda dalam pengelolaannya. ✓ Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata seperti upaya promosi hingga skala internasional untuk menarik wisatawan mancanegara ✓ Berdasarkan kondisi dan eksisting dan program, untuk menuju Kotawaringin Barat sebagai Kota Dunia perlu peningkatan industri pariwisata dengan pengembangan sarana prasarana pariwisata, promosi, SDM, teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 26,8% dan 13,3%. Adanya peningkatan nilai ekspor mulai tahun 2019 	<p>Program Disperindagkop Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 	<p>Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlu pengembangan SDM Pembina Industri Perdagangan, Koperasi dan UMKM karena saat ini masih kurang ✓ Perlu upaya pengembangan dalam pengelolaan pasar rakyat menjadi pasar yang bersih dan sehat karena saat ini kondisinya belum optimal. ✓ Perlu adanya hilirasi industry karena kondisi saat ini masih minim

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<p>hingga 2022, nilai ekspor tahun 2023 di Kotawaringin Barat sebesar US\$ 799.025.594,00,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Industri Besar, IKM yang tersebar di wilayah Kotawaringin Barat 	<p>4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)</p> <p>5. Program Pengembangan Umkm Bidang Perdagangan</p> <p>1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</p> <p>2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p> <p>4. Program Pengembangan Ekspor</p> <p>5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</p> <p>6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bidang Industri</p> <p>1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</p> <p>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <p>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p>	<p>Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota</p>	<p>✓ Untuk menuju Kota Dunia, dalam sektor industri dan perdagangan perlu pengembangan sarana prasarana, SDM pelaku industri, promosi produk daerah, dan pengembangan teknologi industri serta pengembangan hilirisasi industri</p> <p>✓ Pengembangan industry hijau untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksi.</p>

Sumber ; Analisis, 2024

4.9 ANALISIS BIDANG INVESTASI, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KOBAR KOTA BISNIS BARU)

Dari kondisi eksisting dan program yang ada minat investasi di Kotawaringin Barat masih kurang sehingga untuk menuju Kota Dunia, Kotawaringin Barat perlu melakukan pengembangan promosi di tingkat regional, nasional, melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah untuk menarik minat investasi.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

Tabel 4. 26 Analisis Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kobar Kota Bisnis Baru)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 7.054 Nomor Izin Berusaha (NIB) baru • Penanaman modal dalam negeri memiliki nilai yang lebih besar dari penanaman modal asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Promosi Penanaman Modal; 4. Program Pelayanan Penanaman Modal; 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 	<p>Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota.</p>	<p>Dari kondisi eksisting dan program yang ada minat investasi di Kotawaringin Barat masih kurang sehingga untuk menuju Kota Dunia, Kotawaringin Barat perlu melakukan pengembangan promosi di tingkat regional, nasional, melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah untuk menarik minat investasi</p>

4.10 ANALISIS BIDANG KESEHATAN DAN SOSIAL (KOBAR SEHAT)

Kondisi ini menunjukkan Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kotawaringin Barat masih belum optimal disebabkan masih terdapat kematian bayi nilai realisasi 6,76% dan capaian 145,04%, ibu 7 kasus, Kematian akibat penyakit menular, Kematian akibat penyakit tidak menular. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 85,37, sehingga Upaya yang dilakukan dalam memberikan/ meningkatkan kepuasan Layanan masyarakat dengan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan sesuai SPM (Standar pelayanan minimal) serta peningkatan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung kualitas hidup penduduk Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 27 Analisis Bidang Kesehatan Dan Sosial (Kobar Sehat)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga kesehatan 129 yang terdiri dari dokter, ahli gizi, perawat, apoteker, dll • Terdapat fasilitas kesehatan namun belum merata khususnya rumah sakit hanya terdapat di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan • Angka Harapan Lama Hidup penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 lebih rendah 0,41 tahun dari angka Harapan Lama Hidup penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 73,54 tahun dan lebih rendah 0,8 tahun dari Angka Harapan Lama Hidup Nasional yang mencapai 73,93. 	<p>Bidang kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi 2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan indikator Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan indikator Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan indikator Persentase Posyandu Aktif 80%. 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah 100% <p>Bidang Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Penanganan Bencana 3. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 	<p>Kualitas hidup penduduk kota harus tinggi, dengan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan fasilitas rekreasi yang baik. Indikator ini termasuk angka kematian, ketersediaan rumah sakit, dan kualitas lingkungan hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi ini menunjukkan Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kotawaringin Barat masih belum optimal disebabkan masih terdapat kematian bayi nilai realisasi 6,76% dan capaian 145,04%, ibu 7 kasus, Kematian akibat penyakit menular, Kematian akibat penyakit tidak menular. • Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 85,37, sehingga Upaya yang dilakukan dalam memberikan/meningkatkan kepuasan Layanan masyarakat dengan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan sesuai SPM (Standar pelayanan minimal) serta peningkatan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung kualitas hidup penduduk Kotawaringin Barat.

4.11 ANALISIS BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA (KOBAR JUARA)

Perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga karena kondisi saat ini masih kurang. Sudah banyak perlombaan yang diikuti oleh pemuda Kabupaten Kotawaringin barat di tingkat regional maupun nasional namun perlu ditingkatkan lagi.

Perlu ada upaya pengembangan fasilitas kepemudaan untuk meningkatkan minat dan peran kepemudaan Kotawaringin Barat.

Untuk menuju Kota Dunia, Kotawaringin Barat berorientasi untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga di tingkat nasional dan internasional.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

Tabel 4. 28 Analisis Bidang Pemuda Dan Olahraga (Kobar Juara)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat fasilitas olahraga seperti gedung sport center, lapangan, stadion, dll • Terdapat organisasi pemuda sebanyak 42 organisasi dan 325 club olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan 2. Program Khursus Wasit C3 Askap PSSI 3. Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan 4. Program Seminar Pemuda 5. Program Pembinaan Aktivitas Pemuda 6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	<p>Kota harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota. Indikator ini termasuk tingkat partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga karena kondisi saat ini masih kurang. • Sudah banyak perlombaan yang diikuti oleh pemuda Kabupaten Kotawaringin barat di tingkat regional maupun nasional namun perlu ditingkatkan lagi. • Perlu ada upaya pengembangan fasilitas kepemudaan untuk meningkatkan minat dan peran kepemudaan Kotawaringin Barat. • Untuk menuju Kota Dunia, Kotawaringin Barat berorientasi untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga di tingkat nasional dan internasional.

Sumber ; Analisis, 2024

4.12 ANALISIS BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN PERUMAHAN RAKYAT (KOBAR DESA MAJU DAN SEJAHTERA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan Kriteria:

- a. Perekonomian masyarakat;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Kemampuan keuangan daerah;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik daerah

Indikator Kriteria perekonomian masyarakat terdiri atas:

- Produk domestik regional bruto per-kapita;
- Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan; dan
- Persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian.

Produk domestik regional bruto per-kapita yang selanjutnya disebut PDRB per-kapita merupakan nilai produk domestik regional bruto yang telah dikoreksi dalam kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan. Persentase pengeluaran rumah tangga non-makanan merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga non-makanan dibagi total pengeluaran rumah tangga dikali 100% (seratus persen) di kabupaten bersangkutan.

Persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian merupakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dibagi jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Indikator Kriteria sumber daya manusia terdiri atas:

- a. Persentase wanita usia 15–49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis;
- a. Persentase balita diberi imunisasi lengkap;
- b. Angka partisipasi sekolah menengah pertama; dan
- c. Angka partisipasi sekolah menengah atas.

Persentase wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis jumlah wanita usia produktif 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang kelahirannya dibantu oleh tenaga medis (dokter, bidan, atau para medis) dibagi seluruh wanita usia 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun yang pernah kawin dalam

periode dua tahun terakhir dikali 100% (seratus persen). Persentase balita diberi imunisasi lengkap merupakan jumlah anak usia 0-4 (nol sampai empat) tahun yang diberikan imunisasi lengkap dibagi jumlah anak 0-4 (nol sampai empat) tahun di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Angka partisipasi sekolah menengah pertama merupakan jumlah penduduk yang berusia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun.

Angka partisipasi sekolah menengah atas merupakan jumlah penduduk yang berusia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun yang sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia 16-18 (enam belas sampai delapan belas) tahun.

Indikator Kriteria sarana dan prasarana terdiri atas:

- a. Persentase desa yang mempunyai pertokoan;
- b. Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan;
- c. Persentase desa yang mempunyai dokter;
- d. Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar;
- e. Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama;
- f. Persentase rumah tangga pengguna listrik;
- g. Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam;
- h. Persentase penduduk pengguna internet; dan
- i. Persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Persentase desa yang mempunyai pertokoan merupakan jumlah desa yang mempunyai kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, atau pasar dengan bangunan semi permanen dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang mempunyai fasilitas kesehatan merupakan jumlah desa yang mempunyai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang mempunyai dokter merupakan jumlah desa yang mempunyai dokter umum/spesialis atau dokter gigi dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang mempunyai sekolah dasar merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). Persentase desa yang mempunyai sekolah menengah pertama merupakan jumlah desa yang mempunyai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri atau swasta dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase rumah tangga pengguna listrik merupakan jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam merupakan jumlah rumah tangga pengguna telepon/telepon genggam dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen). Persentase penduduk pengguna internet merupakan jumlah penduduk pengguna internet dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase rumah tangga pengguna air bersih merupakan jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah rumah tangga di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Indikator Kriteria kemampuan keuangan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah per-kapita. Pendapatan asli daerah per-kapita yang selanjutnya disebut PAD per-kapita merupakan nilai pendapatan asli daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk di kabupaten bersangkutan.

Indikator Kriteria aksesibilitas terdiri atas:

- a. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton;
- b. Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; dan
- c. Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama.

Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/ beton merupakan jumlah desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan atau tempat praktik dokter dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang mudah mencapai sekolah menengah pertama merupakan jumlah desa yang memiliki atau mudah mencapai sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dibagi jumlah desa di kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Indikator Kriteria karakteristik daerah terdiri atas:

- a. Persentase desa yang tidak mengalami bencana; dan
- b. Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial.

Persentase desa yang tidak mengalami bencana merupakan jumlah desa yang tidak mengalami tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan/lahan atau kekeringan lahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial merupakan jumlah desa yang tidak mengalami perkelahian masal dalam 1 (satu) tahun terakhir dibagi jumlah seluruh desa dalam kabupaten bersangkutan dikali 100% (seratus persen).

Dari hasil penilaian berdasarkan indicator desa tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal maka didapatkan desa-desa sebagai berikut :

1. Kecamatan Arut Utara :
 - Desa Sungai Dau
2. Kecamatan Arut Selatan
 - Desa Tanjung Putri
 - Desa Rangda
3. Kecamatan Kumai
 - Desa Keraya
 - Desa Sebuai
 - Desa Sebuai Timur
4. Kecamatan Pangkalan Banteng
 - Desa Berambai Makmur
 - Desa Karang Sari
 - Desa Sungai Pulau
5. Kecamatan Kotawaringin Lama
 - Desa Tempayung
 - Desa Sakabulin
 - Desa Dawak
 - Desa Lalang
 - Desa Kondang
 - Desa Sumber Mukti
 - Desa Palih Baru

Tabel 4. 29 Penilaian Desa Tertinggal Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Kriteria perekonomian masyarakat	Kriteria sumber daya manusia	Kriteria sarana dan prasarana	Kriteria kemampuan keuangan daerah	Kriteria aksesibilitas	Kriteria karakteristik daerah	Total
1	Arut Utara							
	Nanga Mua	0,22	0,21	0,57	0,22	0,94	4,13	6,29
	Pangkut	1,51	1,43	0,85	1,51	0,94	2,21	8,45
	Sukarami	0,17	0,15	0,85	0,17	0,94	1,73	4,01
	Gandis	0,19	0,18	0,85	0,19	0,94	2,69	5,04
	Kerabu	0,17	0,18	1,70	0,17	0,94	1,68	4,84
	Sambi	0,30	0,28	0,85	0,30	0,94	1,54	4,21
	Penyombaan	0,16	0,15	0,57	0,16	0,94	2,40	4,38
	Pandau	0,14	0,13	0,57	0,14	0,94	3,07	4,99
	Riam	0,12	0,11	0,57	0,12	0,94	1,35	3,21
	Penahan	0,18	0,18	0,85	0,18	0,31	3,88	5,58
	Sungai Dau	0,09	0,09	0,57	0,09	0,94	0,28	2,06
2	Arut Selatan							
	Tanjung Putri	0,30	0,29	0,85	0,30	0,94	0,18	2,86
	Kumpai batu bawah	0,76	0,77	1,42	0,76	0,94	0,17	4,82
	Kumpai Batu Atas	1,36	1,36	1,14	1,36	0,94	0,28	6,44
	Pasir Panjang	4,99	5,07	3,13	4,99	0,94	1,51	20,63
	Mendawai	4,48	4,46	2,84	4,48	0,31	4,36	20,93
	Mendawai Seberang	0,83	0,83	0,85	0,83	0,94	0,24	4,52
	Raja	2,38	2,39	1,70	2,38	0,31	0,01	9,17
	Sidorejo	6,59	6,78	3,69	6,59	1,26	0,06	24,97
	Madurejo	8,41	8,49	4,55	8,41	1,26	0,24	31,36

No	Kecamatan	Kriteria perekonomian masyarakat	Kriteria sumber daya manusia	Kriteria sarana dan prasarana	Kriteria kemampuan keuangan daerah	Kriteria aksesibilitas	Kriteria karakteristik daerah	Total
	Baru	8,95	8,91	5,11	8,95	1,89	0,08	33,89
	Raja Seberang	0,89	0,83	0,85	0,89	0,31	1,07	4,84
	Rangda	0,39	0,37	0,57	0,39	0,31	0,47	2,5
	Kenambui	0,23	0,23	0,57	0,23	0,94	1,39	3,59
	Runtu	0,65	0,64	1,14	0,65	1,89	4,68	9,65
	Umpang	0,37	0,36	0,85	0,37	0,94	5,66	8,55
	Natai Raya	0,71	0,70	0,85	0,71	1,89	0,06	4,92
	Medang Sari	0,53	0,70	1,14	0,53	0,94	0,08	3,92
	Natai Baru	0,49	0,47	0,85	0,49	0,94	0,07	3,31
	Tanjung Terantang	0,42	0,42	1,14	0,42	0,94	0,11	3,45
	Sulung	0,28	0,27	0,57	0,28	1,89	1,58	4,87
3	Kumai							
	Sungai Cabang	0,33	0,30	0,57	0,33	0,31	3,09	4,93
	Teluk Pulai	0,16	0,14	0,85	0,16	0,31	4,44	6,06
	Sungai Sekonyer	0,19	0,18	0,57	0,19	0,31	7,35	8,79
	Kubu	1,47	1,35	0,85	1,47	0,94	1,13	7,21
	Sungai Bakau	0,65	0,63	0,57	0,65	0,94	1,03	4,47
	Teluk Bogam	0,49	0,47	0,57	0,49	0,94	0,76	3,72
	Keraya	0,20	0,19	0,57	0,20	0,94	0,72	2,82
	Sebuai	0,24	0,21	0,57	0,24	0,94	0,58	2,78
	Sungai Kapitan	2,45	2,34	0,85	2,45	0,94	0,84	9,87
	Kumai Hilir	3,10	3,03	1,42	3,10	0,94	0,76	12,35
	Batu Belaman	1,23	1,20	1,14	1,23	0,94	0,68	6,42
	Sungai Tendang	1,46	1,44	13,92	1,46	0,94	0,48	19,7
	Candi	1,62	1,60	0,85	1,62	0,94	0,62	7,25
	Kumai Hulu	2,72	2,63	1,42	2,72	0,94	0,17	10,6

No	Kecamatan	Kriteria perekonomian masyarakat	Kriteria sumber daya manusia	Kriteria sarana dan prasarana	Kriteria kemampuan keuangan daerah	Kriteria aksesibilitas	Kriteria karakteristik daerah	Total
	Sungai Badaun	0,73	0,71	1,14	0,73	0,94	3,75	8
	Sebuai Timur	0,11	0,11	0,85	0,11	0,94	0,33	2,45
	Bumi Harjo	1,94	1,86	0,85	1,94	0,94	0,26	7,79
	Pangkalan Satu	0,86	0,84	1,14	0,86	0,94	0,15	4,79
4	Pangkalan Banteng							
	Pangkalan Banteng	0,75	0,71	1,42	0,75	1,89	7,86	13,38
	Mulya Dadi	0,43	0,41	0,85	0,43	0,94	0,13	3,19
	Amin Jaya	2,67	2,57	0,85	2,67	0,94	0,42	10,12
	Natai Kerbau	0,64	0,61	0,85	0,64	0,94	0,60	4,28
	Karang Mulya	2,23	2,15	1,14	2,23	1,89	0,14	9,78
	Marga Mulya	0,71	0,69	0,85	0,71	1,89	0,20	5,05
	Arga Mulya	0,55	0,55	0,85	0,55	0,94	1,39	4,83
	Kebun Agung	0,56	0,56	0,85	0,56	0,94	0,09	3,56
	Sido Mulyo	0,70	0,68	0,85	0,70	0,94	0,42	4,29
	Simpang Berambai	0,70	0,70	0,85	0,70	0,94	0,07	3,96
	Sungai Hijau	0,56	0,86	1,14	0,56	1,89	0,09	5,1
	Sungai Bengkuang	0,77	0,77	0,85	0,77	1,89	0,26	5,31
	Sungai Kuning	0,52	0,51	0,85	0,52	0,94	0,08	3,42
	Sungai Pakit	0,91	0,87	0,85	0,91	0,94	0,11	4,59
	Berambai Makmur	0,20	0,19	0,57	0,20	0,94	0,05	2,15
	Karang Sari	0,26	0,25	0,85	0,26	0,94	0,12	2,68
	Sungai Pulau	0,22	0,21	0,85	0,00	0,94	0,10	2,32
5	Pangkalan Lada							
	Purbasari	1,49	1,44	1,14	1,49	1,89	0,20	7,65
	Sungai Rangit Jaya	0,84	0,82	0,85	0,84	1,89	0,30	5,54
	Sumber Agung	1,40	1,36	1,42	1,40	1,89	0,30	7,77

No	Kecamatan	Kriteria perekonomian masyarakat	Kriteria sumber daya manusia	Kriteria sarana dan prasarana	Kriteria kemampuan keuangan daerah	Kriteria aksesibilitas	Kriteria karakteristik daerah	Total
	Lada Mandala Jaya	1,40	1,36	1,14	1,40	0,94	0,13	6,37
	Makarti Jaya	1,12	1,05	1,14	1,12	1,89	0,12	6,44
	Pandu Sanjaya	0,82	0,81	1,70	0,82	1,89	0,23	6,27
	Pangkalan Tiga	2,75	2,70	1,99	2,75	0,94	0,20	11,33
	Kadipi Atas	1,26	0,49	1,14	1,26	0,94	0,15	5,24
	Pangkalan Dewa	0,51	1,15	1,14	0,51	0,94	0,13	4,38
	Pangkalan Durin	0,88	0,84	0,57	0,88	1,89	0,20	5,26
	Sungai Melawen	1,04	0,98	1,14	1,04	0,94	0,18	5,32
6	Kotawaringin Lama							
	Babual Baboti	0,26	0,26	0,57	0,26	0,94	1,29	3,58
	Tempayung	0,30	0,30	0,57	0,30	0,94	0,49	2,9
	Sakabulin	0,25	0,26	0,57	0,25	0,94	0,27	2,54
	Kinjil	0,31	0,30	0,85	0,31	0,94	0,40	3,11
	Kotawaringin Hilir	1,28	1,21	0,57	1,28	0,94	4,83	10,11
	Riam Durian	0,82	0,82	0,57	0,82	0,94	0,21	4,18
	Dawak	0,28	0,27	0,85	0,28	0,94	0,37	2,99
	Kotawaringin Hulu	0,76	0,77	1,14	0,76	0,94	1,06	5,43
	Lalang	0,12	0,11	0,57	0,12	0,94	0,47	2,33
	Rungun	0,51	0,49	0,57	0,51	0,94	0,66	3,68
	Kondang	0,14	0,13	0,85	0,14	0,94	0,72	2,92
	Sukamulya	0,55	0,51	0,57	0,55	0,94	0,07	3,19
	Sukajaya	0,37	0,37	0,85	0,37	0,94	0,11	3,01
	Suka Makmur	0,37	0,36	1,14	0,37	0,94	0,12	3,3
	Ipuh Bangun Jaya	0,39	0,38	1,14	0,39	0,94	0,20	3,44
	Sumber Mukti	0,26	0,26	0,57	0,26	0,94	0,03	2,32
	Palih Baru	0,35	0,35	0,85	0,35	0,94	0,01	2,85

Sumber : Analisis, 2024

Tabel 4. 30 Analisis Bidang Pemberdayaan Desa Dan Perumahan Rakyat (kobar desa maju dan sejahtera)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa mandiri sebesar 56,79% Lembaga ekonomi desa yang sudah terbina 215 lembaga di tahun 2022 Lembaga yang aktif (PKK : 101 dan posyandu : 182) Desa Terakses teknologi tepat guna sebanyak 133 desa Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa bersama dimana dari 76 Bumdes terdapat 34 yang tidak aktif 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi 	<p>Kota harus mendorong keberagaman budaya dan memiliki komunitas internasional yang besar dan beragam. Indikator ini termasuk jumlah festival budaya, kegiatan seni, dan keberagaman etnis.</p>	<p>Dari kondisi eksisting, semakin banyak desa yang mampu mengelola desa secara mandiri, lembaga ekonomi desa yang sudah terbina dan siap meningkatkan ekonomi desa, lembaga PKK dan posyandu yang aktif berperan meningkat kesehatan ibu dan anak, serta semakin banyak desa yang memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun menuju Kota Dunia, perlu peningkatan Kualitas SDM dan pengembangan potensi desa</p>

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
	<p>Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal</p> <p>11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>12. Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan</p> <p>13. Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tangga pengguna air minum bersih : 92,59 % • Rumah tinggal bersanitasi : 93,49 % • Rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik : 87,61 % • Rasio Rumah Layak Huni : 0,97 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Program Pengelolaan Izin Lokasi 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<p>Kualitas hidup penduduk kota harus tinggi, dengan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan fasilitas rekreasi yang baik. Indikator ini termasuk angka kematian, ketersediaan rumah sakit, dan kualitas lingkungan hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur karena saat ini masih kurang. • Ratio rumah layak 0,97, dimana masih ada ratio rumah tidak layak sehingga perlu ada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dengan program sejuta rumah melalui : • Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK),

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 8. Program Penatagunaan Tanah 9. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman 		<p>pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/ perbatasan/ tertinggal/ terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; • Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR

Sumber ; Analisis, 2024

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT

4.13 ANALISIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (KOBAR BERSIH, HIJAU DAN PRODUKTIF)

Produktivitas hasil pertanian Kotawaringin Barat cukup namun perlu ditingkatkan lagi dengan upaya pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian yang berteknologi tinggi sehingga akan menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kotawaringin Barat yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan yaitu sebesar 26,72%. Perlu adanya upaya hilirasi pertanian untuk memberikan tambahan value bidang pertanian dan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan wilayah Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia

Sudah terdapat sarana dan prasarana persampahan namun perlu tingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga kualitas lingkungan bisa lebih baik. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah karena kondisi saat ini masih kurang. Terdapat beberapa RTH yang tersebar namun masih banyak alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki tutupan lahan berhutan sehingga dapat meurunkan indeks kualitas tutupan lahan yang berpengaruh pada nilai kualitas lingkungan hidup sehingga perlu ada upaya pengendalian alih fungsi lahan tersebut.

Untuk mendukung kelestarian lingkungan perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Perlu ada upaya pengembangan Dari kondisi eksisting perlu peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Tabel 4. 31 Analisis Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau Dan Produktif)

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Kotawaringin Barat tahun 2023 mencapai 76,19 • Suhu udara rata-rata bulanan tertinggi di Kabupaten Kotawaringin terjadi dibulan Maret, April, Mei Juni pada 27,2°C, sedangkan suhu udara maksimum yang tercatat oleh BMKG Kotawaringin barat pada bulan Januari 2020 yaitu pada suhu 37,2°C • Seluruh nilai O3 berada dibawah ambang batas (baku mutu 235 µg/Nm3) menunjukkan bahwa kadar O3 di udara masih rendah. 	<p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Revitalisasi Fungsi RTH 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Penanganan Pencemaran Lingkungan 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 	<p>Kota harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indikator ini termasuk tingkat polusi udara dan air, penggunaan energi terbarukan, dan program daur ulang sampah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat sarana dan prasarana persampahan namun perlu tingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga kualitas lingkungan bisa lebih baik. • Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah karena kondisi saat ini masih kurang. • Terdapat beberapa RTH yang tersebar namun masih banyak alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki tutupan lahan berhutan sehingga dapat meurunkan indeks kualitas tutupan lahan yang berpengaruh pada nilai kualitas lingkungan hidup sehingga perlu ada upaya

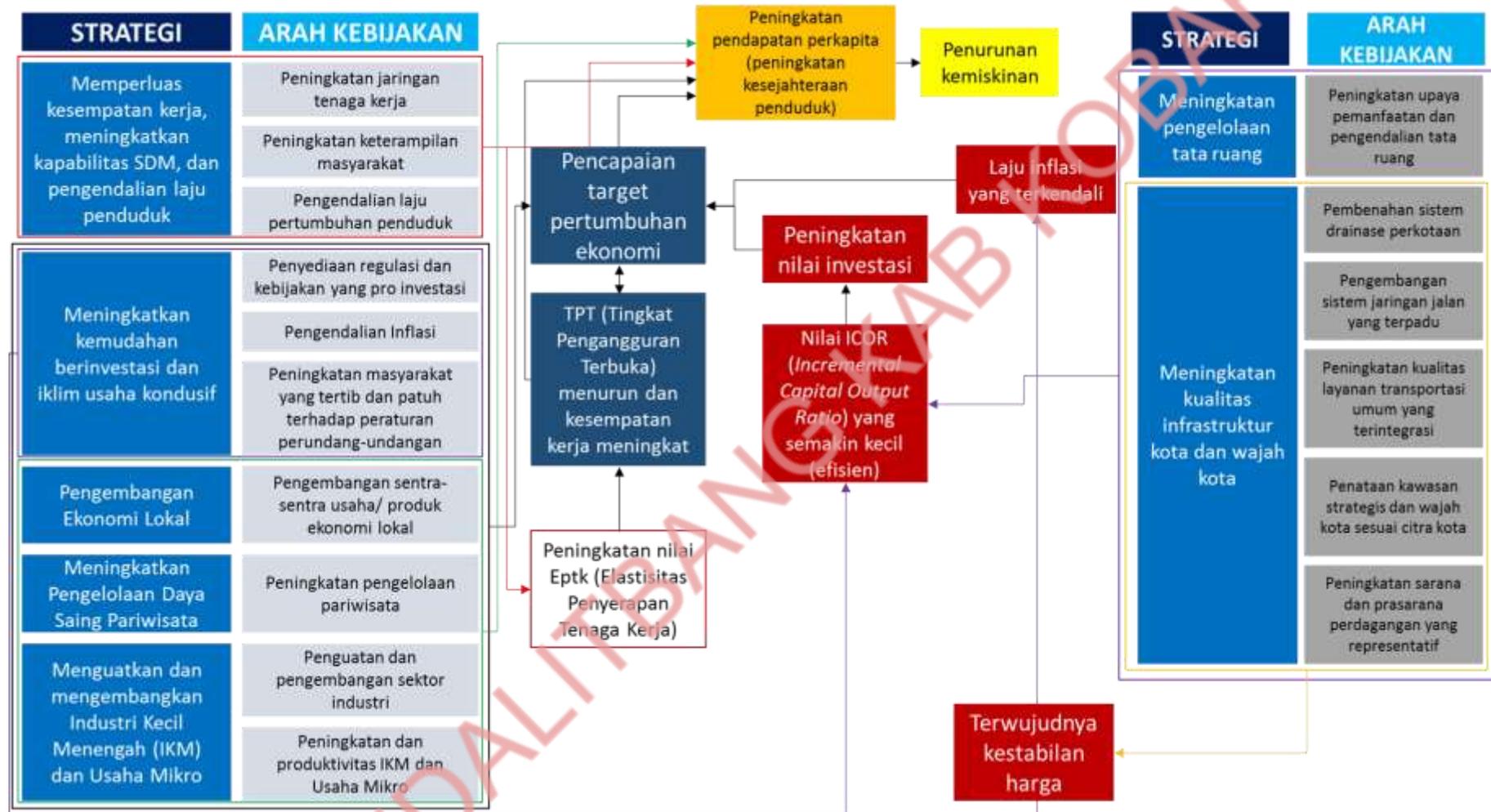
Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> Kualitas air sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan beberapa parameter utama sudah sangat melampaui baku mutu, antara lain: TSS, BOD, COD, Fe, Phenol, Sulfat, MBAS, Fecal dan Total coliform (Sumber : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kotawaringin Barat, 2021) 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Untuk mendukung kelestarian lingkungan perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Perlu ada upaya pengembangan Dari kondisi eksisting perlu peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 76 titik lokasi RTH 			
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 1 TPA, 14 titik TPS/TPST/TP 3R dan 13 Bank Sampah 			
<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas tanaman pangan tertinggi adalah padi, dan ubi kayu 	<p>Bidang Pangan, Perkebunana, dan Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Hilirasi sector pertanian, perkebunan, perikanan 	<p>Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produktivitas hasil pertanian Kotawaringin Barat cukup namun perlu ditingkatkan lagi dengan upaya pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana

Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas hortikultura tertinggi adalah cabai rawit, petai/ sawi/ dan ketimun • Komoditas buah-buahan unggulan tertinggi untuk subsektor tanaman hortikultura adalah : • Pisang : memiliki nilai produktivitas 171.952 kuintal • Komoditas biofarmaka unggulan tertinggi untuk subsektor tanaman hortikultura adalah: • Jahe : memiliki nilai produktivitas 4.821 Kg • Komoditas unggulan tertinggi untuk sektor perkebunan adalah: • Kelapa sawit : memiliki nilai produksi 84.551,7 ton • Komoditas Daging Peternakan unggulan tertinggi untuk Peternakan adalah: • Daging Ternak : Daging Sapi dengan nilai produksi 63,96 ton. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 6. Program perizinan usaha pertanian 7. Program penyuluhan pertanian 8. Program Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan 	<p>dan jasa yang berkembang pesat. Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota.</p>	<p>pertanian yang berteknologi tinggi sehingga akan menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kotawaringin Barat yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industry pengolahan yaitu sebesar 26,72%. ✓ Perlu adanya upaya hilirasi pertanian untuk memberikan tambahan value bidang pertanian dan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan wilayah Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia

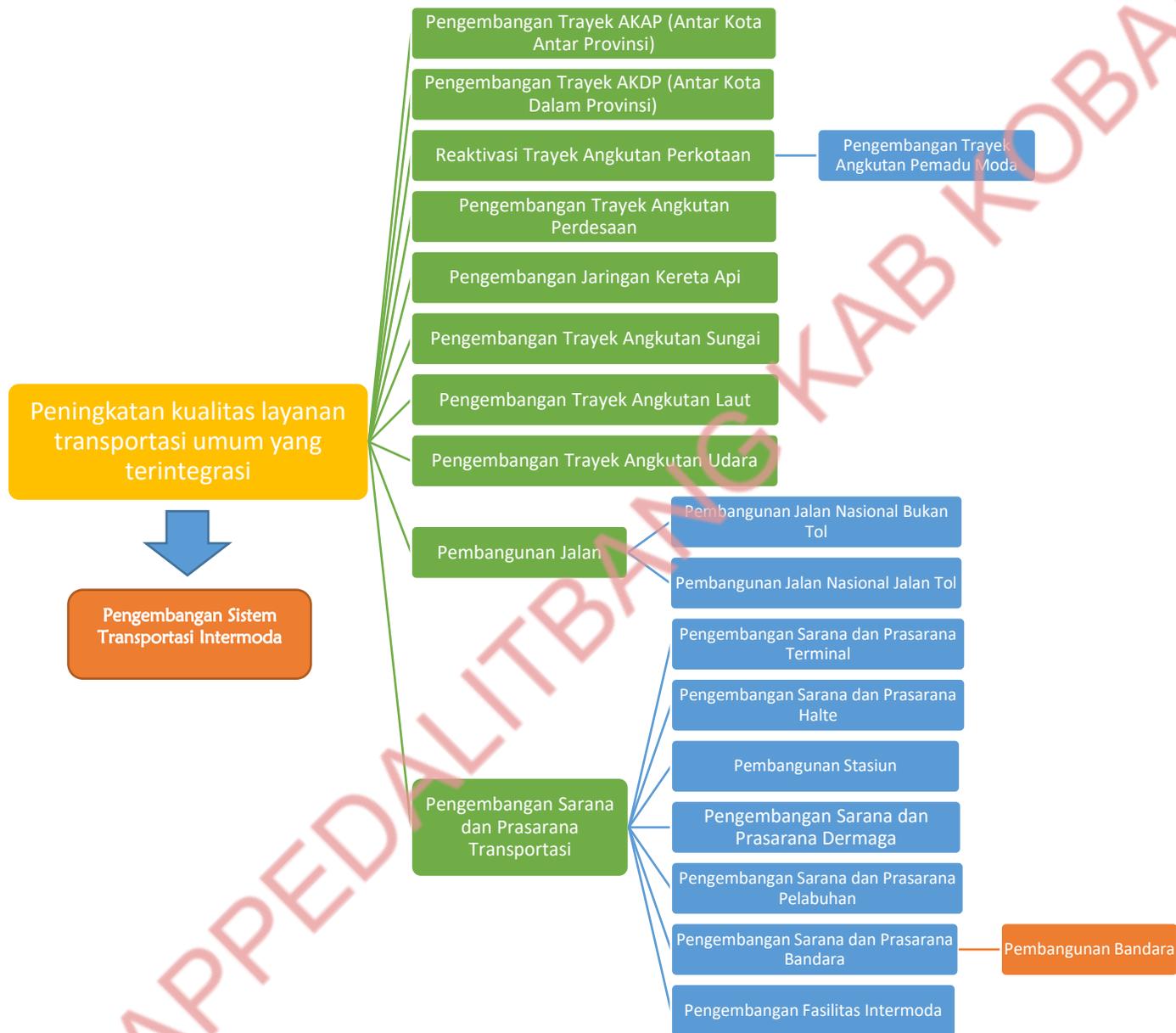
Eksisting	Program yang ada	Kriteria Kota Dunia	Analisis
<ul style="list-style-type: none">• Daging Unggas : Daging Ayam ras pedaging dengan nilai produksi 7.079,68 ton.• Telur : Telur Ayam Ras Petelur dengan nilai produksi 2.375,28 ton• Produktivitas perikanan budidaya tertinggi adalah :• Ikan Nila merupakan komoditas unggulan dengan nilai produksi 4.664,96 ton.• Komoditas unggulan tertinggi untuk Perikanan Tangkap adalah :• Ikan Kembung dengan nilai produktivitas 1.631,12 ton.			

Sumber ; Analisis, 2024

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



Gambar 4.5 Roadmap Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 4.6 Roadmap Pengembangan Transportasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil analisis dari kondisi eksisting di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu

1. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif.
Strategi ini bertujuan untuk menurunkan nilai ICOR (*Incremental Capital-Output Ratio*) Kabupaten Kotawaringin Barat agar semakin efisien dan mengendalikan inflasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan sebagai pelaksanaan dari strategi ini meliputi:
 - a. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.
 - c. Terwujudnya kestabilan harga.
2. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapabilitas SDM, dan pengendalian laju penduduk.
Strategi ini terkait langsung dengan upaya menyediakan *labor supply* yang produktif. Tujuan yang diharapkan adalah penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan meningkatnya kesempatan kerja sebagai dampak dari peningkatan elastisitas kesempatan kerja. Arah kebijakan sebagai pelaksanaan dari strategi ini meliputi:
 - a. Peningkatan jaringan tenaga kerja.
 - b. Peningkatan keterampilan masyarakat.
 - c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
3. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Arah kebijakan dari strategi ini adalah pengembangan sentra-sentra usaha/ produk ekonomi lokal. Strategi ini mendukung upaya penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan peningkatan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan kesejahteraan penduduk, sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat.
4. Meningkatkan Pengelolaan Daya Saing Pariwisata.
Strategi ini diimplementasikan melalui peningkatan pengelolaan pariwisata. Dengan strategi ini diharapkan pariwisata akan berkembang menjadi industri wisata yang mempunyai *multiplier effect* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menguatkan dan mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM.
Arah kebijakan dari strategi ini meliputi:
 - a. Penguatan dan pengembangan sektor industri.
 - b. Peningkatan produktivitas IKM dan UMKM.
6. Meningkatkan pengelolaan tata ruang.
Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan wajah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Strategi ini akan mendukung terwujudnya inflasi yang terkendali dan kemudahan dalam berinvestasi. Arah kebijakan dari strategi ini meliputi:

- a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jaringan Jalan Yang Terpadu.
- b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jaringan Drainase Perkotaan.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Umum
- d. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Representatif.
- e. Penataan Kawasan Strategis dan Wajah Kabupaten Kotawaringin Barat Sesuai Citra Daerah

Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir adalah upaya pemilahan sampah yang dilakukan secara terpadu dari awal hingga akhir. Pengelolaan sampah yang terintegrasi ini meliputi:

1. Pengurangan sampah di hulu

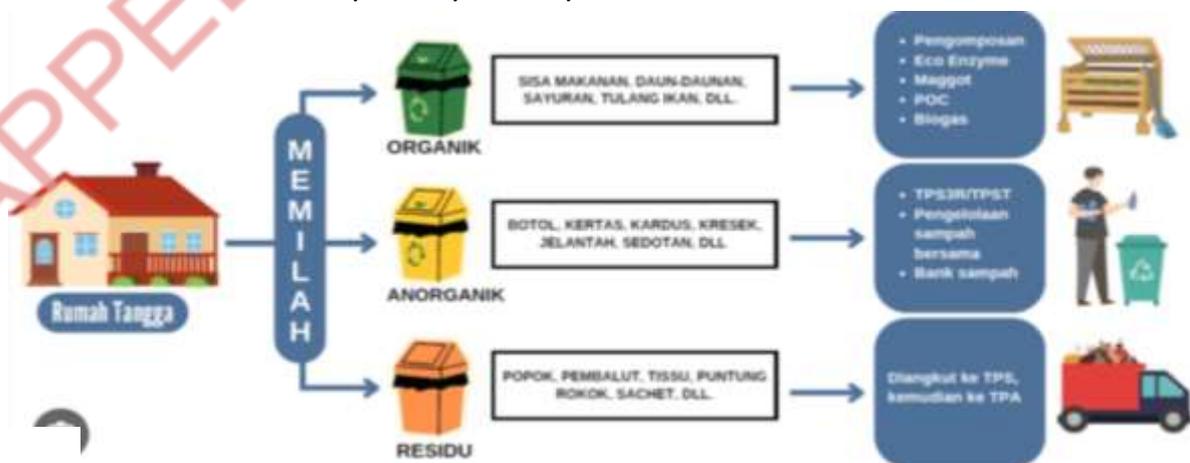
Mengurangi sampah di hulu dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat agar sadar dan bertanggung jawab atas sampahnya. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat dapat melakukan ini dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dan produsen.

2. Penanganan sampah di hilir

Penanganan sampah di hilir meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah secara bijak adalah:

- Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik
- Mengganti alas plastik sampah dengan koran atau kardus
- Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos
- Mendaur ulang sampah anorganik
- Membersihkan tempat sampah setiap hari



Gambar 4.6 Skema Pengelolaan Sampah Yg Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir



BAB 5

RENCANA AKSI DAN INDIKASI PROGRAM

5.1 Parameter dan Indikator Menuju Kota Dunia

Untuk sebuah wilayah kabupaten atau kota menuju menjadi kota dunia, ada beberapa parameter dan indikator yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. **Ekonomi yang Kuat:** Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota.
2. **Infrastruktur yang Modern:** Infrastruktur yang maju sangat penting, termasuk transportasi umum yang efisien, jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, dan fasilitas teknologi canggih. Indikator ini termasuk aksesibilitas transportasi, kualitas jalan, dan ketersediaan layanan listrik dan air bersih.
3. **Pendidikan dan Penelitian:** Kota harus memiliki institusi pendidikan dan penelitian yang berkualitas tinggi, seperti universitas dan lembaga penelitian terkemuka. Indikator ini termasuk angka melekterasi, jumlah universitas dan peneliti, dan hasil penelitian yang dihasilkan.
4. **Kualitas Hidup:** Kualitas hidup penduduk kota harus tinggi, dengan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan fasilitas rekreasi yang baik. Indikator ini termasuk angka kematian, ketersediaan rumah sakit, dan kualitas lingkungan hidup.
5. **Keberagaman Budaya:** Kota harus mendorong keberagaman budaya dan memiliki komunitas internasional yang besar dan beragam. Indikator ini termasuk jumlah festival budaya, kegiatan seni, dan keberagaman etnis.
6. **Keamanan dan Stabilitas:** Kota harus aman dan stabil, dengan tingkat kejahatan yang rendah dan pemerintahan yang efektif. Indikator ini termasuk tingkat kejahatan, kepatuhan terhadap hukum, dan kualitas pelayanan keamanan.

7. Pengaruh Global: Kota harus memiliki pengaruh global dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Indikator ini termasuk jumlah kunjungan wisatawan internasional, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam acara internasional.
8. Inovasi dan Teknologi: Kota harus mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indikator ini termasuk jumlah paten yang diterbitkan, penggunaan teknologi dalam layanan publik, dan inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Pengelolaan Lingkungan: Kota harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indikator ini termasuk tingkat polusi udara dan air, penggunaan energi terbarukan, dan program daur ulang sampah.
10. Partisipasi Masyarakat: Kota harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota. Indikator ini termasuk tingkat partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunitas.

Berdasarkan indikator dan parameter tersebut sebagai dasar dalam menentukan rencana aksi dan program pengembangan 9 bidang di Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia.

5.2 Sembilan Tatanan utama Mewujudkan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2025

Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2025 adalah salah satu program strategis nasional yang mencakup sembilan tatanan utama, yaitu:

1. Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri.
2. Permukiman dan fasilitas umum.
3. Pendidikan.
4. Pasar.
5. Pariwisata.
6. Transportasi dan tertib lalu lintas.
7. Perkantoran dan industri.
8. Perlindungan sosial.
9. Penjagaan dan penanganan bencana.

Setiap tatanan mencakup indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori penghargaan Swasti Saba (Padapa, Wiwerda, hingga Wistara). Pendekatan KKS ini dinilai cukup ampuh dalam menyatukan gerak Langkah antara pemerintah daerah dan Masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan yang berwawasan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil

menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat atau juga dikenal dengan Penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun sekali (tahun ganjil).

5.3 Preseden

Belajar dari kesuksesan pembangunan kota-kota di dunia, seperti di Kota Swiss antara lain :

- Swiss menerapkan konsep kota pintar dan revolusi hijau. Hal ini tidak hanya melibatkan infrastruktur yang diperlukan untuk penyediaan air dan energi, transportasi, pengelolaan air limbah, pembuangan limbah dan telekomunikasi – yang semuanya sangat kompleks – namun juga mewajibkan kota dan pemangku kepentingan ekonomi untuk mempelajari tuntutan masyarakat dan banyaknya ekspektasi masyarakat yang ingin tinggal di ruang menarik yang dirancang dalam skala manusia. Kemampuan Swiss untuk mengatasi semua tantangan ini menjadikannya model bagi kota-kota di luar negeri. Memajukan konsep kota pintar memerlukan keberagaman proyek dan pemangku kepentingan – pemangku kepentingan di Swiss mempunyai kemampuan unik untuk mewujudkannya.
- Memaknai konsep smart city dengan caranya masing-masing. Namun agar menjadi lebih ekologis, berkelanjutan, dan layak huni, semua infrastruktur saling terhubung melalui teknologi digital. Data yang tersedia untuk umum memunculkan layanan baru di bidang transportasi, energi, keamanan, kesehatan dan rekreasi. Kota mengumpulkan data dari ponsel untuk lebih memahami pola perilaku penduduknya. Dengan dukungan Swisscom, data ini digunakan untuk mengoptimalkan lalu lintas di pusat kota. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat menikmati ruang publik, bagaimana mereka beraktivitas, jenis transportasi yang mereka gunakan, dan seberapa sering mereka menggunakannya.

5.4 Rencana Aksi Menuju Kota Dunia

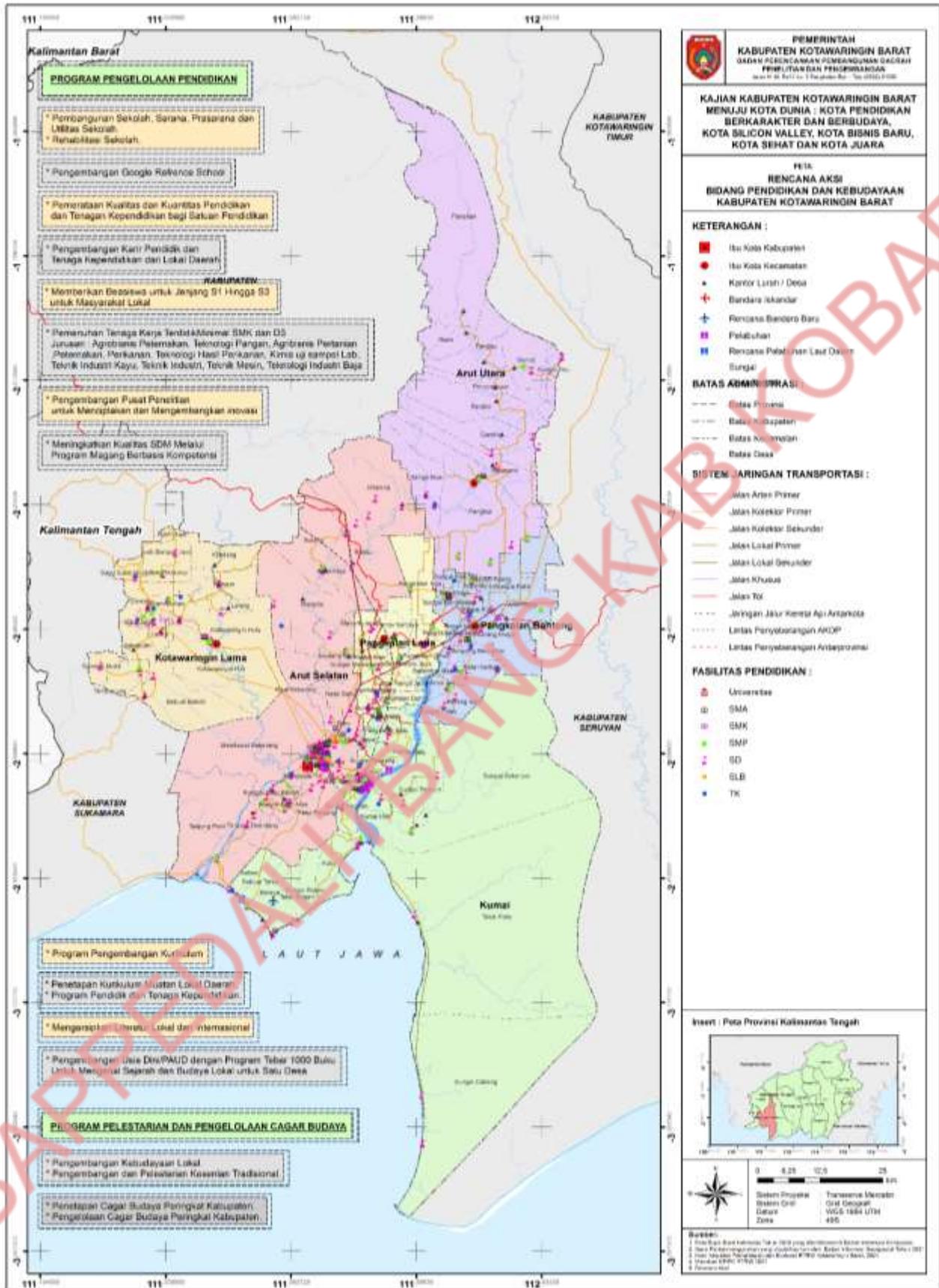
Rencana Aksi ini disusun untuk memberikan gambaran seluruh aktifitas berupa program/ kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan konsep pengembangan, visi, misi, dan strategi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 20 tahun mendatang.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Dan Program Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berpendidikan)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Peningkatan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan						
	Pembangunan Sekolah, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APBD Kab; Swasta; CSR; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Rehabilitasi Sekolah	APBD Kab; Swasta; CSR; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengembangan <i>Google Reference School</i>	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari lokal daerah	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Memberikan Beasiswa untuk jenjang S1 hingga S3 untuk masyarakat lokal	APBD Kab; CSR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Peningkatan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan						
	Pemenuhan tenaga kerja terdidik minimal SMK dan D3 untuk jurusan : agribisnis perkebunan, teknologi pangan, agribisnis pertanian, agribisnis peternakan, agribisnis perikanan, teknologi hasil perikanan, jurusan kimia untuk uji sampel laboratorium, teknik industri kayu, teknik industri, teknik mesin, teknik industri baja	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengembangan pusat penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Meningkatkan kualitas SDM melalui program magang berbasis kompetensi	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengembangan usia dini/ PAUD dengan program tebar 1000 buku untuk mengenal sejarah dan budaya lokal untuk satu desa	APBD Kab; CSR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Mengarsipkan literatur local dan internasional	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan				
	Program Pengembangan Kurikulum						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Pengembangan Kebudayaan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal daerah	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
	Pengembangan Kebudayaan Lokal	APBD Kab; KPBU; CSR; Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional	APBD Kab; Swasta; KPBU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				



Tabel 5.2 Rencana Aksi Dan Program Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat City Of Hub)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan infrastruktur wilayah	Program Pengembangan Energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan						
	Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan biomassa di kawasan terpencil untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat	APBN, Hibah LSM	Dinas ESDM				
	Penyelenggaraan pelatihan teknis untuk instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan teknologi berbasis energi terbarukan seperti pompa surya	APBD kab, KPBD, hibah LSM	Dinas ESDM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				

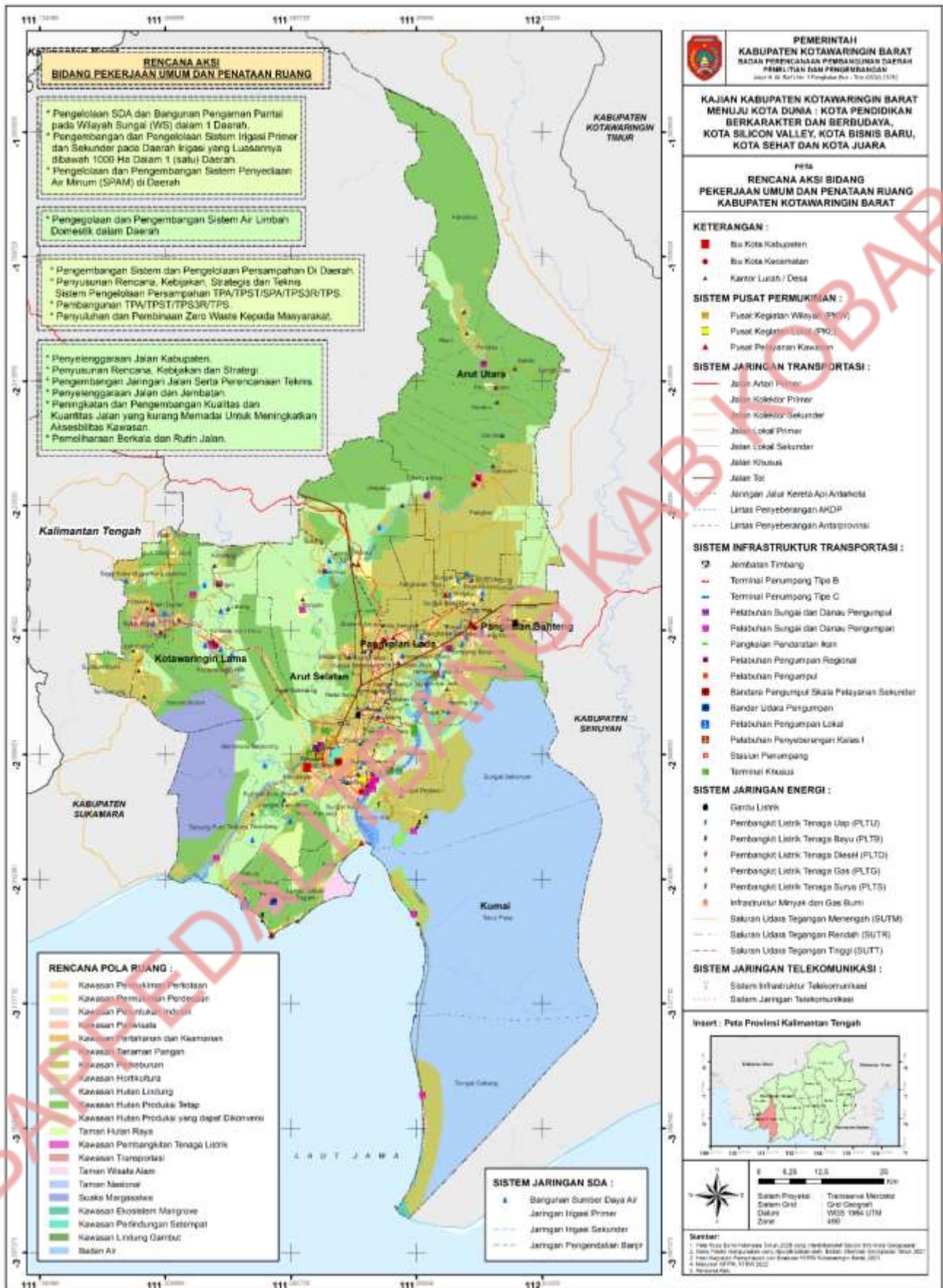
Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas PUPR				
	Program Pengembangan Sistim Dan Pengelolaan Persampahan Regional						
	Pengembangan Sistim dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas PUPR				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas PUPR				
	Pembangunan TPA/TPST/TPS3R/TPS	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas PUPR				
	Penyuluhan dan Pembinaan Zero Waste kepada Masyarakat	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas PUPR				
	Program Penyelenggaraan Jalan						
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan aksesibilitas	Peningkatan dan Pengembangan kualitas dan kuantitas jalan yang kurang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas PUPR				
	Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jalan	APBD Kab; KPBU	Dinas PUPR				
	Program Pewujudan Konsep Smart City menuju Kota Dunia						
	Mengembangkan infrastruktur terintegrasi melalui teknologi digital untuk memberikan layanan baru bidang transportasi, energi, keamanan, kesehatan, dan wisata	APBN, APBD Kab, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata				
	Program pengintegrasian antar moda transportasi di Kotawaringin Barat dan menargetkan transportasi di Kotawaringin Barat bakal menjadi angkutan kelas dunia.						
	Pengembangan Trayek AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Reaktivasi Trayek Angkutan Perkotaan	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Trayek Angkutan Perdesaan	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Jaringan Kereta Api	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
Pengembangan Trayek Angkutan Sungai	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan					

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pengembangan Trayek Angkutan Laut	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Trayek Angkutan Udara	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Program Pembangunan Jalan						
	Pembangunan Jalan Nasional Bukan Tol	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pembangunan Jalan Nasional Jalan Tol	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi						
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pembangunan Stasiun	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Dermaga	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Mengadopsi skema PPP (<i>Public-Private Partnership</i>) untuk pembangunan dermaga di kawasan terpencil guna mendukung aktivitas ekonomi	PPP, APBN	Dinas Perhubungan, Bappeda				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Bandara melalui pembangunan Bandara Baru	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				
	Melakukan modernisasi Bandara Iskandar menjadi bandara internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan wisata	APBN, PPP	Dinas Perhubungan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pengembangan Fasilitas Intermoda	APBN, APBD Kab	Dinas Perhubungan				

BAPPEDALITBANG KAB KOTABAR



Tabel 5.3 Rencana Aksi Dan Program Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandian (Kobar Kota Silicon Valley Indonesia)

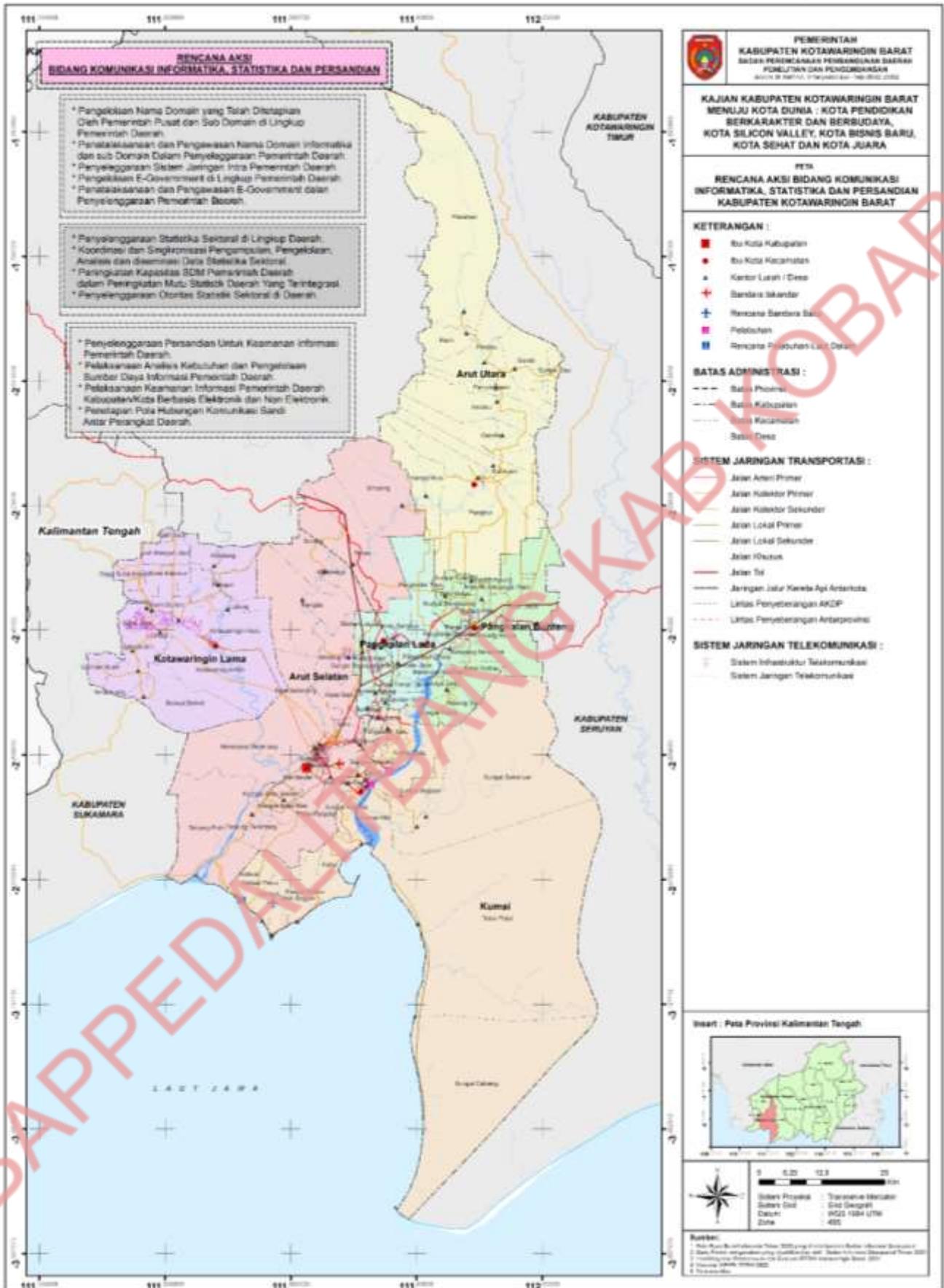
Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Aplikasi Informatika						
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Informatika dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Program Pengembangan sistem pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap ekonomi lokal dan lingkungan secara berkala						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Mewujudan kemandirian ekonomi sejahtera yang melalui penguatan sektor industri	Platform berbasis GIS untk memantau dampak pembangunan secara real time dan transparan	APBN, Investasi Swasta	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Program pengembangan sektor-sektor baru yang inovatif dan berkelanjutan						
	Menyediakan pelatihan BIG Data dan Kecerdasaan buatan (AI) bagi masyarakat dan pelaku industri lokal untuk meningkatkan kapasitas inovasi	APBN, Investasi Swasta	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian, Dinas Pendidikan				
	Melaksanakan program edukasi digitalisasi untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat	APBD Kab, hibah LSM	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian, Dinas Sosial				
Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sectoral	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						
	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis elektronik dan Non elektronik	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	APBD Kab	Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian				

BAPPEDALITBANG KAB KOWAR



Tabel 5.4 Rencana Aksi Dan Program Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (Kobar Istimewa)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten	Program pemasaran pariwisata						
	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dalam dan luar negeri	APBD Kab; Swasta	Dinas Pariwisata				
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata				
	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	APBD Kab	Dinas Pariwisata				
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten baik dalam maupun luar negeri	APBD Kab, Swasta, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata				
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Program Pembangunan Infrastruktur pendukung pariwisata						
	Memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata utama, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan	APBN, PPP	Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Penataan ruang				
	Program Peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat dengan home stay ramah lingkungan dan teknologi energi terbarukan di kawasan konservasi	APBD Kab, dana Desa	Dinas Pariwisata, Kecamatan				
	Melakukan rehabilitasi lahan kritis menjadi agrowisata terpadu untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan konservasi lingkungan	APBN, Hibah LSM	Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup				
Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata						
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten	APBD Kab	Dinas Pariwisata				
	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata				
	Pengadaan/ pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan pariwisata kabupaten	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata				
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten	APBD Kab; Swasta, CSR, KPBU	Dinas Pariwisata				
Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM yang berdaya saing yang berlandaskan kearifan lokal dan industri	Pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	APBD Kab	Dinas Pariwisata				
	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	APBD Kab	Dinas Pariwisata				
	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	APBD Kab	Dinas Pariwisata				
	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	APBD Kab	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program Pengembangan SDM Koperasi						
	Pembinaan koperasi, Pelatihan SDM Koperasi, Pengawasan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi	APBD Kab, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	APBD Kab	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program Pengembangan UMKM						
	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program perencanaan dan pembangunan industri						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	APBD Kab; Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				

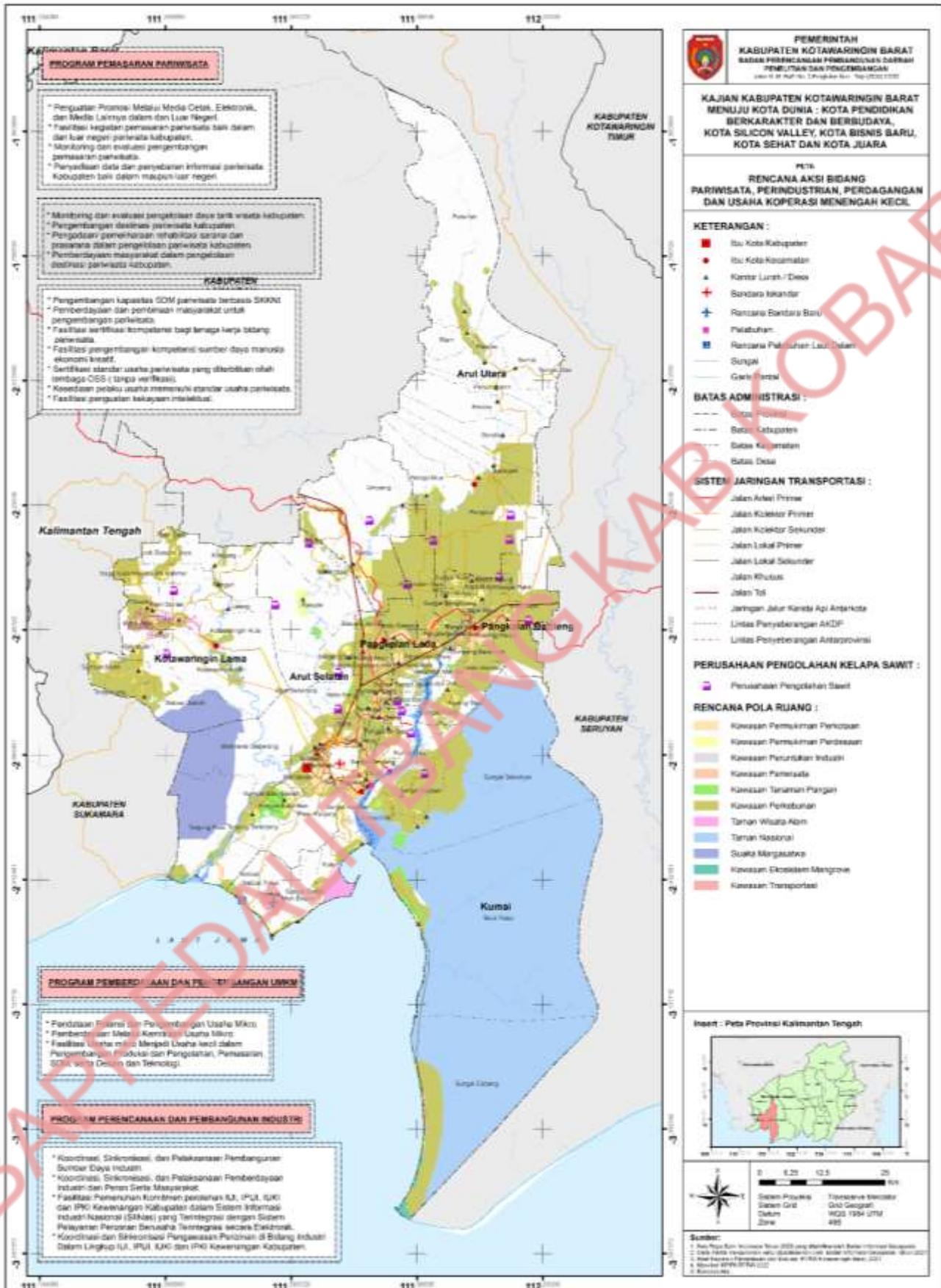
Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatnya Hilirisasi Produk	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten						
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	APBD Kab	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program pengembangan ekspor						
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan melalui pameran dagang nasional	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatnya kualitas perdagangan	Pengembangan hilirisasi produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan kehutanan	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan						
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBD Kab; Swasta,	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	APBD Kab; Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan,				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	APBD Kab	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	APBD Kab; Swasta, CSR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Program menyusun rencana infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung aktivitas investasi dan industri						
	Meningkatkan promosi KEK melalui forum Internasional untuk menarik investasi global	APBN, Investasi Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Menyediakan pendidikan Vokasi di KEK untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja industri lokal	APBN, CSR	Dinas Pendidikan				

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



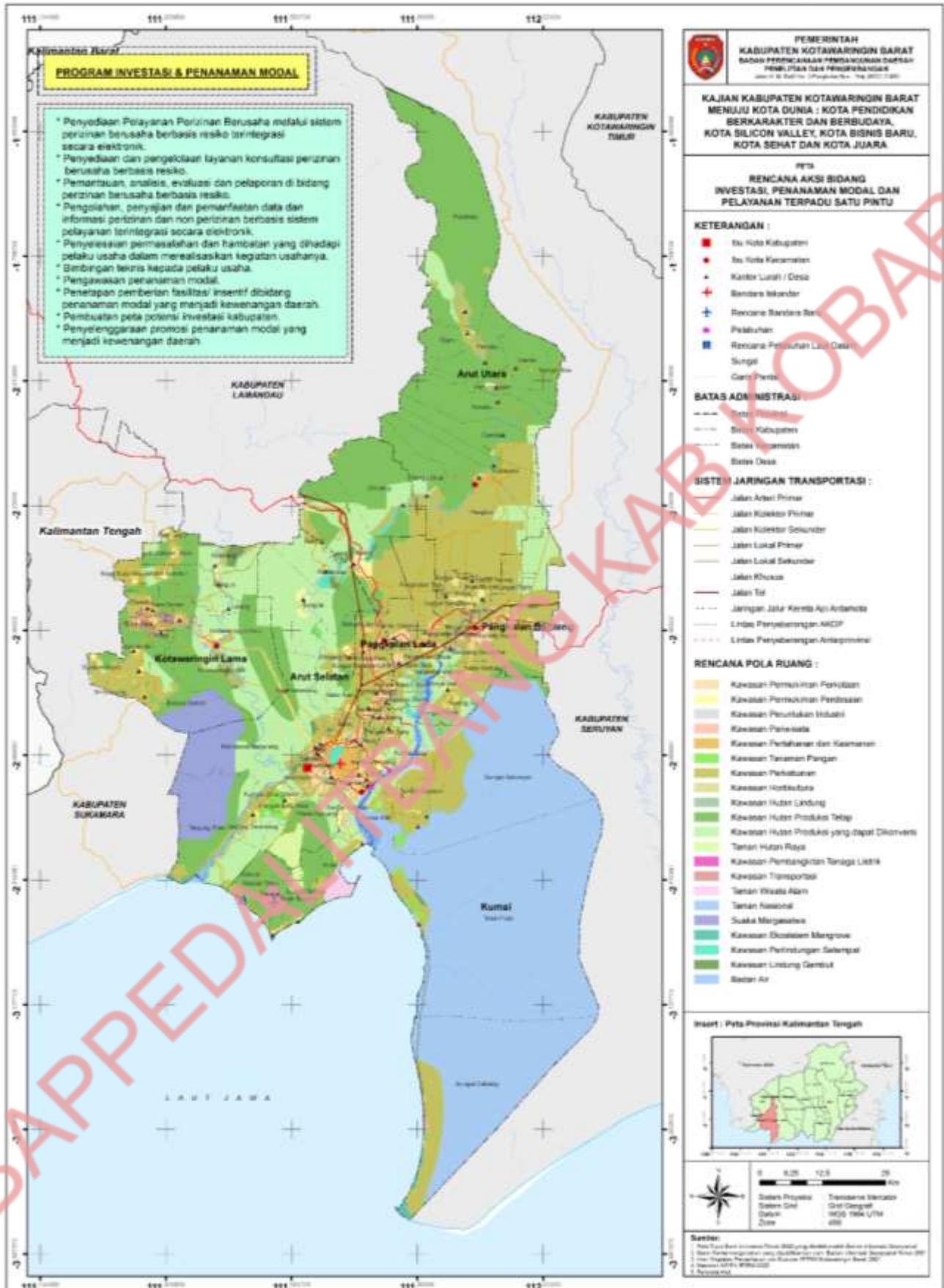
Tabel 5.5 Rencana Aksi Dan Program Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kobar Kota Bisnis Baru)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinas, non perizinan dan penanaman modal	Program Pelayanan penanaman modal						
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Meningkatkan nilai investasi daerah	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pengawasan penanaman modal	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Program pengembangan iklim penanaman modal						
	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Program Promosi Penanaman Modal						
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	APBD Kab; Swasta, KPBU	Dinas Penanaman Modal dan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



Tabel 5.6 Rencana Aksi Dan Program Bidang Kesehatan Dan Sosial (Kobar Sehat)

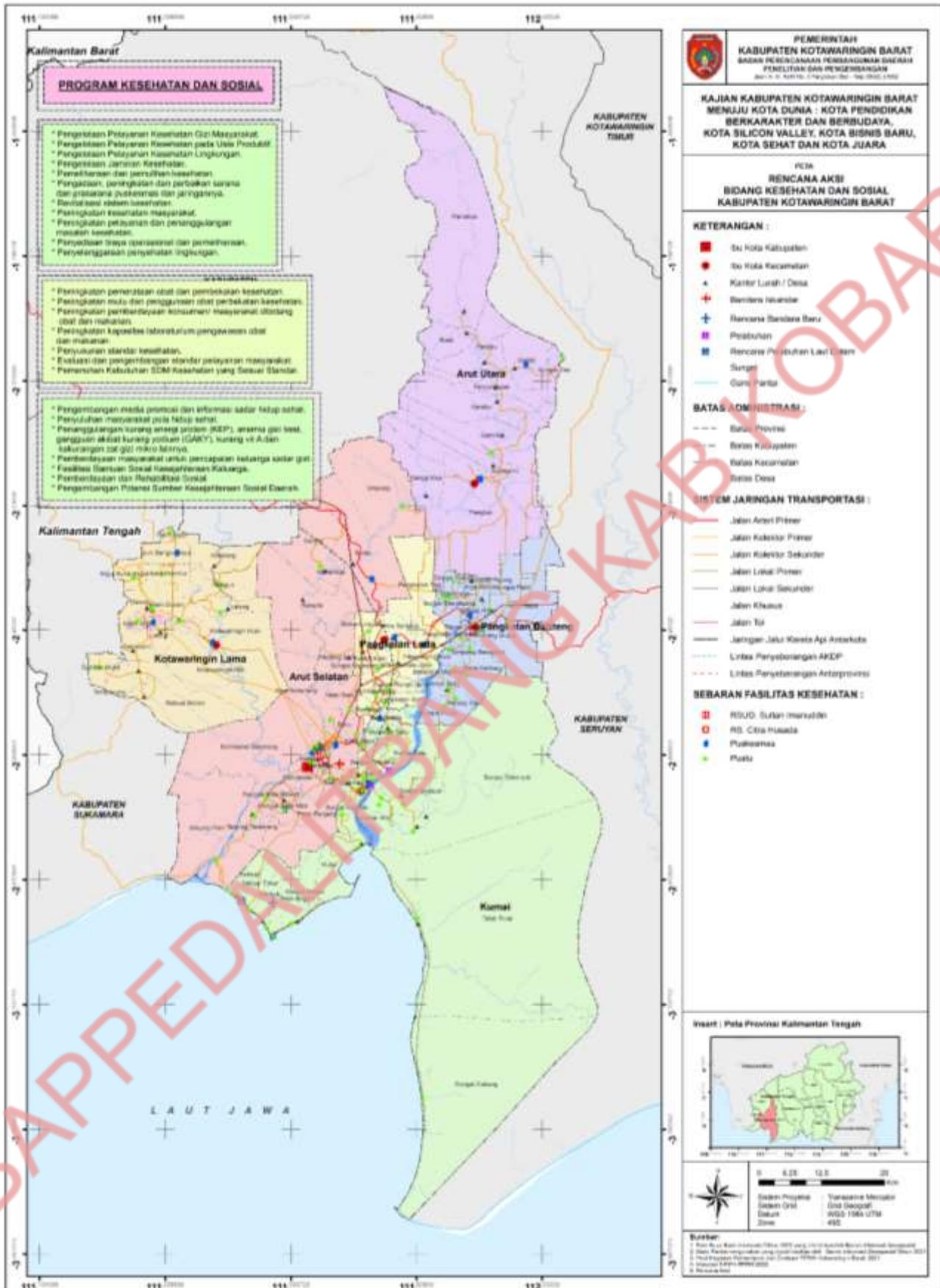
Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Program upaya kesehatan masyarakat						
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Revitalisasi sistem kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan kesehatan masyarakat	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Program obat dan perbekalan kesehatan						
	Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan mutu dan penggunaan obat perbekalan kesehatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Program standarisasi pelayanan kesehatan						
	Penyusunan standar kesehatan	APBN; APBD Kab	Dinas Kesehatan				
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan masyarakat	APBN; APBD Kab	Dinas Kesehatan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Pemenuhan Kesehatan dan Kompetensi Standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan yang Sesuai Standar	APBN; APBD Kab; KPBU; CSR; Swasta	Dinas Kesehatan				
Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berperilaku Sehat	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	APBN; APBD Kab; KPBU; CSR; Swasta	Dinas Kesehatan				
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	APBN; APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kesehatan				
	Program perbaikan gizi masyarakat						
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	APBN; APBD Kab; KPBU; CSR; Swasta	Dinas Kesehatan				
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	APBD Kab	Dinas Kesehatan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan peran sosial dalam pembangunan daerah	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	APBD Kab	Dinas Sosial				
	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	APBN; APBD Kab; KPBU; CSR; Swasta	Dinas Sosial				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	APBD Kab	Dinas Sosial				

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT

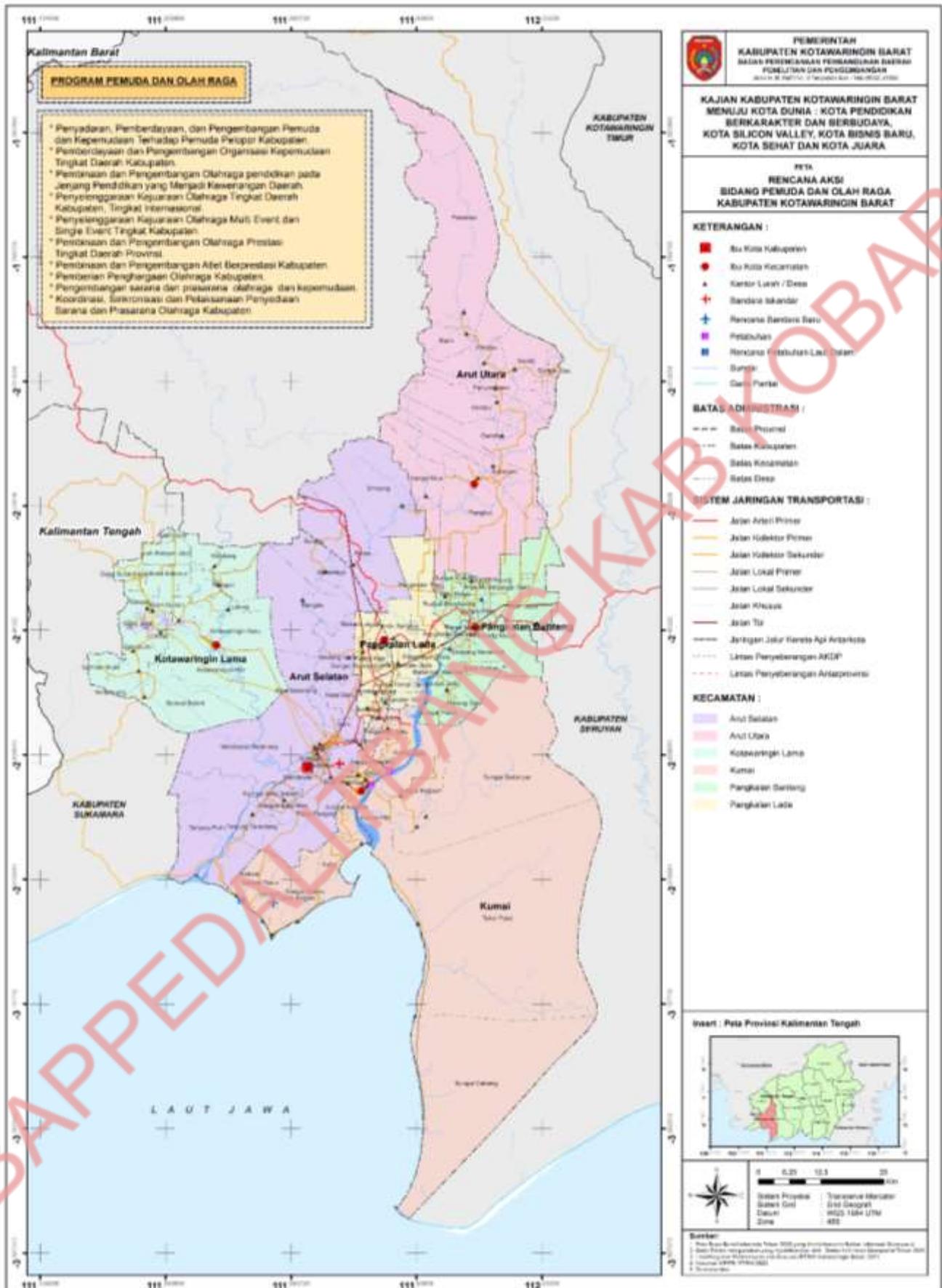


TABEL 5.7 RENCANA AKSI DAN PROGRAM BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA (KOBAR JUARA)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan						
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten, Nasional maupun Internasional	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas fasilitas olahraga dan kepemudaan	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				

BAPPEDALITBANG KAB KOTAWARINGIN BARAT

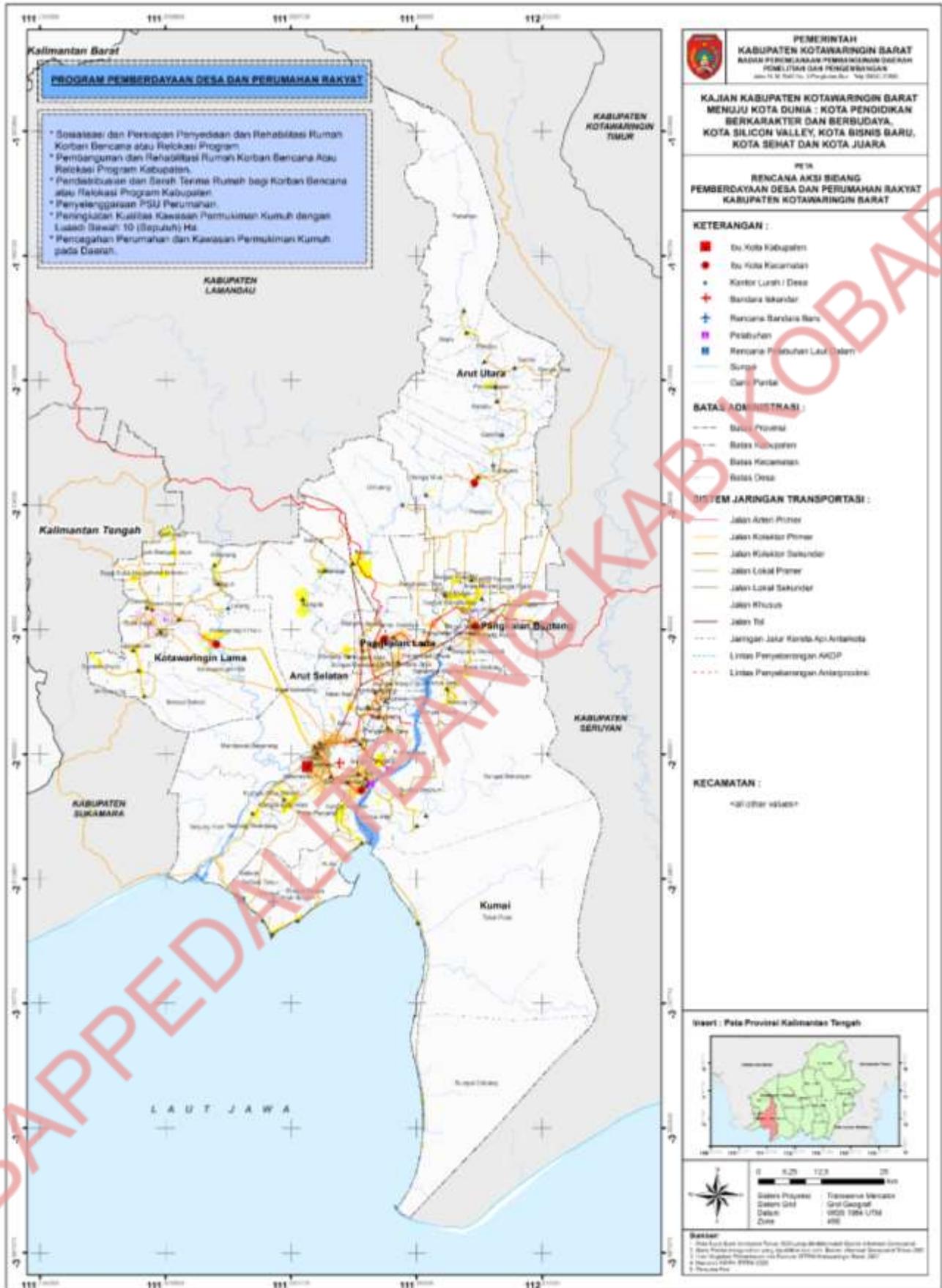


Tabel 5.8 Rencana Aksi Dan Program Bidang Pemberdayaan Desa Dan Perumahan Rakyat (Kobar Desa Maju Dan Sejahtera)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan						
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Pengembangan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	APBN; APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah, Tata Guna Tanah Dan Program Redistribusi Tanah						
	Penyuluhan program redistribusi tanah gratis bagi masyarakat, termasuk biaya pengukuran dan pembuatan sertifikatnya.	APBD Kab	Kantor Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan				

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			Kawasan Permukiman				
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum						
	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Program Kawasan Permukiman						
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasdi Bawah 10 (Sepuluh) Ha	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh						
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Perbaikan rumah tidak layak huni di Tiap Kecamatan	APBN, APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Program Penataan Desa						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program Administrasi Pemerintah Desa						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	APBD Kab; CSR; Swasta	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				



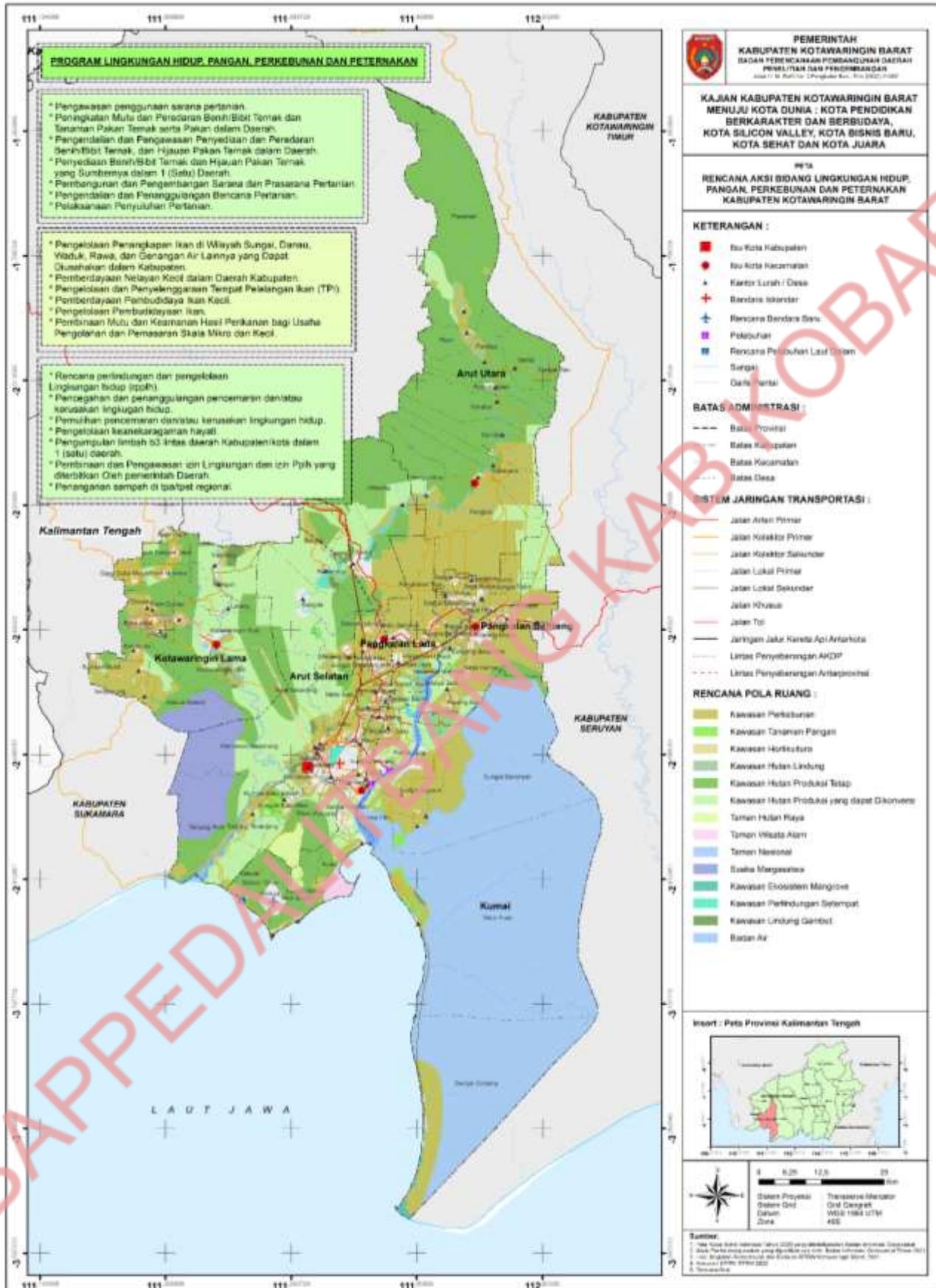
Tabel 5.9 Rencana Aksi Dan Program Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau dan Produktif)

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan produktisi pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian						
	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian						

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan produktivitas perikanan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Program Penyuluhan Pertanian						
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Program pengelolaan perikanan tangkap						
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				
	Program pengelolaan perikanan budidaya						
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan					

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				
	Program perencanaan lingkungan hidup						
	Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH)	APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup				
	Program pengendalian pencemaran Dan/ atau kerusakan lingkungan hidup						
	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup				
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup					

Rencana Aksi	Indikasi Program	Sumber Pembiayaan	OPD	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)						
	Pengelolaan keanekaragaman hayati	APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup				
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)						
	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah	APBD Kab, CSR, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup				
	Program pembinaan dan pengawasan Terhadap izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)						
	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup				
	Program Pengelolaan Persampahan						
	Penanganan sampah di TPA/TPST regional	APBD Kab, CSR	Dinas Lingkungan Hidup				



LAMPIRAN

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

RENCANA AKSI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KOTA DUNIA :
KOTA PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERBUDAYA, KOTA SILICON VALLEY,
KOTA BISNIS BARU, KOTA SEHAT, DAN KOTA JUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat berpotensi bertransformasi menjadi hub pendidikan, teknologi, bisnis, kesehatan, dan olahraga kelas dunia melalui strategi pembangunan terpadu. Meskipun memprioritaskan pendidikan, teknologi, dan pengembangan bisnis sangat penting bagi kemajuan ekonomi, hal ini mungkin secara tidak sengaja mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor penting seperti kesehatan dan layanan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia : Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berbudaya, Kota Silicon Valley, Kota Bisnis Baru, Kota Sehat, Dan Kota Juara.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037.

5. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan Formal.
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun Tahun 2022-2042.
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KOTA DUNIA : KOTA PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERBUDAYA, KOTA SILICON VALLEY, KOTA BISNIS BARU, KOTA SEHAT, DAN KOTA JUARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kota dunia merupakan sebuah kota yang dianggap menjadi titik penting dalam sistem perekonomian dunia.
7. Kota Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya adalah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berbasis karakter

- serta fokus pada peningkatan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan kurikulum yang mencakup nilai-nilai budaya lokal.
8. Kota Silicon Valley adalah berupaya menjadi pusat teknologi dan inovasi, serta mendorong pengembangan industri digital, startup, dan teknologi informasi.
 9. Kota Bisnis Baru adalah berusaha menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi serta fasilitasi perizinan dan dukung inisiatif bisnis lokal.
 10. Kota Sehat adalah fokus pada kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup, serta promosikan gaya hidup sehat dan lingkungan yang bersih.
 11. Kota Juara adalah menjadi contoh keberhasilan dalam berbagai bidang serta mendukung prestasi olahraga, seni, dan budaya.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia yang maju di berbagai sektor.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak dalam mendorong Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia yang maju di berbagai sektor.

BAB II PARAMETER DAN INDIKATOR MENUJU KOTA DUNIA

Pasal 5

- (1) Untuk sebuah wilayah kabupaten atau kota menuju menjadi kota dunia, ada beberapa parameter dan indikator yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa di antaranya:
 - a. Ekonomi yang Kuat: Kota harus memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, dengan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Indikator ini termasuk tingkat pengangguran, pertumbuhan GDP, dan jumlah perusahaan internasional yang beroperasi di kota.
 - b. Infrastruktur yang Modern: Infrastruktur yang maju sangat penting, termasuk transportasi umum yang efisien, jalan tol, bandara internasional, pelabuhan, dan fasilitas teknologi canggih. Indikator ini termasuk aksesibilitas transportasi, kualitas jalan, dan ketersediaan layanan listrik dan air bersih.
 - c. Pendidikan dan Penelitian: Kota harus memiliki institusi pendidikan dan penelitian yang berkualitas tinggi, seperti universitas dan lembaga penelitian

- terkemuka. Indikator ini termasuk angka melekterasi, jumlah universitas dan peneliti, dan hasil penelitian yang dihasilkan.
- d. Kualitas Hidup: Kualitas hidup penduduk kota harus tinggi, dengan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan fasilitas rekreasi yang baik. Indikator ini termasuk angka kematian, ketersediaan rumah sakit, dan kualitas lingkungan hidup.
 - e. Keberagaman Budaya: Kota harus mendorong keberagaman budaya dan memiliki komunitas internasional yang besar dan beragam. Indikator ini termasuk jumlah festival budaya, kegiatan seni, dan keberagaman etnis.
 - f. Keamanan dan Stabilitas: Kota harus aman dan stabil, dengan tingkat kejahatan yang rendah dan pemerintahan yang efektif. Indikator ini termasuk tingkat kejahatan, kepatuhan terhadap hukum, dan kualitas pelayanan keamanan.
 - g. Pengaruh Global: Kota harus memiliki pengaruh global dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Indikator ini termasuk jumlah kunjungan wisatawan internasional, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam acara internasional.
 - h. Inovasi dan Teknologi: Kota harus mendorong inovasi dan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indikator ini termasuk jumlah paten yang diterbitkan, penggunaan teknologi dalam layanan publik, dan inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
 - i. Pengelolaan Lingkungan: Kota harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Indikator ini termasuk tingkat polusi udara dan air, penggunaan energi terbarukan, dan program daur ulang sampah.
 - j. Partisipasi Masyarakat: Kota harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota. Indikator ini termasuk tingkat partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komunitas.
- (2) Indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam menentukan rencana aksi dan program pengembangan 9 (sembilan) bidang di Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kota Dunia.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Menuju Kota Dunia.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Aksi dan Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Kota Pendidikan Berkarakter dan Berpendidikan)
 - b. Rencana Aksi dan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat *City Of Hub*)
 - c. Rencana Aksi dan Program Bidang Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandingan (Kobar Kota Silikon Valley Indonesia)

- d. Rencana Aksi dan Program Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (Kobar Istimewa)
- e. Rencana Aksi dan Program Bidang Investasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kobar Kota Bisnis Baru)
- f. Rencana Aksi dan Program Bidang Kesehatan dan Sosial (Kobar Sehat)
- g. Rencana Aksi dan Program Bidang Pemuda dan Olahraga (Kobar Juara)
- h. Rencana Aksi dan Program Bidang Pemberdayaan Desa dan Perumahan Rakyat (Kobar Desa Maju dan Sejahtera)
- i. Rencana Aksi dan Program Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau dan Produktif)

Paragraf 1

Rencana Aksi dan Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Kota Pendidikan Berkarakter dan Berpendidikan)

Pasal 7

Rencana Aksi Dan Program Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Kota Pendidikan Berkarakter Dan Berpendidikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf a, dilakukan melalui:

- (1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
- (2) Pengembangan Kebudayaan dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Paragraf 2

Rencana Aksi dan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat *City Of Hub*)

Pasal 8

Rencana Aksi Dan Program Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Kotawaringin Barat *City Of Hub*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf b, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan infrastruktur wilayah dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan Energi terbarukan untuk mendukung kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - d. Program Pengembangan Sistim Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - e. Program Penyelenggaraan Jalan
 - f. Program Pewujudan Konsep Smart City menuju Kota Dunia

- (2) Meningkatkan aksesibilitas dengan program yang meliputi:
- a. Program pengintegrasian antar moda transportasi di Kotawaringin Barat dan menargetkan transportasi di Kotawaringin Barat bakal menjadi angkutan kelas dunia.
 - b. Program Pembangunan Jalan
 - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Paragraf 3

Rencana Aksi dan Program Bidang Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian (Kobar Kota Silikon Valley Indonesia)

Pasal 9

Rencana Aksi Dan Program Bidang Komunikasi Informatika, Statistika Dan Persandian (Kobar Kota Silikon Valley Indonesia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf c, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan program yang meliputi:
 - a. Program Aplikasi Informatika
 - b. Program Pengembangan sistem pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap ekonomi lokal dan lingkungan secara berkala
- (2) Mewujudan kemandirian ekonomi yang sejahtera melalui penguatan sektor industri dengan program yang meliputi:
 - a. Program pengembangan sektor-sektor baru yang inovatif dan berkelanjutan
- (3) Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan program yang meliputi:
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- (4) Meningkatkan Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian dengan program yang meliputi:
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Paragraf 4

Rencana Aksi Dan Program Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (Kobar Istimewa)

Pasal 10

Rencana Aksi Dan Program Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan Dan Usaha Koperasi Menengah Kecil (Kobar Istimewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf d, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten dengan program yang meliputi:
 - a. Program pemasaran pariwisata

- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pembangunan Infrastruktur pendukung pariwisata
 - b. Program Peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk pariwisata berkelanjutan
- (3) Meningkatkan Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata dengan program yang meliputi:
 - a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- (4) Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- (5) Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM yang berdaya saing yang berlandaskan kearifan lokal dan industry dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan SDM Koperasi
 - b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - c. Program Pengembangan UMKM
 - d. Program perencanaan dan pembangunan industry
 - e. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten
- (6) Meningkatkan Hilirisasi Produk dengan program yang meliputi:
 - a. Program pengembangan ekspor
- (7) Meningkatkan kualitas perdagangan dengan program yang meliputi:
 - a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- (8) Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan program yang meliputi:
 - a. Program menyusun rencana infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung aktivitas investasi dan industri

Paragraf 5

Rencana Aksi dan Program Bidang Investasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kobar Kota Bisnis Baru)

Pasal 11

Rencana Aksi Dan Program Bidang Investasi, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kobar Kota Bisnis Baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf e, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinas, non perizinan dan penanaman modal dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pelayanan penanaman modal
 - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- (2) Meningkatkan nilai investasi daerah dengan program yang meliputi:
 - a. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - b. Program pengembangan iklim penanaman modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal

Paragraf 6

Rencana Aksi dan Program Bidang Kesehatan dan Sosial (Kobar Sehat)

Pasal 12

Rencana Aksi dan Program Bidang Kesehatan dan Sosial (Kobar Sehat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf f, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program upaya kesehatan masyarakat
- (2) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan program yang meliputi:
 - a. Program obat dan perbekalan kesehatan
 - b. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - c. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- (3) Meningkatkan Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar dengan program yang meliputi:
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (4) Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Dalam Berperilaku Hidup Sehat dengan program yang meliputi:
 - a. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Program perbaikan gizi masyarakat
- (5) Meningkatkan peran sosial dalam pembangunan daerah dengan program yang meliputi:
 - a. Program peningkatan peran sosial dan potensi daerah

Paragraf 7

Rencana Aksi dan Program Bidang Pemuda dan Olahraga (Kobar Juara)

Pasal 13

Rencana Aksi Dan Program Bidang Pemuda Dan Olahraga (Kobar Juara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf g, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas fasilitas olahraga dan kepemudaan dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
- (3) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan program yang meliputi:
 - a. Program Pengembangan Perumahan

- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah, Tata Guna Tanah Dan Program Retribusi Tanah
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
 - d. Program Kawasan Permukiman
 - e. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- (4) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Desa dengan program yang meliputi:
- a. Program Penataan Desa
 - b. Program Administrasi Pemerintah Desa
 - c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 8

Rencana Aksi dan Program Bidang Pemberdayaan Desa dan Perumahan Rakyat
(Kobar Desa Maju dan Sejahtera)

Pasal 14

Rencana Aksi dan Program Bidang Pemberdayaan Desa dan Perumahan Rakyat (Kobar Desa Maju dan Sejahtera) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf h, dilakukan melalui:

- (1) Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan program yang meliputi:
- a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah, Tata Guna Tanah Dan Program Redritibusi Tanah
 - c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah, Tata Guna Tanah Dan Program Redritibusi Tanah
 - d. Program Program Kawasan Permukiman
 - e. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - f. Program Penataan Desa
 - g. Program Administrasi Pemerintah Desa
- (2) Meningkatkan kemajuan pembangunan desa dengan program yang meliputi:
- a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 9

Rencana Aksi dan Program Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau dan Produktif)

Pasal 15

Rencana Aksi Dan Program Bidang Lingkungan Hidup, Pangan, Perkebunan Dan Peternakan (Kobar Bersih, Hijau dan Produktif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 huruf i, dilakukan melalui:

- (3) Meningkatkan produktisi pertanian dengan program yang meliputi:
 - a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - d. Program Penyuluhan Pertanian
- (4) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan program yang meliputi:
 - a. Program pengelolaan perikanan tangkap
 - b. Program pengelolaan perikanan budidaya
 - c. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- (5) Meningkatkan Kualitas lingkungan Hidup dengan program yang meliputi:
 - a. Program perencanaan lingkungan hidup
 - b. Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
 - c. Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)
 - d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
 - e. Program pembinaan dan pengawasan Terhadap izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
 - f. Program Pengelolaan Persampahan

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka maju di berbagai sector.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk pelaksanaan rencana aksi Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kota Dunia berdasarkan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal

Ttd

BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT